



PURSUING EXCELLENT GROWTH

Memacu Pertumbuhan Yang Unggul

PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION



Memacu Pertumbuhan Yang Unggul

Konsep Visual:

Dengan profesionalisme dan etos kerja yang tinggi, NASIONAL RE dari tahun ke tahun terus membangun diri dan memacu pertumbuhan, untuk menjadi perusahaan reasuransi yang unggul dan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Visual Concept:

With high professionalism and working spirit, year by year NASIONAL RE continues to develop itself and to pursue excellent growth, to become a prominent reinsurance company that is able to contribute significantly to national economic development

Cover Story:

“Menjadi Perusahaan Reasuransi Domestik Unggul dan Berperan Aktif dalam Membantu Perekonomian Nasional serta Tumbuh Secara Berkesinambungan”

Cover Story:

"To be an Excellent Domestic Reinsurance Company and To Actively Contribute to National Economic to Grow Continuously".

Dari tahun ke tahun, NASIONAL RE mampu mencatat pertumbuhan bisnis yang membanggakan di tengah semakin ketatnya persaingan dan fluktuasi perekonomian global. Hal ini membuktikan bahwa NASIONAL RE memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi, sehingga mampu memberi layanan terbaik bagi seluruh nasabahnya. NASIONAL RE percaya dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya maka Perusahaan dapat menjadi perusahaan reasuransi domestik unggul dan berperan aktif dalam membantu ekonomi nasional serta tumbuh secara berkesinambungan.

Year by year, NASIONAL RE is able to record a commendable business growth amid increasing competition and fluctuations in the global economy. It proves that NASIONAL RE has high professionalism and working spirit, so as to be able to give the best services to all customers. NASIONAL RE believes that with its experience and expertise, the Company will evolve to become a prominent domestic reinsurance company that play an active role in helping national economy and to grow continuously.

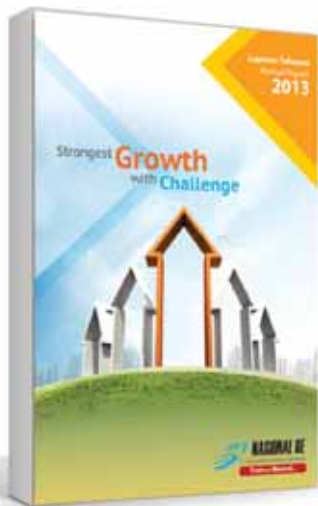
Laporan Tahunan - Annual Report
2011



Laporan Tahunan - Annual Report
2012



Laporan Tahunan - Annual Report
2013



Laporan Tahunan - Annual Report
2014



DAFTAR ISI CONTENTS

- 1** PENJELASAN THEMA
THEME EXPLANATION



- 5** IKHTISAR UTAMA 2015
MAIN HIGHLIGHTS 2015

- 6** IKHTISAR PENCAPAIAN 2015
PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2015
- 8** INISIATIF 2015
INITIATIVES IN 2015
- 10** IKHTISAR KEUANGAN PENTING
FINANCIAL HIGHLIGHTS



- 15** LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

- 16** LAPORAN DEWAN KOMISARIS
MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
- 22** LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS
- 30** PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS LAPORAN
TAHUNAN TAHUN BUKU 2015
ACCOUNTABILITY STATEMENT OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ABOUT
RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT



- 33** PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

- 34** NAMA, ALAMAT DAN INFORMASI UMUM
PERUSAHAAN
COMPANY NAME, ADDRESS AND GENERAL
INFORMATION
- 35** MAKSUD DAN TUJUAN USAHA
GOALS AND OBJECTIVES
- 36** STRUKTUR ORGANISASI
STRUCTURE OF ORGANIZATION
- 38** RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
COMPANY'S HISTORY
- 40** JEJAK LANGKAH
MILESTONES
- 42** KEGIATAN USAHA
BUSINESS ACTIVITY
- 43** VISI DAN MISI
VISION AND MISSION
- 44** NILAI-NILAI PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES
- 45** KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION
- 45** WILAYAH OPERASI
REGIONAL OPERATION
- 46** PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE
- 48** PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE
- 50** KEPALA DIVISI
SENIOR MANAGER
- 52** PENGHARGAAN
AWARDS
- 54** PERISTIWA PENTING
EVENT HIGHLIGHTS



57

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN**

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 58 TINJAUAN BISNIS**
BUSINESS REVIEW
- 64 TINJAUAN KEUANGAN**
FINANCIAL REVIEW
- 92 INFORMASI KEUANGAN MATERIAL LAINNYA**
OTHER MATERIAL FINANCIAL INFORMATION
- 93 PROSPEK USAHA**
BUSINESS PROSPECT
- 94 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS**
BUSINESS SUPPORT REVIEW



119

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- 120 PENDAHULUAN**
PREFACE
- 133 DEWAN KOMISARIS**
BOARD OF COMMISSIONERS
- 142 DIREKSI**
DIRECTORS
- 159 KOMITE-KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN
KOMISARIS**
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS



162 KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

169 MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN
ENTERPRISE RISKS MANAGEMENT

185 KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

187 WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLE BLOWING SYSTEM

191

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY**



197

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT





IKHTISAR UTAMA 2015
MAIN HIGHLIGHTS 2015

IKHTISAR PENCAPAIAN 2015 PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2015

Dalam juta rupiah/In million rupiah

Premi Bruto
Gross Premiums

3.451.756

Hasil Investasi
Underwriting Income

185.420

Hasil Underwriting
Underwriting Results

186.508

Laba bersih
Net Incomes

251.073

Aset
Assets

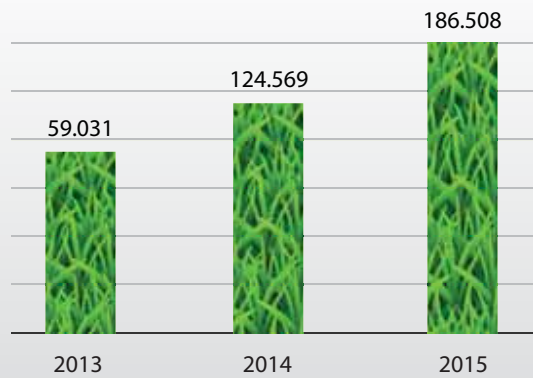
4.116.426

Ekuitas
Equity

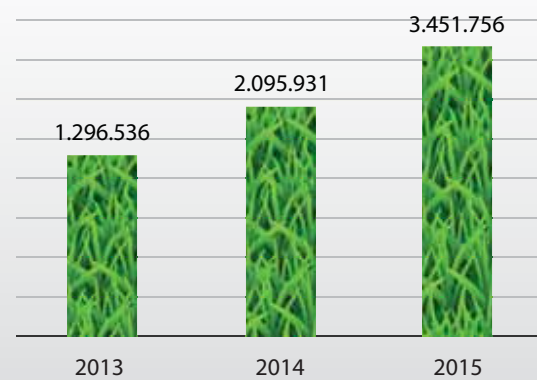
1.182.824

Fitch Ratings
AA - / BB - (int'l)

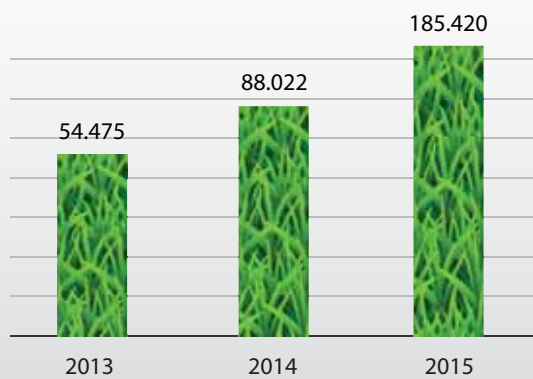
Hasil Underwriting/Underwriting Yields



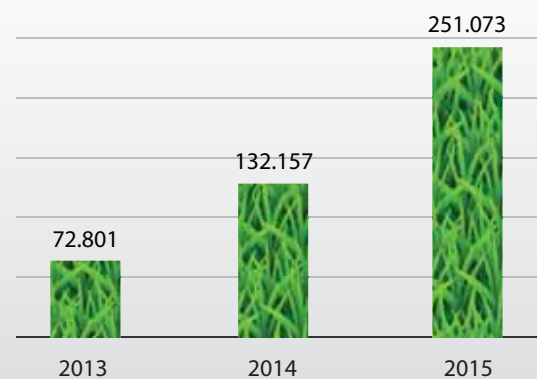
Premi Bruto/Gross Premium



Hasil Investasi/Investment Yields



Laba Bersih/Net Profit



INISIATIF 2015

Sepanjang tahun 2015, Perusahaan melakukan *corporate action* sebagai berikut:

Tambahan Modal Disetor sebesar Rp75 Milyar

Pada tanggal 24 Juni 2015 pemegang saham PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia menambah modal disetor kepada perusahaan sebesar Rp75 milyar. Dengan penambahan tersebut total modal disetor perusahaan per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp538 milyar.

Penambahan modal disetor tersebut antara lain dimanfaatkan untuk:

- a) Menambah penyehatan industri asuransi di dalam negeri
Dengan adanya penambahan kapasitas reasuransi di dalam negeri yang semakin besar, hal tersebut akan sangat berdampak positif pada penyehatan dan penguatan serta daya serap industri asuransi di dalam negeri.
- b) Menahan/mengurangi laju *Premiums Flight* ke luar negeri
Peningkatan kemampuan perusahaan reasuransi dalam menahan / mengurangi laju *premium flight* ke luar negeri tersebut dapat dilakukan baik dengan meningkatkan kapasitas maupun penguatan dalam struktur permodalan. Mengingat sesuai dengan regulasi yang ada, penyerapan premi neto hanya diperbolehkan sebesar maksimum 300% dari modal sendiri.

Penambahan Modal Disetor Rp75 milyar di tahun 2015 memantapkan posisi ekuitas dan struktur keuangan yang ada dalam meningkatkan kapasitas perusahaan.

INITIATIVES IN 2015

Throughout 2015, the Company undertook a number of corporate actions as follow:

Additional Paid-Up Capital of Rp75 billion

On June 24, 2015, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia as the major shareholder added paid-up capital amounting to Rp75 billion, added up to a total paid-up capital of Rp538 billion by December 31, 2015.

This additional paid-up capital is appropriated for the following:

- a) To enhance the soundness of domestic insurance industry
Such a greater domestic reinsurance capacity brings a positive impact on the soundness and strength, as well as enhances the absorption of domestic insurance industry.
- b) Preventing premium flight
Enhancing the capability of reinsurance company in retaining or lowering premium flight can be carried out by increasing capacity or strengthening capital structure. Given the prevailing regulation, that stated the absorption of net premium shall not exceed 300% of own capital.

Additional paid-up capital of Rp75 billion in 2015 strengthened the existing equity position and financial structure in enhancing the Company's capacity.

Revaluasi Aset Perusahaan

Pada tahun 2015 perusahaan melakukan revaluasi aset tanah dan bangunan yang merupakan kantor PT Reasuransi Nasional Indonesia. Adapun tujuan daripada revaluasi aset ini adalah dalam rangka penyesuaian pencatatan aset tetap perusahaan agar sesuai dengan harga pasar wajarnya. Dari revaluasi aset tersebut, terdapat selisih peningkatan nilai aset tetap tanah dan bangunan sebesar Rp112,7 milyar yang pajaknya juga telah dibayarkan pada tahun 2015.

Restrukturisasi Organisasi

Pada tahun 2015 perusahaan melakukan perubahan dan pengembangan struktur organisasi dari sebelumnya 10 (sepuluh) divisi menjadi 12 (dua belas) divisi, dua divisi baru yang ditambahkan adalah Divisi Kehumasan & Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Restrukturisasi organisasi tersebut sebagai tindak lanjut, diantaranya, dari:

- Untuk memenuhi ketentuan pada regulasi (*compliance*), dalam hal ini Pasal Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2015.
- Sebagai tindak lanjut dari adanya penambahan modal disetor perusahaan sebesar Rp75 Milyar yang diberikan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas, maka kapasitas akseptasi perusahaan ditingkatkan.

Reevaluating Corporate Assets

In 2015, the Company revaluated its land and building assets, which was the office of PT Reasuransi Nasional Indonesia. The purpose of the reevaluation is to adjust the recording of the Company's fixed assets with the fair market price. Based on the reevaluation result, the value of our fixed assets, land and building, was increased by Rp112.7 billion and the tax of which has been paid in 2015.

Restructuring the Organization

In 2015, the Company restructured its organization and expanded it from previously 10 (ten) division to 12 (twelve). Two new division are PR & Compliance and Risk Management. The organizational restructuring was the follow up of the following:

- To comply with the regulation, in this case is the OJK Regulation No. 2/POJK.05/2015.
- As a follow up from additional paid-up capital of Rp75 billion from PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia as the major shareholder, the Company enhances its insurance acceptance capacity.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING FINANCIAL HIGHLIGHTS

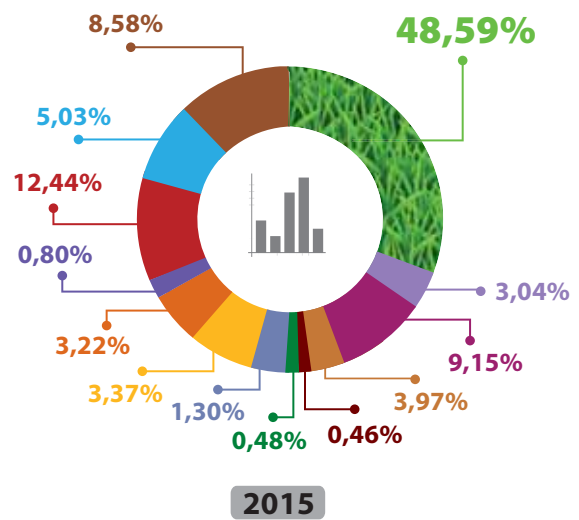
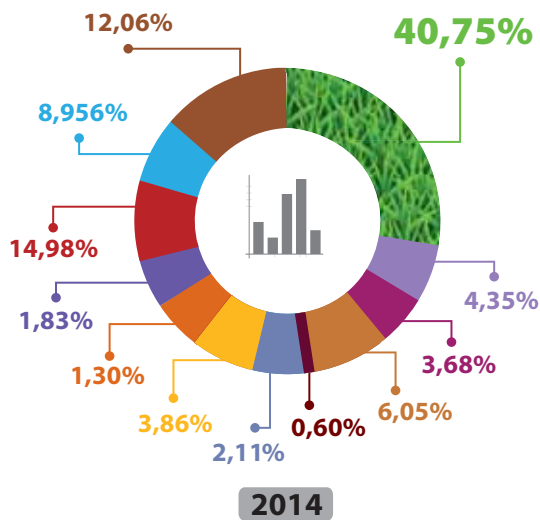
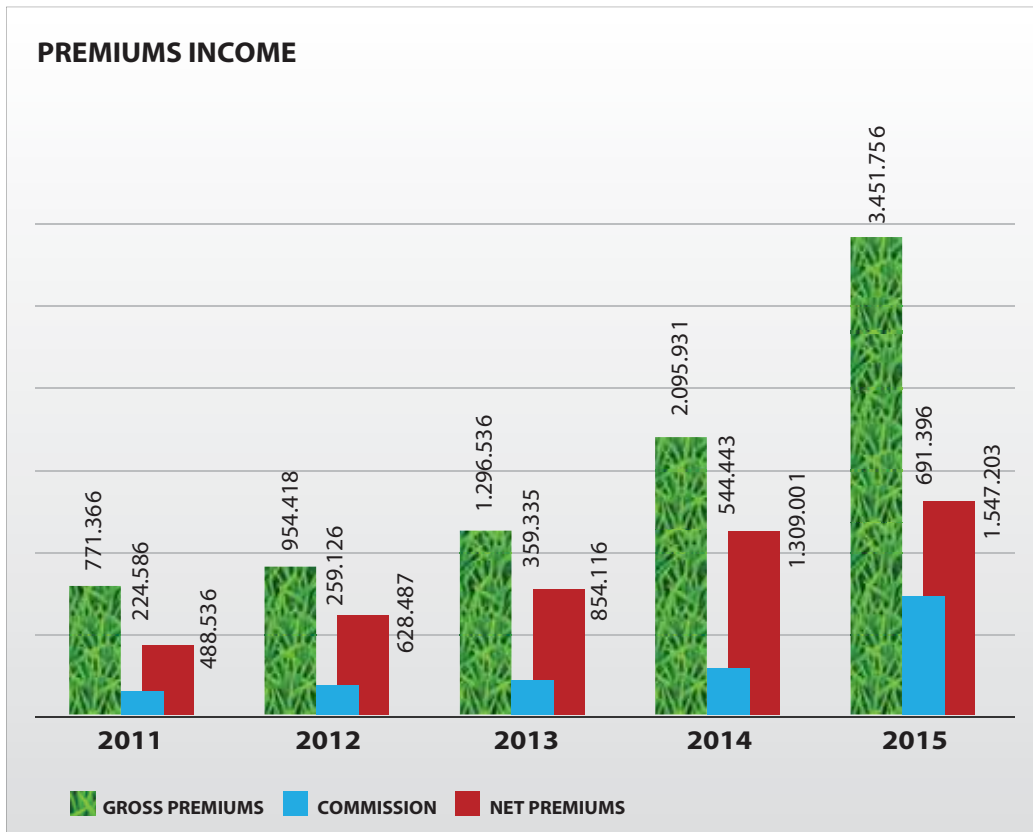
Dalam juta rupiah/In million rupiah

KETERANGAN/Note	2015	2014	2013	2012	2011
Premi Bruto/Gross Premiums	3.451.756	2.095.931	1.296.536	954.418	771.366
Premi Retro/Retrocession Premiums	1.213.157	242.487	83.085	66.805	58.244
Premi Retensi Sendiri/Own Retention Premiums	2.238.599	1.853.444	1.213.451	887.613	713.122
Klaim Bruto/Gross Claims	1.240.357	867.381	521.713	467.280	357.391
Beban Klaim/Claims Expenses	1.292.430	800.143	626.178	516.846	388.243
Beban Komisi Neto/Net Commission Expenses	691.396	544.443	359.335	259.126	224.586
Premi Neto/Net Premiums	1.547.203	1.309.001	854.116	628.487	488.536
Hasil Underwriting/Underwriting Results	186.508	124.569	59.031	54.073	46.029
Hasil Investasi/Investments Income	185.420	88.022	54.475	37.261	35.265
Beban Usaha/Operating Expenses	116.398	88.689	71.083	52.723	44.717
Laba Sebelum Pajak dan Zakat/Profit Before Tax and Zakat	295.190	150.846	81.490	50.078	21.569
Laba Setelah Pajak dan Zakat/Profit After Tax and Zakat	251.073	132.157	72.801	46.066	20.368
Investasi/Investments	2.387.358	1.650.248	1.136.420	859.411	623.778
Aset/Assets	4.116.426	2.930.469	1.722.564	1.122.541	877.439
Cadangan Teknis/Technical Reserves	1.608.608	1.359.376	948.258	613.567	503.325
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan/ Unearned Premiums	892.099	834.087	481.193	305.320	263.259
Estimasi Klaim Retensi Sendiri/Estimated Own Retention Claims	716.509	525.289	467.065	308.247	240.066
Ekuitas/Equity	1.182.824	748.691	371.527	247.105	212.222
Modal Disetor/Paid-up Capital	538.000	463.000	213.000	138.000	138.000

Dalam%/In %

RASIO KEUANGAN/Financial Ratios	2015	2014	2013	2012	2011
Return On Aset (ROA)	8,38	6,48	5,73	5,01	2,81
Return On Equity (ROE)	26,00	23,59	23,54	20,06	10,09
Yield On Investment	9,39	6,60	5,83	5,41	6,64
Klaim Bruto/Premi Bruto/ Gross Claims/Gross Premium	35,93	41,38	40,24	48,96	46,33
Hasil Underwriting/Premi Bruto Underwriting Results/Gross Premiums	5,40	5,94	4,55	5,67	5,97
Likuiditas/Liquidity	134,28	135,75	124,91	136,37	128,58
Solvabilitas/Solvability	141,48	135,65	129,16	142,17	150,49
Beban Usaha/Premi Bruto Operating Expenses/Gross Premiums	3,37	4,23	5,48	5,52	5,80

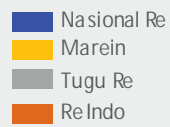
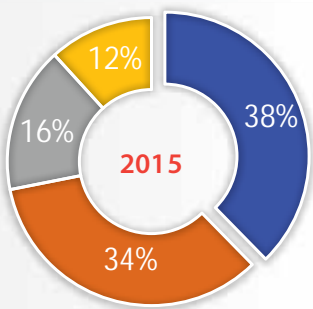
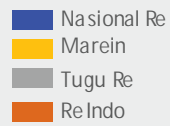
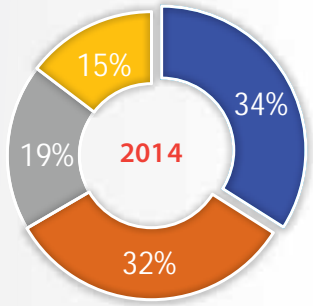
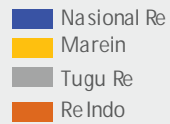
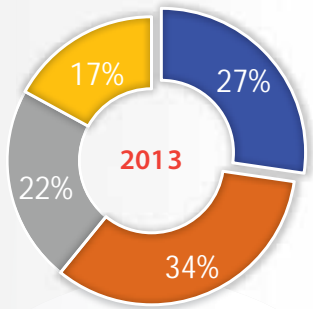
Dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Keterangan :

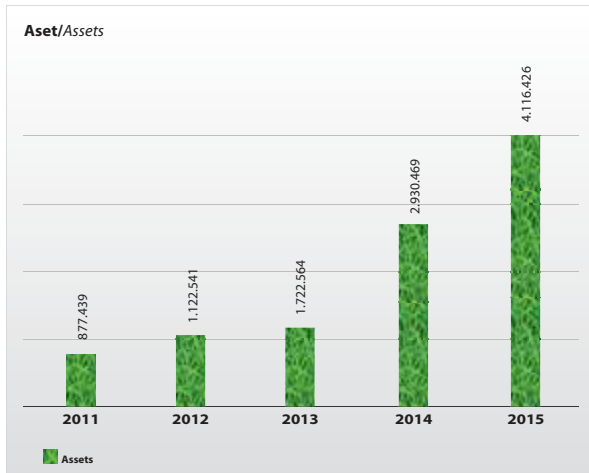
- Harta Benda/Property
- Rekayasa/Engineering
- Kendaraan Bermotor/Motor
- Tanggung Gugat/Liability
- Pengangkutan/Marine Cargo
- Kecelakaan Diri dan Kesehatan/Personal Accident and Health
- Rangka Kapal/ Marine Hull
- Kredit dan Surety Bond/Credit and Surety Bond
- Rangka Pesawat/Aviation
- Aneka/Miscellaneous
- Energi/Energy
- Reasuransi Jiwa/Life Reinsurance

IPR *) Market Share

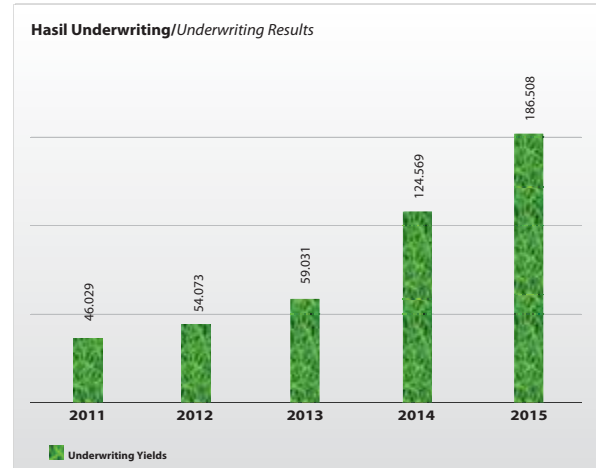


*) Indonesia Professional Reinsurers

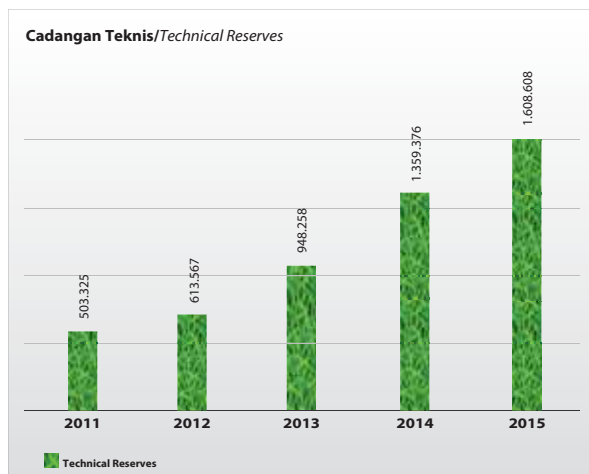
Dalam juta rupiah/In million rupiah



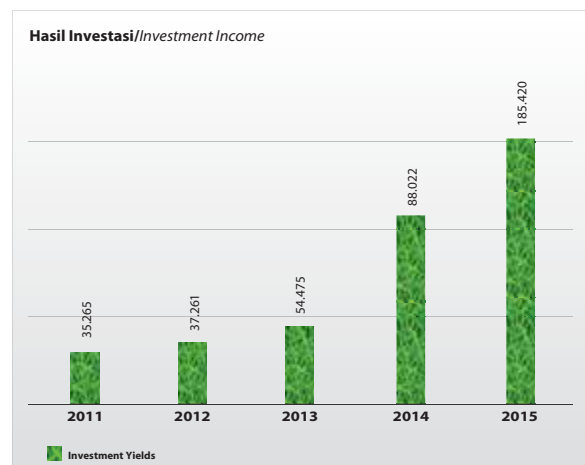
Dalam juta rupiah/In million rupiah



Dalam juta rupiah/In million rupiah



Dalam juta rupiah/In million rupiah







LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris Utama/President Commissioner

Pemegang Saham selaku pemangku kepentingan yang terhormat,

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan sepanjang tahun 2015.

Kondisi Makro Ekonomi

Perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2015 masih dipengaruhi oleh dampak krisis yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju mengalami perlambatan, termasuk di negara-negara Asia.

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat, memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia dimana sampai dengan akhir tahun 2015 masih relatif stagnan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sebesar 4,8%, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar 5,8%. Nilai tukar Rupiah dan perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren yang fluktuatif. Nilai tukar Rupiah terhadap dollar cenderung melemah dan nilai IHSG mengalami penurunan sepanjang tahun 2015 sebesar 12,13%. Inflasi (yoy) pada akhir tahun 2015 sebesar 3,35%, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar 4,4%. Secara fundamental, ekonomi Indonesia masih terbelang positif terutama rendahnya inflasi. Perlambatan ekonomi domestik salah satunya didorong oleh lambannya investasi swasta dan pemerintah, serta penyerapan anggaran yang tidak sesuai perkiraan.

Meskipun sepanjang tahun 2015 Perusahaan beroperasi di tengah kondisi perekonomian yang sangat *volatile*, namun Perusahaan masih dapat mencari dan memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan.

Penilaian atas Kinerja Perusahaan

Pertumbuhan perekonomian yang tidak optimal juga berpengaruh terhadap industri perasuransian nasional. Namun demikian, kondisi ini tidak menjadi kendala bagi Perusahaan untuk menjalankan usahanya sepanjang tahun 2015. Perusahaan dalam tahun 2015 dapat mencapai kinerja sangat baik dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Perusahaan berhasil mencapai premi bruto sebesar Rp3.451 milyar atau meningkat Rp1.356 milyar dibandingkan tahun 2014. Pertumbuhan premi bruto tersebut juga diimbangi dengan pertumbuhan Laba Setelah Pajak & Zakat sebesar 89,98% dari tahun 2014 atau mencapai Rp251 milyar; serta hasil underwriting meningkat sebesar 49,72%.

Dear Shareholders and Stakeholders,

By thanking God the Almighty, please allow us on behalf of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia to report our duty of overseeing the management of the Company in 2015.

Macro Economy Condition

The development of the global economy throughout 2015 was still under influence of the impact of the crisis that occurred few years earlier. These condition has rendered the economic growth in some developed countries to slowdown, including in many Asian countries.

The slow global economic growth impacted the economic conditions in Indonesia, which remained relatively stagnant up to the end of 2015. This was reflected in economic growth that reached only 4.8%, lower than the target set in the State Budget (APBN) in 2015 amounting to 5.8%. The exchange rate of rupiah and the development of Composite Stock Price Index (IHSG) underwent a fluctuating trend. The rupiah exchange rate against the dollar was likely to weaken and the IHSG was decreased by 12.13%. Inflation rate (yoy) at the end of 2015 was 3.35%, lower than the target set in the State Budget (APBN) in 2015 of 4.4%. However, the Indonesian economy fundamental was still fairly positive, especially with such a low inflation rate. The slowdown in the domestic economy, among others, was driven by sluggish private and government investment, as well as the absorption of the budget that was lower than estimation.

Against the backdrop of the volatile situation of economic condition in 2015, the Company managed to seek and to seize profitable business opportunities.

Assessment on the Performance of the Company

The unfavorable economic growth also affected national insurance industry. However, this condition was not an obstacle for the Company in executing its business plan throughout 2015. In fact, the Company was able to achieve an excellent performance and better than the previous year. In 2015, the Company booked gross premiums of Rp3,451 billion or increased by Rp1,356 billion compared to that of 2014. The growth in gross premiums was accompanied by the growth in Profit After Tax & Zakat of 89.98% to Rp251 billion; as well as the underwriting results increased by 49.72%.

Melihat pencapaian kinerja tahun 2015, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi atas soliditas dan kerja kerasnya dalam mengarungi dinamika bisnis sepanjang tahun 2015 serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja yang telah amanahkan oleh pemegang saham. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2015 Direksi telah melakukan langkah strategis dalam memajukan kinerja Perusahaan, antara lain: melakukan restrukturisasi *class of business* (COB) guna memperkuat fundamental bisnis, peningkatan *prudent underwriting* melalui selektivitas/pemilihan sumber bisnis, pengendalian *claim ratio*, dan peningkatan kualitas pelayanan. Penguatan struktur keuangan dan penyesuaian struktur organisasi yang sejalan dengan perkembangan bisnis Perusahaan serta peningkatan kompetensi SDM juga menjadi kunci dalam pencapaian kinerja Perusahaan. Risiko-risiko yang timbul dapat diminimalisir secara tepat dari peningkatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan melalui pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Hal yang perlu dicermati atas pencapaian kinerja tahun 2015 adalah bahwa pertumbuhan pendapatan premi meningkat lebih tinggi dan *claim ratio* dapat dikendalikan dengan baik melalui peningkatan kualitas penanganan akseptasi yang mengedepankan prinsip *prudent underwriting*.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai upaya Direksi untuk tetap bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di tengah tantangan perubahan kondisi industri dan ekonomi sudah cukup baik.

Pandangan atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris menilai bahwa industri reasuransi nasional memiliki tantangan kapasitas nasional yang semakin meningkat. Meskipun serapan premi reasuransi nasional mengalami peningkatan, namun dinilai masih belum tergarap secara optimal. Dengan demikian peluang Perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis masih terbuka luas dan bisa lebih meningkat. Adanya kebijakan regulator untuk meningkatkan penenuhan kapasitas reasuransi dalam negeri, membuka peluang bagi Perusahaan untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan perolehan premi dari berbagai lini bisnis.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016, Perusahaan menargetkan pendapatan premi bruto minimal Rp4.750 milyar dengan Laba setelah pajak & zakat senilai Rp320 milyar. Terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2016 telah diminta kepada Direksi untuk dijabarkan ke dalam strategi dan program kerja yang disesuaikan dengan kondisi

Seeing the achievement in 2015, the Board of Commissioners wishes to express the highest appreciation to the entire Board of Directors on the solidness and hard work in navigating the business dynamics throughout the year and for the efforts undertaken to realize the achievement as mandated by the shareholders. We understand that throughout 2015 the Board of Directors has deployed strategic steps in advancing the Company's performance, among others: restructuring the class of business (COB) to strengthen our business fundamentals, improving our prudent underwriting approach by being more selective on choosing sources of business, controlling claim ratio, and making improvement on the quality of our service. Strengthening the financial structure and the organizational structure that aligns with the business development of the Company, as well as improving the competence of human resources, were the keys in achieving the Company's performance. The risks can be minimized appropriately by improving the Company's management through the implementation of risk management and Good Corporate Governance.

Some issues that need to be addressed regarding the 2015 achievement was that the premiums growth is higher and the claim ratio can be properly controlled by improving the quality of handling the acceptance based on the principles of prudent underwriting.

In general, the Board of Commissioners saw that BOD's effort in achieving the target amidst the changes and challenges in the industry and economy was excellent enough.

Business Prospect

The Board of Commissioners saw that the reinsurance industry in Indonesia had an issue regarding its growing national capacity. Despite the fact that the absorption of national reinsurance premium is increasing, somehow it is not optimally done yet. Hence, the Company still has a wide window of opportunity to expand its business. The policy from regulator to increase the saturation of domestic reinsurance capacity has further opened window of opportunity for the Company to develop its business and to increase its premiums acquisition from various lines of business.

Therefore, we do not think that it was an over estimation that in the Work Plan and Budget of 2016, the Company set a gross premium income of at least Rp4,750 billion, with profit after tax and zakat amounting to Rp320 billion. However, we have requested the Board of Directors to detail the targets set forth in the work plan 2016 into strategies and work programs that are tailored to market conditions. BOC believes that with the

pasar. Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan optimisme dan kerja keras dari seluruh insan perusahaan, target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dapat dicapai bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan. Dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang handal, Teknologi Informasi berbasis *web*, manajemen risiko korporat yang terintegrasi, dan tata kelola yang baik; maka seluruh rencana bisnis dan program kerja dapat dijalankan dengan baik.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan Perusahaan, Dewan Komisaris terus mendorong segenap jajaran Perusahaan untuk selalu berupaya meningkatkan mutu tata kelola dan efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Setiap perumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian operasional Perusahaan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Untuk menilai mutu tata kelola dan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik, pada tahun 2015 Perusahaan telah melakukan *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh *assessor independent* dengan skor nilai 83,08 atau mencapai kualifikasi Baik. Namun demikian, terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi *area of improvement* bagi Perusahaan. Terkait hal ini Dewan Komisaris mengharapkan kerjasama seluruh jajaran/ insan Perusahaan untuk dapat bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna peningkatan mutu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ke arah yang lebih baik.

Dewan Komisaris percaya bahwa konsistensi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sekedar melaksanakan kepatuhan pada peraturan, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada segenap jajaran *stakeholders* bahwa Perusahaan berkomitmen untuk menjadi organisasi yang bertanggung jawab dan layak diandalkan, serta sebagai sarana untuk membangun bisnis yang berkesinambungan di masa depan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung, yakni Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja organ pendukung Dewan Komisaris yang telah memberikan kinerja terbaiknya selama tahun 2015. Atas dukungannya, Dewan Komisaris dapat menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasehat secara tepat sehingga Direksi dapat menjalankan pengelolaan Perusahaan yang berkesinambungan.

positive spirit and hard work of all employee, the target set by the shareholders can be achieved or even surpassed. Supported by a reliable Human Resources, Web-based Information Technology, integrated risk management and good corporate governance; we are sure that the whole business plan and work programs can be run properly.

Commitment Towards Implementation of Good Governance

In an effort to improve the quality of the management, the Board of Commissioners continues to encourage employees at all levels of the Company to always working to improve the quality and effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance. Each policy formulation, as well as monitoring and controlling of the Company's operations shall be done by observing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. To assess the quality of governance and the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance, in 2015 the Company conducted an assessment on the implementation of Good Corporate Governance by independent assessors with a score of 83.08 or qualified as Good. However, there were still some recommendations regarding area of improvement. Concerning this issue, the Board of Commissioners expects collaboration from all employees, so that together we can follow up on those recommendations in order to improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance.

The Board of Commissioners believes that a consistent implementation of Good Corporate Governance is not merely complying regulation, but it will also send a powerful message to stakeholders that we have a strong commitment to building our organization as a responsible and reliable one. It also serves as a means to build a sustainable business in the future.

Assessment on the Committees under The Board of Commissioners

In carrying out our supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely the Secretary of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, namely: the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. The Board of Commissioners appreciated the performance of the supporting organs under the Board of Commissioners who have shown their best performance during 2015. With their support, the Board of Commissioners was able to perform its supervisory and advisory roles appropriately so that the Board of Directors can run a sustainable company management.

Komite Audit:

Sepanjang tahun 2015, Komite Audit bertugas sesuai *Charter* yang telah ditetapkan. Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris dalam hal *monitoring* dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Perusahaan, serta penyelesaian rekomendasi Satuan Pengawas Internal (SPI). Hal ini tercantum dalam laporan tahunan Komite Audit tahun 2015 yang menjelaskan tentang kegiatan Komite Audit selama tahun 2015.

Komite Pemantau Risiko:

Komite Pemantau Risiko telah membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan mereview pelaksanaan manajemen risiko yang telah disusun oleh Direksi serta menilai tingkat toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rinarno Pramudyanto : Komisaris Utama
Sulaeman : Komisaris
Raymond Buisson : Komisaris Independen

Penutup

Dalam kesempatan ini, atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan & kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh jajaran Direksi beserta segenap karyawan Perusahaan atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang tahun 2015. Kami yakin dengan semangat yang sama di tahun-tahun mendatang Perusahaan dapat terus bertumbuh dan menjadi *leader* dalam industri reasuransi nasional serta memberikan kontribusi yang positif bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Audit Committee:

Throughout 2015, the Audit Committee has discharged their duties appropriately according to the predetermined Charter. The Audit Committee has assisted the Board of Commissioners in monitoring and supervising the implementation of the Company's activities, as well as following recommendations from Internal Audit Unit (IAU), and is stated in the annual report of the Audit Committee in 2015, describing activities of the Audit Committee during 2015.

Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee has assisted the Board of Commissioners in monitoring and reviewing the implementation of risk management prepared by the Board of Directors, as well as assessing the level of risk tolerance that can be taken by the Company.

Changes in Composition of the Board of Commissioners

In 2015 there were no changes in the composition of the Board of Commissioners. Thus the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2015 are as follows:

Rinarno Pramudyanto : President Commissioner
Sulaeman : Commissioner
Raymond Buisson : Independent Commissioner

Closing Remark

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to take this occasion to express our highest gratitude for the support and trust given by the shareholders and all stakeholders. We would also like to express our appreciation to the entire Board of Directors and employees for their hard work and dedication shown throughout 2015. We believe that with the same spirit the Company can continue to grow and become a national leader in the reinsurance industry in the coming years, as well as making a positive contribution for our nation.

Jakarta, February 2016

Atas Nama Dewan Komisaris/On Behalf of the Board of Commissioners



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP

Komisaris Utama/President Commissioner



Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS, CRGP
Komisaris/Commissioner

Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris Utama/President Commissioner

Raymond Buisson, SE, CRGP
Komisaris Independen/
Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS



M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRMP, CRGP
Direktur Utama/President Director

Pemegang Saham yang terhormat,

Tahun 2015 merupakan tahun ketiga dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode tahun 2013 – 2017. Dalam tahun 2015 perusahaan memasuki periode I pentahapan RJPP yaitu periode Akselerasi Pertumbuhan Bisnis. Pada tahap ini PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) diharapkan sudah memiliki pondasi yang kuat untuk memasuki masa pertumbuhan yang cepat.

Kondisi Ekonomi

Di tengah berbagai tantangan di tahun 2015, sebenarnya perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, yakni 4,8%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 5%. Namun angka tersebut di bawah yang semula ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, yakni sebesar 5,8%.

Ada berbagai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sedikit lebih lambat dibandingkan ekspektasi. Pertama, adanya faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, antara lain adalah melemahnya perekonomian global, termasuk China yang selama ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, serta melemahnya harga komoditas yang memberi dampak ekonomi cukup signifikan bagi Indonesia, terutama industri-industri pertambangan.

Perlambatan ekonomi domestik juga turut mempengaruhi terhadap laju pendapatan premi asuransi Indonesia tahun 2015, khususnya pada asuransi umum mengingat sebagian besar produk asuransi umum memberikan jaminan terhadap risiko pembangunan ekonomi.

Sepanjang tahun 2015, nilai tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren yang sangat fluktuatif. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi aktivitas bisnis secara umum, terutama industri yang banyak menggunakan Dollar dalam transaksinya.

Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi pada Tahun 2015

Pada tahun 2015 ini adanya dukungan pemerintah terhadap industri asuransi, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 14/POJK.05/2015 tentang retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri, dimana dalam rangka menekan laju defisit neraca pembayaran yang disebabkan oleh *premium flight* diharapkan dapat ditekan. Hal ini merupakan peluang bagi kami perusahaan reasuransi untuk tumbuh lebih cepat dalam rangka perolehan premi bruto, dan turut serta menyukseskan program pemerintah tersebut.

Our valued Shareholders,

2015 was the third year of our Long Term Business Plan (RJPP) for the period of 2013 – 2017. In 2015, the Company entered the first period of RJPP stages, namely the period of Business Growth Acceleration. During this stage, PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) is expected to already have a firm foundation prior to entering fast growing period.

The Condition of Economy

Despite the challenges that must be faced in 2015, actually Indonesian economy managed to record a quite excellent growth, namely 4.8%. It was slightly lower than 2015 of 5% but significantly lower than the target set in the 2015 State Budget (APBN) of 5.8%.

A number of internal and external factors led to a slowdown of economic growth, slightly slower than expected. First, the external factors that affect Indonesian economy, among others, was the weakening of the global economy, including China which has been the largest trading partner of Indonesia. The weakening commodity prices also gave a significant economic impact for Indonesia, especially for the mining industries.

The slowdown in the domestic economy also affected insurance premium income in Indonesia in 2015, especially in general insurance, given that most of general insurance products provided guarantee against risk of economic development.

Throughout 2015, rupiah and Composite Stock Price Index (IHSG) experienced a very fluctuating trend. It had a great impact on business activities in general, especially the industry using Dollar for transactions.

Opportunities and Challenges Faced in 2015

In 2015, the government supported the insurance industry when the Financial Services Authority (FSA) issued POJK No. 14/ POJK.05/2015 regarding Self-Retention and Domestic Reinsurance Support, with the objective of reducing the deficit in payment balance caused by premium flight. This is an opportunity for our company to grow faster, in terms of gross premium income, and to contribute to the success of government programs.

Di sisi lain, tantangan bagi kami adalah peningkatan kapasitas dalam rangka penyediaan kapasitas akseptasi perusahaan asuransi sesuai salah satu misi kami yaitu memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional. Tentunya tantangan lainnya adalah peningkatan kualitas layanan dari kami, baik itu solusi reasuransi, penyelesaian klaim dan penyelenggaraan pendidikan untuk para mitra usaha kami.

Pemegang Saham Perusahaan, yakni PT Askrindo, membuktikan keseriusannya dalam mendukung langkah-langkah NASIONAL RE dalam mengembangkan kapasitasnya, yakni dengan menambahkan kembali modal disetor pada tahun 2015 sebesar Rp75 miliar, setelah pada tahun lalu telah menyetorkan modal sebesar Rp250 miliar. Dan selanjutnya sesuai RKAP 2016, PT Askrindo akan menambahkan kembali modal disetornya sebesar Rp75 miliar. Hal ini merupakan amanat dan tantangan bagi kami untuk mengoptimalkan modal yang telah diberikan Pemegang Saham kami untuk peningkatan kinerja perusahaan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi Para pemangku kepentingan.

Pencapaian Tahun 2015

Secara umum, pada tahun 2015 NASIONAL RE mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan, dimana Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik bahkan melampaui dari target yang ditetapkan, sebagaimana yang tercermin dari angka-angka berikut ini.

Perolehan laba setelah pajak dan zakat Perusahaan mencapai Rp251.073 juta atau 125,4% dari anggaran dengan laba komprehensif sebesar Rp359.134 juta. Angka Laba setelah pajak dan zakat ini tumbuh cukup signifikan yaitu 90% jika dibandingkan laba tahun 2014 yang sebesar Rp132.157 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan premi bruto reasuransi tahun 2015 mencapai Rp3.451.756 juta, atau 101,1% dari anggaran sebesar Rp3.415.750 juta. Angka ini meningkat sebesar 64,7% jika dibandingkan dengan perolehan premi tahun 2014, yang tercatat sebesar Rp2.095.931 juta.
2. Klaim bruto tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.240.357 juta, atau 90,7% dari anggaran sebesar Rp1.367.461 juta.
3. Secara keseluruhan hasil underwriting mencapai surplus Rp186.508 juta atau tercapai 93,2% dari anggaran sebesar Rp200.103 juta atau meningkat sebesar 49,7% jika dibandingkan dengan hasil underwriting tahun 2014 yang sebesar Rp124.569 juta. Sedangkan dari reasuransi syariah,

On the other hand, it is a challenge for us to increase our capacity in order to provide appropriate capacity of acceptance of insurance company, and is part of our mission in providing benefits to our partners in improving their performance as insurance company and to national insurance capacity. Of course, the other challenge is to improve the quality of our services, in terms of providing reinsurance solutions, settlement of claims and providing education for our business partners.

Our shareholder PT Askrindo, has proved its seriousness in supporting our steps in developing capacity by again provided additional paid up capital in 2015 amounting to Rp75 billion, after previously deposited a capital of Rp250 billion. And then as stated in the Budget Work Plan (RKAP) 2016, PT Askrindo will again provide additional paid-up capital in the amount of Rp75 billion. It is as mandate as well as a challenge for us in optimizing the capital that has been provided by our shareholders to increase the Company's performance better and to provide benefits to stakeholders.

Achievement in 2015

In general in 2015 NASIONAL RE was able to demonstrate a satisfactory performance, in which the Company's Budget & Work Plan 2015 has been executed properly even surpassed the target set, as reflected in the figures below.

The Company's income after tax and zakat reached Rp251,073 million or 125.4% of the budget, with a comprehensive profit of Rp359,134 million. This income after tax and zakat grew significant by 90% when compared with that of 2014, which was Rp132,157 million. The details are as follows:

1. Reinsurance gross premiums in 2015 reached Rp3,451,756 million, or 101.1% of the budget of Rp3,415,750 million. It increased by 64,7% when compared to premium income in 2014, which was Rp2,095,931 million.
2. Gross Claims in 2015 amounted to Rp1,240,357million, or 90,7% of the budget of Rp1,367,461 million.
3. The overall results of underwriting reached a surplus of Rp186,508 million or 93.2% of the budget of Rp200,103 million, an increase of Rp49.7% million when compared with the results of underwriting in 2014 which amounted to Rp124,569 million, while from Sharia Reinsurance, which

pendapatan perusahaan adalah pendapatan ujah dan alokasi surplus, masing-masing sebesar Rp24.155 juta dan Rp1.694 juta.

4. Hasil investasi dalam tahun 2015 sebesar Rp185.420 juta atau 146,2% dari anggaran sebesar Rp126.849 juta, dan jika dibandingkan dengan hasil investasi tahun 2014 sebesar Rp88.022 juta, mengalami peningkatan sebesar 110,7%.
5. Realisasi Beban Usaha tahun 2015 tercatat sebesar Rp116.398 juta atau 101,2% dari anggarannya sebesar Rp114.977 juta dan jika dibandingkan dengan beban usaha tahun 2014 sebesar Rp88.689 juta, maka mengalami peningkatan sebesar 31,2%.
6. Realisasi belanja modal tahun 2015 tercatat sebesar Rp5.419 juta atau 97,2% dari anggaran sebesar Rp5.575 juta.

Sementara itu, Total Aset perusahaan tercatat sebesar Rp4.116.426 juta, atau meningkat 40,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2014, yakni Rp2.930.469 juta. Total Aset terdiri dari investasi sebesar Rp2.387.357 juta (58%) dan non investasi sebesar Rp1.729.069 juta (42%).

Perusahaan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp2.909.460 juta (70,7%), Dana Tabarru sebesar Rp24.142 juta (0,6%) dan Ekuitas sebesar Rp1.182.824 juta (28,7%). Ekuitas tahun 2015 meningkat 58% dibandingkan Ekuitas tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp748.691 juta. Peningkatan ini di samping pencapaian laba yang melebihi anggarannya juga disebabkan oleh karena adanya tambahan modal disetor dari Askrindo sebesar Rp75 miliar dan selisih revaluasi aset tetap tanah dan bangunan sebesar Rp112.682 juta.

Arus Kas perusahaan selama tahun 2015, menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp14.173 juta. Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha, tercatat sebesar Rp208.302 juta, arus kas dari aktifitas pendanaan sebesar Rp75.000 juta dan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp558.430 juta. Dari surplus tersebut ditambah dengan saldo awal kas bank sebesar Rp2.460 juta, maka saldo akhir kas/bank menjadi sebesar Rp16.633 juta.

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, secara umum terlihat adanya peningkatan, antara lain *Return on Assets* dari 6,4% pada tahun 2014 naik menjadi 8,4% pada tahun 2015, *Return on Equity* dari 22,7% pada tahun 2014 naik menjadi 26,0% pada tahun 2015.

Laporan Keuangan tahun buku 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan dengan pendapat

became the Company's revenue is ujah and allocation surplus, amounting to Rp24,155million and Rp1,694 million.

4. Investments income in 2015 amounted to Rp185.420 million, or 146.2% of the budget of Rp126,849 million and when compared with that of 2014 amounted to Rp88,022 million, increased by 110.7%.
5. Actual operating expenses in 2015 amounted to Rp116,398 million or 101.2% of the budget amounted to Rp114,977 million and when compared with operating expensesin 2014of Rp88,689 million, increased by 31.2%.
6. Actual capital expenditure in 2015 amounted to Rp5,419 million or 97.2% of the budget of Rp5,575 million.

Meanwhile, the Company recorded total assets of Rp4,116,426 million, an increase of 40.5% compared to position of December 31, 2014, namely Rp2,930,469 million. Total assets consist of investments of Rp2,387,357 million (58%) and non-investment of Rp1,729,069 million (42%).

The Company recorded liabilities of Rp2,909,460 million (70.7%), Tabarru of Rp24,142 million (0.6%) and equity of Rp1,182,824 million (28.7%). Equity increased by 58% in 2015 compared to that of 2014, which was Rp748,691 million. This increase was due to the realization of income which surpassed the budget, as well as due to the additional paid-in capital of Rp75 billion from Askrindo, and the difference between reevaluation of land and building assets of Rp112,682 million.

Cash Flow in 2015, showed an increase of Rp14,173 million. Net cash provided by operating activities, amounted to Rp208,302 million, cash flow from financing activities amounted to Rp75,000 million and net cash used in investment activities amounted to Rp558,430 million. Of the surplus, coupled with an initial balance of cash bank of Rp2,460 million, then the ending balance of cash/bank amounting to Rp16,633 million.

When compared to 2014, in general there is an increase, among others, Return on Assets from 6.4% in 2014 rose to 8.4% in 2015, Return on Equity from 22.7% in 2014 rose to 26% in 2015.

Financial Statements of fiscal year 2015 were audited by Public Accounting Firm Soejatna, Mulyana & Partners with

“Wajar Dalam Semua Hal yang Material sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, kinerja perusahaan tahun 2015 memperoleh skor sebesar 92,5 dengan predikat **“Sehat AA”**, dan pencapaian rasio tingkat solvabilitas dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 dan PMK No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 untuk usaha Reasuransi Konvensional sebesar 168,1% dan untuk usaha Reasuransi Syariah sebesar 40,9% atau telah memenuhi ketentuan BTSM minimal yang dipersyaratkan, yaitu untuk usaha reasuransi konvensional 120% dan usaha reasuransi syariah 30%.

Penilaian kinerja Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators (KPI)* dari Pemegang Saham memperoleh nilai tertimbang sebesar 96 dari target 100.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kemajuan atau kemunduran sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, baik di level manajemen maupun staf lainnya. Itu sebabnya kami senantiasa menghargai Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset yang paling penting bagi Perusahaan.

NASIONAL RE mengembangkan program pengembangan SDM yang terencana dan terstruktur, yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi SDM. Komitmen Perusahaan dalam mengembangkan kompetensi karyawannya sesuai dengan tema “Pendidikan yang berkesinambungan untuk menunjang pekerjaan di bidangnya”. Keseriusan Perusahaan dalam pengembangan SDMnya tercermin dari alokasi anggaran untuk pelatihan yang mencapai sebesar Rp5.667.793.095,- atau sekitar 6,47% dari keseluruhan Beban Pegawai, Direksi dan Komisaris.

Komitmen Tata Kelola Perusahaan

NASIONAL RE memiliki komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan secara *beyond compliance*, sebagai bagian dari upayanya untuk mewujudkan nilai-nilai perusahaan serta untuk mencapai nilai yang maksimal bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan telah menjadi persyaratan mutlak bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Untuk itu, upaya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan sudah lama dilakukan oleh Perusahaan. Tujuannya tidak hanya untuk

the opinion of **“Fair In All Things Material in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards”.**

Based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises State No. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, the Company's performance scored 92.5 with predicate of **“Healthy AA”** and the achievement level of solvency ratios using the Risk Based Capital according to the Minister of Finance No. 53/PMK.010/2012 dated April 3, 2012 and PMK No. 11/PMK.010/2011 dated January 12, 2011 for conventional reinsurance business amounted to 168.1% and for Sharia Reinsurance business amounted to 40.9%, or has complied with the required Minimum Solvability Level (BTSM) of 120% for conventional reinsurance and 30% for sharia reinsurance.

Management performance assessment based on Key Performance Indicators (KPIs) of the Shareholders obtained the weighted value of 96 out of 100 targets.

Human Resource Management

The progress or regress of a company is determined by the quality of its human resources, at the management level and other staff as well. Therefore, we always regard Human resources (HR) as the most important asset for the Company.

NASIONAL RE develops a well planned and structured human resources development program designed to optimize the potential of our human resources. The Company's commitment to developing the competence of its employees is in accordance with the theme of “sustainable education to support the work in the respective field”. The seriousness of the Company in developing human resources is reflected in the budget allocation for training that reached Rp5,667,793,095 or approximately 6.47% of the total expenses for Employees, Directors and Commissioners.

Commitment on Corporate Governance

NASIONAL RE is committed to implementing corporate governance *beyond compliance*, as part of its efforts to realize the values of the Company, as well as to achieve maximum value for shareholders and stakeholders. We are aware that applying the principles of Corporate Governance has become an indispensable prerequisite for the success of a company. To that end, the Company has long applied the principles of Corporate Governance, not only to meet the requirements of regulators, but also mainly to support the

memenuhi ketentuan dari *regulator*, namun terutama agar dapat mendukung Perusahaan dalam melanjutkan pertumbuhan usahanya dan berhasil mencapai target jangka panjang. Hal ini juga merupakan komitmen Perusahaan yang diwujudkan melalui aksi nyata seluruh karyawan di setiap level.

Dari tahun ke tahun, Direksi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* di NASIONAL RE. Dalam tahun 2015, manajemen dan seluruh jajaran perusahaan secara bertahap terus mengusahakan peningkatan penerapan "*best practices*" *Good Corporate Governance (GCG)* dimana hasil *self assessment Good Corporate Governance* versi OJK diperoleh skor 91,37 untuk versi BUMN yang dilakukan oleh konsultan independen mendapatkan skor 85,58 dan *assessment* KPKU diperoleh skor 474,75 dengan kategori *Early Improvement*.

Program-Program CSR Perusahaan

NASIONAL RE dalam tahun 2015 telah mengalokasikan beban CSR sebesar Rp500 juta dan telah terealisasi sebesar Rp463 juta. Adapun penyalurannya diantaranya kepada Yayasan SLB, pembangunan masjid, program peduli bencana dan program lainnya.

Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2015, susunan Direksi tidak mengalami perubahan, yaitu:

1. M. Shaifie Zein – Direktur Utama
2. Edhie Mulyono – Direktur Operasi
3. Rusdianto – Direktur Keuangan & SDM

Penutup

Akhir kata, ijin saya mewakili seluruh anggota Direksi untuk menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasinya kepada Perusahaan. Tentunya kami berharap di tahun mendatang, dengan dukungan seluruh karyawan Perusahaan dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Kepada Dewan Komisaris, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Karena berkat masukan dan dukungan Dewan Komisaris, kami menjalankan dapat pengelolaan perusahaan sebaik mungkin dan mencapai hasil yang optimal di tengah tantangan yang kami hadapi di tahun 2015.

Company's sustainable business growth and to successfully achieve long-term targets. This commitment is realized in each action conducted by all employees at every level.

Year by year, the Board of Directors continuously works to improve the quality of Good Corporate Governance implementation in NASIONAL RE. In 2015, the management and the whole company have continues to gradually improve the implementation of best practices of Good Corporate Governance (GCG), and as result, the self-assessment of Good Corporate Governance scored 91,37 for the FSA version, while for the version of SOEs conducted by an independent consultant scored 85.58 and the assessment from Criteria for Performance Excellence (KPKU) scored 474.75 in the category of Early Improvement.

The Company's CSR Program

In 2015, NASIONAL RE allocated Rp500 million for its CSR program, with realization of Rp463 million, distributed to SLB Foundation, mosques construction, disaster relief and other programs.

Board of Directors Composition

In 2015, there was no change in the composition of the Board of Directors:

1. M. Shaifie Zein – President Director
2. Edhie Mulyono – Director of Operation
3. Rusdianto – Director of Finance and HR

Closing Remarks

To conclude this message, please allow me to represent all members of the Board of Directors to express our deepest appreciation to all employees for their hard work and dedication to the Company. Of course, we do hope that in the coming years, with the support of all employees, the Company can achieve better results.

To the Board of Commissioners, we would also like to express our thankfulness for their input and support so that we could run the management of the company at the best, enabling us to achieve optimal results in the midst of the challenging situation in 2015.

Sedangkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami berharap di tahun-tahun mendatang kami dapat menjawab kepercayaan ini dengan hasil yang lebih memuaskan.

Meanwhile, to the shareholders and stakeholders, we would like to express our gratitude for the trust bestowed upon us. We certainly hope that in the coming years we can give more satisfactory results as response to what we have been entrusted with.

Atas Nama Direksi/
On behalf of the Board of Directors ,



M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRMP, CRGP

Direktur Utama/President Director



Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAJI, AIIS, CRMP, CRGP
Direktur Operasi/Director of Operation

Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/
Director of Finance & Human Resources

M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRMP, CRGP
Direktur Utama/President Director

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

ACCOUNTABILITY STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ABOUT RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA 2015

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2015 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We the undersigned declare that all information in the Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia 2015 is completely disclosed and we are responsible for the accuracy of its content.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is duly executed.

Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia
Board of Commissioners PT Reasuransi Nasional Indonesia



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris Utama/President Commissioner



Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS, CRGP
Komisaris/Commissioner



Raymond Buisson, SE, CRGP
Komisaris Independen/Independent
Commissioner

Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia
Board of Directors PT Reasuransi Nasional Indonesia



M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRMP, CRGP
Direktur Utama/President Director



Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/
Director of Finance & Human Resources



Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, AIIS, CRMP, CRGP
Direktur Operasi/Director of Operation







PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

NAMA, ALAMAT DAN INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE)

Bidang Usaha

Reasuransi

Pendirian Perusahaan

22 Agustus 1994

Kepemilikan

PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 99,9998%
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo Publik 0,0002%

Modal Dasar

Rp1.800.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp538.000.000.000

Alamat Kantor :

Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330.
Phone : (62-21) 3140009, 3149373, 8064 2500 (hunting)
Fax. : (62-21) 3143716, 39049373, 31900430.
E-mail : nasionalre@nasionalre.co.id
Website : www.nasionalre.id

COMPANY, NAME, ADDRESS AND GENERAL INFORMATION

Name

PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE)

Line of Business

Reinsurance

Establishment

August 22, 1994

Ownership

PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 99.9998%
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo 0.0002%

Authorized Capital

Rp1,800,000,000,000

Issued and Fully Paid Capital

Rp538,000,000,000

Address:

Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330.
Phone : (62-21) 3140009, 3149373, 8064 2500 (hunting)
Fax. : (62-21) 3143716, 3909373, 31900430.
E-mail : nasionalre@nasionalre.co.id
Website : www.nasionalre.id

MAKSUD DAN TUJUAN USAHA

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa.
2. Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (*broker*) reasuransi.
3. Melakukan retrocesi atau reasuransi point 1 di atas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

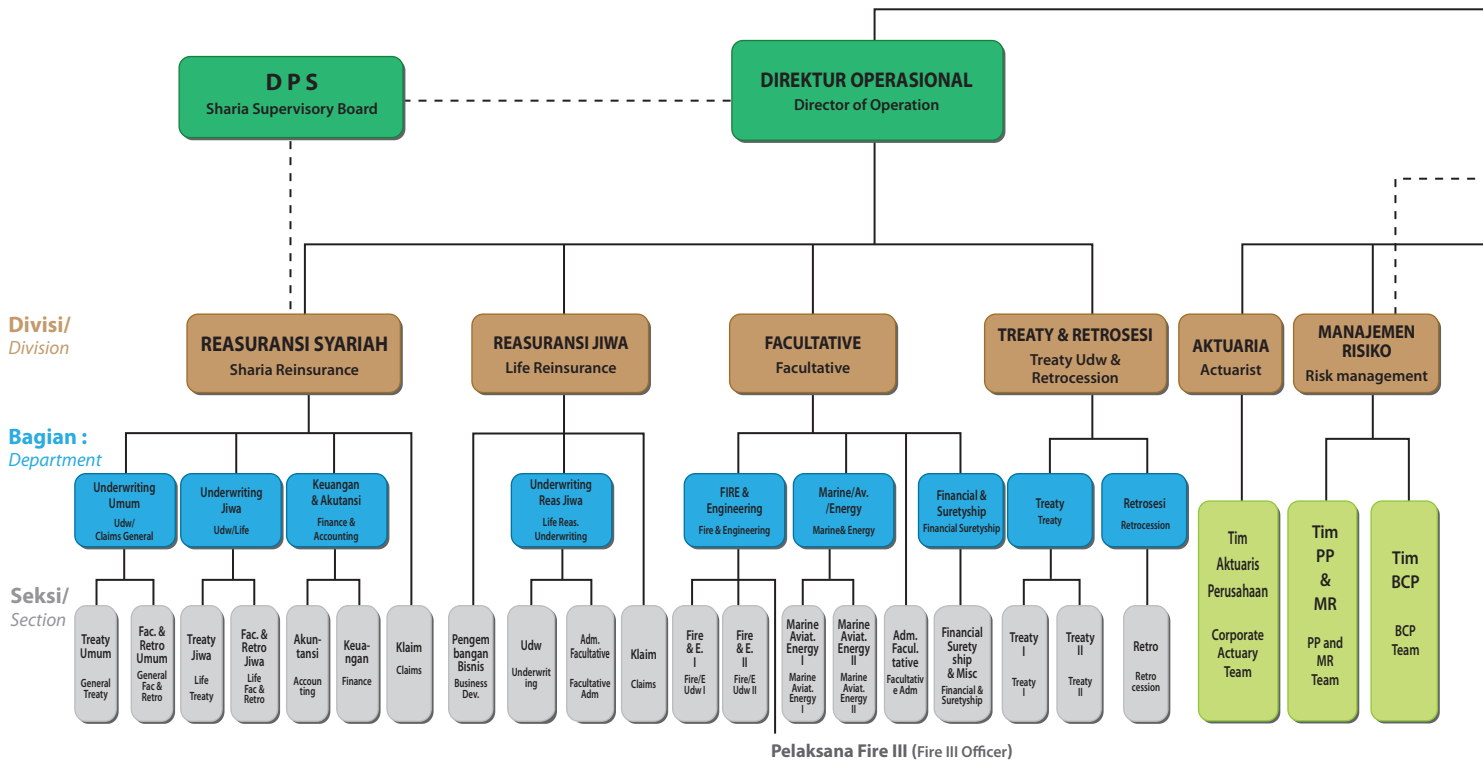
GOALS AND OBJECTIVES

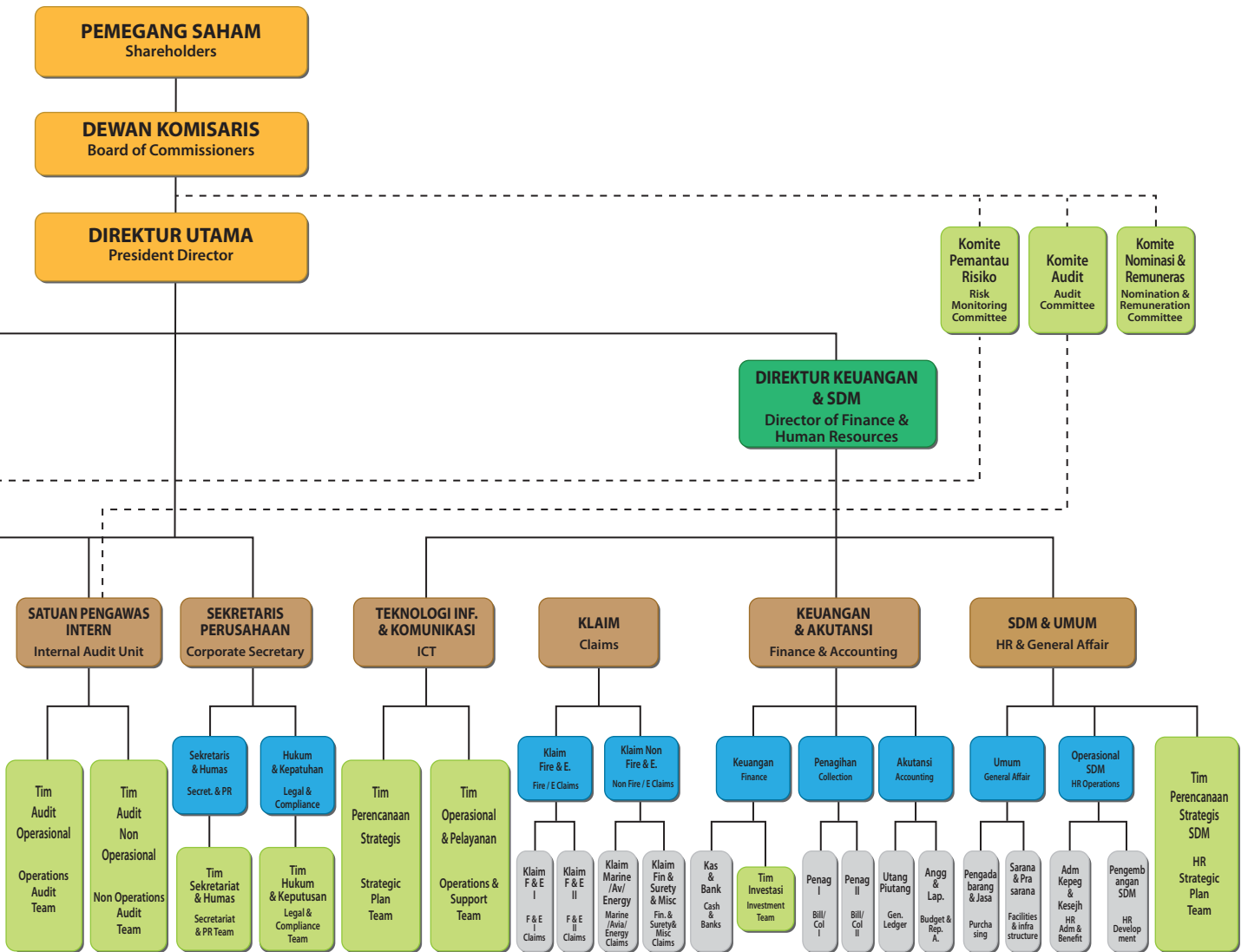
The goals and objectives of the Company are to participate in implementing the government policies and in supporting the government's programs in economy and national development in general and running high quality and competitive reinsurance business in particular, to generate profit and to increase the Company's value by applying limited liability company principles and by providing services in reinsurance to cover risks faced by insurance companies, either on the basis of conventional principles or sharia principles.

To achieve the above goals and objectives, the Company conducts the following businesses:

1. Reinsurance business against risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;
2. Reinsurance for general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers;
3. Retrocedes or reinsures of point 1 above to insurance and / or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers to conduct part of the reinsurance business under sharia principles by establishing a sharia unit.

STRUKTUR ORGANISASI STRUCTURE OF ORGANIZATION





RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Reasuransi Nasional Indonesia atau disingkat NASIONAL RE didirikan berdasarkan akta No. 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta No. 53 tanggal 15 September 1994 di hadapan Achmad Abid, SH, Notaris Pengganti di Jakarta dan akta No. 15 tanggal 7 Oktober 1994 di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 tanggal 11 Oktober 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1994 No. 103 tambahan No. 10862.

Pada awalnya, Perusahaan merupakan Bagian yang di kemudian hari berkembang menjadi Divisi dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO), yakni Divisi Reasuransi Kerugian. Divisi ini berfungsi sebagai unit usaha *Professional Reinsurer*. Dengan demikian, walaupun secara *de jure* Perusahaan didirikan pada tahun 1994, namun secara *de facto* Perusahaan telah memulai usahanya sejak tahun 1971, yaitu sejak PT ASKRINDO mendapat ijin untuk menjalankan usaha Reasuransi Kerugian sebagai bisnis penunjang di samping usaha Asuransi Kredit yang menjadi bisnis utamanya. Perusahaan memperoleh ijin operasi pada tahun 1995 berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/KMK.17/1995 tanggal 9 Januari 1995.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, NASIONAL RE melebarkan sayap usahanya dengan memulai usaha Reasuransi Syariah. Langkah ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perekonomian yang berazaskan Syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, tentunya memerlukan adanya reasuransi yang beroperasi sesuai syariah Islam sehingga dapat diadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

COMPANY'S HISTORY

PT Reasuransi Nasional Indonesia, or abbreviated NASIONAL RE, was established based on the Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 129 dated August 22, 1994 from which was amended with the Notarial Deed of Achmad Abid, SH, substitute notary in Jakarta, No. 53 dated September 15, 1994 and the Notarial Deed of Sutjipto, SH, No. 15 dated October 7, 1994. The Notarial Deeds were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 dated October 11, 1994 and announced in the State Gazette date December 27, 1994 No. 103 Addendum No. 10862.

The history of the Company originated from one of departments, which later became the Division of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), namely General Reinsurance Division. This division served as a Professional reinsurer business unit. Hence, according to the law, the Company was established in 1994, but as a matter of fact, the Company has started its business since 1971, since ASKRINDO was granted the permit to operate general reinsurance business as a supporting business, in addition to their core business of Credit Insurance. the Company was officially established 1995 and received operation permit from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.27/KMK.17/1995 dated January 9, 1995.

On October 28, 2005, NASIONAL RE started Sharia Reinsurance business. This was done to accommodate fast growing of Sharia-based business, including Sharia-based insurance. The growing of sharia-based insurance demands there insurance companies that also based on the principles of Sharia and then a mutual collaboration between both parties can be brought about.

Penambahan bidang usaha Reasuransi Syariah disahkan sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto, SH, di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005.

The adding of Syariah reinsurance business unit is ratified with decision of meeting No. 42 dated August 10, 2005, made before the notary Aulia Taufani, SH, acting in substitute to notary Sutjipto, SH, in Jakarta, approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. C-24079HT.01.04.TH.2005 dated August 31, 2005.

Sejak resmi berdiri, Perusahaan mencatat perkembangan yang cukup pesat dan berhasil membangun kepercayaan publik, sebagaimana yang terlihat dari berbagai penghargaan yang diterimanya. Pada tahun 2006, Perusahaan menerima penghargaan sebagai perusahaan reasuransi terbaik versi majalah Investor, dan pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan sebagai unit reasuransi Syariah terbaik versi majalah Investor.

Since officially established, the Company recorded a rapid growth and managed to build public confidence, as can be seen from the numerous awards received. In 2006, the Company was awarded as the Best Reinsurance Company and in 2008 was awarded as the Best Sharia Reinsurance Unit, both by Investor Magazine.

Perusahaan memasarkan berbagai produk asuransi, antara lain Reasuransi Harta Benda, Kendaraan Bermotor, Rekayasa, Pengangkutan, Rangka Kapal, Kredit, *Surety Bond*, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Aneka dan Reasuransi Jiwa, baik untuk Reasuransi Konvensional maupun Reasuransi Syariah.

The Company provides a wide range of reinsurance products, among others Property, Vehicle, Engineering, Transportation, Marine Hull, Aircraft Frame, Credit, Surety Bond, Credit, Satellite, Energy, Liability, Personal Accident, Arts and Life Reinsurance, both for conventional and Sharia Reinsurance.

JEJAK LANGKAH

1994

NASIONAL RE didirikan di Jakarta sebagai anak perusahaan dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) yang bergerak dalam bidang usaha Reasuransi.

2005

1. Penambahan Modal disetor dari PT Askrindo selaku Pemegang Saham sebesar dari Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp75.000.000.000 (Tujuh puluh Lima Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-24079 HT.01.04 Th. 2005 tanggal 15 Agustus 2007
2. Pada tanggal 28 Oktober 2005 NASIONAL RE memulai usaha Reasuransi Syariah, hal ini dilakukan untuk menampung bisnis reasuransi dengan prinsip syariah, dimana sesuai ketentuan bahwa setiap perusahaan asuransi syariah harus menempatkan reasuransinya pada perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

2007

Penambahan modal disetor dari PT Askrindo selaku pemegang saham sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah), sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 108 tanggal 22 Februari 2007, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: W 7-HT.01.04-4562 tanggal 15 Agustus 2007.

2011

1. Perubahan modal dasar perusahaan dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah)
2. Penambahan modal disetor dari PT Askrindo selaku Pemegang Saham sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) berupa tanah dan gedung kantor Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta Pusat sehingga modal disetor menjadi Rp138.000.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Umaran Mansjur, SH Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Hukum & HAM Nomor: AHU-53290.AH.01.02.
3. Tanggal 01 November 2011 PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating A- (A minus) dari lembaga pemeringkat Pefindo.

MILESTONES

1994

NASIONAL RE is established in Jakarta as a subsidiary of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) engaging in the business of reinsurance.

2005

1. Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, as a Shareholder, amounting to Rp10,000,000,000 (Ten Billion Rupiah) so that the paid-up capital became Rp75,000,000,000 (Seventy Five Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 42 dated August 10, 2005, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-24079 HT.01.04 Th 2005 dated August 15, 2007.
2. On October 28, 2005, NASIONAL RE entered into Sharia Reinsurance business. This was done to accommodate the reinsurance business with Islamic principles, whereas in accordance with the provision that every sharia insurance companies must put their reinsurance in there insurance company with sharia principles.

2007

Additional Paid-up Capital from PT Askrindo as Shareholders, amounted to Rp10,000,000,000 (Ten Billion Rupiah) so that the paid-up capital become Rp85,000,000,000 (Eighty Five Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 108 dated February 22, 2007, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No.W 7-HT.01.04-4562 dated August 15, 2007.

2011

1. Change in the Company's Authorized Capital from Rp100,000,000,000 (one hundred billion) to Rp400,000,000,000 (four hundred Billion).
2. Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, as a Shareholder, amounting to Rp35,000,000,000 (thirty five billion rupiah) in the form of land and office buildings on Jl. Cikini Raya No. 99 Central Jakarta, worth hence the paid-up capital became Rp138,000,000,000 (One Hundred Thirty Eight Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Umaran Mansjur, SH No. 9 dated July 29, 2011, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHU- 53290.AH.01.02.
3. On November 01, 2011, PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained A- (A minus) rating from PEFINDO.

2013

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia meluncurkan layanan terbarunya berupa layanan reasuransi jiwa berbasis web, yaitu www.e-lifere.com pada tanggal 08 Februari 2013.
2. e-lifeRe mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai layanan asuransi jiwa pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang menggunakan layanan web
3. Penambahan modal disetor dari PT Askrindo selaku Pemegang Saham sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Umaran Mansjur, SH Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Hukum & HAM Nomor: AHU-AH.01.10-24996 tanggal 20 Juni 2013.
4. PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating "A" dari lembaga pemeringkat Pefindo.

2014

1. Penambahan Modal Disetor dari sebelumnya total Rp213.000.000.000 (Dua ratus Tiga belas Milyar Rupiah) menjadi Rp363.000.000.000 (Tiga Ratus Enampuluh Tiga Milyar Rupiah).
2. Penambahan Modal Disetor dari sebelumnya total Rp363.000.000.000 (Tiga Ratus Enampuluh Tiga Milyar Rupiah) menjadi Rp463.000.000.000 (Empat Ratus Enampuluh Tiga Milyar Rupiah).
3. Penambahan Modal Dasar dari sebelumnya total Rp400.000.000.000 (Empat Ratus Milyar Rupiah) menjadi Rp1.800.000.000.000 (Satu Trilyun Delapan Ratus Milyar Rupiah).
4. Mendapat predikat **A^(idn)** berdasarkan pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

2015

Penambahan Modal Disetor sebesar Rp75.000.000.000 (Tujuh puluh Lima Milyar Rupiah) dari sebelumnya total Rp463.000.000.000 (Empat Ratus Enampuluh Tiga Milyar Rupiah) menjadi Rp538.000.000.000 (Lima Ratus Tiga puluh Delapan Milyar Rupiah).

Mendapat predikat "**AA-/BB-(int'I)**" berdasarkan pemeringkatan oleh Fitch Ratings

2013

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia launched its newest web-based life reinsurance services, namely www.e-lifere.com on February 08, 2013.
2. E-lifeRe was awarded an award from the Indonesian Record Museum (MURI) as the first life insurance services in Indonesia, even in the world, to use web services.
3. Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, as Shareholder, amounting to Rp75,000,000,000 (Seventy Five Billion Rupiah) so that the paid-up capital became Rp213,000,000,000 (Two Hundred and Thirteen Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Umaran Mansjur, SH, No.9 dated May 03, 2013, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10-24996 dated June 20, 2013.
4. PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained an "A" rating from PEFINDO.

2014

1. Additional paid-up capital from previously Rp213,000,000,000 (Two hundred and thirteen billion rupiah) to Rp363,000,000,000 (Three Hundred Sixty-three billion rupiah).
2. Additional paid-up capital from previously Rp363,000,000,000 (Three Hundred Sixty-three billion rupiah) to Rp463,000,000,000 (Four Hundred Sixty Three Billion Rupiah).
3. Additional authorized capital from previously Rp400,000,000,000 (Four Hundred Billion Rupiah) to Rp1,800,000,000,000 (One Trillion Eight Hundred Billion Rupiah).
4. Obtained the predicate of **A^(idn)** by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

2015

Additional paid-up capital of Rp75,000,000,000 (Seventy Five Billion Rupiah) from previously Rp463,000,000,000 (Four Hundred Sixty Three Billion Rupiah) to Rp538,000,000,000 (Five Hundred Thirty Eight billion Rupiah).

Obtained the predicate of "**AA-/BB-(int'I)**" by Fitch Ratings

KEGIATAN USAHA

Reasuransi Umum Konvensional

Jenis-Jenis produk reasuransi umum konvensional adalah *facultative reinsurance* dan *treaty reinsurance*. Adapun cabang-cabang asuransinya adalah sebagai berikut:

1. Harta Benda
2. Kendaraan Bermotor
3. Pengangkutan
4. Rangka Kapal
5. Rangka Pesawat
6. Satelit
7. Energi
8. Rekayasa
9. Tanggung Gugat
10. Kecelakaan Diri
11. Kredit & Jaminan
12. Aneka

Reasuransi Jiwa Konvensional

NASIONAL RE juga menyediakan kapasitas reasuransi jiwa konvensional kepada perusahaan asuransi jiwa lokal untuk asuransi jiwa, kecelakaan diri dan kesehatan, baik perorangan (*individu*) maupun kelompok (*group*). Pertanggunganaan reasuransi tersebut dapat dilakukan secara berdiri sendiri (*stand alone*) maupun sebagai tambahan (*rider*).

1. Reasuransi Jiwa
 - a. Medical
 - b. Non Medical
 - c. Personal Accident
 - d. Group
 - e. Health
2. Reasuransi Kecelakaan Diri
 - a. Meninggal dunia karena kecelakaan
 - b. Cacat tetap karena kecelakaan
 - c. Biaya perawatan di rumah sakit karena kecelakaan
3. Reasuransi Kesehatan
 - a. Rawat Inap
 - b. Rawat Jalan

Reasuransi Syariah

Dalam Reasuransi Syariah produk jasa yang ditawarkan sama dengan produk jasa Reasuransi Konvensional baik untuk Reasuransi Umum maupun Reasuransi Jiwa. Namun yang membedakan dengan Reasuransi Konvensional adalah adanya *risk sharing* diantara peserta, dan tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, atau dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. NASIONAL RE sebagai perusahaan Reasuransi dalam hal ini hanya sebagai operator atau pengelola dana peserta (*tabarru*) dan tidak ikut menanggung risiko.

BUSINESS ACTIVITY

Conventional General Reinsurance

The types of product of conventional general reinsurance are facultative reinsurance and treaty reinsurance. The insurance branches are as follows:

1. Aneka Properties
2. Motor
3. Marine Cargo
4. Marine Hull
5. Aviation
6. Satellites
7. Energy
8. Engineering
9. Liability
10. Personal Accident
11. Credit & Suretyship
12. Miscellaneous

Conventional Life Reinsurance

NASIONAL RE also provides conventional life reinsurance capacity for local life insurance companies, including life insurance, personal accident and health, both individual and group. The reinsurance coverage is either independently (*stand alone*) or as additional (*rider*).

1. Life Reinsurance
 - a. Medical
 - b. Non Medical
 - c. Personal Accident
 - d. Group
 - e. Health
2. Personal Accident Reinsurance
 - a. Accidental Death
 - b. Accidental permanent disablement
 - c. Accidental Hospital Expenses
3. Health Reinsurance
 - a. Inpatient
 - b. Outpatient

Sharia Reinsurance

In Sharia Reinsurance, the products are the same with Conventional Reinsurance products, both for General Reinsurance and for Life Reinsurance. The difference is in the risk sharing among the participants and there is no transfer of risk from the participants to the insurance company, or from insurance company to reinsurers. NASIONAL RE as the Reinsurance company in this case acts as the operator or manager of participants' fund (*tabarru*) and does not bear the risk.

VISI DAN MISI

VISI

“Menjadi perusahaan reasuransi yang terpercaya, tangguh dan terus tumbuh”.

Penjelasan Visi

Sebagai perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, maka NASIONAL RE harus berusaha untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan bahkan terpercaya bagi para mitra usaha, terlebih dalam situasi dan kondisi global dimana kepercayaan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para mitra usaha, maka perusahaan harus tangguh dalam banyak bidang, khususnya bidang finansial, teknologi informasi maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha serta didukung oleh ketangguhan yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Misi

- Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah.
- Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional.
- Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada *stakeholder* lainnya.

Penjelasan Misi

Dengan menjadi perusahaan yang terpercaya, tangguh dan terus tumbuh, maka perusahaan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi defisit keuangan negara sebagai akibat dari terserapnya premi domestik kepada reasuradur dan retrosesioner di luar negeri.

Dengan menjadi perusahaan yang semakin dipercaya, semakin tangguh dan semakin bertumbuh pesat, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menyerap kapasitas pertanggungansuran dalam negeri, sehingga semakin besar pula premi yang dapat diretensi sendiri oleh reasuradur lokal.

VISION AND MISSION

VISION

“To be the most trusted, strong and growing reinsurance Company”.

Explanation

As a company that manages the financial risks of the business partners, NASIONAL RE should strive to be a company that is trust worthy and reliable even for business partners, especially in the global circumstances in which trust is very hard to find. To obtain a high level of trust of the business partners, the company should be strong in many areas, particularly the areas of finance, information technology and human resources. With the high level of trust from business partners and supported by the resilience of the company, the company has a great opportunity to continue to grow from year to year.

Mission

- To provide services and solutions of general and life reinsurance, both for conventional and sharia products.
- To provide services for the National, Regional and International markets.
- To provide benefits to partners in improving the performance of insurance companies and capacity of national insurance as well as benefits to other stakeholders.

Explanation

By becoming the most trusted, strong and growing Company, NASIONAL RE can help the government reduce the national financial deficits as a result of the absorption of the domestic premium to foreign reinsurer and retrocessionaire.

By becoming more credible, more resilient and more rapidly growing Company, the Company's ability to absorb the capacity of domestic insurance coverage gets greater, as well as greater premium can be retained by local reinsurers.



NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai ditetapkan sebagai pedoman yang memandu sikap dan perilaku seluruh pegawai Perusahaan dalam aktifitas kesehariannya. Nilai-nilai Perusahaan dilengkapi definisi yang jelas serta panduan perilaku yang menjadi pedoman atas tindakan yang boleh (*Do*) dan tidak boleh dilakukan (*Don't*) sehingga seluruh insan dalam Perusahaan memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi sesuatu hal.

Profesionalisme

Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas, mempunyai pandangan yang luas serta mengedepankan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi.

Integritas

Menjunjung tinggi kebenaran, mematuhi ketentuan yang berlaku dan terbuka terhadap kritik yang bersifat membangun.

Teamwork

Bekerja dengan mengutamakan kerjasama tim, mengembangkan sikap saling membantu, dan saling menghargai untuk mencapai kinerja yang efektif.

Service Excellence

Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan layanan dan solusi terbaik demi terciptanya hubungan jangka panjang.

Fairness

Menghormati hak-hak orang lain serta bertindak adil memberi peluang dan kesempatan yang sama.

CORPORATE VALUES

Values set as guidelines drive the attitudes and behavior of all employees of the Company in their day-to-day activities. The Company's values include clear definitions and behavior guidelines that become directive of the Do's and Don't's so that all employees in the Company have the same understanding in dealing with something.

Professionalism

Always improving skills and knowledge in performing duties, having a broad view and promoting the Company's interests above personal interests

Integrity

Up holding truth, in compliance with the current requirements and being open to constructive criticism.

Teamwork

Working under teamwork, developing mutual aid and mutual respect in order to achieve effective performance.

Service Excellence

The ability to understand the needs of customers by giving the best services and solutions for the creation of a long-term relationship.

Fairness

Respecting others' rights and being fair to give equal opportunities.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Hingga 31 Desember 2015, komposisi pemegang saham PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDERS COMPOSITION

As of December 31, 2015, the composition of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follow:

No.	Pemegang Saham/Composition of Shareholders	Prosentase Saham/Share Percentage
1.	PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	99,9998%
2.	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	0,0002%

WILAYAH OPERASI

REGIONAL OPERATIONS



Wilayah kerja NASIONAL RE mencakup seluruh Indonesia, Seluruh kegiatan perusahaan di Jakarta, beralamat di Jl. Cikini Raya No. 99 PO BOX 1618 JKP 10016 Jakarta, Indonesia-10330
 Phone : (62-21) 3140009, 3149373 (Hunting), 80642500
 Fax : (62-21) 3143716, 39049373, 31900430
 E-mail : nasionalre@nasionalre.co.id
 Website : www.nasionalre.id

NASIONAL RE working area covers throughout Indonesia, the entire corporate activities are based in Jakarta, located at: Jl . Cikini Raya No. 99 PO BOX 1618 JKP 10016 Jakarta, Indonesia-10330.
 Phone : (62-21) 3140009, 3149373 (Hunting), 80642500
 Fax : (62-21) 3143716, 39049373, 31900430
 E-mail : nasionalre@nasionalre.co.id
 Website : www.nasionalre.id

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP

Komisaris Utama/President Commissioner

Lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 1960. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 1985, serta Pasca Sarjana (S2) dari Sekolah Tinggi Management PPM, Jakarta tahun 2004. Berkarir di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sejak tahun 1987. Sepanjang karirnya, beliau dipercaya menduduki berbagai jabatan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Bisnis. Dipercaya menduduki sebagai Komisaris Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Juni 2010.

Born in Jakarta on February 26, 1960. He earned a Bachelor Degree from Faculty of Economics, University of Jayabaya, Jakarta in 1985, and a Master Degree from PPM School of Management, Jakarta in 2004. His career began at PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) in 1987. He served many strategic positions, including as Suretyship Division Head, a position which he still holds until today. He serves as President Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia since June 2010.

Sulaeman, SE , MM, AAAIK, AIIS, CRGP

Komisaris/Commissioner

Lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 1962. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1986 serta Pasca Sarjana (S2) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta tahun 2003. Sebagian besar karirnya dibangun di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Berbagai jabatan pernah dipercayakan kepada beliau, hingga menjadi Kepala Divisi Akuntansi yang saat ini masih dijabatnya. Beliau juga tercatat aktif sebagai staf pengajar diklat Internal Audit di PPAK-STAN. Menjabat sebagai Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2010.

Born in Jakarta, on August 17, 1962. He earned his Bachelor degree from University of Krisnadwipayana, Jakarta in 1986, and a Post Graduate degree from School of Management Jakarta in 2003. He mostly spent his career at PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). He served in a number of positions, and now serves as Head of Finance and Investment Division. He was also active as lecturer at Education and Training on Internal Audit at PPAK-STAN. He serves as Commissioner at PT Reasuransi Nasional Indonesia since 2010.



Raymond Buisson, SE, CRGP

Komisaris Independen/Independent Commissioner

Pria, kelahiran Semarang tanggal 1 April 1960. Menempuh pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan, Jurusan Administrasi Keuangan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah tahun 1982, serta memperoleh gelar Strata 1 (S1) Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Mpu Tantular, Jakarta tahun 2000. Pernah bertugas pada bagian akunting dan keuangan di beberapa Perusahaan. Menjabat sebagai Direktur Jakarta Insurance Institute (2002-Juli 2010), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2004-31 Desember 2006), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2007-31 Desember 2010). Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia (Juni 2012-sekarang)

Born in Semarang on April 1, 1960. He earned his education in the Corporate Administration Expert, majoring Financial Administration from University Diponegoro, Semarang, Central Java, in 1982, and Bachelor Degree in Financial Management from Faculty of Economy of University of Mpu Tantular, Jakarta in 2000. He once served in many companies in the accounting and financial division. He was the Director at Jakarta Insurance institute (2002-July 2010), Member of the Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2004-December 31, 2006), Member of Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2007- December 31, 2010). He serves as an Independent Commissioner at PT Reasuransi Nasional Indonesia (June 2012- now).



PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE



M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRMP, CRGP

Direktur Utama/President Director

Lahir di Kalianget, Madura tanggal 22 April 1969. Beliau meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1994 dan meraih gelar Post Graduate Diploma in Insurance dari Glasgow Caledonian University, Scotlandia tahun 1998. Merintis karir di PT Asuransi Binagriya Upakara sebagai pegawai tahun 1995, dipercaya sebagai Kepala Cabang Makassar tahun 1999, Manager R & D tahun 2003, Kacab Syariah tahun 2005 dan sebagai *Caretaker* Kepala Divisi Teknik tahun 2006. Bergabung dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Divisi Reasuransi Syariah (April 2006-Desember 2009). Menjabat sebagai Direktur Operasional PT Reasuransi Nasional Indonesia (Desember 2009-Juli 2010). Dipercaya sebagai Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Agustus 2010.

Born in Kalianget, Madura, on April 22, 1969. He earned a Bachelor degree from University of Hasanuddin in Makassar in 1994 and earned Post Graduate Diploma in Insurance from Glasgow Caledonian University, Scotland in 1998. He built his career at PT Asuransi Binagriya Upakara as employee in 1995, appointed as Head of Makassar Branch Office in 1999, R & D Manager in 2003, Head of Sharia Branch in 2005 and a *Caretaker* for Engineering Division Head in 2006. He was once Head of Sharia Reinsurance Division at PT Reasuransi Nasional Indonesia (April 2006-December 2009). He was appointed as Director of Operation at PT Reasuransi Nasional Indonesia (December 2009 –July 2010). He serves as President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia since August 2010.

Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, AIIS, CRMP, CRGP

Direktur Operasi/Director of Operation

Kelahiran Cirebon, tanggal 20 Agustus 1970. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dari Agribisnis-Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994 dan meraih gelar Magister Management (Marketing) dari Universitas Mercubuana Jakarta tahun 2012. Mengawali karir di Industri Asuransi sebagai Management Trainee di PT Asuransi Ramayana, Tbk tahun 1995, dipercaya sebagai Kepala Divisi *Underwriting/Reasuransi* tahun 2002-Agustus 2010. Bergabung dan menjabat sebagai Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Agustus 2010.

Born in Cirebon, on August 20, 1970. Earning a Bachelor degree in Agribusiness from Bogor Institute of Agriculture in 1994 and a Master in Management (Marketing) from Mercubuana University, Jakarta, in 2012. He started his career in Insurance Industry as a Management Trainee at PT Asuransi Ramayana Tbk. In 1995, He was promoted to be Head of Underwriting/Reinsurance Division in 2002-August 2010. He has been serving as Director of Operations at PT Reasuransi Nasional Indonesia since August 2010.



Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/Director of Finance & Human Resources

Kelahiran Jakarta tanggal 26 Mei 1958. Beliau meraih gelar sarjana (S1) dari Universitas Islam Jakarta tahun 1996 dan gelar (S2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, Jakarta tahun 2001. Karir pertamanya dirintis sebagai Pegawai Pelaksana Bagian Reasuransi Kerugian PT Asuransi Kredit Indonesia tahun (1978-1979), Pelaksana Penagihan (1979-1982) dan sebagai Kepala Seksi Penagihan Reasuransi Kerugian (1982-1994). Bertugas di PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Bagian *Underwriting Treaty* (Januari 1995- April 2000), Diangkat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (Mei 2000-Juli 2004) dan sebagai Kepala Divisi Klaim (Agustus 2004-Agustus 2008). Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia sejak September 2008 sampai sekarang.

Born in Jakarta on May 26, 1958. He earned a Bachelor degree from University of Islam Jakarta in 1996 and Master's degree from School of Economic Studies IPWIJA, Jakarta, in 2001. He built his career at ASKRINDO as General Reinsurance Division officer in (1978-1979), the Collection Officer (1979-1982) and Head of Collection Division of General Reinsurance Division (1982-1994). He was appointed as Treaty Underwriting Department Head at PT Reasuransi Nasional Indonesia (January 1995-April 2000), Finance and Accounting Division Head (May 2000-July 2004) and Claim Division Head (August 2004-August 2008). He serves as Director of Finance and Human Resources since September 2008, until now.



KEPALA DIVISI SENIOR MANAGER



1

2

3

4

5

6



Aviantono Yudihariadi P, S.Kom, AAAIK, CHRP, CRMP



Faried Susanto, SE, AAAIJ, FSAI, AIIS, CRMP



Bagdja Hermawan, SH, MM



Yuse Nuryuliasari, SE, MM, AAIK, AIIS, CSA[®], CFP[®], CRP



Agus Supriadi, SH, MM, AAAIK, QIP, AIIS, CRMO



Sukmo Prayogo, B.BUS, ANZIIF (FELLOW) CIP, AIIS, CRMP



7

8


9


10


11

12

 Sunarso, SE, MM, Ak, CA, AAAIK, CFP®, CSA®, CRMP

 Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, CA, CRMP

 Ari Priasto, SE, IPGDI, CRMP

 Erlan Risdiyanto, SE, ACII, AMII, CRMO

 Cendekiawan, SH, CRMO

 Andrie Prasetyo, SE, CRMP



PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2015, perusahaan mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut:

- 1) Best Reinsurance versi Media Asuransi - 9 Juni 2015.
- 2) Reasuransi Terbaik versi Majalah Investor - 9 Juli 2015.
- 3) The Most Expansive Islamic Reinsurance 2015 versi Karim Consulting - 7 September 2015.
- 4) Best Financial Performance for Reinsurance Company versi Warta Ekonomi - 7 Oktober 2015.

AWARDS

Throughout 2015, the Company received the following awards:

- 1) Best Reinsurance by Media Asuransi - June 9, 2015.
- 2) Best Reinsurance by Majalah Investor - July 9, 2015.
- 3) The Most Expansive Islamic Reinsurance in 2015 by Karim Consulting - September 7, 2015.
- 4) Best Financial Performance for Reinsurance Company by Warta Ekonomi - October 7, 2015.



PERISTIWA PENTING EVENT HIGHLIGHTS



MARET 2015/March 2015

Workshop tentang "Asuransi Kredit & Asuransi Kredit Perdagangan" yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE dengan mengundang mitra usaha, di Hotel Seruni, Cisarua – Bogor, tanggal 5 – 7 Maret 2015.

Workshop on "Credit Insurance & Trade Credit Insurance" organized by NASIONAL RE, inviting business partners, at the Hotel Seruni, Cisarua - Bogor, March 5 - 7, 2015.



MEI 2015/May 2015

In-house Training tentang "Terrorism & Sabotage Insurance" yang diselenggarakan di Jakarta, tanggal 13 Mei 2015.

In-house Training on "Terrorism and Sabotage Insurance" held in Jakarta, on May 13, 2015.



MEI 2015/May 2015

Pelatihan Persiapan Uji Kompetensi Sertifikasi gelar "Certified Risk Management Professional (CRMP)" yang diikuti oleh Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Bagian NASIONAL RE, di Jakarta pada tanggal 20 – 22 Mei 2015.

Training for the Preparation of Certification Competency Test title "Certified Risk Management Professional (CRMP)" attended by the Board of Directors, Heads of Division and Heads of Department of NASIONAL RE, in Jakarta on 20 - May 22, 2015.



MARET 2015/March 2015

Workshop tentang "Kompetensi Inti & Perencanaan Strategis Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)" yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE di Jakarta, tanggal 23 – 24 Maret 2015.

Workshop on "Core Competencies & Strategic Planning based on Criteria for Performance Excellence (KPKU)" organized by NASIONAL RE in Jakarta, March 23-24, 2015.



JUNI 2015/June 2015

Pemberian Zakat Perusahaan melalui Badan Amil & Zakat Nasional (BAZNAS) pada saat acara Buka Puasa Bersama Mitra Usaha di Jakarta, 26 Juni 2015.

Donating Zakat through Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) during the Fast Breaking with Business Partners in Jakarta, June 26, 2015.



AGUSTUS 2015/August 2015

Edhie Mulyono (Direktur Operasi NASIONAL RE, dengan disaksikan oleh Rusdianto, Direktur Keuangan & SDM) menerima cinderamata dari salah satu perwakilan orangtua jompo pada kunjungan perusahaan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Margaguna – Jakarta, tanggal 8 Agustus 2015.

Edhie Mulyono (Director of Operations of NASIONAL RE), witnessed by Rusdianto, Director of Finance & HR, received souvenir from one of the representatives of parents nursing during the Company visits, as part of Corporate Social Responsibility (CSR), to Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 3 Margaguna - Jakarta, dated August 8, 2015.



AGUSTUS 2015/August 2015

Foto bersama Direksi dan pejabat NASIONAL RE dengan Pengurus dan Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Frobel Montessori – Jakarta dalam rangka kunjungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tanggal 11 Agustus 2015.

The Board of Directors and officials of NASIONAL RE took picture together with the Executive Board and School Teachers of the SLB Frobel Montessori – Jakarta, as part of Corporate Social Responsibility (CSR) on August 11, 2015.



M. Shaifie Zein, Direktur Utama NASIONAL RE, sedang memberikan sambutan pada saat perayaan HUT NASIONAL RE ke-21. Sebelum perayaan HUT, seluruh jajaran manajemen dan pegawai melakukan *fun walk*.

M. Shaifie Zein, the President Director of NASIONAL RE, was giving a speech during the 21st anniversary celebration of NASIONAL RE. Prior to the anniversary celebration, the management and employees have a fun walk.



SEPTEMBER 2015/September 2015

Direktur Utama NASIONAL RE menyerahkan seluruh rangkaian acara Outbond Pegawai ala Semi Militer kepada Komandan Yonif 315 Garuda Hitam 065 - Bogor dalam rangka meningkatkan semangat dan disiplin kerja seluruh jajaran NASIONAL RE. Acara berlangsung di Lido, Sukabumi-Bogor pada tanggal 18 – 20 September 2015.

The President Director of NASIONAL RE handed over the whole program of semi military-style Employee Outbound to the Commander of Battalion 315 Garuda Hitam 065 - Bogor in order to improve morale and discipline throughout the Company. The event took place at the Lido, Sukabumi and Bogor on September 18 - 20, 2015.



OKTOBER 2015/October 2015

Foto Bersama NASIONAL RE dengan Mitra Usaha dalam rangka Outing yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE ke Bali, tanggal 8 – 10 Oktober 2015.

NASIONAL RE taking picture together with Business Partners during the Outing organized by NASIONAL RE in Bali, on October 8 – 10, 2015.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

TINJAUAN BISNIS BUSINESS REVIEW



Perekonomian Global Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 terus mengalami pemulihan meski masih berjalan lebih lambat, didorong oleh revisi proyeksi perekonomian *emerging markets*, khususnya negara pengekspor komoditas. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya pelemahan harga komoditas dunia. Berdasarkan data dari *World Economic Outlook* yang dipublikasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global 2015 diperkirakan tumbuh lebih lambat, yakni 3,1% yoy (*year on year*).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global didukung oleh perbaikan ekonomi AS yang semakin *solid*, sehingga *Federal Reserve AS* (*the Fed*) memutuskan kenaikan suku bunga acuan pada Desember 2015, sejalan dengan revisi proyeksi pertumbuhan menjadi 2,6% yoy (*year on year*).

Pemulihan perekonomian zona Eropa masih terbatas tercermin dari perlambatan pertumbuhan ekonomi 2015 dengan tingkat inflasi per November 2015, sekitar 0,1% yoy. Pertumbuhan ekonomi Jepang triwulan III-2015 tumbuh 1% yoy (*year on year*), lebih tinggi dari ekspektasi pasar sehingga meredakan kekhawatiran terhadap resesi ekonomi Jepang. Perekonomian Tiongkok juga terus melambat sebagaimana tercermin dari lambatnya kinerja ekspor-impor serta menurunnya *industrial profit* sejalan dengan kinerja manufaktur yang terkontraksi.

Global Economy 2015

Global economic growth in 2015 continued to recover, though still slower, driven by the revised economic projections in emerging markets, especially in commodity-exporting countries. This is in line with the continuing weaken world's commodity prices. Based on data from the *World Economic Outlook* published by the *International Monetary Fund* (IMF), global economic growth in 2015 is expected to grow more slowly, ie 3.1% yoy (*year on year*).

Meanwhile, global economic growth was supported by a solid US economic recovery so that the US Federal Reserve (Fed) decided to rise its benchmark interest in December 2015, in line with the revision of its growth projection, to 2.6% yoy (*year on year*).

Euro zone economic experienced a limited recovery as reflected in the slowdown in economic growth in 2015, while its inflation rate per November 2015, was around 0.1% yoy. Japan's economic growth in the third quarter of 2015 grew 1% yoy, higher than market expectations thus alleviate concerns regarding Japan's economic recession. China's economy also continued to slow down, as reflected in the slow performance of export-import and declining industrial profits in line with the declining performance of manufacturing.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015

Bank Indonesia ("BI") melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,73%, menurun dibanding 5,02% pada tahun 2014. Sementara itu tingkat inflasi pada tahun 2015 tercatat sebesar 3,3%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 8,4%. Secara umum, walaupun perekonomian Indonesia pada tahun 2015 mengalami tantangan yang cukup besar, seiring dengan masih lemahnya perekonomian dunia dan penurunan harga-harga komoditas pertambangan dan migas, namun berkat fundamental yang *solid* maka dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia tetap aman dan baik.

Ada beberapa faktor yang dapat menopang berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain adalah pertumbuhan jumlah penduduk generasi *millennial* (usia produktif) sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan produksi. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi dengan visi pertumbuhan jangka panjang, serta paket-paket pembangunan infrastruktur yang masif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan belanja pemerintah ke sektor yang lebih produktif dan menopang pertumbuhan ekonomi, seiring dengan mulai stabilnya kondisi politik di Indonesia.

Namun di sisi lain, BI juga menyebutkan terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan ke depannya karena berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Harga komoditas masih akan menurun,
2. Pelemahan ekonomi Tiongkok masih akan terus berlangsung,
3. Ketidakpastian kebijakan dari *Federal Reserve AS (the Fed)* yang dapat mempengaruhi spekulasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS,
4. Tingginya *foreign capital outflow*.

Tinjauan Industri

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan bahwa pertumbuhan industri asuransi di Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan akan meningkat, seiring dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan industri asuransi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, terutama karena sebagian besar produk asuransi memberikan jaminan terhadap risiko pembangunan ekonomi. Bahkan, umumnya kredit untuk proyek pembangunan baru dapat dicairkan bila ada jaminan dari perusahaan asuransi.

Indonesia's Economic Growth in 2015

Bank Indonesia ("BI") reported that Indonesia's economic growth in 2015 was recorded at 4.73%, down compared to 5.02% in 2014. Meanwhile, the inflation rate in 2015 was 3.3%, much lower than in 2014 amounted to 8.4%. In general, although the Indonesian economy in 2015 was under a tough challenges, due to the weakening global economy and the declining prices of mining, oil and gas commodity, but thanks to its solid fundamentals, it is safe to say that the Indonesian economy remains in a relatively safe and sound condition.

There were several factors that can help sustaining economic growth in Indonesia, among others, is the growth of millennial generation population (productive age) so as to increase consumption and production. In addition, the government has also issued a package of economic policy with a vision of long-term growth, as well as packets of massive infrastructure development. It is expected to boost government spending to more productive sectors and to sustain economic growth, along with the beginning of political stability in Indonesia.

On the other hand, Bank Indonesia also said that there were four factors that need to be addressed in the future due to its potential in causing disruption to the economy of Indonesia, namely:

1. The still declining commodity prices,
2. The ongoing weakening of the Chinese economy,
3. Uncertainty of US Federal Reserve (the Fed) policy that may affect the speculation of the Rupiah against the US Dollar,
4. High foreign capital outflow.

Industrial Review

General Insurance Association of Indonesia (AAUI) reported that the growth of the insurance industry in Indonesia in 2015 is expected to increase, along with the high rate of economic growth. This is because the growth of the insurance industry is strongly influenced by economic growth, especially since most insurance products provide a guarantee against the risk of economic development. In fact, most credit for new development projects can be disbursed if there is a guarantee from insurance company.

Dengan demikian, meningkatnya pembangunan infrastruktur, sejalan dengan kebijakan Pemerintah, akan meningkatkan pula permintaan untuk jaminan asuransi, dan berarti pula akan ada peningkatan premi.

Pemerintah pada tahun 2015 menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, sehingga industri asuransi juga diasumsikan akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi juga.

Sementara itu, dari sisi Reasuransi, terlihat bahwa pelaku Industri Asuransi Umum telah mematuhi himbauan OJK untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri, sehingga terlihat adanya pertumbuhannya sangat signifikan. Pada tahun 2015, Premi Bruto Reasuransi Umum tumbuh sebesar 101,8%, dari Rp3,6 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp7,2 triliun di tahun 2015. Dari sisi klaim bruto terjadi peningkatan sebesar 54,1%, dari Rp1,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp2,8 triliun di tahun 2015. Hasil underwriting juga mencatat peningkatan signifikan, dari Rp217 miliar di tahun 2014 menjadi Rp585 miliar di tahun 2015.

Dalam hal klaim pertumbuhan Klaim Bruto Reasuransi, yang hanya sebesar 54%, hal ini wajar sebagaimana natur bisnisnya, dimana klaim reasuransi selalu dibukukan belakangan dibanding Ceding Company yang menempatkan.

Tinjauan Kinerja Per Segmen Bisnis

Perusahaan didirikan untuk membantu kelancaran dan pengamanan perkreditan bank-bank, terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap risiko atas kredit lainnya di luar perbankan. Sejalan dengan perkembangan usaha dan dinamika pasar, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan juga mengalami penyesuaian dan memasuki bidang usaha asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan.

Thus, the increase in infrastructure development, in line with Government policy, will also increase the demand for insurance coverage, and that also means increase in premiums revenue.

In 2015, the Government has set higher target of economic growth compare to last year, so that can be assumed the insurance industry will also experience higher growth as well.

Meanwhile, from the point of view of reinsurance industry, it appears that the players in General Insurance Industry have complied with the FSA's call to increase domestic capacity, leading to a significant growth. In 2015, General Reinsurance Gross premiums grew by 101.8%, from Rp3.6 trillion in 2014 to Rp7.2 trillion in 2015. Gross Claims increased by 54.1%, from Rp1.8 trillion in 2014 to Rp2.8 trillion in 2015. The underwriting results also noted a significant increase, from Rp217 billion in 2014 to Rp585 billion in 2015.

It was understandable the Reinsurance Gross Claims growth only 54% since it was the nature of reinsurance business, where reinsurance claims are always recorded later than Ceding Company.

Business Segment Performance Review

The Company was established to help with the smooth and safe flows of loan from banks to medium and small scale industries and to insure risk of loans of other non-bank financial institution. In line with the development of business and market dynamic, the Company's goal and objective are changed accordingly and now is also engaging in the business of general insurance, including sharia based insurance and optimization of the Company's resources to generate profit in order to increase the value of the Company.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).
2. Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya.
3. Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun luar-negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya.
4. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, bisnis NASIONAL RE di luar segmen syariah terbagi menjadi 2 (dua) segmen bisnis berikut:

1. Reasuransi Umum.
2. Reasuransi Jiwa.

Hingga saat ini segmen bisnis Reasuransi Umum memberikan kontribusi yang terbesar bagi pendapatan premi Perusahaan secara keseluruhan. Pada tahun 2015, jumlah pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum tercatat sejumlah Rp3.155.616 juta, meningkat signifikan 64,69% dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp2,09 triliun. Pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum menyumbang 91,4% dari total pendapatan premi bruto untuk bisnis konvensional. Sementara pada tahun lalu, kontribusi pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum adalah sebesar 87,9%.

To achieve the objectives above, the Company carries out the following activities:

1. Provides insurance against risks of default on loans or financing, included those under Sharia principles, of debtors, mainly of small and micro entrepreneurs as well as cooperatives.
2. Provides direct insurance on various risks, to domestic as well as overseas parties, either Individually or in cooperation with other insurance companies.
3. Provides indirect insurance on various risks reinsured by other domestic as well as overseas insurance companies.
4. Engages in other business activities normally earned out by insurance companies, in conformity with the prevailing legal and regulatory requirements.

Broadly speaking, the Business of NASIONAL RE, separated from sharia segment, is divided into two (2) business segment as follows:

1. General Reinsurance.
2. Life Reinsurance.

Until now General Reinsurance business segment provides the largest contribution to the Company's overall premium income. In 2015, the gross premium income of General Reinsurance segment recorded at Rp3,155,616 million, a significant increase of 64.69% compared to last year, which stood at Rp2.09 trillion. Gross premium income of General Reinsurance segment accounted for 91.4% of total gross premium income for the conventional business. While last year, the gross premium revenue of General Reinsurance segment amounted to 87.9%.

Jumlah pendapatan premi segmen bruto Reasuransi Jiwa tercatat sejumlah Rp296.140 juta atau meningkat 17,2% dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp252.737 juta. Pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Jiwa menyumbang 8,6% dari total pendapatan premi bruto untuk bisnis konvensional. Sementara pada tahun lalu, kontribusi pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Jiwa adalah sebesar 12,1%.

Gross premium income for Life Reinsurance segment recorded at Rp296.140 million, an increase of 17.2% compared to last year, which was recorded at Rp252,737 million. Gross premium income Life Reinsurance segment accounted for 8.6% of total gross premium income for the conventional business. While in the past year, the gross premium revenue General Reinsurance segment amounted to 12.1%.

Bila diurai lebih lanjut pendapatan premi bruto untuk segmen Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa dapat dilihat pada table berikut:

Broken down further, the gross premium income for the segment of General Reinsurance and Life Reinsurance is presented in the following table:

(dalam rupiah/in rupiah)

Class of Business (COB)	Realisasi/ Realization 2015 (1)	Target 2015 (2)	Realisasi / Realization 2014 (3)	% Pertumbuhan/ Growth (1:3)	% Pencapaian/ Growth (1:2)
Harta Benda /Property	1.677.279.717.872	891.827.000.000	854.206.164.382	96,4	188,0
Kendaraan Bermotor/Motor	105.255.161.093	123.265.000.000	91.177.887.638	15,4	85,4
Pengangkutan/Marine Cargo	315.909.956.519	143.418.000.000	77.216.331.198	309,1	220,3
Rangka Kapal/ Marine Hull	137.059.783.889	183.935.000.000	126.919.067.003	8,0	74,5
Rangka Pesawat/Aviation	16.059.783.890	5.280.000.000	1.176.157.739	1.265,6	304,2
Satelit/Satellite	16.552.434.234	-	-	-	-
Energi/Energy	44.949.535.052	47.053.000.000	44.346.919.292	1,4	95,5
Rekayasa/Engineering	116.335.169.687	153.098.000.000	80.926.119.262	43,8	76,0
Tanggung Gugat/Liability	111.237.514.777	46.105.000.000	27.328.201.833	307,0	241,3
Kecelakaan Diri dan Kesehatan/ Personal Accident and Health	27.505.692.312	39.493.000.000	38.348.752.435	(28,3)	69,6
Kredit dan Surety Bond/Credit and Surety Bond	429.452.969.429	615.500.000.000	314.037.562.321	36,8	69,8
Aneka/Miscellaneous	173.811.356.306	343.026.000.000	187.511.010.952	(7,31)	50,7
Reasuransi Jiwa/Life Reinsurance	296.140.253.544	823.750.000.000	252.737.240.255	17,2	36,0
Total	3.451.755.982.573	3.415.750.000.000	2.095.931.414.310	64,7	101,1

Dari table di atas terlihat bahwa pendapatan premi bruto dari Rangka Pesawat meningkat paling pesat, yakni 1.265,6%.

The above table shows that the gross premium income of the Aviation increased significantly, namely 1,265.6%.

Bisnis Reasuransi Jiwa masih jauh dari target yang ditetapkan namun demikian hasil underwritingnya sudah menunjukkan hasil yang positif.

Life Reinsurance business was far from target, but its underwriting results has already showed a positive result.

Berdasarkan komposisinya, segmen harta benda memberi kontribusi tertinggi, yakni sebesar 48,6% dari total pendapatan premi. Pada tahun 2015, pendapatan segmen harta benda tercatat sebesar Rp1.677.280 juta, meningkat 96,4% jika dibandingkan dengan pendapatan segmen harta benda tahun sebelumnya, yakni Rp854.206 juta. Selanjutnya diikuti oleh pendapatan segmen Kredit dan *Surety Bond*, pengangkutan dan reasuransi jiwa.

Based on the composition, Properties segment contributed the highest, amounting to 48,6% % of the total premium income. In 2015, the Properties segment recorded revenues of Rp1.677.280 million, an increase of 96,4% compared with the previous year, ie Rp854.206 million. Next is the income of the Credit and Surety Bond segment, marine cargo and life insurance.

Aspek Pemasaran

Sebagai perusahaan reasuransi, NASIONAL RE tidak membuat produk-produk baru yang bisa langsung diterima oleh konsumen atau dalam hal ini adalah Tertanggung. Namun demikian, NASIONAL RE dapat berkontribusi kepada perusahaan-perusahaan asuransi mitranya dengan cara menawarkan skema produk yang sudah ada untuk dikombinasikan dengan produk lainnya sehingga menjadi suatu produk gabungan atau suatu paket. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip reasuransi, yaitu "*follow the fortune*", dimana perusahaan reasuransi hanya mengikuti produk-produk yang dijual oleh perusahaan asuransi. Pada prinsipnya perusahaan reasuransi memberi dukungan kapasitas untuk akseptasi produk-produk yang dipasarkan perusahaan asuransi. Sementara itu, sasaran pemasaran NASIONAL RE adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, baik perusahaan lokal dengan struktur permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), gabungan antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing (*joint venture*) dan saat ini sedang dijajaki untuk melakukan pemasaran kepada perusahaan asuransi mancanegara.

Karena NASIONAL RE tidak bisa menjual produknya secara langsung kepada Tertanggung maka NASIONAL RE melakukan strategi pemasarannya dengan cara:

1. Memberikan konsultasi teknis asuransi/reasuransi,
2. Menyelenggarakan *gathering* dengan para mitra usaha,
3. Memberikan tutorial,
4. Menyelenggarakan seminar atau *workshop*, dan
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan formal dan non-formal lainnya yang bersifat menjalin hubungan yang sudah berjalan, baik hubungan bisnis maupun hubungan non-bisnis.

Marketing Aspects

As a reinsurance company, NASIONAL RE does not create new products to be used directly by consumer, or in this case is the insured. However, NASIONAL RE can contribute to its partner, insurance companies, by offering schemes existing products to be combined with other products so that it becomes a composite product or a package. This is in line with one of the principles of reinsurance, which is "*follow the fortune*". Reinsurance company just follows the products sold by insurance companies. In principle, the reinsurance company provide capacity support for the acceptances of products marketed by the insurance company. NASIONAL RE's target market is the insurance companies in Indonesia, Domestic Direct Investment Companies (PMDN), or joint venture with foreign companies and currently being explored is targeting our marketing efforts to foreign insurance companies.

Since NASIONAL RE can not sell its products directly to the insured, then the Company executes its marketing strategy by:

1. Provide technical consultancy on insurance/reinsurance,
2. Conduct gathering event with business partners,
3. Provide tutorials,
4. Organize seminars or workshops and
5. Carry out other formal and informal activities to maintain relationships, both business and non-business.

TINJAUAN KEUANGAN

PT Reasuransi Nasional Indonesia menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan di Indonesia, kecuali dinyatakan lain. Seluruh materi uraian ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 001/I/SMR/LAI-NASRE/2015 dengan pendapat bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Tahun 2015, PT Reasuransi Nasional Indonesia telah berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang mengesankan. Sebagaimana yang terlihat pada pertumbuhan total *asset* perusahaan yang meningkat signifikan sebesar 40,5% dari Rp2.930.469 juta pada tahun 2014 menjadi Rp4.116.426 juta pada tahun 2015. Laba sebelum pajak juga meningkat sebesar 95,7% dari Rp150.846 juta pada tahun 2014 menjadi Rp295.379 juta pada tahun 2015.

Analisis Laba Rugi

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, Perusahaan mencatat perolehan laba setelah pajak dan zakat sebesar Rp251.073 juta atau mengalami peningkatan sebesar 90,0% jika dibandingkan perolehan tahun sebelumnya, yakni Rp132.157 juta. Peningkatan laba tersebut terutama berasal dari pertumbuhan rata-rata pendapatan yang berasal dari *underwriting* dan investasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan beban.

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha sebelum pajak perusahaan sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp295.190 juta atau mengalami peningkatan sebesar 95,7% jika dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan usaha tersebut adalah sebesar 120,4% dari yang ditargetkan.

FINANCIAL REVIEW

PT Reasuransi Nasional Indonesia presents an analysis and discussion of the financial performance, in accordance with the rules set out in the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) Indonesia and Accounting and Reporting Guidelines in Indonesia, unless otherwise stated. This review is based on the Consolidated Audited Financial Statements of the Company which have been audited by Public Accounting Firm Soejatna, Mulyana & Partners (SMR), in accordance with the Independent Auditor's Report No. 001/I/SMR/LAINASRE/2015, with the opinion that the Company's consolidated financial statements are presented fairly, in all material respects.

In 2015, PT Reasuransi Nasional Indonesia successfully recorded an impressive growth performance, as evidenced in the growth of total assets of the company that significantly increase by 40,5% from Rp2,930,469 million in 2015 to Rp4,116,426 million in 2015. Profit before tax increased by 95,7% from 150,846 million in 2014 to Rp1295,379 million in 2015.

Balance Analysis

For the fiscal year ended on December 31, 2015, the Company recorded an after-tax profit and zakat amounting to Rp251.073 million or an increase of 90.0% when compared to the previous year's achievement of Rp132,157 million. The increase in profit mainly came from the growth of average revenue which was higher than the growth of expenses.

Operating Revenues

The Company's revenue, as of the end of 2015 amounted to Rp295.190 million or an increase of 95,7% when compared to the previous year's revenue. The realized operating revenues amounted to 9120.4% of the target.

Tabel Pendapatan Usaha/Operating Revenues Table

dalam jutaan rupiah/in million rupiahs

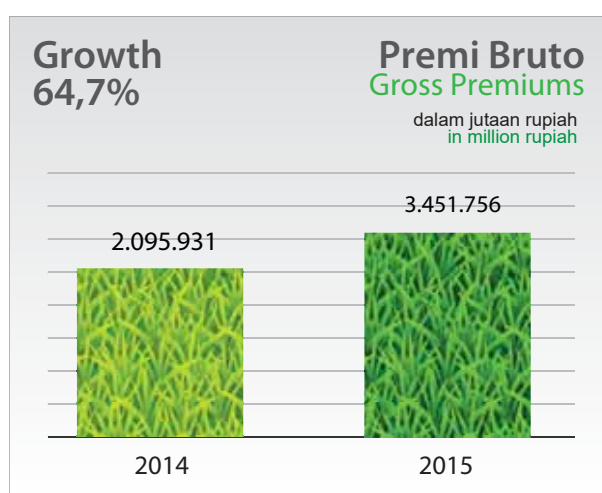
No	Keterangan/Description	Realisasi/Realization	Realisasi/Realization	% Pertumbuhan/Growth
		2014	2014	(2:1)
		(1)	(2)	(2:1)
1.	Premi Bruto/Gross Premiums	2.095.931	3.451.756	64,7
2.	Premi Retrosesi/Retrocession Premiums	242.487	1.123.157	400,3
3.	Penurunan (kenaikan) Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan /Increase (Decrease) in Unearned Premiums	(380.568)	(62.640)	83,5
4.	Jumlah Pendapatan Premi/Total Premiums Income	1.472.876	2.175.960	47,7
5.	Beban Underwriting/Underwriting Expenses	1.348.306	1.989.451	47,6
6.	Hasil Underwriting/Underwriting Result	124.570	186.508	49,7
7.	Pendapatan Ujrah/Ujrah Income	21.644	24.155	11,6
8.	Alokasi Surplus Dana Tabarru/Tabarru Fund Surplus Allocation	1.171	1.694	44,7
9.	Hasil Investasi/ Investment Income	88.022	185.420	110,7
10.	Penghasilan (beban) lain/Other Income (Expense)	4.130	13.811	234,4
11.	Jumlah Pendapatan Usaha sebelum pajak/Total Income before tax	150.846	295.190	95,7

Premi Bruto

Perolehan premi bruto tahun 2015 sebesar Rp3.451.756 juta, naik sebesar 64,7% dari perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp2.095.931 juta. Peningkatan perolehan premi bruto tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi perusahaan dan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP 2015 sehingga dapat meningkatkan volume akseptasi bisnis dan disertai juga dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Realisasi pendapatan premi bruto tersebut adalah sebesar 101,1% dari yang ditargetkan.

Gross Premiums

Gross premium income in 2015 amounted to Rp3,451,756 million, or increased by 64.7% from the previous year's achievement of Rp2,095,931 million. The increase in gross premium income was due to the Company's strategy and the work program set forth in RKAP 2015 so as to increase the volume of business acceptance and lead to a significant economic growth. Realized gross premium income amounted to 101.1% of the target.



Premi Retrosesi

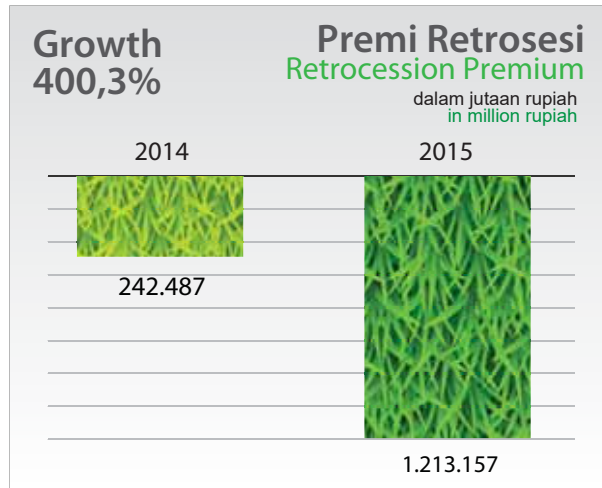
Premi retrosesi atau premi yang kembali direasuransikan perusahaan reasuransi mengalami peningkatan signifikan sebesar 400,3% dari semula sebesar Rp242.487 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.213.157 juta pada tahun 2015. Hal

Premiums Retrocession

Retrocession premiums, or premiums re-insured by reinsurance companies, increased by 400.3% from Rp242,487 million in 2014 to Rp1,213,157 million in 2015. This was due to the need of having an adequate back up of retrocession on premiums received by the

tersebut disebabkan karena diperlukan *back up* retroseksi yang mencukupi atas premi-premi yang masuk yang jumlahnya cukup signifikan. Realisasi premi retroseksi tersebut adalah sebesar 362,3% dari yang ditargetkan.

Company, and the amount of which was quite significant. The realization of the retrocession premiums amounted to 362.3% of the target.

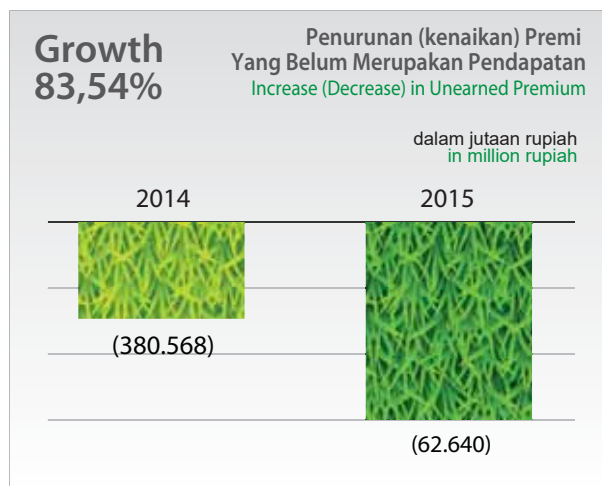


Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan

Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan mengalami penurunan signifikan sebesar 83,54% dari semula sebesar (Rp380.568) juta pada tahun 2014 menjadi sebesar (Rp62.640) juta pada akhir tahun 2015. Peningkatan tersebut merupakan konsekuensi dari peningkatan pendapatan premi yang cukup signifikan yang diperoleh perusahaan. Realisasi penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan tersebut adalah sebesar 89,5% dari yang ditargetkan.

Increase (Decrease) In Unearned Premiums

Increase (decrease) in unearned premiums is part of the premium that is not recognized as income, since the coverage is unexpired as of the end of the accounting period. Unearned premiums decreased significantly by 83,54% from (Rp380,568) million in 2014 to (Rp62,640) million by the end of 2015. The decrease in unearned premiums was a consequence of a significant increase in premium income, earned the company. The realization of the decrease in unearned premiums amounted to 89,5% of the target.

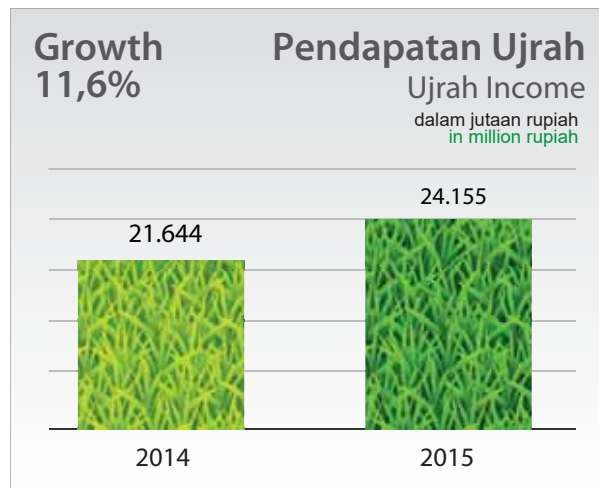


Pendapatan Ujrah

Pendapatan Ujrah dari Reasuransi Syariah yang diperoleh selama tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,6%, dari Rp21.644 juta menjadi Rp24.155 juta. Realisasi pendapatan Ujrah tersebut adalah sebesar 83,1% dari yang ditargetkan.

Ujrah Income

Ujrah Income of Sharia Reinsurance acquired in 2015 increased by 11.6%, from Rp21,644 million in 2014 to Rp24.155 million. The realization of Ujrah Revenue is 83.1% of target.

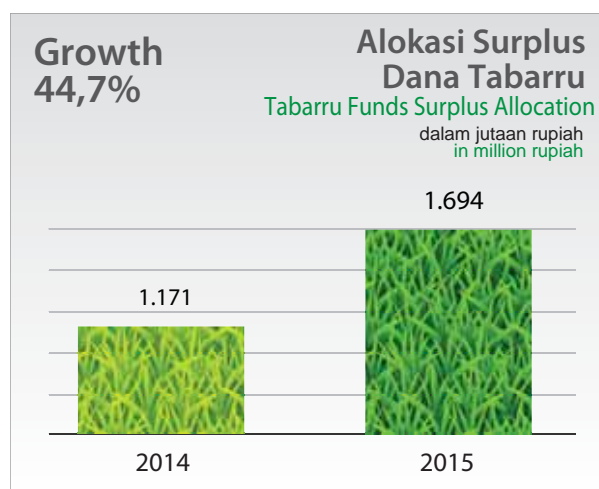


Alokasi Surplus Dana Tabarru

Alokasi surplus dana Tabarru tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.694 juta, naik 44,7% dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.171 juta. Kenaikan ini terjadi karena hasil underwriting yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Realisasi tersebut adalah sebesar 22,7% dari yang ditargetkan.

Tabarru Funds Surplus Allocation

Tabarru Funds Surplus Allocation in 2015 was Rp1,694 million, grew 44.7% when compared to previous year of Rp1,171 million, due to the increase in underwriting results compared to that of the last year. The realization was 22, 7% of target.

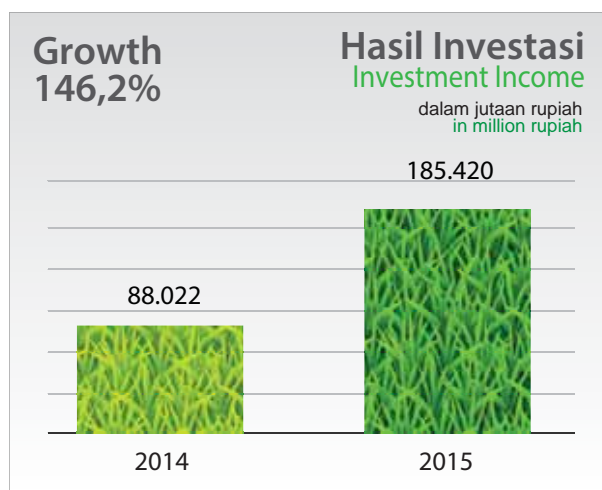


Hasil Investasi

Hasil investasi pada tahun 2015 meningkat 110,7%, dari Rp88.022 juta menjadi Rp185.420 juta. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah investasi yang dimiliki oleh perusahaan selama tahun 2015. Realisasi tersebut adalah sebesar 146,2% dari yang ditargetkan.

Investment Income

Investment Income or Return of investments in 2015 increased by 110.7%, from Rp88,022 million to Rp185,420 million. This increase occurred due to an increase in the amount of investments owned by the Company in 2015. The realization is 146.2% of the target.

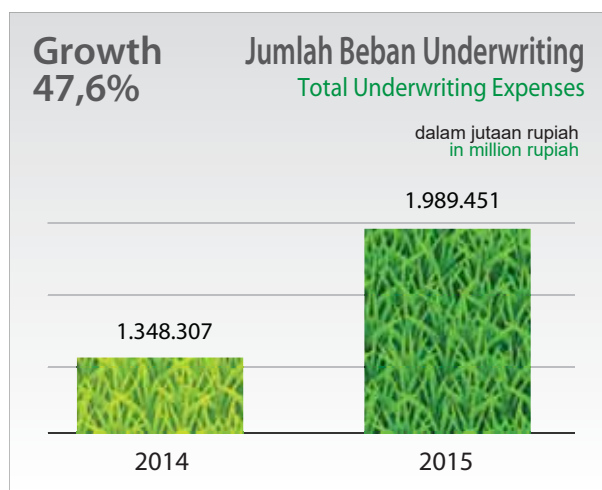


Beban Underwriting

Beban underwriting pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 47,6% dari Rp1.348.307 juta pada tahun 2014 menjadi Rp1.989.451 juta pada tahun 2015. Peningkatan beban hasil underwriting tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban komisi neto sebesar 27,0%, dari Rp544.443 juta menjadi Rp691.396 juta. Beban klaim meningkat sebesar 61,5% dari Rp800.142 juta menjadi Rp1.292.430 juta. Beban Underwriting lain juga meningkat, yakni sebesar 151,2% dari Rp3.721 juta menjadi Rp5.625 juta.

Underwriting Expenses

Underwriting expenses in 2015 increased by 47,6% from Rp1,348,307 million in 2014 to Rp1,989,451 million in 2015. The increase was due to the increase in net commission expense amounted to 27.0%, from Rp544,443 million to Rp691,396 million. Claims expenses increased by 61,5% from Rp800,142 million to Rp1,292,430 million. Other Underwriting Expenses also increased by 151,2% from Rp3,721 million to Rp5,625 million.

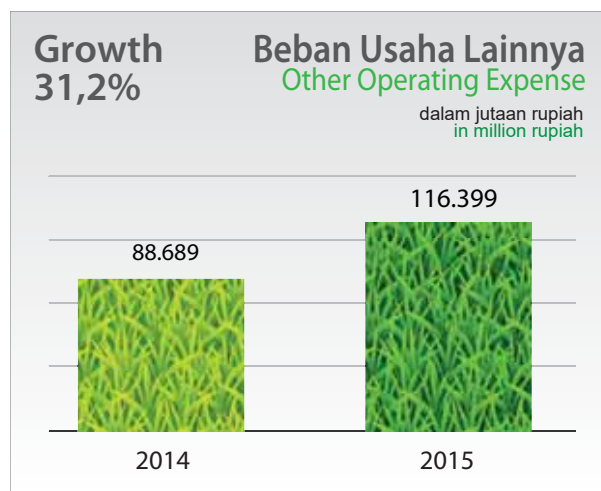


Beban Usaha

Beban usaha antara lain terdiri dari beban umum, beban administrasi dan beban pemasaran. Pada tahun 2015, beban usaha tercatat sebesar Rp116.399 juta, meningkat 31,2% dibandingkan tahun 2014, yakni Rp88.689 juta. Peningkatan beban usaha tersebut terutama dikarenakan peningkatan beban umum, dari Rp75.095 juta menjadi Rp99.646 juta, atau meningkat 32,7%. Beban Administrasi mengalami kenaikan sebesar 28,1%, dari Rp7.653 juta menjadi Rp9.804 juta. Beban Pemasaran meningkat 17,0% dari Rp5.942 juta menjadi Rp6.949 juta.

Operating Expenses

Operating expenses include general expenses, administration expenses and marketing expenses. In 2015, other operating expenses amounted to Rp116.399 million, an increase of 31.2% compared to that of 2014 of Rp88,689 million. The increase in operating expenses was primarily due to an increase in general expenses, from Rp75,095 million to Rp99.646 million, an increase of 32.7%. Administration Expenses increased by 28.1%, from Rp7,653 million to Rp9.804 million. Marketing Expenses increased by 17.0% from Rp5.942 million to Rp6.949 million.

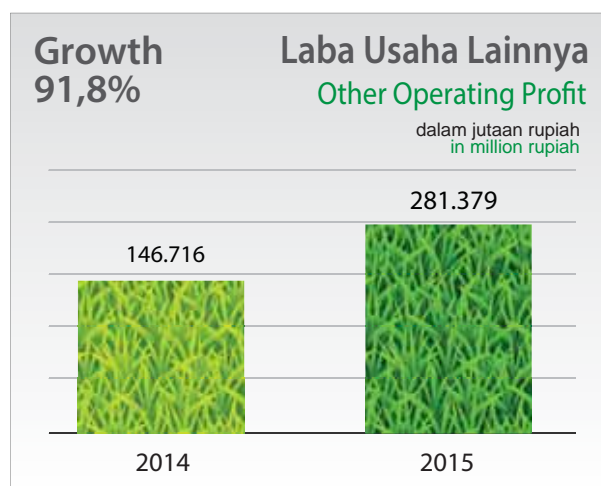


Laba Usaha

Laba usaha pada tahun 2015 mengalami lonjakan signifikan sebesar 91,8% dari Rp146.716 juta pada tahun 2014 menjadi Rp281.379 juta pada tahun 2015. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan hasil underwriting sebesar 49,7% dari Rp124.570 juta menjadi Rp186.508 juta di tahun 2015, sementara beban usaha pada tahun yang sama hanya meningkat 31,2%.

Operating Profit

Operating profit in 2015 grew significantly by 91,8% from Rp146.716 million in 2014 to Rp281.379 million in 2015. The increase in operating profit was primarily due to an increase of 49.7% in underwriting results from Rp124.570 million to Rp186.508 million in 2015, while operating expenses in the same year only increased by 31.2%.

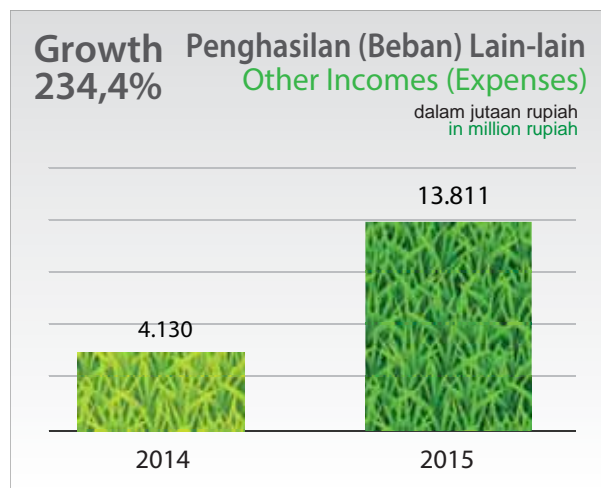


Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Penghasilan (beban) lain-lain antara lain berasal dari Laba (beban) beda kurs non investasi, jasa giro, bunga piutang pegawai, laba pelepasan aset tetap, biaya bank, beban penyisihan penurunan nilai piutang serta penghasilan (beban) lainnya. Pada tahun 2015, penghasilan (beban) lain-lain tercatat positif 13.811 juta naik 234,4% dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp4.130 juta.

Other Incomes (Expenses)

Other Incomes (expenses), among others derived from incomes (expenses) resulted from the gain on non-investment exchange rate, current accounts, assets' receivables interest, income from fixed assets disposal, bank charges, provision for impairment of receivables and other income (expense). In 2015, other incomes (expenses) recorded a positive Rp13.811 million, increased by 234,4% over the previous year of Rp4,130 million.

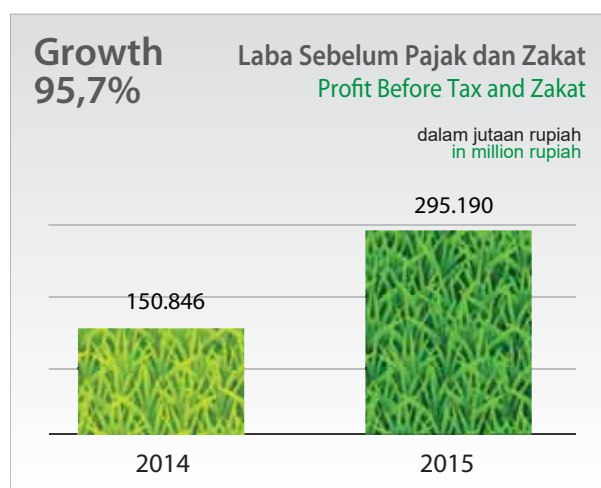


Laba Sebelum Pajak dan zakat

Perusahaan pada tahun 2015 telah membukukan laba sebelum pajak penghasilan dan zakat sebesar Rp295.190 juta dengan peningkatan sebesar 95,7% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp150.846 juta. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut mengalami peningkatan karena peningkatan hasil investasi yang cukup signifikan pada tahun 2015.

Profit Before Tax and Zakat

In 2015, the Company posted a profit before income tax and zakat of Rp295,190 million, an increase of 95,7% compared to 2014 of Rp150.846 million. Profit before income tax has increased due to a significant increase in returns on investment in 2015.

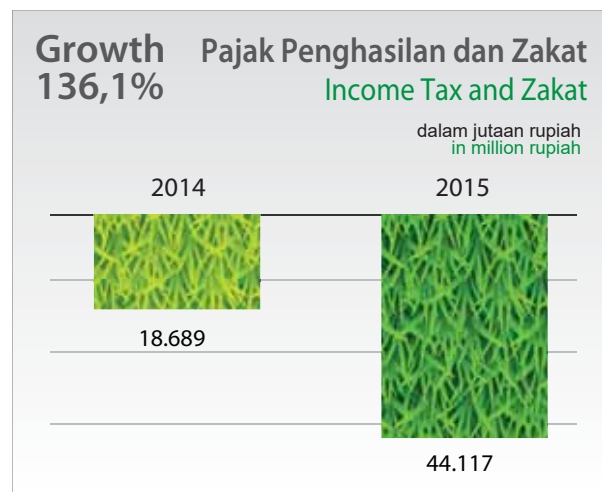


Pajak Penghasilan dan Zakat

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan PSAK No. 46 (Revisi 2011) tentang "Pajak Penghasilan". Beban pajak penghasilan, termasuk pajak tangguhan dan zakat perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp44.117 juta atau mengalami peningkatan sebesar 136,1% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp18.689 juta.

Income Tax and Zakat

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period reported and is calculated based on the applicable tax rates. In accordance with SFAS No. 46 (Revised 2011) on "Income Tax". Income tax expense, including deferred tax and zakat as of the end of 2015 amounted to Rp44,117 million or an increase of 136.1% compared to 2014 of Rp18,689 million.

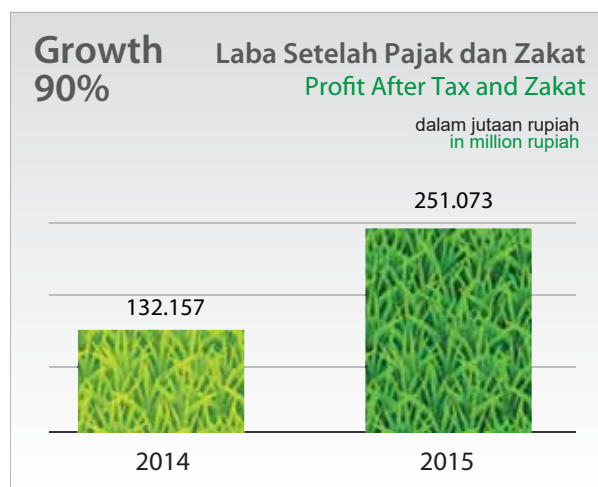


Laba Setelah Pajak dan Zakat

Setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan zakat, maka didapat laba setelah pajak perusahaan dan zakat pada akhir tahun 2015 sebesar Rp251.073 juta atau mengalami peningkatan sebesar 90,0% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp132.157 juta.

Profit After Tax and Zakat

Net of income tax and zakat, the profit after tax and zakat at the end of 2015 amounted to Rp251,073 million or an increase of 90.0% compared to 2014 of Rp132,157 million.



ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

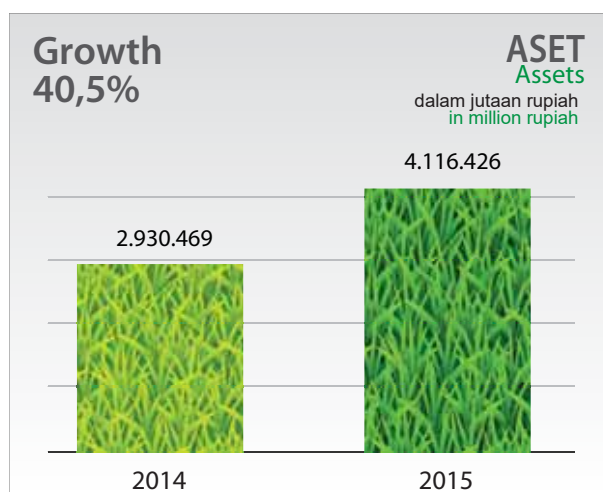
Pada tahun 2015, Perusahaan mencatat pertumbuhan aset yang mengesankan, dari Rp2.930.469 juta di tahun sebelumnya menjadi Rp4.116.426 juta atau meningkat 40,5%.

Sedangkan liabilitas dan ekuitas perusahaan sampai dengan akhir tahun 2015 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 35,9% dan 54,1% dibandingkan dengan tahun 2014.

Assets, Liabilities And Equity

The Company recorded an impressive growth of assets, from Rp2,930,469 million in the previous year to Rp4,116,426 million, an increase of 40.5%.

Meanwhile, liabilities and equity as of the end of 2015, increased by 35.9% and 54.1% respectively compared to that of 2014.



ASET

Peningkatan investasi dari tahun 2014 sebesar Rp1.650.248 juta menjadi Rp2.387.357 juta atau meningkat 44,7%. Peningkatan aset lainnya berasal dari aset tetap sebagai dampak adanya revaluasi aset dan peningkatan aset retroseksi.

ASSETS

Increase in investment in 2014 from Rp1,650,248 million to Rp2,387,357 million, an increase of 44.7%. Other increase in assets came from fixed assets, due to the reevaluation of assets and increase in asset retrocession.

Keterangan/Description	2014	2015	% Growth
Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalent	2.460	16.633	576,1
Piutang Usaha/Account Receivables	528.624	405.658	-23,3
Piutang Ujrah/Ujrah Receivables	8.896	9.330	4,9
Aset Retroseksi/Retrocession Assets	670.856	1.086.655	62,0
Biaya Dibayar Dimuka/Prepaid Expense	83	44	-48,2
Piutang hasil Investasi/Investment Income Receivables	5.616	7.708	37,3
Piutang Lain-lain/Other Receivables	3.047	3.429	12,5
Instrument Investasi/Investment Instrument	1.650.248	2.387.357	44,7
Aset Tetap/Fixed Assets	51.038	166.447	226,1
Aset Lain-lain/Other Assets	1.164	4.226	263,0
Total Aset/Total Assets	2.930.469	4.116.426	40,5

Penjelasan peningkatan dan penurunan komponen aset perusahaan sebagaimana penjelasan di bawah ini.

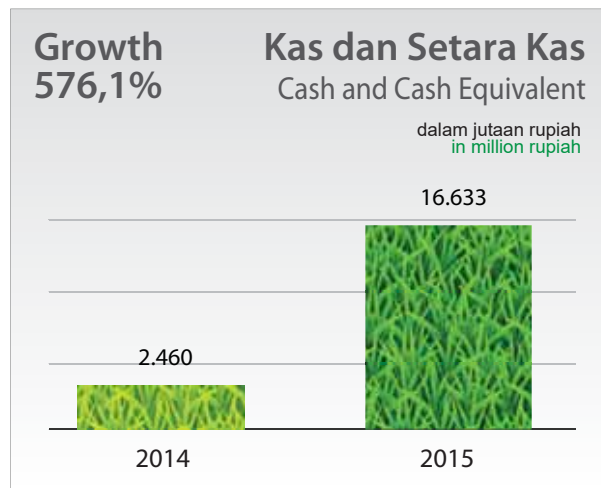
Explanation of increase and decrease of the Company's assets component as the description below.

Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp16.633 juta, meningkat 576,1% dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.460 juta.

Cash and Cash Equivalents

The Company's balance of cash and cash equivalents at the end of 2015 recorded at Rp16,633 million, grew by 576.1% from the year 2014 amounted to Rp2,460 million.

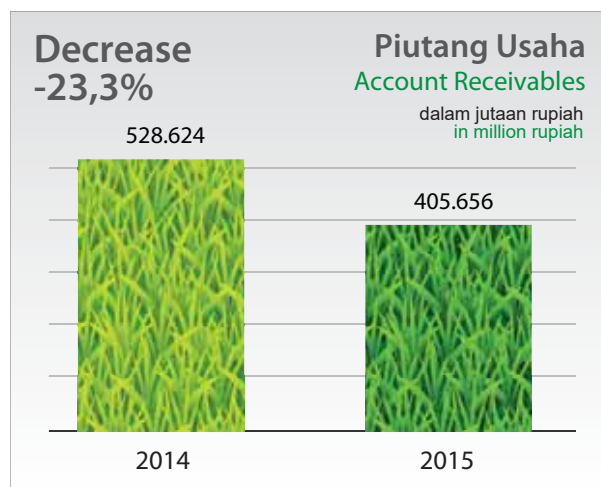


Piutang Usaha

Piutang usaha terbagi atas piutang reasuransi serta piutang retrosesi. Piutang usaha perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp405.656 juta atau mengalami penurunan sebesar 23,3% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp528.624 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang reasuransi sebesar 184,6 % dari semula sebesar Rp494.032 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp353.446 juta pada akhir tahun 2015.

Accounts Receivable

Accounts receivable consist of reinsurance and retrocession receivables. The Company's accounts receivable at the end of 2015 stood at Rp405,656 million or a decrease of 23.3% compared to 2014 of Rp528,624 million. The increase was primarily driven by the decrease in reinsurance receivables of 184.6% from Rp494,032 million in 2014 to Rp353,446 million in 2015.

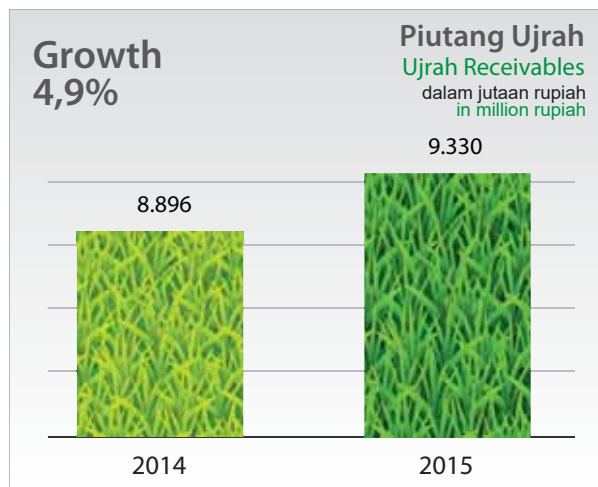


Piutang Ujrah

Piutang ujarah perusahaan merupakan bagian pendapatan perusahaan atas *fee* dari pengelolaan dana tabarru. Pada akhir tahun 2015, piutang ujarah perusahaan tercatat sebesar Rp9.330 juta atau mengalami kenaikan sebesar 4,9% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp8.896 juta. Peningkatan piutang ujarah tersebut antara lain disebabkan karena kenaikan kontribusi dari semula Rp151.388 juta pada tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp185.223 juta atau naik sebesar 22,4%.

Ujarah Receivable

The Company's Ujarah Receivables is part of the Company's revenue over the fee of tabarru fund management. At the end of 2015, the Company's ujarah receivable recorded at Rp9,330 million or an increase of 4.9% from that of the 2014 of Rp8,896 million. Increase in ujarah receivables is partly due to the increase in contribution from Rp151,388 million in 2014 to Rp185,223 million, or grew 22.4%.

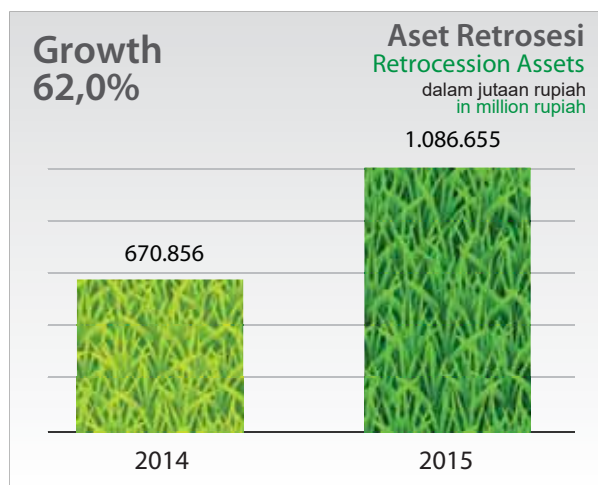


Aset Retrosesi

Aset retrosesi adalah nilai hak kontraktual neto retrosesioner dalam perjanjian retrosesi. Jumlah tersebut menggambarkan bagian dari premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim yang menjadi hak kontraktual neto retrosesioner. Aset retrosesi perusahaan sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.086.655 juta atau mengalami peningkatan sebesar 62,0% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp670.856 juta.

Retrocession Assets

Retrocession asset is the net retrocessionaire contractual rights value in the retrocessionaire agreement. The amount is describing part of the unearned premiums and claims estimates that become net retrocessionaire contractual rights. The Company's retrocession assets by the end of 2015 stood at Rp1,086,655 million or an increase of 62.0% compared to that of 2014 of Rp670,856 million.

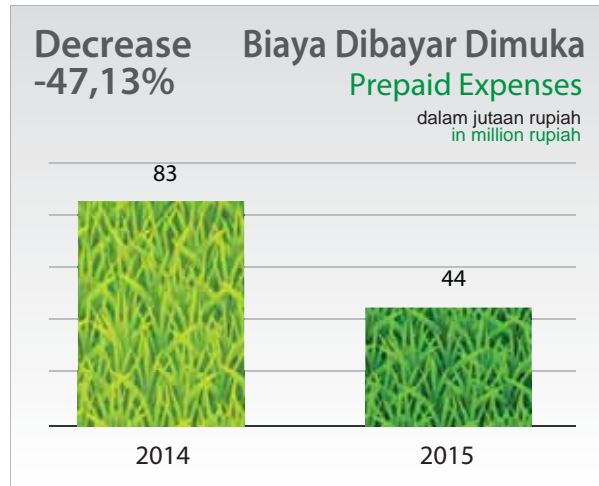


Biaya Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp44 juta atau mengalami penurunan sebesar 47,13% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp83 juta.

Prepaid Expenses

The balance of prepaid expenses at the end of 2015 amounted to Rp44 million or grew by 47.13% when compared to 2014 of Rp83 million.

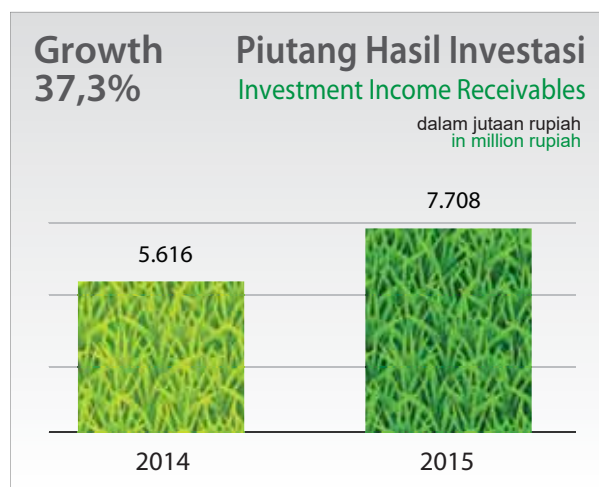


Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi perusahaan antara lain berasal dari kupon obligasi, bunga deposito serta bunga *deposito on call*. Saldo piutang hasil investasi perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp7.708 juta atau mengalami peningkatan sebesar 37,3% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp5.616 juta. Untuk piutang hasil investasi perusahaan tidak melakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan ke penerbit obligasi dan Bank pengelola deposito yang terjamin pembayarannya melalui transfer ke rekening entitas.

Investment Income Receivables

The Company's receivables on investment income, among others, derived from coupon bonds, deposits interest and oncall deposits interest. The Company's investment return receivable balance at the end of 2015 recorded at Rp7,708 million or an increase of 37.3% compared to 2014 of Rp5,616 million. For receivables on investment return, the Company does not undertake any allowance for the possibilities of uncollectible and impairment of receivables value, considering the receivables is an invoice to the issuer and the Bank manage the deposits which guaranteed its payment by wire transfer to the account of the entity.

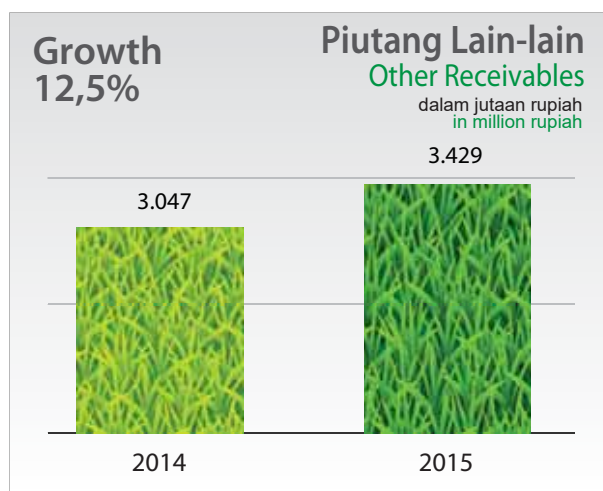


Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain perusahaan merupakan piutang yang diberikan kepada pegawai untuk keperluan perumahan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 19/KEP/DIR/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Pinjaman Perumahan bagi pegawai PT Reasuransi Nasional Indonesia. Piutang lain-lain pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp3.429 juta atau mengalami kenaikan sebesar 12,5% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp3.047 juta. Piutang pegawai tidak dilakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan yang dijamin pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai.

Other Receivables

The Company's other receivables are receivables provided to the employee for housing purposes with a minimum of 1 (one) year of service and a period of 10 (ten) years according to Decree of the Board of Directors Number: 19/KEP/DIR/VII/2002 dated July 8, 2002 on Housing Lending for the employees of PT Reasuransi Nasional Indonesia. Other receivables at the end of 2015 stood at Rp3,429 million or grew by 12.5% from the year 2014 of Rp3,047 million. The Company does not establish allowance for possible uncollectible and impairment receivables on employees' receivables, considering the receivables are guaranteed invoices through employees' payroll deductions.



Instrumen Investasi

Instrumen investasi perusahaan terbagi atas dana jaminan, deposito biasa, surat berharga serta penyertaan saham. Sampai dengan akhir tahun 2015, instrumen investasi perusahaan mengalami peningkatan sebesar 44,7% dari semula sebesar Rp1.650.248 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp2.387.357 juta.

Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan dana deposito yang meningkat 56,9% atau secara nominal sebesar Rp678.458 juta dan surat berharga yang meningkat sebesar 12,9% atau Rp59 juta.

Jika ditinjau berdasarkan komposisi dari instrumen investasi, dana deposito mendominasi komposisi instrumen investasi dengan komposisi sebesar 78,4% terhadap total instrumen investasi tahun 2015. Komposisi dana deposito tersebut mengalami peningkatan sebesar 56,9% terhadap komposisi dana deposito tahun 2014. Selanjutnya diikuti dengan komposisi

Investment instruments

Investment instruments are divided into collateral fund, ordinary deposits, securities and share participation. As of the end of 2015, the Company's investment instrument increased by 44.7% from Rp1,650,248 million in 2014 to Rp2,387,357 million.

The increase resulted mainly from an increase in deposit funds that grew 56.9% or Rp678,458 million and in securities that grew 12.9% or Rp59 million.

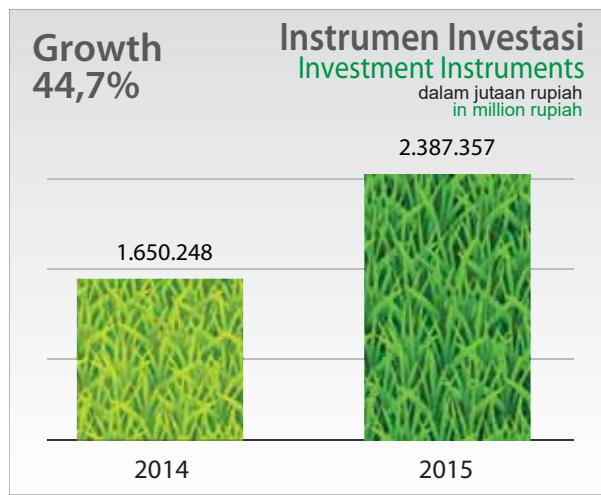
Based on the composition of investment instruments, the deposit funds dominate the composition of the investment instrument with a composition of 78,4% of the total investment instrument in 2015. The deposit fund composition had increased by 56.9% towards composition of the deposit of funds in 2014. Followed by securities with a composition of 21,6% of the total investment

surat berharga dengan komposisi sebesar 21,6% terhadap total instrumen investasi tahun 2015. Komposisi surat berharga tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,9% terhadap komposisi surat berharga tahun 2014. Sedangkan untuk penyertaan saham pada akhir tahun 2015 ini memiliki komposisi sebesar 0,1% terhadap total instrumen investasi.

Penjelasan mengenai peningkatan masing-masing komponen instrument investasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

The securities composition grew by 12,9% from the composition in 2014. As for the share participation, by the end of 2015, has a composition of 0.1% of the total investment instruments.

A description of each component of the increase in investment instruments as described below.

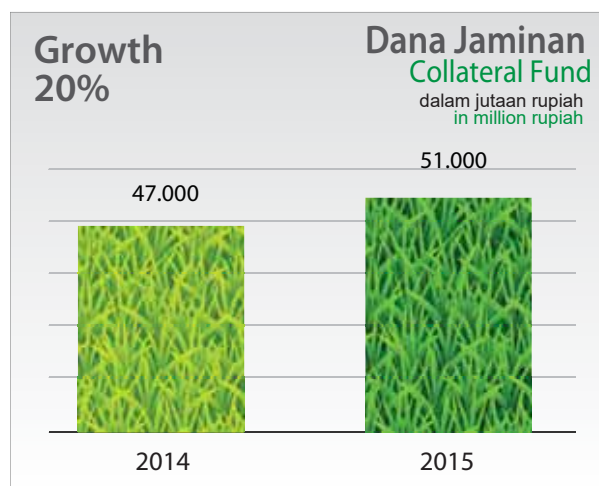


Dana Jaminan

Saldo dana jaminan perusahaan pada tahun 2015 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat dari sebesar Rp47.000 juta tahun 2014 menjadi Rp51.000 juta. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi. Dana jaminan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp51.000 juta dan Rp47.000 juta, sudah memenuhi ketentuan di atas.

Collateral Fund

The balance of the Company's collateral fund in 2015 was increased from that of 2014, from Rp47,000 million to Rp51,000 million. The insurance and reinsurance companies must have a minimum collateral fund in the amount 20% greater of the own capital required and the sum of 1% of the net premium with 0,25% from the reinsurance premiums. Collateral funds as per December 31, 2015 and 2014 respectively amounted to Rp51,000 million and Rp47,000 million have comply with the provision above.

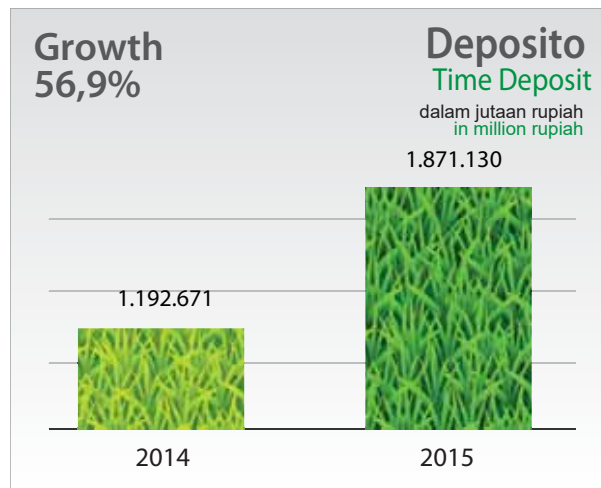


Deposito

Saldo deposito perusahaan pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 56,9% dari semula sebesar Rp1.192.671 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.871.130 juta pada akhir tahun 2015, dan secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar Rp678.458 juta.

Time Deposit

The Company's time deposit balance at the end of 2015 increased by 56,9% from Rp1.192.671 million in 2014 to Rp1.871.130 million by the end of 2015, nominally growth by Rp678.458 million.

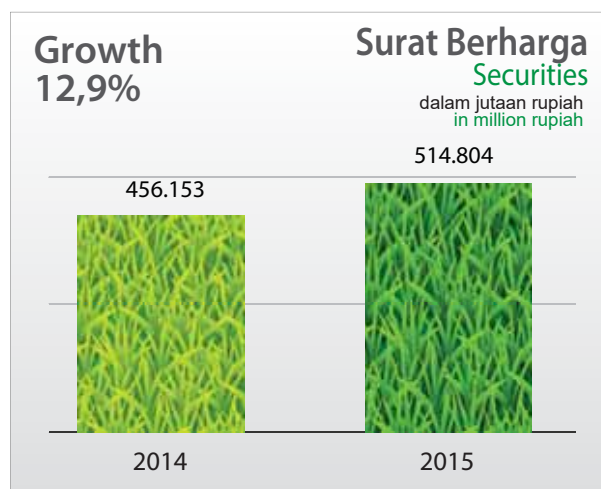


Surat Berharga

Saldo surat berharga yang dimiliki perusahaan terbagi atas saham yang diperdagangkan, obligasi yang diperdagangkan serta reksadana. Secara total, surat berharga yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp514.804 juta atau mengalami peningkatan sebesar 12,9% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp456.153 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan obligasi tersedia untuk dijual sebesar Rp112.799 juta atau 216,3% selama tahun 2015.

Securities

The Company's securities consisting of traded shares traded, traded bonds and mutual funds. In total, the Company's securities at the end of 2015 stood at Rp514,804 million or an increase of 12,9% compared to the year 2014 amounted to Rp456,153 million. The increased resulted mainly from an increase in Bonds available-for-sale of Rp112.799 million, or 216,3% in 2015.



Komposisi surat berharga yang dimiliki terutama didominasi oleh komposisi obligasi-obligasi yang diperdagangkan sebesar 53,7% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi tersebut mengalami penurunan sebesar 31,9% jika dibandingkan dengan komposisi tahun 2014 sebesar 78,9%.

Selanjutnya diikuti dengan komposisi reksadana dengan komposisi sebesar 32,1% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi reksadana tersebut mengalami peningkatan sebesar 179,1% jika dibandingkan dengan komposisi tahun 2014 sebesar 11,5%.

Sedangkan komposisi saham yang diperdagangkan memiliki komposisi terendah sebesar 14,2% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi saham yang diperdagangkan tersebut mengalami kenaikan sebesar 47,9% terhadap komposisi saham yang diperdagangkan tahun 2014 sebesar 9,6%.

Penyertaan Saham

Jumlah penyertaan saham perusahaan memiliki kecenderungan tetap atau tidak berubah baik tahun 2014 maupun tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.424 juta. Investasi dalam bentuk penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Penyertaan saham tersebut merupakan penyertaan kepada PT Asuransi Maipark Indonesia sebesar Rp724 juta serta Dana Konsorsium Asuransi Khusus sebesar Rp700 juta.

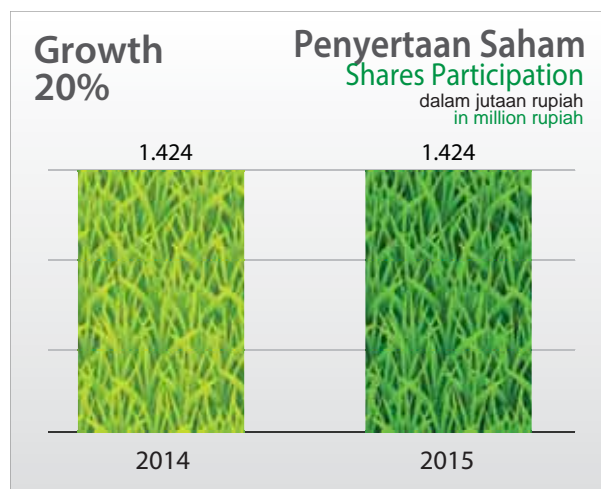
The composition of securities is mainly dominated by bonds traded of 53,7% of the total securities owned by the Company. The composition decreased by 31,9% when compared to the composition in 2014 of 78.9%.

Followed by mutual funds of 32.1% of the total securities. The composition of mutual funds increased by 179,1% compared to the composition in 2014 amounted to 11.5%.

The least component of the composition of securities is traded shares, which was 14.2% of total securities. It grew by 47.9% from the previous 9.6% in 2014.

Shares Participation

The number of the Company's shares participation is unlikely to change in 2014 and 2015 in the amount of Rp1,424 million. The investments in form of shares participation with the ownership less than 20% of the fair values are not available and intended for long-term investments are stated at acquisition cost (cost method). The shares participation are investments to PT Asuransi Maipark Indonesia amounting to Rp724 million and Special Insurance Consortium Funds of Rp700 million.

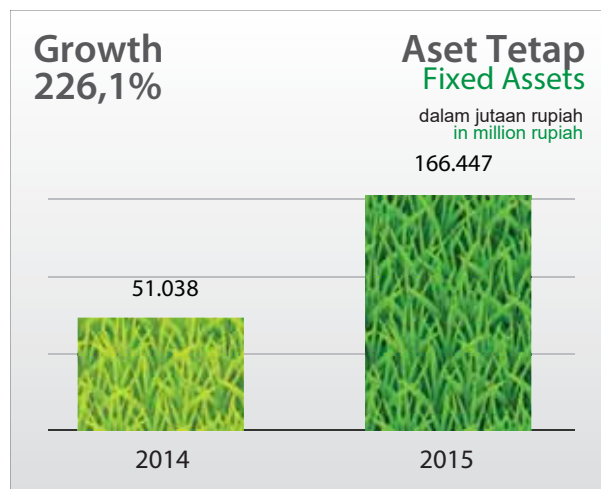


Aset Tetap

Aset tetap perusahaan selama tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 226,1% dari semula sebesar Rp51.038 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp166.447 juta pada akhir tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya revaluasi aset pada tanah bangunan yaitu masing-masing bertambah sebesar Rp108.958 untuk tanah dan Rp6.241 untuk bangunan. Pada akhir 2015 nilai tanah dan bangunan setelah dikurangi penyusutan menjadi sebesar Rp159.727 juta.

Fixed Assets

The Company's fixed assets in 2015 grew 226,1% from Rp51.038 million in 2014 to Rp166.447 million by the end of 2015. This increase was primarily due to the reevaluation of land and building assets, increased by Rp108,958 for land and Rp6,241 for buildings respectively. At the end of 2015 the value of land and buildings after depreciation amounted to Rp159,727 million.

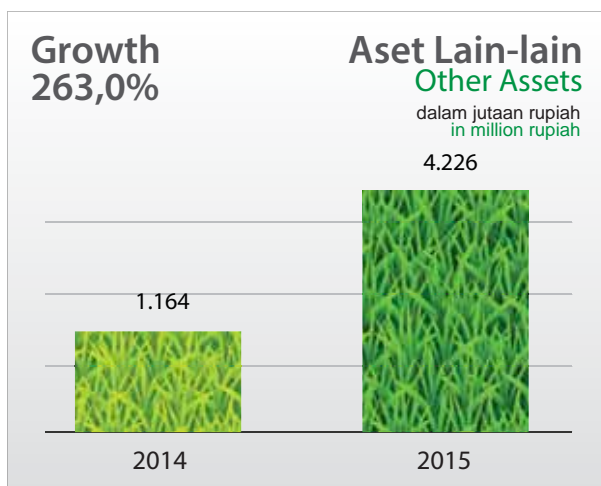


Aset Lain-Lain

Aset lain-lain perusahaan yang terbagi pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Corporate Member Rancamaya, Corporate Member Bogor Raya, Corporate Member Gunung Geulis, Corporate member Emerald, serta lainnya. Untuk aset lain-lain berupa KPD, perusahaan telah melakukan amortisasi seluruh nilai kontrak KPD sebesar 100% atau Rp27.000 juta. Jumlah net aset lain-lain perusahaan sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp4.226 juta atau mengalami peningkatan sebesar 263,0% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp1.164 juta.

Other Assets

The Company's other assets are divided on Contract of Management Fund [KPD], Corporate Members Rancamaya, Corporate Members Bogor Raya, Corporate Member Gunung Geulis, Corporate Member Emerald, as well as others. For other assets over the KPD has made establishment of full allowance reserve totaling of Rp27,000 million. The total net of other assets of the Company until the end of 2015 stood at Rp4,226 million or increased by 263.0% compared to 2014 of Rp1,164 million.



LIABILITAS

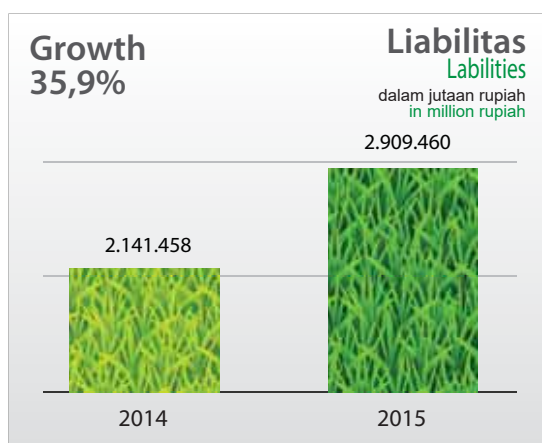
Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp2.909.460 juta atau mengalami peningkatan sebesar 35,9% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp2.141.458 juta. Peningkatan liabilitas perusahaan selama tahun 2015 terutama ditopang oleh peningkatan estimasi klaim retensi sendiri yang secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp265.800 juta serta premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp399.231 juta terhadap tahun 2014.

Secara rinci komponen liabilitas sebagaimana tabel di bawah ini.

LIABILITIES

As of the end of 2015, the total liabilities stood at Rp2,909,460 million or an increase of 35,9% compared to 2014 amounted to Rp2,141,458 million. This increased liability was mainly supported by the increase in estimated own retention claims which nominally increased by Rp265,800 million and unearned premiums for the year 2014 of Rp399,231 million.

The liability component in detailed as described in the table below



(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Keterangan/Description	2014	2015	% Growth
1. Utang Klaim Reasuransi/Reinsurance Claim Payable	49.092	72.046	46,8
2. Utang Premi Retrosesi/Retrocession Premiums Payable	28.659	55.438	93,4
3. Estimasi Klaim Retensi Sendiri/Own-Retention Claim Estimation	1.114.817	1.380.617	23,8
4. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan/Unearned Premiums	915.415	1.314.646	43,6
5. Kontribusi Diterima Dimuka/Contribution Received in Advance	-	-	-
6. Beban Yang Masih Harus Dibayar/Accrued Expenses	18.372	22.322	21,5
7. Utang Pajak dan Zakat/Tax and Zakat Payable	8.638	37.640	335,7
8. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja/Post-Employment Benefit Liability	22.976	23.690	4,3
9. Kewajiban Pajak Tangguhan/Deferred Tax Obligation	-	-	-
10. Utang Lain-lain/Other Payable	2.345	2.792	19,1
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities	2.160.294	2.909.460	34,7

Utang Klaim Reasuransi

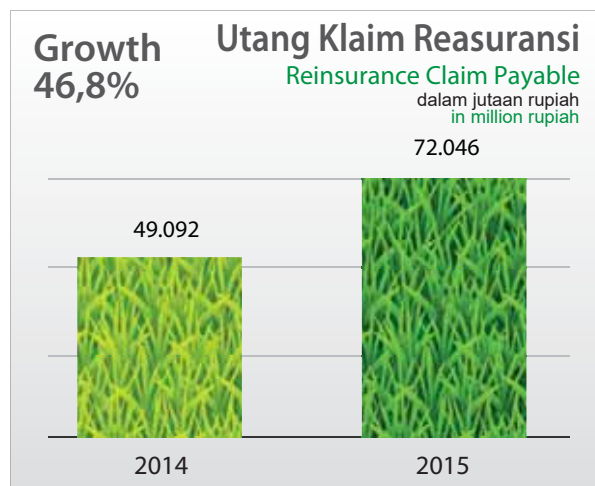
Utang klaim asuransi terbagi atas utang klaim asuransi umum konvensional dan syariah dan utang klaim asuransi jiwa konvensional dan syariah. Secara total, utang klaim asuransi perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp72.046 juta atau mengalami peningkatan

Reinsurance Claims Payable

The reinsurance claims Payable consists of conventional and sharia general insurance claims payable and conventional and sharia life insurance claims payable. In total, the Company's reinsurance claims payable at the end of 2015 stood at Rp72,046

sebesar 46,8% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp49.092 juta. Peningkatan utang klaim reasuransi terutama disebabkan oleh peningkatan klaim reasuransi umum dan jiwa konvensional dengan peningkatan sebesar 40,9 % dari semula sebesar Rp45.866 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp64.604 juta pada akhir tahun 2015.

million or an increase of 46.8% compared to 2014, amounted to Rp49,092 million. This increased was primarily due to an increase in conventional general and life reinsurance claims, which grew 40,9% from Rp45.866 million in 2014 to Rp64,604 million by the end of 2015.

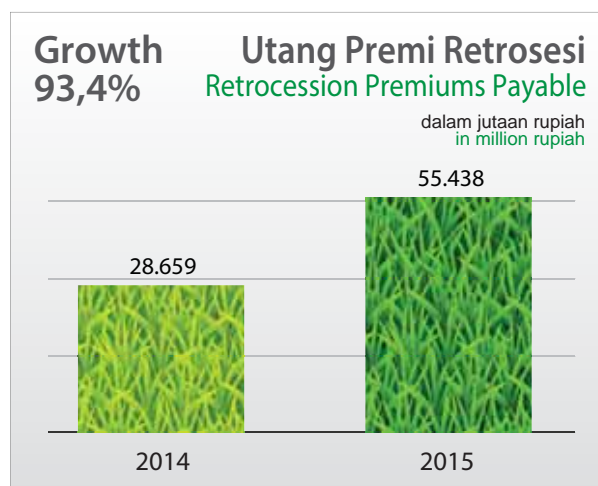


Utang Premi Retrosesi

Sebagaimana jenis utang klaim asuransi, utang premi retrosesi juga terbagi atas utang premi retrosesi umum konvensional dan syariah dan utang premi retrosesi jiwa konvensional dan syariah. Secara total, utang premi retrosesi perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp55.438 juta atau mengalami peningkatan sebesar 93,4% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp28.659 juta. Peningkatan utang premi retrosesi terutama disebabkan oleh peningkatan premi retrosesi umum dan jiwa konvensional dengan peningkatan sebesar 93,9% dari semula sebesar Rp27.561 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp53.437 juta pada akhir tahun 2015.

Retrocession Premiums Payable

As in the type of insurance claims payable, retrocession premiums payable is also dividend into conventional and sharia general retrocession premiums payable and conventional and sharia life retrocession premiums payable. In total, the Company's retrocession premiums payable at the end of 2015 stood at Rp55,438 million or an increase of 93.4% compared to 2014, amounting to Rp28.659 million. The increased in retrocession premiums payable was primarily due to an increase in conventional general and life retrocession premiums, grew by 93.9% from Rp27,561 million in 2014 to Rp53.437 million at the end of 2015.

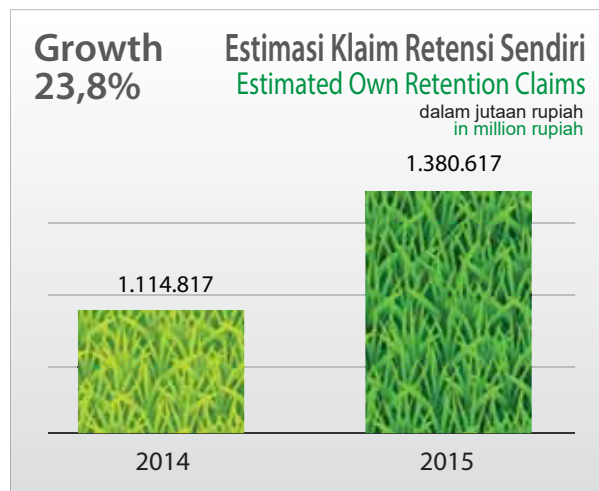


Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Estimasi klaim retensi sendiri perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.380.617 juta atau mengalami peningkatan sebesar 23,8% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp1.114.817 juta. Peningkatan estimasi klaim retensi sendiri terutama disebabkan oleh peningkatan untuk harta benda yang secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp124.069 juta dari semula sebesar Rp700.276 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp824.344 juta pada akhir tahun 2014.

Estimated Own Retention Claims

The Company's estimated own retention claims at the end of 2015 stood at Rp1,380,617 million or an increase of 23.8% compared to 2014 amounted to Rp1,114,817 million. This increased was primarily due to an increase in the property which in nominal increased by Rp124,069 million from Rp700.276 million in 2014 to Rp824.344 million by the end of 2014.

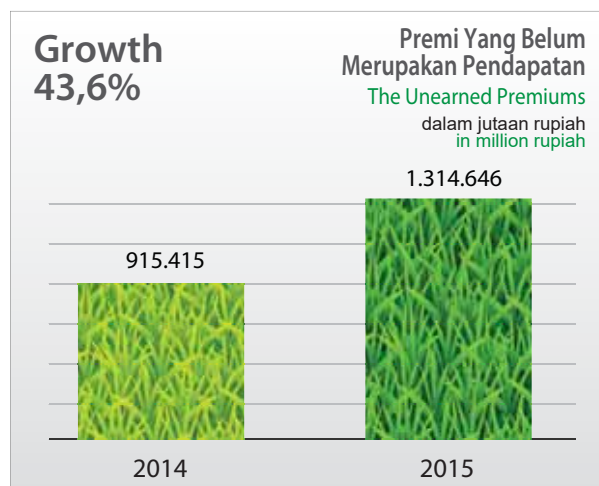


Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Saldo premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Premi yang belum merupakan pendapatan perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.314.646 juta atau mengalami peningkatan sebesar 43,6% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp915.415 juta. Peningkatan premi yang belum merupakan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh segmen reasuransi jiwa yang secara nominal meningkat sebesar Rp43.403 juta selama tahun 2014.

The Unearned Premiums

The balance of unearned premiums is part of the premiums that have not been recognized as revenue because the coverage is still running at the end of the accounting period. The Company's unearned premium by the end of 2015 stood at Rp1.314.646 million or an increase of 43,6% compared to 2014, amounted to Rp915.415 million. This increased was primarily due to the life reinsurance segment which in nominal increased by Rp43.403 million in 2014.

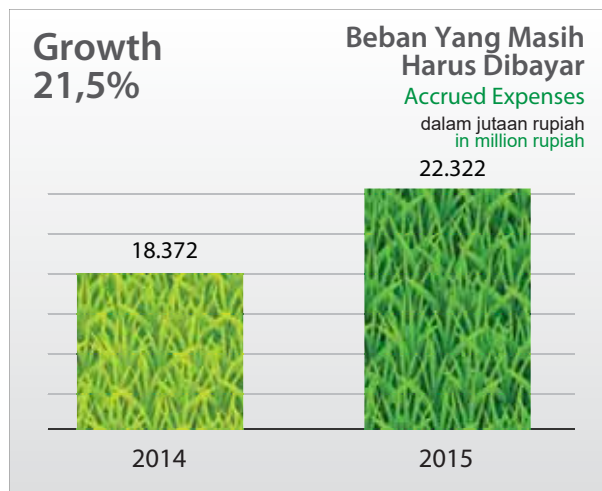


Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan, SDM dan umum, seperti: merit prestasi, jasa produksi karyawan, tantiem Direksi dan beban SDM dan umum lainnya. Beban yang masih harus dibayar perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp22.322 juta atau mengalami peningkatan sebesar 21,5% jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp18.372 juta.

Accrued Expenses

Accrued Expenses are the costs associated with employees, HR and general, such as: merit, production bonus, BOD tantiem and HR and other general expenses. Accrued expenses as of the end of 2015 amounted to Rp22,322 million or an increase of 21.5% compared to the year 2014 by Rp18.372 million.

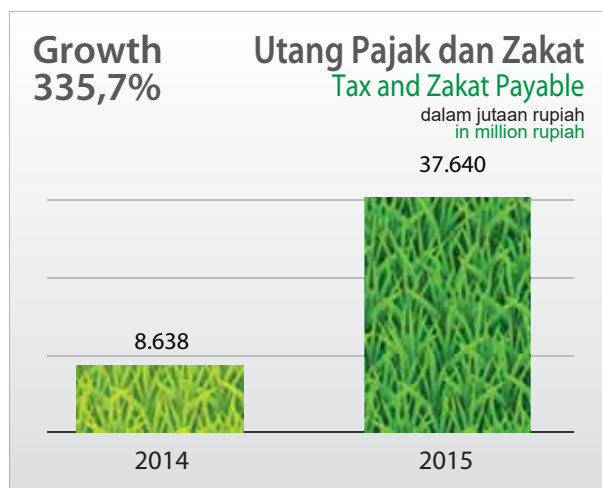


Utang Pajak dan Zakat

Utang pajak dan zakat perusahaan sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp37.640 juta atau mengalami kenaikan sebesar 335,7% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp8.638 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pajak kini perusahaan yang meningkat sebesar 228,6% dari semula sebesar Rp19.421 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp63.822 juta pada akhir tahun 2015, selisih pajak kini dengan utang pajak dan zakat adalah pajak dibayar dimuka.

Tax and Zakat Payable

The Company's tax and zakat payable as of the end of 2015 stood at Rp37,640 million or an increase of 335,7% compared to that of 2014 amounting to Rp8.638 million. This increase primarily due to increase in the Company's current tax by 228,6% from Rp19.421 million in 2014 to Rp63.822 million by the end of 2015, the difference between the current tax with the tax and zakat payable is taxes paid in advance.

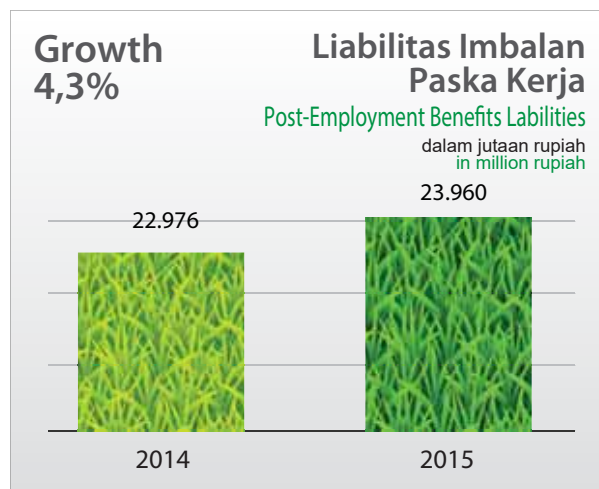


Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Berdasarkan laporan aktuaria PT RAS Actuaris tahun 2015 beban, Aset dan liabilitas imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp23.960 juta atau mengalami kenaikan sebesar 4,3% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp22.976 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban imbalan kerja tahun berjalan yang meningkat sebesar Rp423 juta dibandingkan tahun lalu.

Post-Employment Benefits Liability

Based on the actuarial report from PT RAS Actuaris in 2015, the expenses, assets and liabilities for post-employment benefits at the end of 2015 stood at Rp23,960 million, an increase of 4,3% compared to that of 2014, amounting to Rp22,976 million. This increase was primarily due to increase in employee benefits expenses for the current year, which increased by Rp423 million compared to last year.

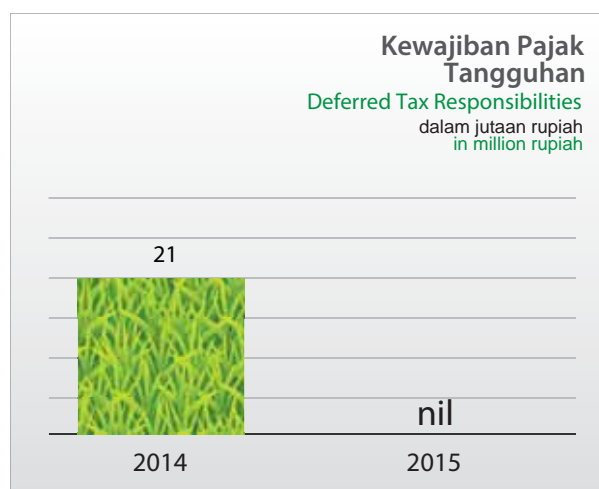


Kewajiban Pajak Tangguhan

Pada akhir tahun 2015, perusahaan tidak memiliki kewajiban pajak tangguhan sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp21 juta.

Deferred Tax Responsibilities

By the end of 2015, the Company has no deferred tax liability, while in 2014 amounted to Rp21 million.

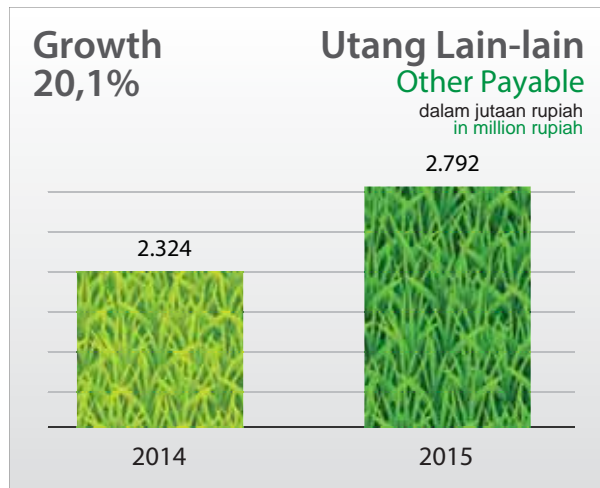


Utang Lain-Lain

Jumlah utang lain-lain perusahaan pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp2.792 juta. Hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,1% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.324 juta.

Others Payable

The Company's total other payables as of the end of 2015 stood at Rp2,792 million. This is an increase of 20.1% when compared to 2014 which was recorded at Rp2,324 million.

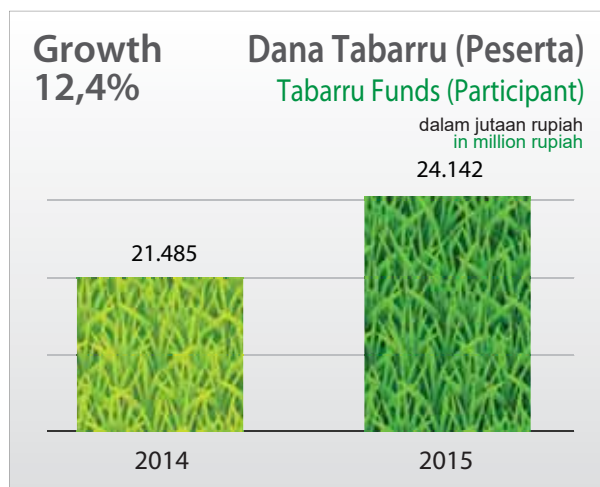


DANA TABARRU [Peserta]

Pada akhir tahun 2015 dana tabarru tercatat sebesar Rp24.142 juta, meningkat sebesar 12,4% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp21.485 juta.

Tabarru Funds (Participant)

By the end of 2015, tabarru funds amounted to Rp24,142 million, grew by 12.4% compared to 2014 which was recorded at Rp21,485 million.



EKUITAS

Pada akhir tahun 2015, ekuitas perusahaan mengalami peningkatan sebesar 58,0% dari semula sebesar Rp748.691 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.182.824 juta pada akhir tahun 2015. Peningkatan ini berasal dari tambahan modal disetor sebesar Rp75 milyar, revaluasi aset tetap sebesar Rp109.300 juta dan pencapaian laba setelah pajak dan zakat tahun 2015 yang sebesar Rp251.073 juta.

Secara rinci komponen ekuitas sebagaimana tabel di bawah ini.

No Keterangan/Description	2014	2015	% Growth
1. Modal Disetor /Paid Up Capital	463.000	538.000	16,2
2. Cadangan Umum/General Reserves	167.641	300.023	79,0
3. Cadangan Tujuan/Appropriated Reserves	5.799	5.799	-
4. Laba Tahun berjalan/Profit of the Year	132.157	251.073	90,0
5. Komponen ekuitas lainnya	(20.131)	87.930	536,8
Jumlah Ekuitas/Total Equity	748.691	1.182.824	58,0

Modal Disetor

Pada akhir tahun 2015, modal disetor perusahaan tercatat sebesar Rp538.000 juta atau mengalami peningkatan sebesar 16,2% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp463.000 juta. Penambahan tersebut berasal dari tambahan Modal Disetor PT Askrindo (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp75.000 juta.

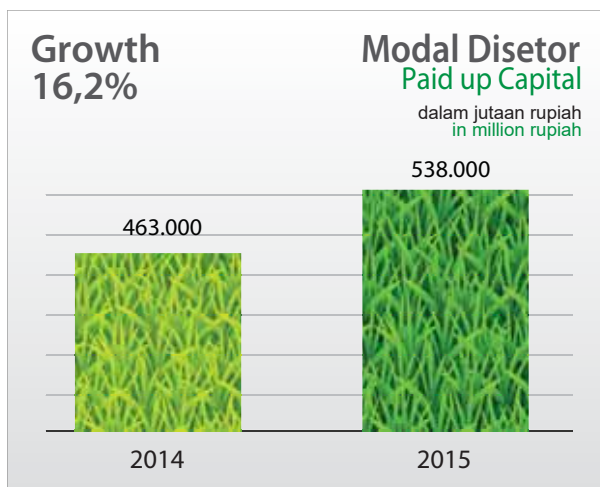
EQUITY

In late 2015, the Company's equity increased by 58.0% from Rp748,691 million in 2014 amounted to Rp1.182.824 million by the end of 2015. The increase was due to the additional paid-up capital of Rp75 billion, reevaluation of fixed-assets of Rp109,300 million and after tax and zakat income of Rp251,073 million.

In detail, the equity component as the table below.

Paid Up Capital

In 2015, the Company's paid up capital stood at Rp538,000 million or grew by 16.2% compared to 2014 of Rp463,000 million. The increase was due to the additional paid up capital of Rp75,000 million from PT Askrindo (Persero) to PT Reasuransi Nasional Indonesia.

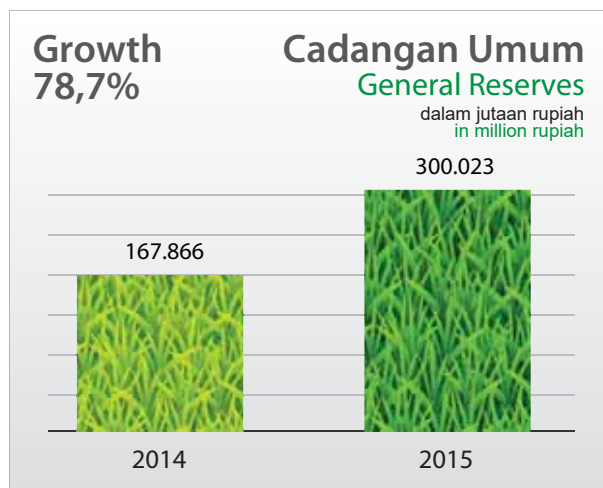


Cadangan Umum

Pada akhir tahun 2015, terdapat peningkatan cadangan umum perusahaan sebesar 78,7% dari semula sebesar Rp167.866 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp300.023 juta pada akhir tahun 2015.

General Reserves

By the end of 2015, the Company's general reserves increased by 78.7% from Rp167,866 million in 2014 to Rp300,023 million in 2015.

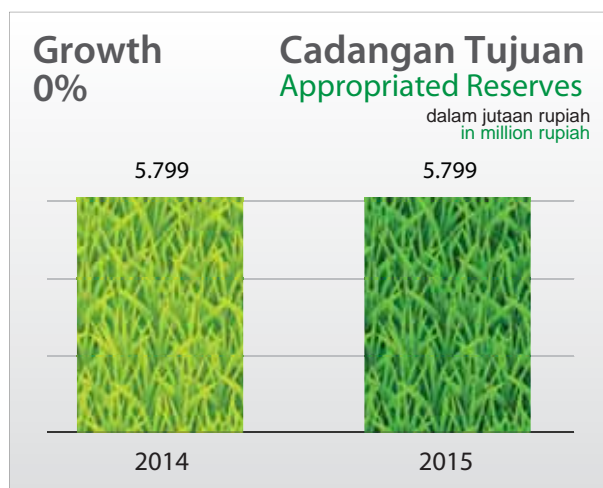


Cadangan Tujuan

Berbeda dengan cadangan umum, pada tahun 2015 perusahaan tidak melakukan penambahan terhadap cadangan tujuan perusahaan sehingga tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 sebesar Rp5.799 juta.

Appropriated Reserves

In contrast to general reserves, in 2015 the Company did not add the appropriated reserves, hence it did not change from 2014, amounted to Rp5,799 million.

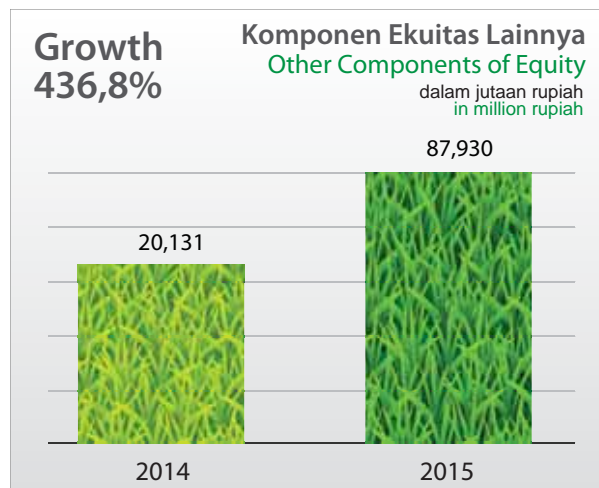


KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Komponen ekuitas lainnya terdiri dari keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja dan surplus revaluasi gedung yang masing-masing sebesar Rp(21.371 juta) dan Rp109.300 juta. Pada akhir tahun 2015, komponen ekuitas lainnya tercatat sebesar Rp87.930 juta atau naik sebesar 436,8% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar (Rp20.131 juta).

OTHER COMPONENTS OF EQUITY

Other components of equity consisting of gains (losses) on employee benefits actuary and surplus from the reevaluation of buildings, each of which are Rp(21,371) million and Rp109,300 million respectively. At the end of 2015, other equity component amounted to Rp87,930 million or grew by 436.8% compared to 2014's of (Rp20,131 million)

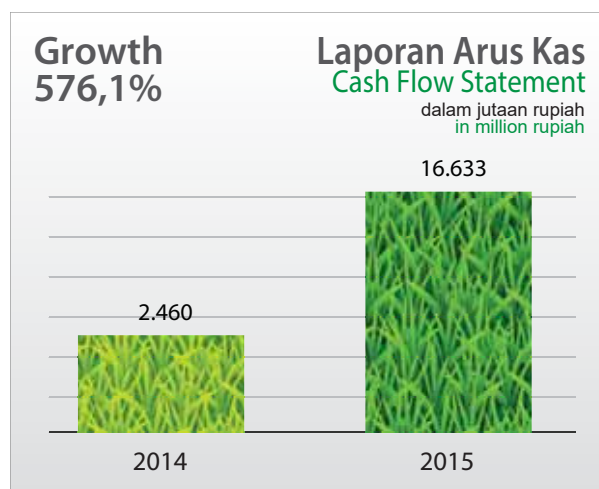


LAPORAN ARUS KAS

Posisi kas dan setara kas Perusahaan di akhir tahun 2015 sebesar Rp16.633 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.173 juta atau sebesar 576,1% dari tahun 2014 sebesar Rp2.460 juta.

CASH FLOW STATEMENT

Cash and cash equivalents at the end of 2015 amounted to Rp16,633 million, an increase of Rp14,173 million or 576.1% from 2014 amounting to Rp2,460 million.



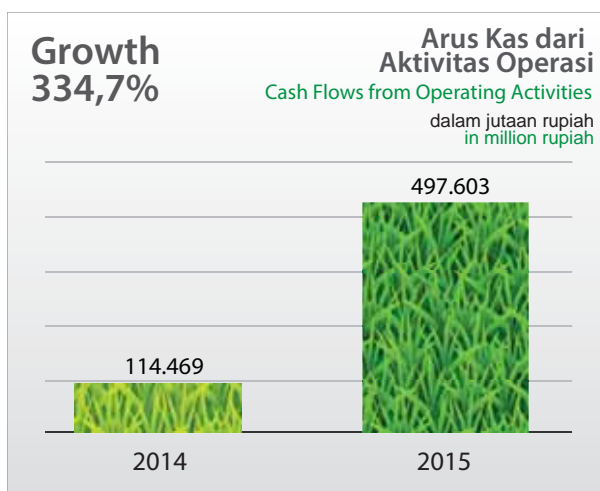
Keterangan/Description	2014	2015	% Growth
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi – Net/Cash Flows From Operating Activities-Net	114.469	497.603	334,7
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi – Net/Cash Flows From Investment Activities-Net	365.758	558.430	52,7
Arus Kas Dari Aktivitas Pendana/Cash Flows From Financing Activities	250.000	75.000	70
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara kas/Increase Cash and Cash Equivalent-Net	1.289	14.173	999,5
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Balance of Cash and Cash Equivalent Beginning of the Year	2.460	16.633	576,1

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas operasi tahun 2015 tercatat sebesar Rp497.603 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp383.134 juta atau secara persentase meningkat sebesar 334,7% dari tahun 2014 sebesar Rp114.469 juta.

Cash Flows From Operating Activities

Cash flow from operating activities in 2014 was recorded at Rp497,603 million, grew by Rp383,134 million or in percentage by 334,7% from Rp114,469 million in 2014.

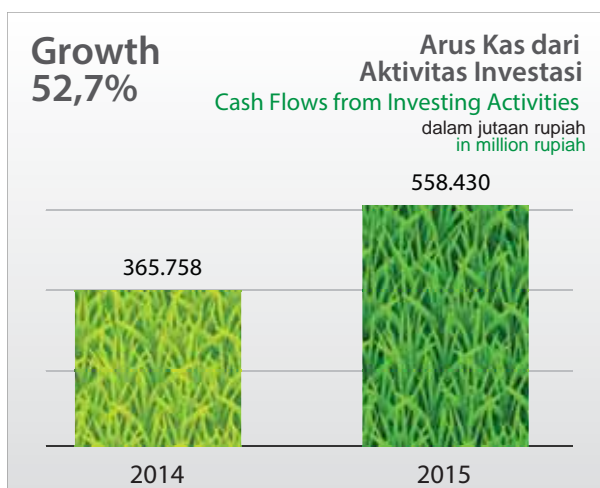


Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi tahun 2015 tercatat sebesar Rp558.430 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp192.672 juta atau secara persentase mengalami peningkatan sebesar 52,7% dari tahun 2014 sebesar Rp365.758 juta.

Cash Flows from Investing Activities

Cash flows from investing activities in 2015 recorded at Rp558,430 million and an increase of Rp192,672 million or in percentage an increase of 52,7% from Rp365,758 million in 2014.

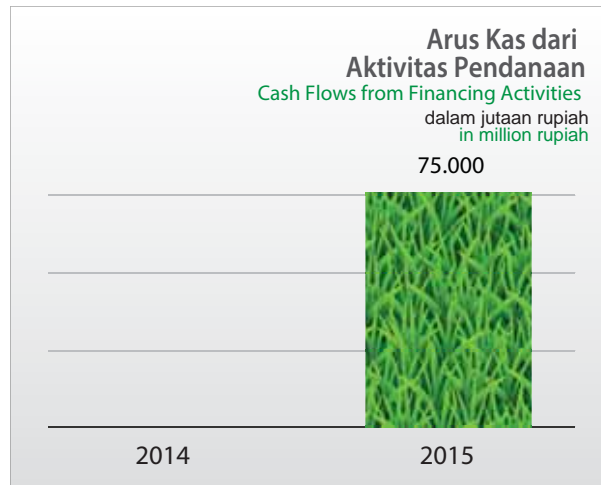


Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada akhir tahun 2015 terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp75.000 juta.

Cash Flows from Financing Activities

By the end of 2015 there were cash flow from financing activities amounted to Rp75,000 million.

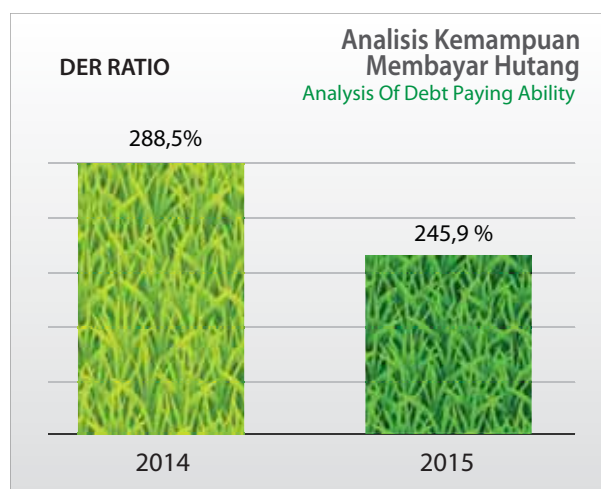


ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 2014 yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio utang terhadap modal (*Debt Equity Ratio/ DER*). Rasio DER tahun 2015 berada pada level 245,9 % sedangkan rasio DER tahun 2014 sebesar 288,5%. Penurunan tersebut disebabkan pertumbuhan ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan selama tahun 2015.

ANALYSIS OF DEBT PAYING ABILITY

The Company's ability in paying debt liability in 2015 increase from 2014 as indicated by the decline in debt to equity ratio (DER). DER in 2015 stood at 245.9% while the DER in 2014 amounted to 288,5%. The decrease was due to higher equity growth compared with the growth of debt during 2015.



INFORMASI KEUANGAN MATERIAL LAINNYA

OTHER MATERIAL FINANCIAL INFORMATION

Tingkat Kolektibilitas Piutang/Table of Collectibility

Reasuransi Umum/General Reinsurance	90,3%
Reasuransi Jiwa/Life Reinsurance	91,0%
Retrosesi Umum/General Retrocession	73,2%
Retrosesi Jiwa/Life Retrocession	14,1%

Struktur Modal/Capital Structure

Modal disetor/Paid-Up Capital	Rp538.000 juta/million
Cadangan Umum/General Reserves	Rp300.023 juta/million
Cadangan Tujuan/Appropriated Reserves	Rp 5.799 juta/million
Laba Tahun Berjalan/Current Year Profit	Rp251.073 juta/million
Komponen Ekuitas Lainnya/Other Components of Equity	Rp 87.930 juta/million

Modal Disetor/Paid-Up Capital

Kepemilikan/Ownership of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	99,9998%
Kepemilikan/ Ownership of YDKK Askrindo	0,0002%

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir dan dampaknya terhadap laporan keuangan

Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan audited halaman 58 - 60.

Changes In Accounting Policies Applied by the Company in the Last Fiscal Year and The Impact on Financial Statement

This subject can be found in the audited financial statements on the page 58 - 60.

Ketaatan sebagai Wajib Pajak

Jumlah pajak yang dibayarkan Perusahaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- PPh 21	Rp11.392 juta
- PPh 23	Rp 51 juta
- PPh 21 Final	Rp 313 juta
- PPh 4 ayat 2	Rp 11 juta
- PPh 25	Rp18.427 juta
Total	Rp30.914 juta

Compliance as Tax Payer

The amount of tax paid by the Company in 2015, are as follow:

- Income Tax 21	Rp11.392 million
- Income Tax 23	Rp 51 million
- Income Tax 21 Final	Rp 313 million
- Income Tax 4 v.2	Rp 11 million
- Income Tax 25	Rp18.427 million
Total	Rp30.914 million

PROSPEK USAHA

Target Perusahaan untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Anggaran/target tahun 2016

BUSINESS PROSPECT

The Company's target in 2016 can be found in the following table:

Budget/targets in 2016 Business Support

Akun/Account	Dalam jutaan Rp/in Million Rupiah
Premi Bruto /Gross Premiums	4.750.000
Premi Retrosesi/Retrocession Premiums	1.072.000
Klaim Bruto/Gross Claims	1.900.000
Klaim Retrosesi/Retrocession Claims	208.177
Beban Komisi Neto/Net Commission Expenses	868.450
Hasil Underwriting/Underwriting Results	301.000
Pendapatan Ujrah/Ujrah Income	38.792
Alokasi Surplus Dana Tabarru/Tabarru Fund Surplus Allocation	8.179
Hasil Investasi/Investment Result	192.723
Beban Usaha/Operating Expenses	156.403
Penghasilan (Beban) Lain lain/Other Income (Expenses)	11.768
Laba sebelum Pajak/Profit Before Tax	396.055
Pajak/Tax	76.055
Earning After Tax (EAT)	320.000
Investasi/Investment	3.136.881
Total Aset/Total Assets	5.280.039
Kewajiban/Liabilities	3.766.932
Dana Tabarru/Tabarru Fund	63.969
Ekuitas/Equity	1.449.136

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan indikasi bahwa peran sumber daya manusia sebagai salah satu aset perusahaan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan usaha dan pertumbuhan laba perusahaan, Perusahaan menyadari pentingnya peningkatan kompetensi karyawan melalui berbagai program pengembangan kompetensi yang dirancang secara internal maupun eksternal.

Selama ini, Perusahaan terus berupaya untuk merealisasikan potensi karyawan sehingga mampu berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. Realisasi potensi ini bukan saja dari sisi kuantitas sumber daya manusia, namun juga dari sisi kualitasnya. Itu sebabnya dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya, Perusahaan senantiasa berupaya agar seluruh karyawannya mampu mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolegal. Hal ini dicapai dengan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan melalui suatu program pelatihan yang dijalankan secara berjenjang dan terstruktur. Konsistensi Perusahaan dalam pelaksanaan program pengembangan SDM ini merupakan suatu keharusan bagi segenap jajaran manajemen Perusahaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perusahaan, karena Perusahaan meyakini bahwa Sumber Daya Manusia merupakan asetnya yang utama.

BUSINESS SUPPORT REVIEW

Human Resource Management

Enactment of AEC indicated that the role of human resources as one of the Company's assets is increasingly important. Therefore, to maintain business continuity and profit growth, the Company realizes the importance of improving the competence of its employees through competency development program conducted internally and externally.

From time to time, the Company always seeks to bring out the potential in our employees so that they can optimally contribute to the Company. We bring out this potential in terms of quantity and also quality of human resources. Therefore, in managing and developing our human resources, the Company constantly encourages all of its employees to develop themselves, as individual and collegial. This is achieved by implementing a competence development program for all employees through training programs conducted in stages and structured manner. The consistency of the Company in the implementation of human resources development program is a mandatory for all levels of management in order to realize the goals and objectives of the Company, since the Company believes that human resources are its main assets.

Realisasi Program SDM tahun 2015

Realisasi program SDM tahun 2015 antara lain terdiri dari:

1. Menyusun Surat Keputusan (SK) Direksi sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Surat Keputusan Direksi yang dibuat pada tahun 2015, 10 (sepuluh) diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Activities
1.	SK Alur Proses Bisnis PT.Reasuransi Nasional Indonesia, No.20/KEP/DIR/I/2015, tertanggal 05 Januari 2015. Decree No.20/KEP/DIR/IX/2015 dated January 5, 2015 on Business Process Flow of PT Reasuransi Nasional Indonesia.
2.	SK Pedoman <i>Service Level Agreement</i> (SLA), No.21/KEP/DIR/I/2015, tertanggal 05 Januari 2015. Decree No.21/KEP/DIR/I/2015, dated January 5, 2015 on Guidelines for Service Level Agreement (SLA).
3.	SK Pedoman Penyusunan SOP TI, No.22/KEP/DIR/I/2015, tertanggal 06 Januari 2015. Decree No.22/KEP/DIR/I/2015, dated January 6, 2015 on Guidelines for the Preparation of SOP for IT.
4.	SK Pedoman Standar <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> , No.23/KEP/DIR/I/2015, tertanggal 06 Januari 2015. Decree No.23/KEP/DIR/I/2015, dated January 6, 2015 on Guidelines for Standard Hardware and Software.
5.	SK Standar Operasional Prosedur Pengendalian Efektivitas Kerja dan Biaya System Kerja, No.27/KEP/DIR/I/2015, tertanggal 09 Januari 2015. Decree No.27/KEP/DIR/I/2015, dated January 9, 2015 on the Standard Operation of Control Procedures and Cost Effectiveness of the Work System.
6.	SK Pedoman <i>Disaster Recovery Planning</i> , No.28/KEP/DIR/I/2015, tertanggal 12 Januari 2015 Decree Disaster Recovery Planning, No.28/KEP/DIR/I/2015, dated January 12, 2015.
7.	SK Pedoman penanganan keluhan pelanggan, No.29/KEP/DIR/I/2015, tertanggal 12 Januari 2015 Decree No.29 / KEP / DIR / I / 2015 dated January 12, 2015 on Guidelines for handling customer complaints.
8.	SK Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) PT Reasuransi Nasional Indonesia, No. 48 A/KEP/DIR/VII/2015, tertanggal 13 Juli 2015. Decree No. 48 A/KEP/DIR/VII/ 2015 dated July 13, 2015 Guideline of the Work Plan and Budget (CBP) and Action Plan (RTL) PT Reasuransi Nasional Indonesia.
9.	SK Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Reasuransi Nasional Indonesia No. 48 B/KEP/DIR/VII/2015, tertanggal 13 Juli 2015. Decree No. 48 B/KEP/DIR/VII/2015 dated July 13, 2015 Guideline of the Company's Long Term Plan (RJPP) PT Reasuransi Nasional Indonesia.
10.	SK Struktur Organisasi, No.69/KEP/DIR/XII/2015, tertanggal 30 Desember. Decree No.69/KEP/DIR/XII/2015 dated December 30, 2015 on the organizational structure.

2. Menyusun *Standard Operational Procedure* pengendalian efektivitas kerja dan biaya system kerja.
3. Menyusun Pedoman *Disaster Recovery Planning*.
4. Menyusun Pedoman penanganan keluhan pelanggan.
5. Melakukan pengkinian struktur organisasi.
6. Menyusun pedoman *Key Performance Indicator* (KPI) karyawan dengan mengacu pada konsep *Balanced Score Card* (BSC).
7. Menyusun pedoman promosi, mutasi/rotasi dan demosi karyawan.
8. Melakukan penyusunan *update* struktur organisasi.
9. Menyelenggarakan 125 (seratus dua puluh lima) pelatihan dan pengembangan karyawan baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di Perusahaan (*In House Training*).

Realization of HR Program in 2015

Realization of HR program in 2015 include the following:

1. Prepared 74 (Seventy Four) Decrees (SK) of the Board of Directors in 2015, 10 (ten) of them are:

2. Developed a Standard Operational Procedure on the control of effectiveness and cost of work system.
3. Developed Guidelines for Disaster Recovery Planning.
4. Developed Guidelines for handling customer complaints.
5. Updated the organizational structure.
6. Developed guidelines for Key Performance Indicator (KPI) of employees with reference to the concept of Balanced Score Card (BSC).
7. Developed guidelines for promotion, transfer / rotation and demotion of employees.
8. Updated the preparation of the organizational structure.
9. Organized 125 (One Hundred Twenty Five) employee training and development, both domestically and abroad, including in-house training and development program.

Selain itu, Perusahaan pada tahun 2015 melakukan rekrutmen sebanyak 17 (Tujuh Belas) karyawan baru, dengan perincian 1 (satu) untuk jabatan Kepala Seksi dan 16 (Enam Belas) untuk staff pelaksana yang ditempatkan pada divisi-divisi sebagai berikut:

- a. 2 (dua) karyawan baru di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. 2 (dua) karyawan baru di Divisi Keuangan dan Akuntansi.
- c. 1 (satu) karyawan baru di unit kerja Sekretariat Perusahaan.
- d. 2 (dua) karyawan baru di Divisi Klaim.
- e. 1 (satu) karyawan baru di Divisi Reasuransi Jiwa.
- f. 3 (tiga) karyawan baru di Divisi SDM dan Umum.
- g. 2 (dua) karyawan baru di Satuan Pengawas Internal.
- h. 1 (satu) karyawan baru di Divisi Reasuransi Syariah.
- i. 1 (satu) karyawan baru di Divisi Facultative.
- j. 2 (dua) karyawan baru di Divisi Treaty dan Retrosesi.

Perencanaan dan Pengembangan SDM

Kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Perusahaan yang didasarkan pada konsep *Human Capital Excellence* dimulai sejak proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian hingga program kesejahteraan karyawan dan pengelolaan hubungan industrial. Dengan menerapkan konsep *Human Capital Excellence*, Perusahaan mampu membangun SDM yang kompeten di industrinya sehingga akan meningkatkan daya saing Perusahaan.

Kebijakan Rekrutmen

Menyesuaikan dengan perkembangan usaha dan kebutuhan operasional perusahaan, NASIONAL RE menerapkan beberapa strategi rekrutmen yang tepat, akurat dan cepat, dengan tetap memperhatikan kualitas serta kompetensi dasar para calon karyawan. Pelaksanakan proses rekrutmen senantiasa dimulai dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kebutuhan penambahan pegawai, baik kebutuhan saat ini maupun prediksi kebutuhan masa depan. Dengan demikian diharapkan Perusahaan mampu memiliki *pool* calon-calon karyawan dengan potensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan perencanaan perusahaan.

In addition, the Company recruited 17 (Seventeen) new employees in 2015, consisting 1 (one) for the post of Head of Section and 16 (Sixteen) for the post of staff, and were placed in the following divisions:

- a. 2 (two) new employees in the Division of Information Communications & Technology (ICT).
- b. 2 (two) new employees in the Finance and Accounting Division.
- c. 1 (one) new employee in the Corporate Secretariat Unit (i.e. PR & Compliance Division).
- d. 2 (two) new employees in the Division of Claims.
- e. 1 (one) new employee in Life Reinsurance Division.
- f. 3 (three) new employees in the Division of Human Resources and General Affairs.
- g. 2 (two) new employees in the Internal Audit Unit.
- h. 1 (one) new employee in the Division of Sharia Reinsurance.
- i. 1 (one) new employee in the Facultative Division.
- j. 2 (two) new employees in the Division of Treaty and Retrocession.

Human Resources Planning and Development

The Company's management and development policy on human resource are based on the concept of Human Capital Excellence, began at the process of recruitment, selection, training, assessment, up to employee welfare programs and industrial relations. By applying the concept of Human Capital Excellence, the Company is able to build a competent human resources in the industry, which will improve the competitiveness of the Company.

Recruitment Policy

To adapt to the development of business and operational needs of the company, NASIONAL RE implements recruitment strategies are appropriate, accurate and fast, by taking into account the quality and basic competence of the prospective employee. Recruitment process always begins with analysis of the needs of additional staff, both current and future needs, so that the Company is able to have a talent pool with potential and basic competence suitable for the corporate plan.

Strategi rekrutmen yang diterapkan Perusahaan mencakup:

- Iklan di internet melalui jobstreet dan jobsdb.
- Kunjungan ke kampus-kampus.

Proses rekrutmen antara lain terdiri dari:

- Wawancara , dapat dilakukan oleh:
 - a) Kepala Bagian SDM/Kepala Divisi SDM & Umum dan atau Kepala Bagian/Kepala Divisi Unit Pengguna (*User*).
 - b) Tim Pewawancara (yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang Pejabat setingkat Kepala Divisi yang ditunjuk oleh perusahaan).
 - c) Direksi (bila diperlukan).
- Psikotest: dilakukan oleh lembaga/konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- Tes Kesehatan: dilakukan oleh Rumah Sakit/instansi yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- Laporan ke Direksi.

Hasil Rekrutmen tahun 2015 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) karyawan, dengan perincian 1 (satu) Kepala Seksi dan 16 (enam belas) Staff Pelaksana

Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme

Seluruh karyawan NASIONAL RE diarahkan dan diberi kesempatan penuh untuk menjadi insan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk belajar, bertumbuh, dan bersaing secara sehat sehingga secara bersama-sama mampu menjadi daya dorong bagi kemajuan Perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pekerja agar memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan bisnis perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. Selama ini program pendidikan, pelatihan dan pengembangan pekerja dilakukan oleh Perusahaan secara berkelanjutan dan terencana dengan baik.

The Company's recruitment strategies include:

- Advertising on the internet via JobStreet and JobsDB.
- Visits to campuses.

The recruitment process is comprised of:

- Interviews, by:
 - a) Head of HR Department/ Head of HR & General Affairs Division and/ or Head of Division (User).
 - b) The interviewer Team (consisting of at least 2 (two) officials of Division Head level designated by the company.
 - c) The Board of Directors (if necessary).
- Psycho-test: carried out by the agency / consultant appointed by the Company.
- Health Test: conducted by the hospital / institution appointed by the Company.
- Report to the Board of Directors.

The Recruitment in 2015 resulted in a total of 17 (seventeen) new employees, comprises 1 (one) Head of Section and 16 (sixteen) Staff

Competence Development and Professionalism

All employees at NASIONAL RE are encouraged and given a full opportunity to develop themselves by learning, growing and competing fairly, so that all together can be the driving force for the progress of the Company. In order to achieve this end, the Company continuously provides trainings and competence development program for workers to have the skills and competencies needed to address business challenges, in the present and the future. So far, all educational, training and development programs are conducted by the Company continuously in a carefully planned manner.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Sepanjang 2015

Employee Competence Enhancement In 2015

Kegiatan	Activities
Undangan Marine Insurance Claim Seminar yang diselenggarakan oleh PT Global Internusa Adjusting (GIA),	Invitation of Marine Insurance Claim Seminar organized by PT Global Internusa Adjusting (GIA),
Sertifikasi Public Relations (PR) Kehumasan yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers,	Certification of Public Relations (PR) organized by Serikat Perusahaan Pers,
W/S Teknis Penilaian Risiko di perusahaan asuransi kerugian dan reasuransi yang diselenggarakan oleh WDA,	W/S Technical Assessment of Risk in insurance and reinsurance company organized by WDA,
Basic Theory and Practice of Reinsurance & Seminar, yang diselenggarakan oleh AAUI,	Basic Theory and Practice of Reinsurance Seminar, organized by AAUI,
Tutorial S108 Program regular & Tutorial asuransi, yang diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha,	Tutorial S108 Program regular & Tutorials on insurance, organized by Widya Dharma Artha,
The 27 th how to handle press well W/S, yang diselenggarakan oleh SPS,	The 27 th how to handle the press well W / S, organized by SPS,
Sosialisasi SE OJK No. 3/SEOJK.05/2015, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan,	Socialization of FSA Circular No. 3/SEOJK.05/2015, organized by the Financial Services Authority,
Publik Seminar Persiapan pensiun, yang diselenggarakan oleh Prospero Manajemen, Musyawarah perwakilan anggota ke 5 MPA V, yang diselenggarakan oleh AAMAI,	Public Seminar on Pension Preparation, organized by Prospero Management, the 5 th Council of representative of members of MPA V, organized by AAMAI,
Seminar Core System Migration Trend & State of the Art in Indonesia 2015, yang diselenggarakan oleh Sharing Vision,	Seminar on Core System Migration Trend and State of the Art in Indonesia in 2015, organized by Sharing Vision,
Pelatihan Oracle Database 12C Administration, yang diselenggarakan oleh PT Edutrain, Sosialisasi Instrumen Investasi efek beragun asset (EBA), yang diselenggarakan oleh AAUI,	Training on Oracle Database 12C Administration, organized by PT EduTrain, Socialization of Investment Instruments asset-backed securities (ABS), organized by AAUI,
Pelatihan Certified Securities Analyst (CSA), yang diselenggarakan oleh CSA,	Training for Certified Securities Analyst (CSA), which was organized by the CSA,
Pelatihan Pengelolaan tugas-tugas Audit, yang diselenggarakan oleh PPA & K,	Management Training Audit tasks, organized by PPA & K,
Diskusi panel Actuarial for non actuary, yang diselenggarakan oleh ISEA,	The panel discussion on Actuarial for non Actuary, organized by ISEA,
Seminar Trend Technology Informasi dan peran televisi dalam bisnis asuransi, yang diselenggarakan oleh Media Asuransi,	Seminar on Information Technology Trend and television roles in the insurance business, which is organized by Media Insurance,
Asia Pacific Life Insurance Congres (APLIC) 2015, yang diselenggarakan oleh AAJI,	15th Asia Pacific Life Insurance Congress (APLIC) 2015, organized by AAJI,
Pelatihan Audit Intern tingkat lanjutan II, yang diselenggarakan oleh YPIA, Pelatihan sertifikasi keahlian asuransi syariah tingkat dasar, yang diselenggarakan oleh AASI,	Internal Audit Training advanced level II, organized by YPIA, skills certification training of Takaful basic level, organized by AASI,
W/S Bedah polis dan klausula marine hull insurance (Asuransi rangka kapal), yang diselenggarakan oleh WDA,	W/S of Study on policies and clauses marine hull insurance (marine hull insurance), organized by WDA,
W/S Bedah kasus sengketa klaim, yang diselenggarakan oleh BMAI, W/S Bedah polis dan klausula asuransi marine cargo, yang diselenggarakan oleh WDA,	W/S of Study on dispute of claim, organized by BMAI, W/S of Study on policy and marine cargo insurance clauses, organized by WDA,
"ICISA Spring Meeting", yang diselenggarakan oleh International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) di Athens Yunani,	"ICISA Spring Meeting", organized by the International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) in Athens Greece,
City Week 2015 "The Role of International Financial Services in Driving the Global Economic Recovery" yang diselenggarakan oleh The Board Of Patrons di London,	City Week 2015 "The Role of International Financial Services in Driving the Global Economic Recovery" organized by The Board Of Patrons in London,
"Asia sub Committee Meeting" yang diselenggarakan oleh International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) di Hongkong,	The "Asian sub-Committee Meeting" organized by the International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) in Hong Kong,
Tutorial Internal S.002 dan S.101 ujian AAMAI, yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE,	Internal Tutorial of S.002 and S.101 AAMAI exam, held by the NASIONAL RE,
In house training Certified Risk Management Officer (CRMO), yang diselenggarakan oleh PT RAP Indonesia bertempat di NASIONAL RE,	In-house training Certified Risk Management Officer (CRMO), organized by PT RAP Indonesia housed in the NASIONAL RE,
W/S Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE,	W/S Criteria for Excellence Performance (KPKU), organized by NASIONAL RE,

Kegiatan	Activities
Sosialisasi RKAP 2015, yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE,	Socialization on RKAP 2015, organized by NASIONAL RE,
Sosialisasi HR Blue Print, yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE,	Socialization on HR Blue Print, held by NASIONAL RE,
Sosialisasi K3, yang diselenggarakan oleh NASIONAL RE,	Socialization on K3, held by the NASIONAL RE
Sosialisasi Asuransi Kesehatan, yang diselenggarakan oleh MNC Life Ins., bertempat di NASIONAL RE.	Socialization of Health Insurance, held by MNC Life Ins., took place in NASIONAL RE.
10th Annual HR Conference 2015, yang diselenggarakan oleh Data On Corporate,	The 10th Annual HR Conference 2015, organized by DataOn Corporate,
Seminar Technical Sharing Session Reats Marine, yang diselenggarakan oleh Adi Pratama Asia (Reinsurance Brokers),	Technical Seminar Sharing Session Reats Marine, organized by Adi Pratama Asia (Reinsurance Brokers),
Seminar Nasional Internal Audit 2015, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA),	National Seminar on Internal Audit in 2015, organized by the Internal Audit Foundation (YPIA),
W/S Mdaemon Mail Server, yang diselenggarakan oleh PT Duta Distribusi Servisindo,	W/S MDAemon Mail Server, held by PT Duta Distribution Servisindo,
Seminar Chief Audit Executive (CAE) Forum – Benchmarking Pengelolaan Internal Audit, yang diselenggarakan oleh FKSPI,	Seminar Chief Audit Executive (CAE) Forum-Benchmarking Management of Internal Audit, organized by FKSPI,
W/S Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) yang diselenggarakan oleh FKSPI,	W/S Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) organized by FKSPI,
Training Reinsurance Contract Treaty Wordings, yang diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance Limited (SCI) di Singapore,	Training Contract Reinsurance Treaty wordings, organized by the Singapore College of Insurance Limited (SCI) in Singapore,
Training Foundation Course in Medical & Health Insurance, yang diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) di Malaysia,	Training Foundation Course in Medical & Health Insurance, organized by The Malaysian Insurance Institute (MII) in Malaysia,
ICISA Trade Credit Insurance dan Surety Training Seminar, yang diselenggarakan oleh STECIS The Trade Insurance & Surety Academy di Netherland,	ICISA Trade Credit Insurance and Surety Training Seminar, organized by STECIS The Trade Insurance & Surety Academy in the Netherlands,
W/S Akuntansi asuransi update sesuai PSAK 28, PSAK 36 & PSAK 62, yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),	W/S Insurance Accounting Update in accordance with IAS 28, IAS 36 and IAS 62, organized by the Indonesian Institute of Accountants (IAI),
Seminar Nasional Masa depan kerjasama multifinance, perbankan dan asuransi setelah peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI),	National Seminar on future cooperation, finance, bank and insurance after the FSA regulation No. 29/POJK.05/ 2014, which was organized by the General Insurance Association of Indonesia (AAUI),
Training Effective risk management-the people factor, yang diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance Limited (SCI) di Singapore,	Training Effective risk management-the people factor, which was organized by the Singapore College of Insurance Limited (SCI) in Singapore,
Training Enterprise risk management & capital allocation for insurers, yang diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance Limited (SCI) di Singapore,	Training Enterprise risk management and capital allocation for insurers, organized by the Singapore College of Insurance Limited (SCI) in Singapore,
Seminar Nasional 2nd talent management strategy, yang diselenggarakan oleh PT Intipesan Pariwara,	The 2nd National Seminar on talent management strategy, held by PT Intipesan Pariwara,
Seminar Tatakelola/dokumen bagi BUMN dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisien serta mewujudkan Good Corporate Governance (GCG), yang diselenggarakan oleh Tata Solusi,	Seminar on Governance / documents for SOEs and enterprises to improve productivity and efficient and to realize the Good Corporate Governance (GCG), which is held by Tata Solutions,
W/S Memahami peraturan dan SOP pengadaan barang dan jasa BUMN, yang diselenggarakan oleh Risk Management International (RMI),	W/S Understanding the rules and SOP for procurement of goods and services of SOE, which was organized by the Risk Management International (RMI),
UIB Asia's 3D/2N Market Seminar 2015, yang diselenggarakan oleh UIB Asia Reinsurance Brokers Pte, Ltd., bertempat di Vietnam,	UIB Asia's 3D / 2N Market Seminar 2015, which was organized by UIB Asia Reinsurance Brokers Pte, Ltd., in Vietnam,
Training Understanding of Oil & Gas contract and it's insurance conditions, yang diselenggarakan oleh The Malaysia Insurance Institute (MII) di Malaysia,	Training Understanding of Oil & Gas contract and it's insurance conditions, which was organized by The Malaysian Insurance Institute (MII) in Malaysia,
W/S Upgrading Insurance Claims Handling, yang diselenggarakan oleh STIMRA,	W/S Upgrading Insurance Claims Handling, which was organized by STIMRA,
W/S Oil dan Gas Insurance, yang diselenggarakan oleh AMAR'AS Institute,	W/S Oil and Gas Insurance, which was organized by the Institute AMAR'AS,
Training Intermediate Course in Contractor's All Risk/Erection All Risk Insurance Claims, yang diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) di Malaysia,	Intermediate Training Course in Contractor's All Risks / Erection All Risk Insurance Claims, which was organized by The Malaysian Insurance Institute (MII) in Malaysia,

Kegiatan	Activities
Gathering dengan PT Askrindo, yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo), bertempat di Hongkong,	Gathering with PT Askrindo, which was organized by PT (Persero) Credit Insurance Indonesia (PT Askrindo), held in Hong Kong,
Seminar Manajemen risiko industri Keuangan Non-Bank (IKNB) : Bagaimana implementasinya guna meningkatkan ketahanan dan profit usaha, yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR),	Seminar on Risk Management Non-Bank Financial industry (IKNB): How is the implementation in order to improve the resilience and business profit, which was organized by the Risk Management Certification Agency (BSMR),
W/S Oracle DBA 11g Admin Workshop 1, yang diselenggarakan oleh PT Andalan Teknologi Inovasi,	W / S Oracle DBA 11g Admin Workshop 1, which is held by PT Andalan Teknologi Inovasi ,
Training Intermediate Course in Medical & Health Insurance – Non Medical Aspect of Claims, yang diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) di Malaysia,	Intermediate Training Course in Medical & Health Insurance-Non Medical Aspects of Claims, which was organized by The Malaysian Insurance Institute (MII) in Malaysia,
In House Training Certified Risk Management Officer (CRMO)-perbaikan, yang diselenggarakan oleh LSPMR-PT RAP di NASIONAL RE,	In House Training Certified Risk Management Officer (CRMO)-remedial, which was organized by LSPMR-PT RAP in NASIONAL RE,
In House Training Certified Risk Management Professional (CRMP), yang diselenggarakan oleh LSPMR-PT RAP di NASIONAL RE,	In House Training Certified Risk Management Professional (CRMP), which was organized by LSPMR-PT RAP in NASIONAL RE,
In House Training Terrorism & Sabotage Insurance, yang diselenggarakan oleh IBS Insurance Broking Service PT di NASIONAL RE,	In House Training Terrorism & Sabotage Insurance, which was organized by IBS Insurance Broking Service PT on NASIONAL RE,
In House Training Perhitungan Cadangan Premi & Klaim IBNR, yang diselenggarakan oleh PT KIS Aktuaris di NASIONAL RE.	In House Training Calculation Premiums & Claims IBNR reserves, organized by PT KIS Actuaries in NASIONAL RE.
Program Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP), yang diselenggarakan oleh LSPMR-PT RAP di Manado,	Risk Governance Certification Program Certified Professional (CRGP), which was organized by LSPMR-PT RAP in Manado,
W/S Master Class Program Series CV, yang diselenggarakan oleh LSPMR-PT RAP di Manado,	W/S Master Class Program Series CV, which was organized by LSPMR-PT RAP in Manado,
GTG-CIR 2015-041-6th (AGMS) Annual General Meeting, yang diselenggarakan oleh Global Takaful Group Limited, bertempat di Dubai UAE,	GTG-CIR 2015-041-6th (AGMS) Annual General Meeting, which was organized by the Global Takaful Group Limited, located in Dubai UAE,
Financial Lines Basics training, yang diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance di Singapore,	Financial Lines Basics training, which was organized by the Singapore College of Insurance in Singapore,
The Nuts & Bolts of treaty reinsurance – proportional treaty reinsurance training, yang diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance di Singapore,	The Nuts & Bolts of treaty reinsurance-proportional treaty reinsurance training, which was organized by the Singapore College of Insurance in Singapore,
The Nuts & Bolts of treaty reinsurance – non proportional treaty reinsurance training, yang diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance di Singapore,	The Nuts & Bolts of treaty reinsurance-non-proportional treaty reinsurance training, which was organized by the Singapore College of Insurance in Singapore,
Technical reinsurance accounts training, yang diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance di Singapore,	Technical reinsurance accounts training, which was organized by the Singapore College of Insurance in Singapore,
Program Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO)- susulan, yang diselenggarakan oleh LSPMR – PT RAP Indonesia,	Certification Program Certified Risk Management Officer (CRMO)-additional, which was organized by LSPMR-PT RAP Indonesia,
The Impact of global change, yang diselenggarakan oleh Munich Re di Bangkok Thailand,	The Impact of global change, which was organized by Munich Re in Bangkok Thailand,
W/S Enterprise risk management (ERM) tentang Modul operasional, yang diselenggarakan oleh AAJI,	W / S Enterprise risk management (ERM) of the operating module, which was organized by AAJI,
Training Pasar modal utk modul WMI, yang diselenggarakan oleh Batavia Properindo Aset Manajemen,	Capital markets Training For WMI modules, which diselenggarakan oleh Batavia Properindo Aset Manajemen,
Seminar Increase Business and IT agility, yang diselenggarakan oleh Continously Improving Business Processes,	Seminar Increase Business and IT agility, which was organized by Continously Improving Business Processes,
W/S SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS 18001 & PP No. 50/2012, yang diselenggarakan oleh CV Aruni,	W/S SMK 3 Occupational Safety and Management System based on OHSAS 18001 & PP 50/2012, organized by CV Aruni,
Training Audit Kecurangan (Fraud Audit),diselenggarakan oleh PPA & K,	Training on Audit Fraud organized by the PPA & K,
Seminar Insurance and Infrastructure Project Development in Indonesia, yang diselenggarakan oleh AAUI,	Seminar on Insurance and Infrastructure Development Project in Indonesia, which was organized by AAUI,
W/S ERM – Asset & Liability, yang diselenggarakan oleh AAJI	W/S ERM-Asset & Liability, which was organized by AAJI
Training Sertifikasi Certification of the Business Continuity Institute (CBCI), yang diselenggarakan oleh Reksis Consulting,	Training on Certification Certification of the Business Continuity Institute (CBCI), which was organized by Reksis Consulting,

Kegiatan	Activities
W/S Akuntansi reasuransi non proportional utk excess of loss & metode perhitungan reinstatement Premiums Integral, diselenggarakan oleh LPMA Trisakti,	W/S Accounting for non-proportional reinsurance For excess of loss and reinstatement Premiums Integral calculation method, organized by LPMA Trisakti,
Training Aplikasi Akuntansi tingkat dasar, yang diselenggarakan oleh IAI,	Training on Accounting Application basic level, which was organized by the IAI,
Seminar 28th TAA, diselenggarakan oleh AAJI,	The 28th TAA Seminar, which was organized by AAJI,
W/S Bedah polis & klausula Asuransi heavy equipment (HE), yang diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha (WDA),	W/S Study on policy & Insurance clause heavy equipment (HE), organized by Widya Dharma Artha (WDA),
Seminar & pengukuhan gelar PIA, yang diselenggarakan oleh PPA & K di Lombok,	Seminar & inaugural of PIA title, which was organized by PPA & K in Lombok,
W/S Merancang program Reasuransi property dengan pendekatan pragmatis, yang diselenggarakan oleh LPMA Trisakti,	W/S Designing property reinsurance program with a pragmatic approach, which was organized by LPMA Trisakti,
Perbaikan Sertifikasi CRMP, yang diselenggarakan oleh LSPMR – PT RAP Indonesia,	Revision of Certification of CRMP, which was organized by LSPMR-PT RAP Indonesia,
Seminar Trading in a soft and fast changing reinsurance market, is the underwriting cycle a thing of the past, yang diselenggarakan oleh UIB Asia Reinsurance Brokers, di London,	Trading Seminar in a soft and fast changing reinsurance market, the underwriting cycle is a thing of the past, organized by UIB Asia Reinsurance Brokers, in London,
W/S Manajemen Public Relation & Media Relations Perusahaan, yang diselenggarakan oleh Indotama,	W/S Management Public Relations & Media Relations Company, organized by Indotama ,
W/S Bedah polis & klausula asuransi property all risk (PAR), industrial all risk (IAR), yang diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha (WDA),	W/S Surgical property insurance policies and clauses all risk (PAR), industrial all risk (IAR), organized by Widya Dharma Artha (WDA),
Seminar Enterprise risk management, yang diselenggarakan oleh AAUI dan AAJI,	Enterprise risk management seminar, organized by AAUI and AAJI,
International Conference Ensuring financial sustainability of insurance, pension & social security systems, diselenggarakan oleh Challenges & Opportunities,	International Conference Ensuring financial sustainability of insurance, pension and social security systems, organized by Challenges & Opportunities,
Tutorial Analisis aktuaris asuransi umum, yang diselenggarakan oleh PT Promo Literasi Prima bekerjasama dg OJK,	Tutorial Analyst general insurance actuaries, organized by PT Promo Literasi Prima and FSA,
W/S The Swiss Re portofolio Management, yang diselenggarakan oleh Swiss Re, di Jakarta,	W/S The Swiss Re portfolio Management, organized by Swiss Re, in Jakarta,
Pelatihan & ujian Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Ajun, yang diselenggarakan oleh AASI,	Training and Skills Certification exam Takaful Level Adjunct, organized by AASI,
Underwriting Gathering, yang diselenggarakan oleh AAJI,	Underwriting Gathering, organized by AAJI,
Seminar & kuliah lapangan : Geo ekskusi Maipark 2015, diselenggarakan oleh PT Reasuransi Maipark, di Aceh,	Seminars and lectures field: Geo execution Maipark 2015, organized by PT Reasuransi Maipark, in Aceh,
Tutorial ujian Aktuaris modul F10, diselenggarakan oleh PT ASA Infomega,	Tutorial Actuaries exam on F10 module, which was held oleh PT ASA Infomega,
W/S Asuransi Pembangunan Kapal, diselenggarakan oleh STIMRA,	W/S Insurance for Shipbuilding, which was organized by STIMRA,
Tutorial Internal ujian AAMAI subyek 001 (Pengantar Prinsip Asuransi) dan subyek 002 (Pengantar Hukum Asuransi), yang diselenggarakan di NASIONAL RE,	Internal exam tutorial AAMAI subject 001 (Introduction to the Principles of Insurance) and subject 002 (Introduction to Insurance Law), which was held at the NASIONAL RE,
Aviation Insurance In House Training, yang diselenggarakan oleh KMD Brokers, di NASIONAL RE,	Aviation Insurance In House Training, which was organized by KMD Brokers, at the NASIONAL RE,
Pelatihan dan uji Certified Risk Management Professional (CRMP) untuk peserta dari Mitra Bisnis (Cedant), yang diselenggarakan oleh LSPMR – PT RAP Indonesia, di NASIONAL RE,	Training and testing of Certified Risk Management Professional (CRMP) for participants of the Business Partners (cedant), which was organized by LSPMR-PT RAP Indonesia, at the NASIONAL RE,
W/S Internal Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) – Analisis & Sintesis Holistic View : Dimensi ADLI & LeTCI, yang diselenggarakan oleh Trainer/ Assessor of Malcolm Baldrige & CPE (C. Totok Agung, MM)	W/S Internal Rating Criteria for Performance Excellence (KPKU)-Analysis and Synthesis Holistic View: The dimension of ADLI & LeTCI, which was organized by the Trainer / Assessor of Malcolm Baldrige & CPE (C. Totok Agung, MM)
Undangan Public Hearing Rancangan PMK, yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI),	Invitation for Public Hearing Draft of PMK, which was organized by the Society of Actuaries of Indonesia (PAI),

Kegiatan	Activities
W/S POJK No. 17/POJK.03/2014 Ttg Penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan serta peraturan turunannya yaotu SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015,diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),	W/S POJK No. 17/POJK.03/2014 TTG Implementation of integrated risk management for financial conglomerates as well as derivatives regulation namely SEOJK No. 14/ SEOJK.03/2015, which was organized by the Financial Services Authority (FSA),
W/S Analisis laporan keuangan,diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),	W/S Analysis of the financial statements, which was organized by the Indonesian Institute of Accountants (IAI),
W/S Helpdesk full package,diselenggarakan oleh PT Andalan Teknologi,	W/S Helpdesk full package, which was organized by PT Andalan Teknologi ,
W/S 26th Asean School for Young Insurance Managers (AYIM),diselenggarakan oleh Asean Insurance Council – Singapore College of Insurance, bertempat di Phnom Penh, Cambodia,	W/S on the 26th Asean School for Young Insurance Managers (AYIM), which was organized by the Asean Insurance Council-Singapore College of Insurance, held in Phnom Penh, Cambodia,
Pelatihan PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2016,diselenggarakan oleh AAJI,	Training on SFAS which became effective as of January 1, 2016 which was organized by AAJI,
Seminar Global Uncertainly Softening Reinsurance Cycle and NASIONAL REtention Policy,diselenggarakan oleh AAUI,	Seminar Global Reinsurance uncertainly Softening Cycle and NASIONAL REtention Policy, which was organized by AAUI,
Konferensi Peluang & Tantangan industri asuransi dalam menghadapi era informasi & globalisasi,diselenggarakan oleh AAMAI bekerjasama dg Universitas Gunadarma,	Conference on Opportunities and Challenges of the insurance industry in the era of information and globalization, which was organized by AAMAI in collaboration with Gunadarma University,
W/S Profil Rising teknologi pembangkit listrik & risk assessment,diselenggarakan oleh STIMRA,	W/S Profile Rising electricity generation technologies and risk assessment, which was organized by STIMRA,
W/S Bedah kasus kecurangan & teknik investigasi klaim asuransi kendaraan bermotor,diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha (WDA),	W/S Surgical investigative techniques in cases of fraud and motor vehicle insurance claim, which was organized by Widya Dharma Artha (WDA),
Undangan Pasar Asuransi Mikro Indonesia,diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),	Invitation to Markets Microinsurance Indonesia, which was organized by the Financial Services Authority (FSA),
Seminar Strategi Produktivitas pada asuransi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),diselenggarakan oleh AAJI,	Productivity Strategy Seminar on insurance in the face of the Asean Economic Community (AEC), which was organized by AAJI,
Training Mastering ITIL Foundation, diselenggarakan oleh PT Andalan Teknologi Inovasi,	Training on Mastering ITIL Foundation, organized by PT Andalan Teknologi Inovasi,
Sosialisasi Pencegahan & pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana terorisme (TPPI),diselenggarakan oleh AAJI – OJK,	Socialization Prevention and combating money laundering (AML) and terrorist acts (TPPI), which was organized by AAJI-FSA,
Inhouse Training/Inggriya Trade Credit Insurance – Underwriting and Claims Aspects,diselenggarakan di NASIONAL RE oleh Atradius RE (Irelandia) – ARB Brokers (Singapore),	Inhouse Training / Inggriya Trade Credit Insurance-Underwriting and Claims Aspects, which was held at the NASIONAL RE by Atradius RE (Ireland)-ARB Brokers (Singapore),
Uji perbaikan Sertifikasi CRMP (Certified Risk Management Professional) untuk peserta dari mitra bisnis,diselenggarakan di PT RAP Indonesia,	Test of CRMP Certification (Certified Risk Management Professional) for participants from business partners, which was held in PT RAP Indonesia,
Seminar Nasional Peranan Auditor Internal dalam rangka efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal,diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Internal (AAI),	National Seminar on Role of Internal Auditors in order of effectiveness of governance, risk management and internal control, which was organized by the Association of Internal Auditors (AAI),
Pelatihan Asesmen Manajemen Risiko (Maturity Level),diselenggarakan oleh NASIONAL RE – PT Askrindo, bertempat di NASIONAL RE,	Training Assessment Risk Management (Maturity Level), which is held by the NASIONAL RE-PT Askrindo, at NASIONAL RE,
Pelatihan Asuransi syariah bagi Dewan Pengawas Syariah, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI),	Training for Takaful Shariah Supervisory Board, which was organized by the Association of Takaful Indonesia (AASI),
Workshop “Insurance Audit Basic Concepts Of Operational Audit Of Insurance Technical” yang diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha (WDA),	Workshop "Basic Concepts Of Insurance Audit Operational Audit Of Technical Insurance" organized by Widya Dharma Artha (WDA),
Workshop “Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi”, yang diselenggarakan oleh LPMA-STMA Trisakti,	Workshop "Establishment of Technical Reserves Share Insurance and Reinsurance Company", organized by LPMA-STMA Trisakti,
Workshop Komisarariat ASGARA JASKEU Plus Akhir Th. 2015,diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI),	Workshop Commissariat ASGARA JASKEU Plus in 2015, which was organized by the Forum of Communication of Internal Control Unit (FKSPI),
W/S Penerapan PSAK terbaru pada penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2015, yang diselenggarakan oleh AauI,	W/S Application of SFAS latest at the end of the preparation of financial statements in 2015, organized by AAUI,

Kegiatan	Activities
Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia th. 2015, yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, bertempat di Bandung,	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of DPS Islamic Financial Institutions in Indonesia in 2015, organized by the National Islamic Council MUI, held in Bandung,
W/S IT Capacity Planning, yang diselenggarakan oleh PT Sharing Vision, bertempat di Bandung,	W/S IT Capacity Planning, organized by PT Sharing Vision, held in Bandung,
Training Mastering ITIL Foundation 2011 dan Exam Preparation, yang diselenggarakan oleh PT Andalan Teknologi Inovasi,	Mastering ITIL Foundation 2011 Training and Exam Preparation, organized by PT Andalan Technology Innovation,
Workshop Risk Based Internal Audit – Focusing on What Matters, yang diselenggarakan oleh FDB Events Pte Ltd, Singapore,	Workshop on Risk Based Internal Audit-Focusing on What Matters, organized by the FDB Events Pte Ltd, Singapore,
Asia Conference on Big Data & Analytics for Insurance, yang diselenggarakan oleh Asia Insurance Review, Singapore.	Asia Conference on Big Data & Analytics for Insurance, organized by Asia Insurance Review, Singapore.

Pengembangan Karir dan Kesetaraan Kesempatan

NASIONAL RE mendukung pengembangan karir bagi seluruh karyawannya melalui pelaksanaan pelatihan khusus yang terencana. Selain itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh pekerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik, sejak proses rekrutmen, maupun dalam program pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi.

Strategi Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Remunerasi merupakan imbalan kerja dari perusahaan bagi karyawan yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pension, dan lain sebagainya. Dalam menyusun strategi remunerasinya, NASIONAL RE mempertimbangkan berbagai hal selain kemampuan perusahaan. Salah satu yang utama adalah kinerja karyawan. Dengan menerapkan strategi remunerasi berbasis kinerja, Perusahaan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga pertumbuhan, dan memperkuat posisinya di tengah persaingan usaha. Strategi ini juga diterapkan untuk mempertahankan karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki Perusahaan.

Remunerasi juga terkait dengan kesejahteraan karyawan dan bagi Perusahaan hal ini merupakan hal yang paling esensial dalam pengembangan SDM. Perusahaan memberikan perhatian khusus dalam masalah kesejahteraan karyawan serta terus melakukan peningkatan dari tahun ke tahun.

Kebijakan Remunerasi yang diterapkan perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014. Dengan demikian, seluruh pegawai mendapatkan tingkat kesejahteraan yang memadai dan dengan demikian menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

Career Development and Equal Opportunity

NASIONAL RE supports career development for all employees through the implementation of well planned trainings. In addition, the Company also provides opportunities and equal rights for all workers, regardless of ethnic, religion, race, class, gender and physical condition, from the beginning of the recruitment process, as well as in the competence and skills development programs and well established career path and competitive remuneration.

Remuneration Strategy and Employee Benefits

Remuneration is the benefit of employees of the company for employees to wages and salaries and allowances fixed, fees, incentives, bonuses for achievement, severance, pension and so forth. In preparing the remuneration strategy, NASIONAL RE consider various things other than the ability of the Company. One of the main ones is the performance of the employee. By implementing performance-based remuneration strategy, the Company is able to improve productivity, maintain growth and strengthen its position in the middle of the competition. This strategy is also applied to retain the best employees of the Company.

Remuneration is also related to the welfare of employees and the Company recognizes this is the most essential aspect in the development of human resources. The Company pays attention to employee welfare issues and continuously improve it.

Remuneration policy applied by the Company refers to the Law No. 13 of 2013 on Labour and the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04 / MBU / 2014. Thus, all employees can enjoy a proper standard of living and help promoting comfort working environment.

Pengelolaan Hubungan Industrial

NASIONAL RE menerapkan sistem manajemen *human assets* yang berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Selain dari itu NASIONAL RE juga mengakui hak pekerja untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja yang berpedoman pada Budaya Perusahaan, Kebijakan Perusahaan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok-pokok Organisasi. Perusahaan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar *Good Corporate Governance* (GCG). Selain daripada itu, Perusahaan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

Untuk itu segenap jajaran perusahaan baik Direksi, manajemen dan pekerja akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pekerja sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. Perusahaan melaksanakan beberapa hal mengenai pekerja dan hubungan industrial antara lain:

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pekerja;
2. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan;
4. Meningkatkan disiplin pekerja agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan *reward* dan *punishment* secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pekerja;
6. Memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja;
7. Menempatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai komitmen Perusahaan;
8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pekerja;

Industrial Relations Management

NASIONAL RE implements the human assets management system based on the principles of openness, fairness, motivational and free from bias due to differences in ethnicity, origin, gender, religion and origin of birth, as well as the things that are not related to performance. Aside from that, NASIONAL RE also recognizes the right of employees to be involved in organization/union in accordance with the provisions of the applicable legislation.

The Company continuously coaches and develops its employees based on the Corporate Culture, Corporate Policies on employment, Principal Regulations of Personnel and Organization. The Company also guarantees that the aforementioned regulations are in accordance with the standards of Good Corporate Governance. In addition, the Company is fully aware of the dynamic changes in the business environment.

To that end, all levels of the Company, either Board of Directors, management and employees will always strive to establish partnerships in order to support each other in achieving mutual goals and progress. The Company will constantly strive to improve the quality of management and their employees in order to perform efficiently and effectively. The Company carries out some issues on employees and industrial relations, among others:

1. Managing the works excellently to motivate and empower workers;
2. Ensuring that the remuneration scheme received by the employees, in general is in accordance with the rules and comparable and competitive with similar industries;
3. Providing opportunities for employees to participate in education and training in line with the competencies and needs of the Company;
4. Increasing the employees discipline to comply with the rules and policies established;
5. Implementing a fair reward and punishment in accordance to the employees' achievement or error;
6. Providing employees the rights to have freedom of association, according to the prevailing laws and regulations and protect the right of employees to join or not join the Labor Union.
7. Making the Collective Labour Agreement (CLA) as the Company's commitment;
8. Providing employees with conducive and safe working conditions;

9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja;
11. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten;
12. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan.

Pekerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap perusahaan. Kewajiban pekerja terhadap Perusahaan antara lain:

1. Setiap pekerja wajib menaati PKB, Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan perusahaan;
2. Setiap pekerja wajib mendahulukan kepentingan perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
3. Setiap pekerja wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;
4. Setiap pekerja wajib menjaga harta milik dan nama baik perusahaan;
5. Setiap pekerja yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan.

Pertemuan antara wakil manajemen dan Serikat Pekerja (SP) pada tahun 2015 dilakukan pada tanggal 27-28 November 2015. Tidak ada perselisihan ketenagakerjaan pada tahun 2015. Pertemuan antara wakil manajemen dan Serikat Pekerja (SP) pada tahun 2015 dilakukan pada tanggal 27-28 November 2015 dengan agenda evaluasi PKB dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

9. Providing post-employment rights in accordance with the applicable regulations;
10. Referring to the Collective Labour Agreement (CLA) in terms of the welfare of the employees, fair competition, provision of working facilities and infrastructure;
11. Implementing Collective Labour Agreement (CLA) consistently;
12. Placing Labour Union as a partner of the Company.

Employees also have a range of obligations that must be fulfilled, among others are:

1. All employees are required to comply with CLA, Corporate Values and all Company regulations.
2. All employees are required to prioritize the interests of the Company that relate directly or indirectly with their responsibilities.
3. All employees are required to exert their best efforts in carrying out their assigned duties.
4. All employees are required to maintain the property and reputation of the Company.
5. All employees who became supervisors are required to develop subordinate staff and provide exemplary.

The meeting between representatives of management and Labour union (SP) in 2015 was held on November 27 to 28, 2015. There are no labor disputes in 2015. The meeting between management representatives and Labour union (SP) in 2015 took place on November 27 to 28 2015 with agenda of CLA evaluation and discussion on issues relating to employment.

Komposisi Karyawan

Per 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki 190 karyawan dengan jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, D3, S1 dan S2. Berdasarkan jabatan komposisi berjenjang mulai dari Pegawai Kontrak, Pegawai Dasar, Pelaksana, Kepala Seksi, Kepala Bagian, dan Kepala Divisi.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan, usia dengan status pegawai tetap selengkapnya dapat dilihat di bawah ini:

Employee Composition

As of December 31, 2015, the Company had 190 employees with education levels ranging from elementary school, junior high, high school, Under Graduate, Bachelor and Masters' degree. Based on the position, the composition ranging from Temporary Employees, Clerk, Officer, Section Head, Department Head and Division Head.

Composition of employees by occupation, education, age and status of permanent employee can be seen below:

KETERANGAN/NOTE	2014	2015
Pria/Male	115	123
Wanita/Female	60	67
TOTAL	175	190

DATA PEGAWAI NASIONAL RE BERDASARKAN UMUR PEGAWAI/NASIONAL RE EMPLOYEE BY AGE Per 31 Desember 2015/As of December 31, 2015

No	Jabatan/Position	20 s/d 24 tahun /y.o.	25 s/d 29 tahun/ y.o.	30 s/d 34 tahun/ y.o.	35 s/d 39 tahun	40 s/d 44 tahun	45 s/d 49 tahun	50 s/d 54 tahun	55 tahun ke atas	TOTAL
1.	Kepala Divisi/Head of Division	0	0	0	1	2	6	3	0	12
2.	Kepala Bagian / Head of Department	0	0	0	3	6	9	4	1	23
3.	Kepala Seksi / Head of Section	0	0	11	12	11	8	6	0	48
4.	Pelaksana / Officer	10	32	8	8	5	5	1	0	69
5.	Pegawai Dasar/Clerk	0	0	0	3	6	6	0	0	15
6.	Pegawai Kontrak/ Temporary Employee	7	12	3	0	1	0	0	0	23
SUBTOTAL		17	44	22	27	31	34	14	1	190
GRANDTOTAL										190

Komposisi Pendidikan Pegawai Per 31 Desember 2015/Composition of Employee by Education as of December 31, 2015)

No	Jabatan / Position	Jenjang Pendidikan / Education Level												Jumlah/Total	
		S2 (M)		S1 (B)		D3 (UG)		SLTA (SH)		SLTP (JH)		SD (E)		2014	2015
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
1.	Kepala Divisi/Head of Division	4	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	10	12	
2.	Kepala Bagian / Head of Department	4	4	18	19	-	-	-	-	-	-	-	22	23	
3.	Kepala Seksi / Head of Section	6	5	41	40	3	3	-	-	-	-	-	50	48	
4.	Pelaksana / Officer	1	1	37	64	4	3	2	1	-	-	-	44	69	
5.	Pegawai Dasar/Clerk			1				11	11	3	3	1	1	16	15
6.	Pegawai Kontrak/ Temporary Employee		1	20	11	6	7	7	4				33	23	
Jumlah/Total		15	16	123	141	13	13	20	16	3	3	1	1	175	190

Note:

M = Masters' Degree, B = Bachelor Degree, UG = Under Graduate, SH = Senior High, JH = Junior High, E = Elementary School

Komposisi Tenaga Ahli

Sampai dengan bulan Desember 2015, perusahaan memiliki 190 (seratus sembilan puluh) orang pegawai (tidak termasuk Direksi), dan 53 (lima puluh tiga) diantaranya telah menyanggah gelar profesi, baik ajun ahli maupun ahli asuransi, yaitu:

The Composition of Experts

As of Desember 2014, the Company had 190 (one hundred and ninety) employees (excluding Directors) and 53 (fifty three) of which have professional titles, both adjunct experts and insurance experts, namely:

Komposisi Keahlian Pegawai (per 31 Des.2015)/The Composition of Employee Experts as of December 31, 2015

No	Keahlian/Expert	Jumlah/Total	
		Des-14	Des-15
1.	ANZIIF-Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance	1	1
2.	ACII-Associate of the Chartered Insurance Institute	4	4
3.	AAIK-Ahli Asuransi Indonesia – Kerugian	5	5
4.	AAIJ-Ahli Asuransi Indonesia – Jiwa	1	1
5.	AAAIK-Ajun Ahli Asuransi Indonesia-Kerugian	9	10
6.	AAAIJ-Ajun Ahli Asuransi Indonesia-Jiwa	11	11
7.	FSAI-Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia	1	1
8.	AMII-Associate of the Malaysian Insurance Institute	8	8
9.	FIIIS-Fellow of Islamic Insurance Society	2	2
10.	AIIS-Associate of Islamic Insurance Society	8	9
11.	IPGDI-International Post Graduate Diploma in Insurance	2	1
Jumlah/Total		52	53

Evaluasi Kinerja Karyawan

Evaluasi kinerja karyawan dilakukan dengan menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) perusahaan yang kemudian diturunkan masing-masing unit kerja untuk kemudian dibuat dalam *Performance Appraisal* (PA) masing-masing Pegawai.

Yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian seluruh karyawan dan unit kerja untuk melakukan atau menyusun target-target di tahun selanjutnya.

Jumlah karyawan yang mendapat promosi dan rotasi/mutasi pada tahun 2015 adalah:

- Karyawan yang promosi sejumlah : 8 karyawan
- Karyawan yang rotasi/mutasi sejumlah : 16 karyawan
- Total karyawan yang promosi dan rotasi/mutasi sejumlah : 24 karyawan

Employee Performance Evaluation

Employee performance evaluation is carried out using *Key Performance Indicators* (KPI) of company, which then applied in each work unit and then used for *Performance Appraisal* (PA) of each employee.

Following up results from the performance evaluation is evaluating the achievement of all employees and work units in performing or setting the targets for the next year.

The number of employees who received promotions and rotation/transfer in 2015 are:

- Promotion : 8 employees
- Job rotation/mutation : 16 employees
- Total employees receiving promotion and rotation/mutation : 24 employees

Pengelolaan Teknologi Informasi & Komunikasi

Kebijakan Pengembangan TIK

Sebagai infrastruktur strategis, Perusahaan menempatkan fokus tersendiri terhadap pengembangan aspek Teknologi Informasi & Komunikasi. Upaya pengembangan yang dilakukan berfokus pada dukungan sistem Teknologi Informasi yang dapat menghadirkan proses bisnis serta layanan yang cepat, akurat dan efisien serta mendorong inovasi-inovasi secara berkelanjutan.

Dukungan Teknologi Informasi tersebut diterapkan baik untuk menghasilkan produk baru maupun mengoptimalkan proyek yang telah berjalan sehingga dapat memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi para pelanggan dan *stakeholders*. Karena itu, Perusahaan menyusun desain serta pengelolaan teknologi informasi secara terintegrasi meliputi:

1. **Availability** yaitu ketersediaan layanan infrastruktur TIK yang terbebas dari gangguan;
2. **Scalability** yaitu kemampuan untuk menampung peningkatan beban kerja layanan TIK;
3. **Security** yaitu pengamanan integritas data dari ancaman pencurian, pengubahan dan penghapusan, baik yang dilakukan melalui jaringan, maupun akses langsung ke fasilitas fisik TIK;
4. **Serviceability** yaitu kemudahan untuk melakukan pemeliharaan termasuk perbaikan dari kerusakan; dan
5. **Manageability** yaitu kemudahan dalam pengelolaan, termasuk administrasi dan pengoperasiannya.

Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

Selain mengembangkan program dan aplikasi, serta melakukan *upgrading* peralatan infrastruktur TIK secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi, Perusahaan juga melaksanakan program pengembangan SDM bidang TIK, yakni melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan Divisi TIK. Peningkatan kompetensi SDM ini dilakukan melalui pemberian berbagai training yang relevan termasuk pendidikan aplikasi, program sertifikasi keahlian, manajemen risiko di bidang TIK, hingga tahap *programmer* bagi pengembangan fitur-fitur aplikasi.

Management of Information and Communication Technology

ICT Development Policy

As a strategic infrastructure, the Company need to pay special attention on the development of Information Technology. The development efforts are focused on the support of Information Technology system that provides a fast, accurate and efficient business processes and services and to encourage innovation in a sustainable manner.

IT support is used during the creation of new products or when optimizing the existing project so as to provide satisfaction and added value for customers and stakeholders. Therefore, the Company has prepared the design and management of information technology in an integrated manner that includes:

1. **Availability**, which is the availability of ICT infrastructure services free from interference;
2. **Scalability**, or the ability to accommodate the increased workload of ICT services;
3. **Security**, safeguarding the integrity of the data from the threat of theft, alteration and deletion, whether done through the network, as well as direct access to physical ICT facilities;
4. **Serviceability**, the ease to perform maintenance including repair of the damage; and
5. **Manageability**, or the ease in managing, including the administration and operation.

HR Development for ICT Sector

In addition to developing programs and applications, as well as upgrading its ICT infrastructure equipment on a regular basis, according to the needs and technological developments, the Company also implement development programs for human resources in ICT sector, namely by improving the competence and professionalism of the employees of the ICT Division. The development of HR competencies is conducted through the provision of various relevant training programs, including applications training, skills certification program, ICT risk management and programmer for the development of application features.

Satuan Kerja Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

Satuan kerja teknologi informasi berada pada Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi yang terdiri dari 13 orang dengan komposisi pendidikan S1 sebanyak 12 orang serta D3 sebanyak 1 orang.

Dalam struktur organisasi perusahaan, Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi digambarkan sebagai berikut:



Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi

a. Roadmap Sistem Informasi

Secara ringkas, *roadmap* implementasi arsitektur sistem informasi yang dipetakan berdasarkan tema pada masing-masing fase dijelaskan pada gambar berikut:

Masing-masing program pada setiap fase mencerminkan sasaran Divisi TIK dalam rangka meningkatkan optimalisasi dukungan TIK terhadap sasaran bisnis. Fase pertama, yaitu program peningkatan nilai tambah data dan informasi memiliki beberapa tujuan teknis, diantaranya memanfaatkan data yang belum termanfaatkan secara optimal, meningkatkan utilisasi data, dan mengolah data mentah yang tersedia untuk dapat dijadikan informasi atau *knowledge* yang lebih bernilai untuk kebutuhan bisnis.

Information and Communication Technology (ICT) Unit

Information and Communication Technology unit is part of the Division of Information and Communication Technology consisting of 13 persons, with the composition of 12 graduates and 1 Undergraduate.

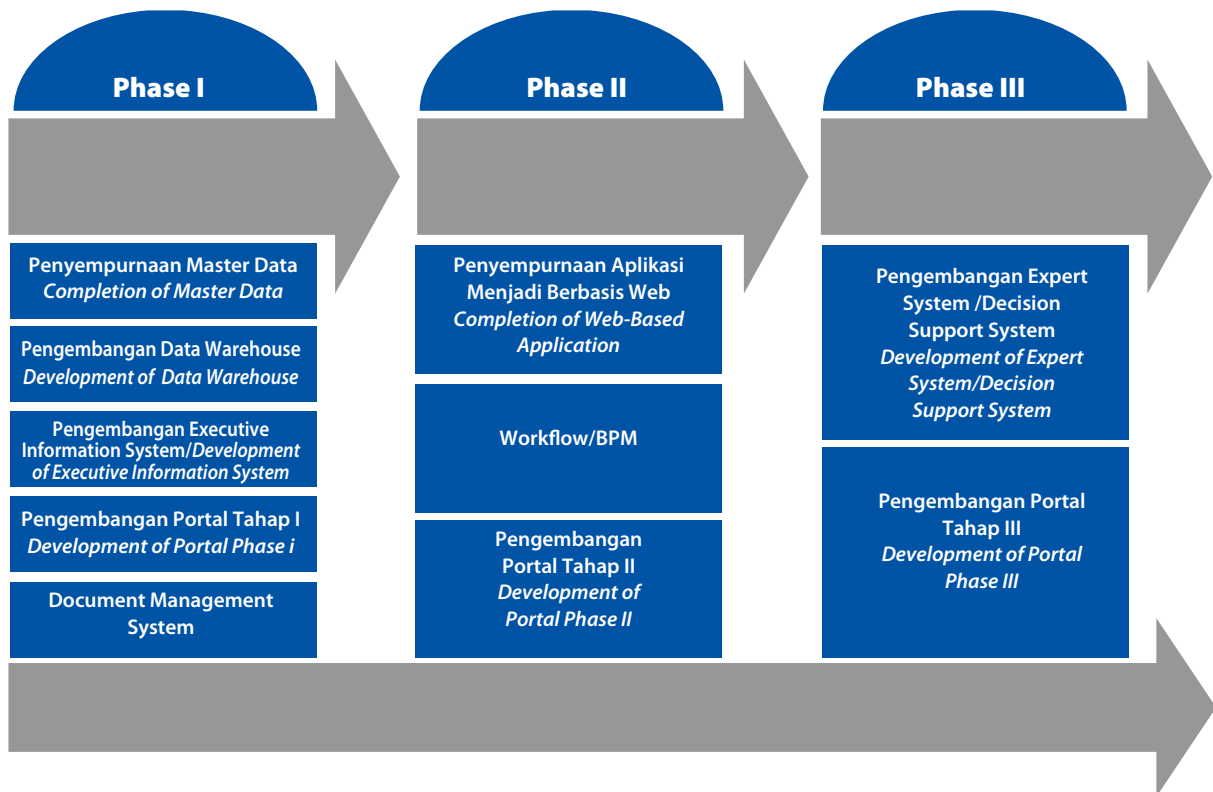
In the Company's organizational structure, the Division of Information and Communication Technology is described as follows:

Roadmap for Development of Information and Communication Technology

a. Information Systems Roadmap

In short, the roadmap of architecture implementation information systems, mapped based on the theme of each phase, is described in the following image:

Each program in each phase reflects SIMR Division goals in order to improve the optimization of ICT support towards business objectives. The first phase is the program to increase value-added data and information, with some technical purposes, including using data that has not been utilized optimally, improve the utilization of data and process the available raw data to become more valuable information or knowledge for the business needs.

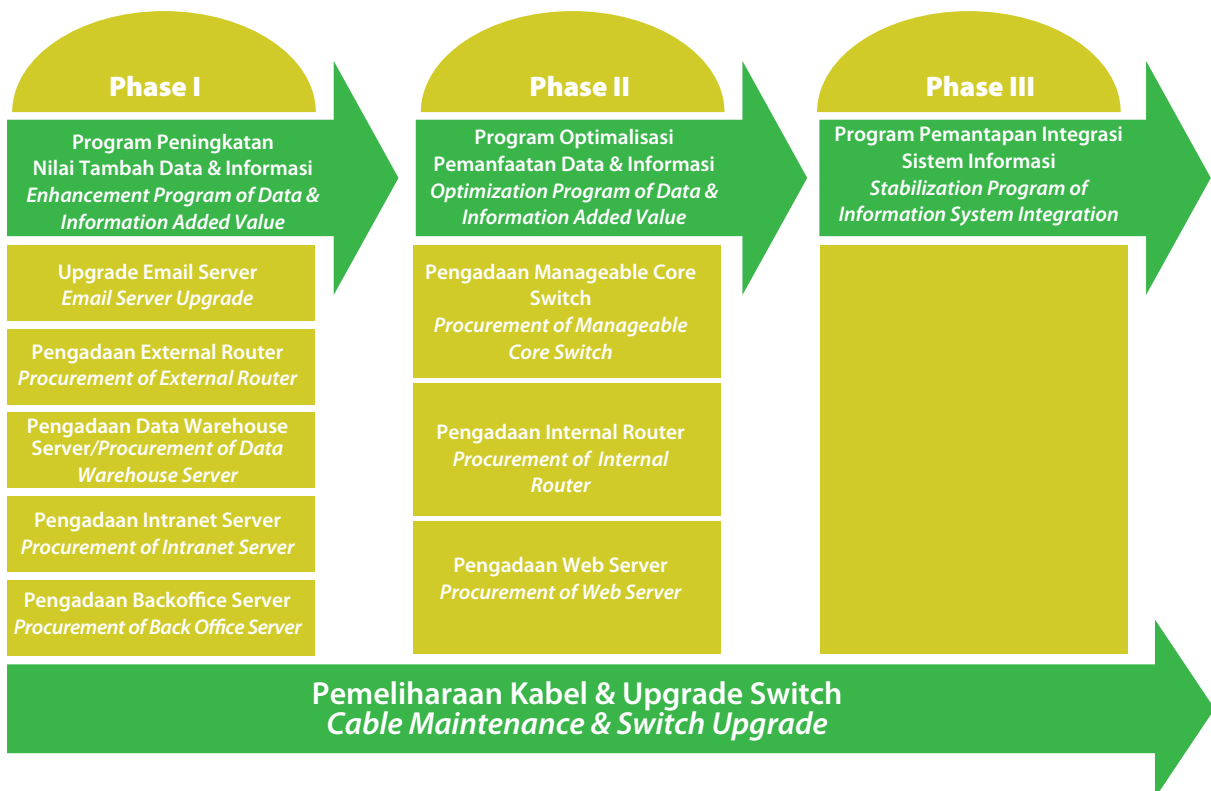


b. Roadmap Teknologi Informasi & Komunikasi

Roadmap teknologi informasi sebagian besar mencakup kegiatan pengadaan. Kegiatan pengadaan ini disesuaikan dengan *roadmap* sistem informasi yang telah diuraikan di atas. Kegiatan pengadaan dan upgrade ini dapat dilihat pada Gambar *Roadmap* Teknologi Informasi & Komunikasi berikut ini.

b. Roadmap of Information and Communication Technology

Information technology roadmap is mostly about procurement activities. This procurement activity is tailored to the roadmap information system described above. This procurement activities and upgrades can be seen in the following Image of Information and Communication Technology Roadmap.



Kegiatan pemeliharaan kabel merupakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan *roadmap* sistem informasi & komunikasi sehingga tidak terlihat pada gambar. Kegiatan pemeliharaan kabel seyogyanya merupakan kegiatan rutin yang berkelanjutan.

Web Server

Dari gambar di atas terlihat bahwa kegiatan pengadaan telah dapat diselesaikan pada fase kedua. Kegiatan yang terkait pemeliharaan tentunya dilakukan pada semua fase.

Manajemen TIK

Dalam rangka mendukung program-program kerja yang terkait dengan pengembangan arsitektur sistem maupun teknologi informasi, dibutuhkan organisasi TIK yang ideal sesuai dengan acuan *best practice* pengelolaan TIK.

Tahap awal dari membenahan manajemen dan tata kelola TIK adalah dengan merancang kebijakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengembangan maupun pengelolaan terhadap seluruh proses dalam daur hidup TIK. Kebijakan ini selayaknya juga menaungi seluruh aspek TIK, mulai dari manajemen informasi, aplikasi, infrastruktur pendukung, hingga manajemen organisasi TIK itu sendiri. Sehingga diharapkan segala kegiatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan TIK yang tentunya melibatkan unit kerja lain memiliki suatu acuan induk atau pedoman yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Beberapa standar atau *best practice* dapat diadopsi untuk perancangan *ICT Policy* ini, diantaranya COBIT 4.1 dan *IT Infrastructure Library* untuk Manajemen proses khusus pada infrastruktur.

Tahap berikutnya setelah disahkannya *ICT Policy* NASIONAL RE-Wide ini adalah perancangan kebijakan keamanan informasi yang konsepnya disarikan dari *ICT Policy* dan merujuk kepada standar keamanan informasi sesuai *best practice*, semisal ISO/IEC 27001 tentang sistem Manajemen keamanan informasi.

Pembenahan proses dalam pengelolaan TIK dapat pula diturunkan dari *ICT Policy* yang telah didefinisikan. Beberapa proses yang perlu ditingkatkan maturitasnya melalui pembakuan prosedur antara lain adalah identifikasi solusi bagi otomatisasi proses bisnis dan prosedur sosialisasi beserta mekanisme relasional antara TIK dan Bisnis.

Kegiatan penyesuaian fungsi organisasi terhadap kebutuhan arsitektur sistem/teknologi informasi dapat dilaksanakan secara fleksibel. Fungsi-fungsi yang ada dapat menempel ke masing-

Cable maintenance activities are activities that are not directly related to information systems roadmap so it is not presented in the image. Cable maintenance activities should be an ongoing routine activity.

Web Server

As seen in the image above, procurement has been completed in the second phase. Maintenance related activities must be done on all phases.

ICT Management

In support of the work programs related to the development of the system architecture and information technology, an ideal ICT organizations is needed, with refers to the best practices of ICT management.

The early stages of revamping Management and ICT governance are to prepare policy as its legal umbrella for the development and management of the entire process in the life cycle of ICT. This policy should also overshadow all aspects of ICT, ranging from information Management, applications, support infrastructure, to IT Management organization itself. It is expected all the activities for IT development and management that would involve other unit has a parent reference or guidelines agreed upon and adhered together.

Some standards or best practices can be adopted to design the ICT Policy, including COBIT 4.1 and the IT Infrastructure Library for special process Management on the infrastructure.

The next stage, following the ratification of NASIONAL RE-Wide ICT Policy is designing the concept of information security policy, based on the ICT Policy and referring to the best practices of security standards of information, such as ISO/IEC 27001 on Information Security Management systems.

Revamping the processes in ICT management can also be based on the defined ICT Policy. Some processes, which maturities need to be improved through standardization of procedures, include identifying solutions for business process automation and socialization procedures, as well as relational mechanism between ICT and the business.

The alignment of functions of organization and the system architecture/information technology is brought about in a flexible manner. Existing functions can be attached to each of existing

masing personal yang telah ada di dalam struktur organisasi melalui pemberian kegiatan pelatihan atau penambahan kompetensi apabila penambahan jumlah personal tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Program Pengembangan Aplikasi Utama

Sebagai salah satu perusahaan reasuransi, yang mempunyai misi memberikan kapasitas reasuransi maka NASIONAL RE berperan serta dalam menyediakan kapasitas reasuransi Umum dan Jiwa baik jenis Konvensional maupun Syariah.

Untuk keperluan itulah perusahaan memiliki modul-modul penting sebagai berikut:

1. Modul Aplikasi Reasuransi Umum Syariah;
2. Modul Aplikasi Reasuransi Jiwa Syariah;
3. Modul Aplikasi Reasuransi Umum Konvensional;
4. Modul Aplikasi Reasuransi Jiwa Konvensional;
5. Modul Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Modul Akuntansi & Keuangan.

Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi

Untuk mendukung berjalan baiknya operasional perusahaan, berbagai upaya telah diusahakan, termasuk melengkapi peralatan dan infrastruktur terkait Teknologi Informasi & Komunikasi secara memadai. Infrastruktur ini meliputi:

1. Perangkat Keras;
2. Perangkat Lunak;
3. Jaringan Komunikasi Data;
4. serta Keamanan Data.

personnel in the organizational structure through provision of additional training or competence, in the event that additional personnel is not possible.

Main Application Development Program

As one of the reinsurance companies which has the mission of providing reinsurance capacity, thus NASIONAL RE takes part in providing reinsurance capacity of both types of General and Life of both Conventional and Sharia.

For that purpose, the Company has following important modules for core business:

1. Sharia General Reinsurance Application Module
2. Sharia Life Reinsurance Application Module
3. Conventional General Reinsurance Application Module
4. Conventional Life Reinsurance Application Module
5. Human Resource (HR) Module
6. Accounting & Finance Module.

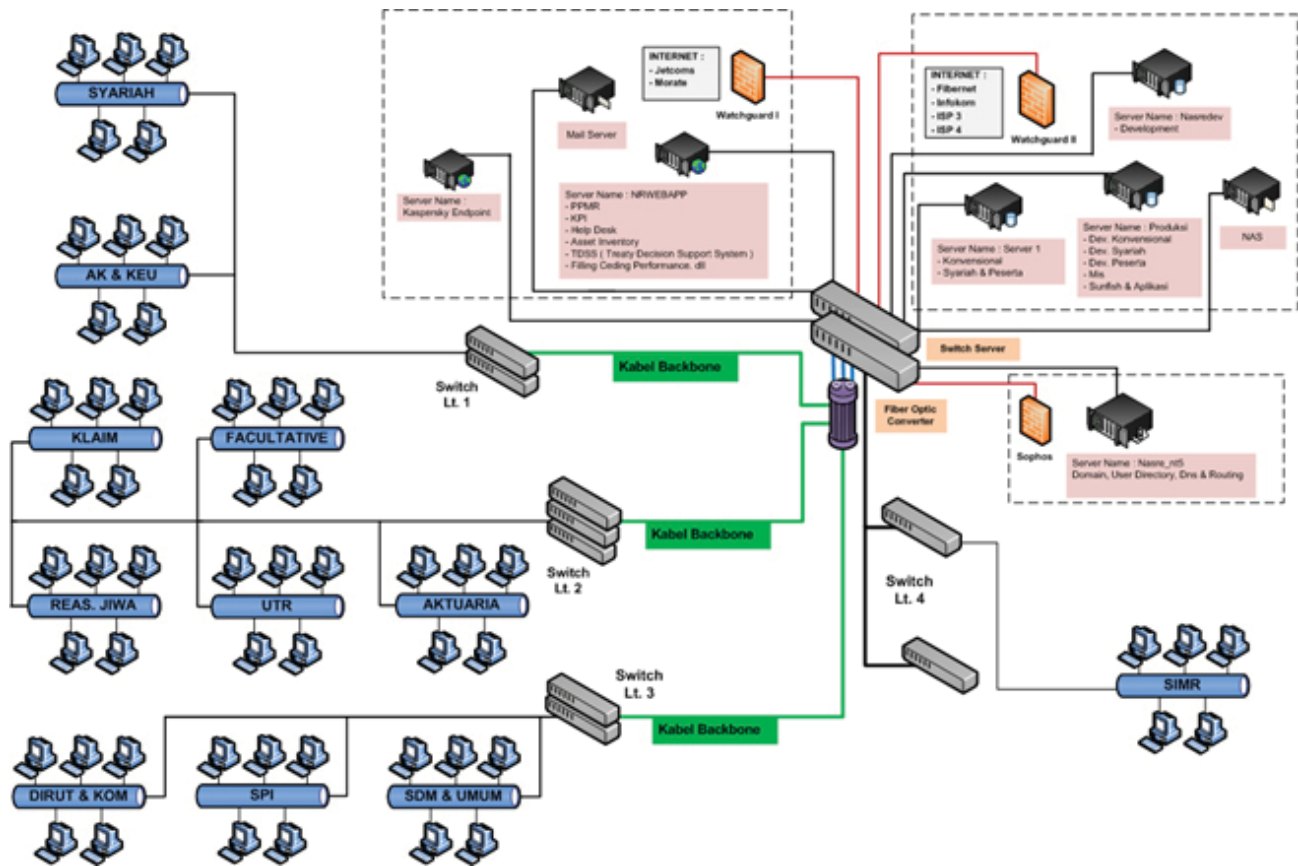
Information & Communication Technology Infrastructure

To support the Company's operations, various efforts have been made, including adequately completing the equipment and infrastructure of information technology. This infrastructure includes:

1. Hardware;
2. Software;
3. Data Communication Networks; and
4. Data Security.

Berikut ini adalah bagan infrastruktur teknologi informasi Perusahaan.

Following is the chart of the Company's information technology infrastructure.



Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi (TIK)

Tata Kelola TIK berorientasi pada pelaksanaan proses kerja dan bukan pada hasil proses kerja, sehingga menuntut adanya pengelolaan dan pelaksanaan proses kerja yang lengkap dan terintegrasi. Tingkat kematangan dalam Tata Kelola TIK yang semakin tinggi akan tercermin pada pengelolaan TIK yang berorientasi pada upaya Preventif dan Proaktif, Risiko TIK yang terkendali, dan menghindari terjadinya masalah yang sama berulang kali serta dapat memberikan jaminan mutu yang lebih konsisten dalam jangka panjang.

Terdapat empat proses dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagai berikut:

- A. Proses Kerja Pengelolaan Tingkat Layanan
PT Reasuransi Nasional Indonesia dalam menjalankan proses kerja pengelolaan tingkat layanan yang sistematis dan terintegrasi masih melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar dapat mendorong terjadinya tingkat layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna pada semua tingkat layanan. Hal ini dimaksudkan supaya pengukuran tingkat layanan yang diberikan kepada pengguna dapat dilakukan lebih lengkap dan akurat.
- B. Proses Kerja Pengembangan Solusi Berbasis TIK
Dalam pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Solusi Berbasis TI dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengujian *System Test*, *User Acceptance Test* dan pendekatan *IT Project Management* secara formal, lengkap, dan sistematis.
- C. Proses Kerja Pengelolaan *Help Desk*
User selaku pengguna layanan TI membuat request berkaitan dengan layanan TIK yang diinginkan untuk membantu memperlancar proses kerjanya dan mengirimnya ke *Help Desk*. Atas dasar request tersebut *Help Desk* mendistribusikan kepada *System Architect TI*, *DBA*, atau *System Development* maupun *Help Desk* memonitor penyelesaian pekerjaan tersebut sampai diterima dan sesuai dengan keinginan *user*. Dengan diterapkannya sistem pelayanan melalui satu pintu secara sistematis dan terintegrasi oleh *Help Desk* tersebut, diharapkan pelayanan kepada user akan membuat semua permintaan pelayanan akan tercatat dengan baik dan penyelesaian pekerjaan akan termonitor dengan baik. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan semua permintaan layanan akan diselesaikan secara lengkap dan terukur serta sudah diselesaikan dengan tepat waktu.

Information Communication and Technology (ICT) Governance

The ICT Governance is a process-oriented rather than result oriented, thus demands a complete and integrated management and execution. A higher level of maturity of ICT Governance will be reflected in an ICT management that is oriented towards Preventive and Proactive efforts, under controlled ICT Risk and preventing same problems from recurring and is able to deliver a more consistent quality assurance in the long run.

There are four processes in the implementation of ICT Governance as follows:

- A. Level of Service Management Working Process
In carrying out a systematic and integrated Level of Service Management Working Process. PT Reasuransi Nasional Indonesia is still conducting ongoing improvement in order to promote the level of service that can suit the users demand at all levels. It is intended to make the measurement on the level of service provided to the user can be conducted more completely and accurate.
- B. ICT-Based Solutions Development Working Process
In the development and refinement of IT Based Solutions application is done by using the evaluating mechanism of System Test, User Acceptance Test and IT Project Management approach in a formal, complete and systematic way.
- C. Help Desk Management Working Process
User of IT service makes a request related to the desired ICT services to help expedite the work process and send it to the Help Desk. Based on the request, the Help Desk staff distributes the task to the IT System Architect, DBA, or the System Development and Help Desk staff to supervise the completion of the work until accepted and in accordance with users' request. With the implementation of one-stop-service system in a systematic and integrated management by the Help Desk, all users' requests will be recorded and the completion of the work will be monitored. This policy is implemented to ensure that all requests will be completed in full, scalable and timely mannered.

D. Proses Kerja Pengelolaan Konfigurasi TIK
 PT Reasuransi Nasional Indonesia dalam melakukan pengelolaan konfigurasi Teknologi Informasi & Komunikasi dengan membuat dokumentasi terhadap Aplikasi Bisnis, *Data Base*, Sistem Operasi, versi *software*, versi *hardware*, dan Infrastruktur.

D. ICT Configuration Management Working Process
 To manage the configuration of IT, PT Reasuransi Nasional Indonesia creates documentation of Business Applications, Database, Operating System, software version, hardware version and Infrastructure.

Inovasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2015

1. **Penerapan Teknologi Voice Over Internet Protocol (VOIP)**
 Pengadaan dan pemasangan *Voice Over Internet Protocol (VOIP)* yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi melalui jaringan internet tanpa dibatasi oleh jarak dan ruang serta biaya yang lebih murah dan efisien.
2. **Pembuatan Aplikasi Pemeliharaan Lisensi berbasis Web**
 Aplikasi yang dibangun berbasis Web dengan tujuan *inventor* dan melakukan *monitoring* atas semua lisensi *software* dan *hardware* yang digunakan perusahaan.
3. **Pembuatan Aplikasi Akseptasi Notification berbasis Android (Mobile)**
 Aplikasi yang dibangun berbasis android (Mobile) yang bertujuan untuk mempermudah akseptasi bisnis tanpa dibatasi jarak dan ruang. Pada umumnya dilakukan melalui *Personal Computer* dan berdampak *paperless*.
4. **Pembuatan Aplikasi Early Warning System Satuan Pengawas Internal (SPI) berbasis Web**
 Bertujuan untuk mempermudah pengawasan khususnya dalam melihat *Cover Retro Facultative*, *Treaty Proportional* maupun *Treaty Non Proportional*, *Akumulasi Big Risks*, *Akumulasi Big Losses* maupun Akseptasi.
5. **Pembuatan Premiums Report Facultative berbasis Web**
 Bertujuan mengetahui data premi Bruto Fakultatif, Premi Bruto *Treaty* dan Reasuransi Jiwa secara *realtime*, cepat dan akurat dalam rangka pengambilan keputusan.
6. **Pembuatan Claim Support System berbasis Web**
 Bermanfaat bagi unit Klaim dalam mengetahui status suatu klaim dengan tujuan menciptakan kepuasan pelanggan. Berisi info tentang status klaim dan *Time Frame* suatu proses klaim.
7. **Pembuatan Asset Management System**
 Suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola aset perusahaan sehingga dapat membantu dalam

Innovations in Information and Communications Technology in 2015

1. **Applying the Voice Over Internet Protocol (VOIP) Technology**
 Procurement and installation of Voice Over Internet Protocol (VOIP) aims to facilitate communication through Internet without being limited by distance and space in more economic and efficient way.
2. **Developing Web-based License Maintenance Applications**
 This web-based application is built to help for inventors and monitoring for all software and hardware licenses used by the company.
3. **Developing Acceptance Notification Application based on Android (Mobile)**
 The application that built on Android (Mobile) aims to simplify the business acceptance without being limited by distance and space. Generally it is made through Personal Computer which leads to a paperless system.
4. **Developing Web-based Early Warning System Application for Internal Audit Unit (IAU)**
 Aiming to facilitate the supervision particularly in viewing Coverage of Retro Facultative, Proportional Treaty and Non Proportional Treaty, Accumulated Big Risks, Accumulated Big Losses and Acceptance.
5. **Developing Web-based Facultative Premiums Report**
 Designed to help finding data of Facultative Gross Premium, Treaty and Life Reinsurance Gross Premium, in realtime, fast and accurate to help decision making process.
6. **Developing Web-based Claim Support System**
 Assisting Claims Unit in finding out the status of a claim with the goal of creating customer satisfaction. Contains information about the status of claims and Time Frame of a claims process.
7. **Developing Asset Management System**
 A system designed to manage the Company's assets, enabling an easy way of calculating the assets to give a more accurate

perhitungannya secara akurat baik Pengelolaan Aset fisik sampai Nilai Penyusutan dan Nilai Amortisasi.

8. Pengembangan *Disaster Recovery System*

Pembangunan replikasi server database di Surabaya yang bertujuan sebagai penyimpan data *Black-up* perusahaan.

Dampak Keuangan Pengelolaan TIK

Jumlah dana yang dianggarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan pengelolaan TIK di tahun 2015, adalah sebesar Rp4.635.040.000. Sementara realisasinya adalah Rp3.319.494.945. Pembelanjaan terbesar digunakan untuk Pembelian PC, laptop, Scanner, & Printer, OS & Office, yakni sebesar Rp1.043.328.200. Pembelian ini dilakukan untuk mengganti peralatan yang umur teknisnya sudah habis (>5 tahun), untuk keperluan presentasi.

result, both in physical Asset Management as well as Values of Depreciation and Values of Amortization.

8. Developing *Disaster Recovery System*

Developing replication of database server in Surabaya for storing the Company's data back-up.

ICT Management Impact on Finance

The amount of funds by The Company allocated Rp4,635,040,000 for the budget of ICT management in 2015. The realization was Rp3,319,494,945. Majority of expenditure was used for purchasing PCs, laptops, scanners and printers, OS & Office, amounting to Rp1,043,328,200. This purchase was made to replace the equipment which technical lifespan has due (> 5 years), for presentation purposes.







Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PENDAHULUAN

Selama ini, berbagai inisiatif dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan telah dilakukan NASIONAL RE dalam rangka membangun dasar yang kuat dalam tata kelola perusahaan, karena bagi kami, *Good Corporate Governance*, merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan. Hal inilah yang mendorong NASIONAL RE untuk berkomitmen senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Perusahaan juga mendorong semua unit usaha untuk juga meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*, di lingkungan operasi mereka.

Pernyataan Komitmen

Sebagai bukti kuatnya komitmen NASIONAL RE dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Perusahaan telah menerbitkan Surat Keputusan Manajemen tentang *Code of Conduct*, *Pedoman Good Corporate Governance*, *Piagam Direksi dan Komisaris*, *Pedoman Transparansi dan Disclosure*, *Piagam Internal Audit*, *Piagam Komite Audit* dan *Piagam Sekretaris Perusahaan*.

Berbagai pedoman tersebut bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai tuntutan pasar dan praktik-praktik terbaik dalam industri asuransi, dimana penyempurnaannya berdasarkan hasil dari penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance*,. Perseroan juga telah membentuk Tim pemantau *Good Corporate Governance*, yang tugasnya mengevaluasi hasil audit penilaian *Good Corporate Governance*,.

Selanjutnya, NASIONAL RE bermaksud untuk melakukan penyempurnaan atas Panduan *Good Corporate Governance*, Perusahaan sejalan dengan diterbitkannya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yang kemudian di perbaharui melalui PP No. 81 tahun 2008. Saat penyusunan Panduan ini telah dikeluarkan konsep POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk Perusahaan Perasuransian, yang telah diedarkan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya.

PREFACE

From time to time, various initiatives in improving corporate governance has been taken by NASIONAL RE in order to build a strong foundation in implementing corporate governance since, for us, *Good Corporate Governance* is a mechanism that regulates the management of the Company in generating long-term economic value in a sustainable manner. It encourages NASIONAL RE to commit to continuously developing and improving the implementation of corporate governance principles at all levels of the organization and its operations. The Company also encourages all of its business units to also improve the quality of *Good Corporate Governance* implementation in their operating environment.

Statement of Commitment

As evidence of the strong commitment of NASIONAL RE in applying the principles of good corporate governance, the Company issued a Management Decree regarding the *Code of Conduct*, *Good Corporate Governance Guidelines*, *Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners*, *Guidelines of Transparency and Disclosure*, *Internal Audit Charter*, *Audit Committee Charter* and the *Charter of the Corporate Secretary*.

Those guidelines are dynamic in nature and is constantly evolving according to market demands and best practices in the insurance industry, and is perfected based on self-assessment results on the implementation of *Good Corporate Governance*. The Company also formed a *Good Corporate Governance* monitoring team and is tasked to evaluate the result of *Good Corporate Governance* audit.

Furthermore, NASIONAL RE intends to make improvements on the Company's guidelines of *Good Corporate Governance* in line with the Law No.40 of 2007 on Limited Companies and Government Regulation (PP) No. 39 of 2008 on the second amendment of Government Regulation No. 73 of 1992 on the organization of insurance business, which then updated through PP No. 81 in 2008. At the time this manual was prepared, FSA issued its concept of *Good Corporate Governance (GCG)* for Insurance Company, which has been circulated to obtain input from various parties in order to perfecting it.

Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan *Good Corporate Governance*

Dalam menyusun pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan, NASIONAL RE mengacu pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh berbagai institusi dan regulator, antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peraturan nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pedoman tersebut telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam peraturan perundangan lain yang terkait, yakni Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Anggaran Dasar perusahaan.

Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

NASIONAL RE tidak memiliki peraturan yang mengharuskan pejabatnya menyampaikan laporan harta kekayaan (LHKPN) hingga level 2 (dua) di bawah Direksi dan penyampaian Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam mendukung gerakan anti korupsi, terdapat peraturan internal (pedoman gratifikasi) yang mewajibkan karyawan untuk melaporkan hal-hal terkait gratifikasi kepada Direksi.

Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* di Perusahaan adalah:

1. Mencapai sasaran usaha Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
3. Menjadikan organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan kewenangannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
4. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*Corporate Social Responsibility*).

Legal Basis for the Implementation of *Good Corporate Governance* Policies

In drawing up the guidelines for the implementation of corporate governance, NASIONAL RE refers to the guidelines issued by various institutions and regulators, among others, Regulation of the Minister of SOES No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises (SOEs), Regulation No. PER-09/MBU/2012 on amendments to the regulations of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011, the Regulation of Financial Services Authority (FSA) No.2/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Insurance Company, as well as the Guidelines of Good Corporate Governance Indonesia by the National Committee on Governance (NCG). These guidelines are in accordance with the rules contained in other relevant legislation, namely Law No. 40 of the Limited Company, regulations from the Financial Services Authority (FSA) and the Articles of Association of the company.

Guideline on State Apparatus Assets Reporting

NASIONAL RE does not implement particular regulation mandating the Executives to submit State Apparatus Assets Reporting (LHKPN) to Second Level below the Board of Directors and Gratification Report to Corruption Eradication Commission (KPK). Hence, as part of our commitment to supporting anti-corruption initiative, the Company has implemented an internal regulation which requires that the employees report gratification-related issues to the Board of Directors.

Objectives of Corporate Governance

Objectives of Good Corporate Governance Implementation in the Company, among others:

- 1) To achieve the Company's business target through a management based on Good Corporate Governance principle.
- 2) To empower function and independency of each Company's organ.
- 3) To encourage the Company's organ in making decision and exercising their authority based on high moral value and compliance with law and regulation.
- 4) To implement Corporate Social Responsibility to the society.

- | | |
|--|---|
| <p>5. Optimalisasi nilai perusahaan bagi Pemegang Saham maupun Pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>6. Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.</p> | <p>5) To optimize corporate values for the Shareholders and other Stakeholders.</p> <p>6) To increase the Company's competitiveness both in national and international level.</p> |
|--|---|

Struktur dan Hubungan Tata Kelola Perusahaan

Organ Perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Tata Kelola secara efektif. Masing-masing Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah Perusahaan membentuk struktur *Good Corporate Governance* yang berfungsi untuk memastikan implementasi *Good Corporate Governance* di seluruh kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan. Struktur inti *Good Corporate Governance* adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Organ-organ ini berperan untuk memastikan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik dalam seluruh kegiatan operasional maupun strategis. Masing-masing komponen memiliki kewenangan tersendiri dan bekerja secara mandiri untuk memenuhi fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

Structure And Relationship Of Corporate Governance

Organ of the Company plays very important role in the effective implementation of corporate governance. Each organ of the Company shall perform its functions based on the principles of independence in carrying out the duties, functions and responsibilities for the benefit of the Company, in accordance with the provisions stated in the Articles of Association and the legislation in force. For this reason the Company has established a corporate governance structure that serves to ensure the implementation of *Good Corporate Governance* in all operational and strategic activities of the Company. *Good Corporate Governance* core structure is the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors. These organs play a role to ensure the implementation of the principles of good corporate governance in all operational and strategic activities. Each component has its own authority and to work independently to fulfill the functions, roles and responsibilities.

Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Agar implementasi *Good Corporate Governance* di Perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan pedoman-pedoman atau aturan tertulis yang memuat tentang kebijakan dan praktek *Good Corporate Governance*, atau biasa disebut sebagai *soft structure*, serta pengaturan-pengaturan lainnya agar Perusahaan dapat tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etis. Karena implementasi *Good Corporate Governance* bukan merupakan hal yang sederhana maka pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik dan terukur. Hal ini dicapai dengan menyusun *roadmap* penerapan *Good Corporate Governance*.

Tujuan penyusunan *roadmap* penerapan *Good Corporate Governance* di Perusahaan adalah untuk menumbuhkan komitmen manajemen dalam menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan terukur, serta untuk penyempurnaan *soft structure Good Corporate Governance*. Penyempurnaan *softstructure* ini akan meningkatkan tanggung jawab manajemen dalam menjaga segenap kepentingan *stakeholders*.

Semenjak dibangun dan diterapkannya *Good Corporate Governance* di lingkungan NASIONAL RE, Direksi telah menetapkan Kerangka Pembangunan dan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2005-2009, periode 2009-2013 dan periode 2013-2017. Secara berkala Perusahaan melakukan penilaian *Good Corporate Governance* untuk melihat seberapa jauh perkembangannya.

Penilaian tahun buku 2012 yang dilakukan oleh konsultan independen untuk versi OJK dilakukan pada tahun 2013 oleh ISEA dengan skor 85 dan untuk tahun 2013 yang dilakukan tahun 2014 untuk versi OJK telah dilakukan self assesment dengan skor 88,21; sedangkan *self assessment Good Corporate Governance* tahun 2014 dengan skor 90,64.

Corporate Governance Implementation Roadmap

In order to properly execute the Good Corporate Governance implementation in the Company, written manuals or guidelines are needed which disclose Good Corporate Governance policy and practices, or known as softstructure, as well as other relevant regulations that the Company always complies with prevailing Law as well as sound and ethical corporate principle. Good Corporate Governance Implementation is not a simple aspect to be done that has to have adequate planning and measure. This will be achieved by formulating Good Corporate Governance implementation roadmap.

Objective of the Good Corporate Governance implementation roadmap preparation is to foster the management's commitment to implementing Good Corporate Governance in consistent and measured manners, as well as to improve Good Corporate Governance. The soft structure improvement will improve the management's responsibility in maintaining the stakeholders' interest.

Ever since the establishment and implementation of Good Corporate Governance in NASIONAL RE, the Board of Directors has assigned Good Corporate Governance Development and Implementation Framework on the Company's Long-Term Plan for 2005-2009 Period, 2009-2013 and 2013-2017 period. The Company gradually undertakes Good Corporate Governance assessment to oversee the progress of the Good Corporate Governance practice.

Good Corporate Governance Assessment for fiscal year 2012 is done by independent consultant for FSA (Financial Services Authority) or OJK Version was carried out in 2013 by ISEA with score of 85 and in 2013 was carried out in 2014, for OJK version through a self-assessment with score of 88.21; meanwhile, GGC self-assessment for 2014 achieved score of 90.64.



Selanjutnya, hasil *self assessment Good Corporate Governance* versi OJK untuk tahun 2014 dan tahun 2015 berturut-turut menghasilkan skor 88,21 dan 91,37. *Assessment Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh konsultan independen eksternal dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

URAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah penjelasan maupun usulan keputusan disampaikan sesuai dengan tata tertib Rapat yang dibagikan kepada peserta Rapat pada saat registrasi dan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir sebelum pembahasan agenda Rapat dimulai. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui perhitungan suara mayoritas yang hadir dalam rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Perusahaan meliputi pembahasan: Persetujuan laporan tahunan; Persetujuan proyeksi laporan keuangan; Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); Persetujuan penggunaan Laba Bersih perusahaan; dan lain-lain.

Pembahasan atas usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seseorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Selain itu terdapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Furthermore, the FSA version on Good Corporate Governance self assessment for 2014 and 2015 resulted in scores of 88.21 and 91.37 respectively. Good Corporate Governance Assessment is carried out by external independent consultants conducted every two (2) years.

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (GMS)

In each agenda of the GMS, the shareholders have the opportunity to ask questions after the explanation and proposal of resolution in accordance with the procedure of the meeting that were distributed to participants during registration and has been approved by the attending shareholders prior to the discussion of the agenda of the meeting. During GMS, resolutions shall be made by unanimous consensus of the meeting or based on voting mechanism.

General Meetings of Shareholders (GMS) held by the Company includes several discussions on: Annual Report approval, financial report projection approval, Budget Plan (RKAP) approval and approving distribution of the Company's Net Profit.

Discussion on recommendations proposed by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholders representing $\frac{1}{10}$ (one per tenth) shares issued by the Company with legal voting rights under a requirement that records of respective party has to be received by the Board of Directors before Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) announcement date. In addition, the Company also held Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) at any time according to the Company's needs.

Ketentuan

- 1) Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan dengan suara bulat.
- 2) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah;
 - b. Dewan Komisaris.
- 3) Permintaan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diajukan melalui surat tercatat, disertai alasan-alasannya, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan berakhir;
 - c. Dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perusahaan.
- 4) Surat tercatat sebagaimana butir 3 di atas disampaikan oleh Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- 5) Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.
- 6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, maka:
 - a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau;
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 8) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

Procedure

1. If the GMS is attended and/or represented by Shareholders and all Shareholders approve the GMS implementation then the GMS is authorized to take legitimate resolution.
2. Implementation of Annual and/or Extraordinary GMS can be done under proposal from:
 - a. One or more Shareholders representing $\frac{1}{10}$ (one per tenth) shares issued by the Company with legal voting rights;
 - b. Board of Commissioners.
3. Proposal to implement Annual and/or Extraordinary GMS under registered letter, attached with the reasons, including but not limited on following conditions:
 - a. Board of Directors does not held Annual GMS according to prevailing regulation;
 - b. Service term of Board of Directors and/or Board of Commissioners will be ended;
 - c. The Board of Directors is failed or facing conflict of interest with the Company.
4. The registered letter as mentioned in point 3 is presented by the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners.
5. The Board of Directors announce GMS invitation in 15 (fifteen) days at the latest after the GMS implementation proposal is accepted.
6. If the Board of Directors did not deliver GMS invitation:
 - a. GMS proposal from the Shareholders is repropoed to the Board of Commissioners, or;
 - b. The Board of Commissioners to announce separate GMS invitation.
7. The Board of Commissioners shall perform the calling of General Meeting of Shareholders.
8. The Board of Commissioners has to announce GMS invitation in 15 (fifteen) days at the latest after the GMS proposal is received.

- 9) Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Direksi berdasarkan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai butir 5 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
 - 10) Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai butir 6b dan butir 7 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas.
 - 11) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang 15 (lima belas) hari sebagaimana butir 5 dan butir 7, maka Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perusahaan.
 - 12) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 13) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
 - 14) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - 15) Perusahaan wajib memberikan salinan bahan/materi sesuai butir 13 kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.
 - 16) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan dalam butir 11, 12 dan 13, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
 - 17) Dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham, risalah wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 18) Tandatangani sebagaimana butir 16 tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris.
9. GMS held by the Board of Directors is based on GMS invitation as stated on point 5 that only discusses several issues related with the reason declared in the point 3 as well as other agenda deemed necessary by the Board of Directors.
 10. General Meeting of Shareholders held by the Board of Commissioners based on the summon to the General Meeting of Shareholders item 6b and item 7 above only to discuss the issues related to the reasons as stated in the point 3.
 11. Should the Board of Directors or Board of Commissioners fail to call for GMS during 15 (fifteen) days period as stated in point 5 and 7, then the Shareholders who request the GMS can make the call by themselves upon permission from the Chairman of the State Court at the Company domicile.
 12. The invitation to GMS should be delivered not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS by excluding the date of the summon and the date of the meeting.
 13. GMS invitation is delivered through registered mail and/or advertisement in newspaper.
 14. The GMS invitation should mention the date, time, venue and agenda to be discussed of the meeting attached with an announcement that the agenda that will be discussed in the GMS is available in the Company's office since the GMS invitation to the GMS implementation date.
 15. The Company should provide copy of the agenda/material according to point 13 to the Shareholders free of charge, if requested.
 16. In the event that the invitation is not in accordance with the provisions in point 11, 12 and 13, the resolution of GMS shall remain valid if the GMS is attended by all shareholders with valid voting rights and the resolution is unanimously agreed.
 17. In every GMS, the Minutes of Meetings has to be made and signed by Meeting Chair and at least 1 (one) shareholder appointed from the GMS participant.
 18. The signature, as stated in point 16 is not required if the GMS minutes of meetings are made through notarial deeds.

- | | |
|--|---|
| <p>19) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk perbedaan pendapat/<i>dissenting opinion</i> jika ada).</p> <p>20) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.</p> <p>21) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.</p> <p>22) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>23) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.</p> <p>24) Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> | <p>19. The Minutes of Meetings discloses every aspects discussed and decided (including any dissenting opinion).</p> <p>20. The GMS can be held if at least attended or represented by 51% (fifty one percent) of the shares with legal voting rights, except stated different under Law and/or Articles of Association.</p> <p>21. The shareholders, either directly or represented with letter of attorney, are entitled to attend the GMS and use their voting rights according to amount of their shares.</p> <p>22. Every resolution is agreed under collective consensus principle.</p> <p>23. If the collective consensus is failed to be achieved, the resolution is considered legitimate if has been approved by more than $\frac{1}{2}$ (one per two/half) of voting submitted, except stated different in Articles of Association.</p> <p>24. If the recommendation contains more than 2 (two) alternatives and voting result does not come up with 1 (one) alternative supported by more than $\frac{1}{2}$ (one per two/half) of the voting submitted, another voting will be carried on 2 (two) alternatives with most voting that one of the recommendations will be voted with more than $\frac{1}{2}$ (one per two/half) of total voting submitted by the Shareholders and also might take legitimate resolution without implementing physical GMS, by the mechanism that all of Shareholders have approved on the recommendation under written statement and signed the statement. The resolution taken in respective way has equal force with a legitimate resolution taken in the GMS.</p> |
|--|---|

Pokok-Pokok Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2015

1. Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Laporan Tahunan & Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2014 PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 6 Maret 2015.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Penetapan Pengangkatan Sementara Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 1 Juni 2015.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Penambahan Modal Disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp 75 Milyar tanggal 24 Juni 2015.

Key Resolutions of GMS and EGMS 2015

1. The General Meeting of Shareholders on the Ratification of the Annual Report and Approval of Financial Statement of the Fiscal Year 2014 of PT Reasuransi Nasional Indonesia on March 6, 2015.
2. The Extraordinary GMS (EGMS) on the Determination of the temporary appointment of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia on June 1, 2015.
3. The EGMS on Additional Paid-Up Capital for PT Reasuransi Nasional Indonesia amounting to Rp 75 Billion on June 24, 2015.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Penetapan Pengangkatan Sementara Jabatan Direksi tanggal 30 Juli 2015.
5. Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan RKAP Tahun 2016 tanggal 10 Desember 2015.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Rapat Umum Pemegang Saham 2014

Tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 yang ditindaklanjuti selama tahun 2015 adalah:

Pertama, Berkaitan dengan target usaha yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015, Direksi diminta untuk:

1. Memaksimalkan kapasitas terpakai sesuai proyeksi besaran ekuitas pada akhir tahun dan rencana tambahan modal disetor.
2. Meningkatkan produktivitas *underwriting yield* masing-masing *Class of Business* (CoB), terutama untuk CoB yang pernah menanggung beban klaim besar, yakni: Jiwa dan *Fire*.
3. Mengutamakan pencapaian hasil *underwriting* yang optimal, dengan senantiasa menerapkan prinsip selektifitas dan *prudent underwriting* serta mengarahkan bisnis ke struktur portofolio dengan tingkat risiko yang lebih menguntungkan.
4. Terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan portofolio bisnis fakultatif dengan tetap memperhatikan aspek *prudent underwriting* dalam pemilihan jenis bisnis.

Kapasitas terpakai yang dimiliki Perusahaan akan terus diupayakan secara maksimal, dimana target premi bruto tahun 2015 dapat terlampaui dengan jalan mencoba masuk pada *giant business* sebagai tahap awal untuk mendapatkan bisnis yang lebih besar di masa mendatang. Namun upaya tersebut hanya mencapai rasio premi neto dibandingkan ekuitas murni sebesar 171,9%. Hal ini disebabkan pada tahun 2015, beban retrosesi yang diatas anggarannya dalam rangka mengamankan *giant business*, disamping realisasi EAT yang di atas anggarannya dan revaluasi aset yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015.

Peningkatan *Underwriting yield* masing-masing *Class of Business* (CoB) khususnya pada Jiwa dan *Fire* telah dilakukan upaya maksimal, dimana dengan *prudent underwriting* terus menerus dilakukan perusahaan pada CoB *Fire* perusahaan mendapatkan *underwriting yield* sebesar 1% dan pada Cob Jiwa sebesar 8,8%.

4. The EGMS on Determination of the temporary appointment of the Board of Directors on July 30, 2015.
5. General Meeting of The Shareholders on Ratification of RKAP 2016 on December 10, 2015.

Follow Up on Recommendation from the GMS 2014

Follow-up on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) on Approval of the Work Plan and Budget (RKAP) 2014 held in 2015 are as follow:

First, regarding the business targets set forth in the 2015 Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Directors are required to:

1. Maximize the amount of utilized capacity in accordance with the projections of equity at the end of the year and the plan for additional paid-in capital.
2. Improve the productivity of *underwriting yield* of each Class of Business (COB), especially those that bearing large claims, namely: Life and Fire Insurance.
3. Prioritize the achievement of optimal *underwriting yield*, by continually applying the principles of selectivity and *prudent underwriting* and directing the business to portfolio structure the with a more favorable risk level.
4. Continue to work to improve and develop facultative business portfolio while maintaining *prudent underwriting* aspects in choosing the type of business.

The Company's utilized capacity will continue to be pursued to the fullest extend, in which the target of gross premium in 2015 could be exceeded by trying to engage to *giant business* as the initial stage to gain much larger business in the future. But these efforts only reached a ratio of net premiums compared to pure equity of 171.9%. This was due to a higher-than-budget retrocession expense in the effort to secure *giant business*, besides the realization of EAT which was above the budget and the reevaluation of assets conducted by the Company in 2015.

Improvement on *underwriting yield* of each Class of Business (COB), especially on Life and Fire has been done with utmost efforts, in which a *prudent underwriting* is continuously done by the Company. Fire Insurance *underwriting yield* yielded 1% while Life Insurance 8.8%.

Dalam pelaksanaan operasionalnya tetap dilakukan secara *prudent underwriting* agar pencapaian hasil *underwriting* dapat lebih optimal, dan pada tahun 2015 pencapaian hasil *underwriting* sebesar 93,2% dari targetnya dan pada tahun 2015, CoB yang mengalami minus hanya pada COB rangka pesawat dan tanggung gugat.

Kedua, Direksi diminta untuk terus berupaya memperoleh skema retroseksi yang sesuai dengan profil risiko yang dihadapi PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Premi retroseksi tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 400% bila dibandingkan premi retroseksi tahun 2014. Kenaikan tersebut disebabkan karena diperlukannya *back up* retroseksi terhadap akseptasi *giant business* yang selama ini belum diserap oleh perusahaan reasuransi domestik.

Ketiga, Direksi diminta untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan melalui penerapan manajemen risiko berbasis *Four Eyes Principles* untuk *Transactional Risk Management* dan *Enterprise Risk Management* (ERM) serta penguatan Satuan Pengawas Internal.

Dalam upaya peningkatan pengendalian internal, perusahaan telah menerapkan manajemen risiko berbasis ERM di semua lini kegiatan perusahaan, untuk *four eyes principle* telah dibentuk komite-komite diantaranya komite investasi, komite manajemen risiko dan komite akseptasi, komite penyelesaian klaim dan komite lainnya, disamping penguatan SDM pada Satuan Pengawas Internal dan koordinasi yang intensif dengan Satuan Pengawas Internal induk perusahaan.

Keempat, Direksi diminta untuk terus menjaga dan meningkatkan Rasio Pencapaian *Solvabilitas/Risk Based Capital* (RBC).

Peningkatan kualitas aset dan manajemen *balance sheet* terus dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian rasio *Risk Based Capital*, dan pada tahun 2015 perusahaan memperoleh rasio *Risk Based Capital* Konvensional sebesar 168,1% meningkat cukup signifikan dibandingkan pencapaian *Risk Based Capital* Konvensional tahun 2014 yang sebesar 131%. Sedangkan untuk rasio *Risk Based Capital* Syariah untuk tahun 2015 sebesar 40,9% tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 40,9%.

Kelima, Direksi diminta terus mengembangkan inovasi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan kinerja dan

The operation remains conducted by the principle of prudent underwriting to obtain optimal underwriting yield, and in 2015 the underwriting yield reached 93.2% of its target. The COB that experienced minus yield was aviation and liability.

Second, the Board of Directors is required to continue to obtain retrocession scheme in accordance with the risk profile faced by PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Retrocession premiums in 2015 increased very significantly by 400% when compared with that of the 2014. The increase was due to the need to have retrocession back up against the acceptance of giant business, which has never been absorbed by domestic reinsurance companies.

Third, the Board of Directors is required to improve the company's internal controls through the implementation of risk management based on Four Eyes Principles for Transactional Risk Management and Enterprise Risk Management (ERM), as well as strengthening the Internal Audit Unit.

In order to improve internal controls, the Company has implemented an ERM-based risk management in all lines of activities of the Company, formed committees for implementing four eyes principle, among others investment committee, risk management committee and the committee of acceptances, the claims settlement committee and other committees, in addition to strengthening human resources of Internal Audit unit and intensive coordination with the parent company's Internal Audit unit.

Fourth, the Board of Directors is required to continue maintaining and improving the Solvency / Risk Based Capital (RBC) Ratio.

Improving asset quality and balance sheet management will continue to be done to improve the Risk Based Capital ratio, and in 2015 the Company obtained a Conventional Risk Based Capital ratio of 168.1% increased significantly compared to that of 2014 of 131%. As for Sharia Risk Based Capital ratio, the ratio in 2015 remains the same with the ratio in 2014 of 40.9%.

Fifth, the Board of Directors is requested to continue developing innovations to keep the continuity of growth performance and

meningkatkan peran Teknologi Informasi (TI) dalam proses pengambilan keputusan dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Eksekutif sehingga dapat menunjang pelayanan yang optimal kepada *customer/* pengguna jasa.

Pada tahun 2015 perusahaan telah memisahkan Divisi Sistem Informasi dan Manajemen Risiko menjadi Divisi Teknologi Informasi Komunikasi dan Divisi Manajemen Risiko. Hal yang telah dilakukan pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan peran Teknologi Informasi dalam mengembangkan sistem informasi manajemen dan sistem informasi eksekutif diantaranya adalah:

1. Penyempurnaan aplikasi *treaty decision support system*.
2. Pembuatan aplikasi klaim secara *web*.
3. Pembuatan aplikasi pengelolaan aset tetap dan *software*.
4. Penyempurnaan aplikasi *business intelligence*.
5. Pembuatan aplikasi produksi premi *facultative* secara *web*.

Keenam, dalam manajemen Sumber Daya Manusia, Direksi diminta untuk:

1. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbasis korporasi (*group perusahaan*).
2. Menerapkan konsep remunerasi berbasis kinerja dan penerapan *joint Key Performance Indicators* (KPI) untuk menjaga soliditas organisasi.
3. Mengembangkan program pelatihan secara fokus dan berkesinambungan untuk menunjang pengembangan karier karyawan.

Perusahaan tengah menyiapkan *HR Blue Print* yang berbasis korporasi (*group perusahaan*), diantaranya pada tahun 2015 perusahaan telah mengirimkan pejabat setingkat manajer untuk mengisi kebutuhan personil di perusahaan induk.

Dalam rangka penyempurnaan didalam penerapan konsep remunerasi berbasis kinerja perusahaan perusahaan dibantu oleh konsultan telah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran terhadap Struktur Organisasi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan Unit Kerja dibantu oleh Konsultan HR. Disamping itu melakukan *Up date* (pemutakhiran) terhadap seluruh *Job Description* yang ada pada seluruh Unit Kerja di mulai bulan Juli 2015 dilanjutkan penyusunan Job Grading yang nantinya akan di gunakan sebagai dasar dalam penyusunan *Salary Structure*. Selanjutnya perusahaan juga menerapkan joint KPI dalam rangka menjaga soliditas organisasi dan peningkatan kinerja di seluruh unit.

enhance the role of Information Technology (IT) in the decision-making process by developing a Management Information Systems and Executive Information System that can support optimal service to the customers / users.

In 2015, the Company divided the Division of Information Systems and Risk Management into 2 (two), i.e. Division of Information and Communication Technology and Division of Risk Management. A number of issues has been addressed in 2015 in order to enhance the role of information technology in developing management information systems and executive information systems:

1. Improving *treaty decision support* application system.
2. Developing *web-based claim* application.
3. Developing *fixed asset and software management* application.
4. Improving of *business intelligence* application.
5. Developing *web-based facultative premium production* application.

Sixth, in the management of Human Resources, the Board of Directors is required to:

1. Manage Human Resources (HR) with a corporate-based manner (*group of companies*).
2. Apply the concept of performance-based remuneration and implementation of *joint Key Performance Indicators* (KPI) to maintain the solidity of the organization.
3. Develop a focused and continuous training programs to support employees career development.

The Company is preparing a corporation-based (*group of companies*) *HR Blue Print*, among other by sending managers to fill the needs of personnel in the parent company.

To enhance the application of the concept of performance-based remuneration, the Company is supported by an HR consultant who undertake evaluation and updating of the existing organization structure, to be adapted to the needs of the Company and the work unit. In addition, the Company also up-dated all existing *Job Description* in the whole Units, started in July 2015, followed by preparation of *Job Grading* to be used as the basis for preparing *Salary Structure*. Furthermore, the Company also implemented joint KPI in order to maintain the solidity of the organization and improving performance across the units.

Ketujuh, dengan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015, Direksi diminta komitmennya:

1. Merealisasi anggaran perusahaan dengan selalu menaati prosedur dan mengacu pada program kerja serta anggaran yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan secara keseluruhan terhadap strategi dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Melakukan pengukuran efektivitas langkah/strategi yang telah ditetapkan untuk dilakukan langkah evaluasi.

Manajemen senantiasa melaksanakan kegiatan sesuai prosedur dan mengacu pada program kerja serta anggaran yang telah ditetapkan serta untuk pencapaian target yang telah ditetapkan selalu melaksanakan secara keseluruhan terhadap strategi dan program kerja yang telah ditetapkan dan mengukur efektifitas atas strategi yang telah ditetapkan.

Anggaran pendapatan merupakan target minimal yang harus diupayakan pencapaiannya secara maksimal oleh segenap jajaran perusahaan, sedangkan anggaran biaya merupakan alokasi maksimal yang harus diupayakan seefisien mungkin dalam realisasinya sehingga target laba perusahaan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan selama tahun 2015 telah diupayakan agar selalu efektif dan efisien sehingga beban yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sesuai dengan keperluan dan kebutuhan, sehingga tujuan serta sasaran perusahaan dapat tercapai.

Terkait dengan rencana penambahan modal disetor senilai Rp75.000.000.000 pada tahun 2015; Direksi diminta untuk melengkapi kajian dan menyampaikan dalam surat tersendiri kepada Pemegang Saham.

Kajian atas penambahan modal disetor sebesar Rp75.000.000.000 telah disampaikan kepada Pemegang Saham dan tambahan modal disetor telah diterima perusahaan pada tanggal 19 Agustus 2015.

Direksi diminta untuk senantiasa mengkaji ulang, melengkapi, dan menyempurnakan seluruh Sistem dan pedoman operasional perusahaan, dengan memperhatikan aspek manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Seventh, with the ratification of the Work Plan and Budget (RKAP) 2015, the Board of Directors is requested to commit to:

1. Realizing the Company's budget by always duly complying the procedure and referring to the work program and budget that have been set.
2. Implementing overall strategy and work program as specified in the work plan and budget.
3. Assessing the effectiveness of measures / strategies for evaluation.

The Management continues to implement activities according to the procedure and refer to the work program and budget, and in achieving the targets by always implementing the strategy and work program and assess the effectiveness of the strategy that has been set up.

Budgeted income is the minimum target that should be pursued to the fullest by all employees of the Company, while the budget expenses is the maximum allocation to be pursued as efficiently as possible in the realization so that the profit target that has been set can be achieved.

The Company's business activities in 2015 were always conducted in the utmost effective and efficient way so that the expenses incurred for all of these activities were in accordance with the purposes and needs, so that the Company's goals and objectives can be achieved.

Regarding the plan for additional paid-up capital of Rp 75 billion in 2015; the Board of Directors was required to complete the study and submit in a separate letter to shareholders.

Review on the additional paid-in capital of Rp 75,000,000,000 has been submitted to the Shareholders and the additional paid-in capital has been received by the Company on August 19, 2015.

The Board of Directors is required to constantly review, complement, and enhance the entire system and guidelines for the operational of the Company, by duly adhering to risk management and the principles of *Good Corporate Governance*.

Seluruh sistem dan pedoman operasional perusahaan telah terus dilakukan penyempurnaannya, yang dilakukan dengan memenuhi aspek manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam peningkatan penerapan *Good Corporate Governance*, Perusahaan secara rutin melakukan *self assessment* dan hasilnya selalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, skor *assesment* yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu *Assesment Good Corporate Governance* versi Meneg BUMN yang dilakukan oleh konsultan independen akan dilaksanakan pada kuartal I 2015 sebesar 83 dan *self assessment Good Corporate Governance* versi OJK dengan skor 90.

Direksi diminta untuk berkoordinasi dengan induk perusahaan untuk keselarasan pengembangan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko, Audit Internal, Pedoman Akuntansi, Investasi, mutu pengelolaan perusahaan (KPKU & *Good Corporate Governance*), dan hal lain yang dipandang perlu.

Melalui berbagai forum baik TI, SDM, Manajemen Risiko, Audit Internal, Akuntansi dan Investasi, mutu pengelolaan perusahaan telah dilakukan synergi dan pertemuan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan Askrindo Group dalam rangka keselarasan didalam pengembangannya.

The whole system and operational guidelines of the company has been continuously perfected, and is conducted in compliance with the risk management aspects and the principles of Good Corporate Governance. In order to improve the application of Good Corporate Governance, the Company regularly conducts self assessment and the results are always higher than the previous year. The scores on the assessment conducted in 2015, namely the Assessment of Good Corporate Governance version Ministry of State Owned Enterprises was carried out by independent consultant in the first quarter of 2015 scored 83 and the self assessment of Good Corporate Governance version FSA scored 90.

The Board of Directors is required to coordinate with the parent company for the alignment of the development of Information Technology, Human Resources, Risk Management, Internal Audit, Accounting Guidelines, Investment, quality of management (KPKU & Good Corporate Governance), and many others that are deemed necessary.

Through various forums either on IT, Human Resources, Risk Management, Internal Audit, Accounting and Investments, the Company has synergized the management quality and continuously met with Askrindo Group in order to align the development.

DEWAN KOMISARIS

Acuan Hukum

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mewajibkan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Sesuai UU tersebut, tugas dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, serta memberi masukan terkait kedua hal tersebut. Dewan Komisaris NASIONAL RE secara bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi sesuai peraturan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan garis besar kebijakan perusahaan. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 28 ayat (3), mensyaratkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Piagam Dewan Komisaris

NASIONAL RE telah menyusun Piagam Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai panduan kerja bagi Dewan Komisaris, yang disatukan ke dalam *Board Manual* Untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan atas manajemen yang dijalankan Direksi Perusahaan, serta memberi nasihat serta memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis serta memastikan bahwa *Good Corporate Governance* dan praktik pengelolaan risiko diimplementasi secara efektif di seluruh lingkup kegiatan operasional Perusahaan.

Kewenangan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJPP dan RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum

BOARD OF COMMISSIONERS

Legal Basis

The Law No. 40 of 2007 on Limited Company (“UUPT”) requires all Company established under Indonesian Law to have a Board of Commissioners. Pursuant to that Law, duty of the Board of Commissioners is to supervise the management and policy made by the Company’s management and to provide recommendation on both aspects. Board of Commissioners of NASIONAL RE is in charge to carry monitoring function and consultancy function according to prevailing law, on behalf of the Company’s interest and complies with corporate policy framework. The Law No. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprise, particularly stated in Article 28 point (3) required that serving period of Board of Commissioners is 5 (five) years and may be reappointed for another 1 (one) serving period.

Board of Commissioners Charter

NASIONAL RE has prepared the Board of Commissioners charter as working guideline for the Board of Commissioners, attached in the Board Manual for Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board.

Duties and Responsibilities

According to law, the Board of Commissioners is responsible for carrying out the supervisory duties concerning the management activities conducted by the Board of Directors, as well as providing advices and monitoring and evaluating the implementation of strategic policies and to ensure that good corporate governance and risk management practices have been implemented effectively across the entire scope of operational.

The authority of the Board of Commissioners is based on the Articles of Association and resolutions of the AGMS, which includes the following duties and responsibilities:

- (1) Providing advice to the Board of Directors in carrying out managerial duty;
- (2) Observing and reviewing as well as signing Long-Term Plan and Budget Plan prepared by the Board of Directors, according to the Articles of Association.
- (3) Providing advice and recommendation to the GMS regarding Long-Term Plan and Budget Plan concerning reason of the

Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJPP dan RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas atas tugas dan kewenangannya, Dewan Komisaris menyiapkan laporan tugas pengawasan atas peran pengawasan yang dilakukan selama satu tahun buku untuk dilaporkan kepada pemegang saham untuk disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip akuntabilitas. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris harus dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang dituangkan dalam KPI Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Board of Commissioners for signing Long-Term Plan and Budget Plan.

- ((4) Keeping updated on the progress of the Company's activity, providing advice and recommendation to the GMS regarding every issue considered necessary on the Company's management.
- (5) Immediately reporting to the GMS in case the Company's performance tends to decline.
- (6) Observing and reviewing periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report.
- (7) Providing an explanation, recommendation and advice to the GMS regarding the Annual Report, if proposed.
- (8) Preparing annual working program to be included in the Company's Budget Plan.
- (9) Establishing Audit Committee.
- (10) Proposing Public Accountant to the GMS.
- (11) Preparing Board of Commissioner's Minutes of Meetings and documenting the copy.
- (12) Delivering report to the Company regarding his and/or his families shares of ownership in this or other companies.
- (13) Providing report to GMS regarding audit duty done during latest fiscal year.
- (14) Undertaking other responsibilities in relation with monitoring and advisory duties, as not violating Law, Articles of Association and/or GMS resolution.

As embodiment of accountability of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners prepares report on the implementation of their supervisory duties to be reported to shareholders and to be approved by the Annual GMS. This is also in line with GCG principles, mainly accountability principle. In addition, performance of the Board of Commissioners has to be evaluated based on performance appraisal elements stated in KPI of the Board of Commissioners of to be later on presented in the GMS.

Wewenang

Setiap anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE, baik secara individu maupun secara kolektif, memiliki kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yakni:

- a. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen penting perusahaan.
- b. Memeriksa kas perusahaan untuk keperluan verifikasi dan keperluan lain terkait kegiatan pengawasan.
- c. Memeriksa kekayaan atau inventaris perusahaan.
- d. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dimiliki atau dipergunakan oleh Perusahaan.
- e. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi, mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan perusahaan.
- f. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- g. Meminta penjelasan mengenai segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- h. Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- i. Membentuk komite, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- j. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
- k. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- n. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- o. Menunjuk dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.

Pembagian Tugas

Komisaris Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satunya bertindak sebagai Komisaris Utama merangkap anggota, seorang Komisaris dan satu orang Komisaris Independen.

Authority

Every member of Board of Commissioners in NASIONAL RE, has an authority both individually and collegially regarding the duty and responsibility implementation, among others:

- a. Checking books, letters and other corporate important documents.
- b. Checking the Company's cash for verification and other assignments related with monitoring activity.
- c. Checking the Company's assets or inventory.
- d. Entering yard, building and office owned or occupied by the Company.
- e. Proposing an explanation from the Board of Directors and/or other Executives under the Board of Directors regarding every issues mainly related with the Company's management.
- f. Proposing the Board of Directors and/or other Executives with a concern of Board of Directors to attend Board of Commissioners meeting.
- g. Asking explanation on every policy and action done or will be implemented by the Board of Directors.
- h. Dismissing member of BOD according to provision stated in Articles of Association.
- i. Establishing committee, if considered necessary, by concerning the Company's capabilities.
- j. Hiring the Expert for certain aspects and time period under the Company's expenses, if considered necessary.
- k. Performing management activity in certain condition and period according to provision stated in Articles of Association.
- l. Exercising other authorities as long as not violating the Laws, Articles of Association and/or GMS Resolution.
- m. Attending Board of Directors meetings and providing comment on matters discussed.
- n. Executing other supervisory authority, provided that not in the contrary to prevailing rules and the Articles of Association and or Resolution from the GMS.
- o. Appoint and dismiss Secretary of the Board of Commissioners.

Separation of Duty

The Board of Commissioners consists of 3 (three) members, namely one President Commissioner, one commissioner and one independent commissioner. The commissioners have

Komisaris memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara kolegal.

Komposisi Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Penetapan Pengangkatan Sementara Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 1 Juni 2015

Berikut susunan Dewan Komisaris perusahaan tahun 2015:

Komisaris Utama : Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris : Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS
Komisaris Independen : Raymond Buisson, SE, CRMP, CRGP

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris NASIONAL RE telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi jumlah Direksi, yakni sebanyak 3 (tiga) orang, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Pernyataan Integritas

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

NASIONAL RE mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak mempunyai saham di perusahaan lain.

Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. Tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

appropriate background education and experience to carry out their duties and responsibilities to oversee the implementation of BOD duties in managing the Company. The BOC performs their duties collegially.

Board of Commissioners Composition

The Extraordinary GMS (EGMS) on the Determination of the temporary appointment of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia on June 1, 2015

Below the composition of Board of Commissioners in 2015:

President Commissioner : Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Commissioner : Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS
Independent Commissioner : Raymond Buisson, SE, CRMP, CRGP

Number and composition of NASIONAL RE Board of Commissioners have complied with the regulation which prohibited to more than number of Directors, which is 3 (three) members, including 1 (one) Independent Commissioner member.

All of Board of Commissioners members are domiciled in Indonesia.

Statement of Integrity

All members of the Board of Commissioners has the integrity, competence and adequate financial reputation and meet the provisions of the Limited Company Act and the principles of corporate governance.

NASIONAL RE requires the BOC to disclose its ownership, either in the Company or in other companies domiciled in and outside the country in a report which must be renewed annually. All members of the Board of Commissioners who served currently has no shares in other companies.

NASIONAL RE requires the Board of Commissioners to disclose share ownership either in the Company or other companies domiciled in Indonesia and overseas by means of a report which has to be annually updated. Every member of Board of Commissioners serving in current period does not have share ownership in other companies.

Pernyataan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris NASIONAL RE telah mencerminkan keberagaman baik dari sisi kompetensi, edukasi, maupun pengalaman yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris sebaik mungkin.

The diversity Statement Composition of the Board of Commissioners

Composition of NASIONAL RE Board of Commissioners has reflected unity both from competency, education or experience aspect to support the implementation of Board of Commissioners' function in duty.

No	Nama/Name	Jabatan Saat Ini/Current Position	Jabatan Sebelumnya/Previous Position	Pendidikan/Education
1.	Rinarno Pramudyanto	Komisaris Utama/President Commissioner	-	S-2
2.	Sulaeman	Komisaris/Commissioner	-	S-2
3.	Raymond Buisson	Komisaris Independen/Independent Commissioner	Direktur Jakarta Insurance Institute	S-1

Pernyataan Independensi Komisaris

Sebagai perwujudan dari upaya menjaga independensi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan telah menunjuk seorang Komisaris Independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Selain itu, adanya Komisaris Independen dapat mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih objektif dan fair, yang mampu menjaga kesetimbangan antara kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Seorang Komisaris Independen harus mampu menghindari benturan kepentingan dan mampu bertindak independen, tidak mempunyai kepentingan lain yang berbenturan dan dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.

Independent Commissioner Statement

As the realization of an effort to maintain independency of Board of Commissioners monitoring function implementation, the Company has appointed an Independent Commissioner, who has no financial, managerial, share ownership and or family relationship to second degree with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders in a commitment which might interfere ability to act independently. In addition, Independent Commissioner is also assumed to establish more objective and fair working environment, to balance the interest of stakeholders and other stakeholders. An Independent Commissioner has to prevent conflict of interest and having ability to act independently, without conflict of interest which may constraint independent and critical duty implementation both in commitment with Board of Commissioners or in the relationship with the Board of Directors.

Rangkap Jabatan Komisaris

Tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Board of Commissioners Dual Position

No member of the Board of Commissioners holds concurrent position as Commissioner, Director, or Executive Officer at another company that is contrary to legislation

No	Nama/Name	Jabatan Di Perusahaan/Position in the Company	Jabatan Yang Dirangkap/The Position concurrently
1.	Rinarno Pramudyanto	Komisaris Utama/President Commissioner	Kepala Divisi ASKRINDO/Division Head ASKRINDO
2.	Sulaeman	Komisaris/Commissioner	Kepala Divisi ASKRINDO/Division Head ASKRINDO
3.	Raymond Buisson	Komisaris Independen/Commissioner Independent	-

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Selama tahun 2015 Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris tahun 2015 sebagaimana berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI
2. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris
3. Melakukan Pengawasan dan Perkembangan Kegiatan Perusahaan
4. Memberikan nasihat /masukan/pengarahan kepada Direksi
5. Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham
6. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan kepada pemegang saham.

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit setiap bulan sekali. Dewan Komisaris berhak mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat diupayakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, dalam hal tidak tercapai mufakat melalui musyawarah, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Panduan Kerja Dewan Komisaris, agenda dan materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung. Hal ini agar Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi atau bila perlu untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat dilaksanakan.

Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit

Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit antara lain membahas evaluasi terhadap hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan *review* atas Struktur Organisasi Perusahaan dan berbagai permasalahan yang lain.

Implementation of Board of Commissioners Duty

The Board of Commissioners has exercised its duty according to the 2015 Budget Plan, among others:

1. Preparing Budget Plan and KPI
2. Implementing Board of Commissioners Meeting.
3. Monitoring and reviewing the Company's activity.
4. Providing advice, suggestion/recommendation to the Board of Directors.
5. Submitting the report/suggestion/recommendation to the Shareholders and/or GMS.
6. Submitting report on the monitoring duty to the shareholders.

Board of Commissioners Meeting Procedure

Board of Commissioners commences meeting at least one every month. The Board of Commissioner might also invite the Board of Directors to attend the meeting. The Board of Commissioners meeting is declared legitimate and illegible to take bounding decision if attended or represented by more than half of Board of Commissioners members. Every resolution is taken under collective consensus principle. Hence, if collective consensus failed to be achieved, the meeting decision will be taken considering the most voting. Every Meeting's decision is mandatory for all of Board of Commissioners members.

According to Board of Commissioners Board Manual, the meeting agenda, meeting agenda and material have to be delivered to the Board of Commissioners at least 3 (three) working days before the meeting. This aimed that the Board of Commissioners to have an opportunity to observe additional information before the meeting is started.

Board of Commissioners Meeting

a. Board of Commissioners Internal Meeting with Audit Committee

Board of Commissioners Internal Meeting or with Audit Committee among others discusses the evaluation of the Company's performance target, business development and review on Organization Structure and other issues.

Selama tahun 2015 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 100%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

The Board of Commissioners held 6 (six) Board of Commissioners Internal Meeting or with Audit Committee with 100% attendance level. Detail of the attendance is as follows:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/Number of Meeting	Jumlah Hadir /Attendance	Kehadiran (%)/Attendance (%)
Rinarno Pramudyanto	Komisaris Utama/ President Commissioner	6	6	100%
Sulaeman	Komisaris/Commissioner	6	6	100%
Raymond Buisson	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	6	6	100%

b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi antara lain membahas hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2015 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 95.85%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

b. BOC Meeting with the Board of Directors

Board of Commissioners meeting with the Board of Directors, among others, discuss the results of the Company's performance, business development and other issues. During 2015 the Board of Commissioners held a Board Meeting with the Board of Directors as much 12 (twelve) meetings with an average attendance rate of 95,85%. Details of attendance as follows:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/ Number of Meeting	Jumlah Hadir / Attendance	Kehadiran (%)/Attendance (%)
Rinarno Pramudyanto	Komisaris Utama/ President Commissioner	12	11	91.70%
Sulaeman	Komisaris/Commissioner	12	11	91.70%
Raymond Buisson	Komisaris Independen/Independent Commissioner	12	12	100.00%
M. Shaifie Zein	Direktur Utama/President Director	12	12	100.00%
Edhie Mulyono	Direktur Operasi/Director of Operation	12	12	100.00%
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR	12	11	91.70%

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris lainnya

Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas fungsi Pengendalian Manajemen Risiko dan Implementasi *Good Corporate Governance* di Perusahaan. Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah menjalankan kedua fungsi tersebut dengan baik.

Other Board of Commissioners Duties

Other than above activities, the Board of Commissioners is also responsible for conducting the function of risk management transfer and GCG implementation. In 2015, the Board of Commissioners has performed both function well.

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners

KPI Dewan Komisaris tahun 2015.

Board of Commissioners KPI in 2015.

Key Performance Indikator (KPI) Dewan Komisaris/Realization of Key Performance Indicator (KPI) Board of Commissioners

No	KRITERIA/ASPEK	SATUAN/Unit	TARGET/Target	BOBOT Weight
I.	ASPEK PERENCANAAN/Aspect of Planning			5
	Menyampaikan program kerja, anggaran & KPI Dekom tahun 2015, yang menjadi bagian dari RKAP tahun 2015;/Delivering work program, Budget & KPI of BOC in 2015 as part of the 2015 RKAP	NJml. Dok./No. of Doc	1	5
II.	ASPEK PENGAWASAN & MONITORING/Aspect of Supervision and Monitoring			37,5
1.	Review dan analisis laporan berkala, terdiri dari :/Review and Analysis of Regular Report, which include:			
	- Melakukan analisis laporan keuangan bulanan/Conducting Analysis on Monthly Financial Statement	NJml. Dok./No. of Doc	12	5
	- Menyampaikan Surat Tanggapan terhadap RKAP 2015./Submitting Respond of 2015 RKAP	NJml. Dok./No. of Doc	1	2,5
2.	Rapat Dewan Komisaris/Meeting of the BOC	Kali/Times	12	5
3.	Memberikan arahan / nasehat kepada Direksi.			
	1) Underwriting	Jml. Saran/No. of Adv	1	5
	2) Keuangan & Investasi/Financial & Investment	Jml. Saran/No. of Adv	1	5
	3) SDM & Umum/HR & General Affairs	Jml. Saran/No. of Adv	1	5
	4) Pengendalian Internal/Internal Controlling	Jml. Saran/No. of Adv	1	5
	5) Teknologi Informasi/Information Technology	Jml. Saran/No. of Adv	1	5
III.	ASPEK PELAPORAN/Aspect of Reporting			17,5
1.	Menyampaikan laporan/ pendapat/ saran kepada Pemegang Saham/ RUPS, terdiri dari:/Response Letter to the 2014 Annual Report			
	- Surat Tanggapan atas Laporan Tahunan tahun 2014./Response Letter to the 2014 Annual Report	NJml. Dok./No. of Doc	1	2,5
	- Surat tanggapan kinerja Triwulanan/Response Letter to Quarterly Report	NJml. Dok./No. of Doc	3	5
	- Laporan khusus atau rekomendasi lainnya kepada Pemegang Saham (disampaikan jika ada hal penting /harus dilaporkan)./Special report or other recommendation to shareholders (to be submitted when in urgency/need to report)	NJml. Dok./No. of Doc	1	5
2.	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dekom , yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan 2014./Submitting Report of Duty of the BOC, as part of 2014 Annual Report	NJml. Dok./No. of Doc	1	5
IV	ASPEK DINAMIS/Aspect of Dynamic			40
1.	Peningkatan Kompetensi/Competency Enhancement	Kali	4	5
2.	Realisasi KPI Korporasi/Realization of Corporate KPI	nilai/Score	85	35
JUMLAH/Total				100

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Procedure for Determination of Remuneration of Directors and Commissioners

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dimana

The determination of Board of Commissioners's remuneration refers to Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 where

selanjutnya diajukan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dimana untuk realisasinya dengan mempertimbangkan prestasi KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2015

Remunerasi Dewan Komisaris meliputi gaji, tunjangan pakaian, tunjangan hari raya, dan tantiem yang dibayarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.128.833.724 untuk Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2015 Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*.

the recommendation is addressed and approved in the GMS, where the realization has considered Board of Directors and Board of Commissioners KPI achievement.

Board of Commissioners Remuneration in 2015

Board of Commissioners remuneration includes salary and allowance and incentives paid in 2015 amounted to Rp2,128,833,724 , for member of the Board of Commissioners and Secretary of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Competency Development Program

In 2015, the Board of Commissioners has participated in various training, conference, seminar or workshop.

Nama/Name	Jabatan/Position	Workshop/Training/seminar	Penyelenggara/Organizer	Tempat/Venue
Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama/ President Commissioner	21th Indonesia Rendezvous	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Denpasar-Bali
		W/S Konferensi Nasional Profesi MR III	PT RAP Indonesia	Batam
Sulaeman	Komisaris/Commissioner	Pelatihan CRGP	PT RAP Indonesia	Jakarta
		W/S Master Class Program Series XV	PT RAP Indonesia	Manado
Raymond Buisson	Komisaris Independen/ Independent Commissioner.	21th Indonesia Rendezvous	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Denpasar-Bali
		W/S Master Class Program Series XV	PT RAP Indonesia	Manado



Bambang Sumarsono, Sekretaris Dewan Komisaris

Lahir di Rembang, 29 Agustus 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1995. Bambang memulai karir sebagai Pelaksana bagian Pertanggungjawaban pada tahun 1996. Sejak Februari 2010 hingga saat ini menjabat Kepala Bagian Investasi pada Divisi Keuangan dan Investasi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Bambang Sumarsono, Secretary of the Board of Commissioners

Born in Rembang, August 29, 1971. Graduated with a Bachelor degree from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Diponegoro, Semarang in 1995. He started his career as Executive at Insurance Department in 1996. Since February 2010 to present, he serves as Head of Investment Unit at the Division of Finance and Investment of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Pertanggungjawaban Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Acuan Hukum

Selain Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi NASIONAL RE senantiasa mengacu pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu tugas dan tanggung jawab Direksi juga mengacu pada berbagai kebijakan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi,

THE BOARD OF DIRECTOR

The Board of Directors is the Company's organ which has a full authorization and responsibility for the management of the Company, for the interest of the Company, in accordance with the intention and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside of the court of law in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable law.

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Each member of the BOD carries out tasks and make decisions in accordance with each role and responsibility. However, in discharging their duties of managing the Company, the Board of Directors collectively accountable to the GMS. Accountability of Directors to the GMS is the embodiment of accountability in the management of the Company, in upholding the GCG principles.

The assessment on the Board of Directors performance is performed by the Board of Commissioners, either individually or collectively, based on the elements of assessment of BOD. The assessment was conducted at the end of the fiscal year. The results of the assessment of BOD's performance is submitted by BOC in the GMS.

Legal Reference

Besides the Articles of Association, in discharging their duties and responsibilities, the Board of Directors of NASIONAL RE always refer to the law and regulations, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Company.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises.
3. The Indonesian Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.

In addition, the duties and responsibilities of the Board of Directors also refers to various policies of the Ministry of SOEs, the Financial Services Authority and other regulatory authorities.

As required by law, the Board of Directors shall meet the requirements of integrity, competence and passed the fit and

dan dinyatakan lulus uji kepatuhan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*), serta memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Direksi juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ditunjuk sebagai Direksi.

Seluruh anggota Direksi NASIONAL RE telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

Piagam Direksi

Aktivitas dan tindakan Direksi dalam mengelola perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan hukum dan perundang-undangan. Di luar apa yang tercantum dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan hukum tersebut di atas, maka dilakukan prosedur kerja yang tetap menjunjung prinsip akuntabilitas berdasarkan kesepakatan, persetujuan dan pengaturan antar sesama anggota Direksi. Hal ini dicantumkan dalam Piagam Direksi atau *Board Manual*.

Piagam Direksi disusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, merampingkan proses birokrasi dalam administrasi, dan mendukung peningkatan kinerja Direksi. Piagam ini juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan hubungan kelembagaan, yang artinya senantiasa berlandaskan pada suatu mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Kewajiban Direksi Secara Kolegial

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

proper test, as well as having good character and morals, never been declared bankrupt or been the directors or commissioners who were responsible for causing a company to go bankrupt within the last 5 (five) years. In addition, the Directors have never been found guilty of a criminal act in the financial sector within the last 5 (five) years prior to the appointment as Directors.

All members of the Board of Directors of NASIONAL RE have complied with all the provisions mentioned above.

Board of Directors Charter

All activities and actions undertaken by the Board Directors, in managing the company, are stipulated in the Articles of Association, as well as in the laws and regulations. In the case of activities and actions in the management of the Company that are not governed by our Articles of Association or the provisions of the law, procedures are followed that support the principle of accountability through consensus, agreement and/or rules between the members of the BOD. This is stipulated in the BOD Charter or Board Manual.

BOD Charter is aimed at expediting the decision making process, reducing bureaucracy in the administration of the Company's management and supporting improvements in performance. This charter also governs the working relationship between the BOD and the BOC, which is an institutional relationship meaning that it is based on countable management and supervisory mechanisms in accordance with the prevailing provisions.

Authorities and Duties of the Board of Directors

As set forth in the legislation, Articles of Association and/or resolutions of the GMS, in discharging its duties, the Board of Directors has the authority as follows:

1. Establish the Company's management policies.
2. Organize the delegation of power from the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to decide on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court of justice.
3. Organize the delegation of power from the Board of Directors to one or more of the Company's employee, either individually or collegially to represent the Company in and out of court of justice.

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak-pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Manage employment provision, including salary, pension or retirement benefits and other benefit for employee beyond the obligations required by the law must obtain prior approval from the GMS.
5. Appoint and dismiss employee based on the Company's rules and applicable legislation.
6. Appoint and dismiss the corporate secretary.
7. Perform any actions related to the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with the other party and /or other party with the Company, as well as representing the Company on and off the court of justice, with restrictions as stipulated in the legislation, Articles of Association and /or resolution of the GMS .

Sedangkan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
- d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi.
- e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
- f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
- h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
- i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah

The duties of the Board of Directors are as follow:

- a. Pursue and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the intention and purpose.
- b. Prepare Long Term Plans, Work Plan & Budget and their amendment and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the GMS.
- c. Provide explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan & Budget.
- d. Prepare Shareholder Register, Special Register and Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Directors Meeting.
- e. Prepare Annual Report as a form of responsibility of managing the Company, along with the financial statements as referred to in the Law on Corporate Documents.
- f. Prepare Financial Statements based on the applicable Accounting Standards and submit to the Public Accountant to be audited.
- g. Submit the Annual Report, along with the Financial Statement to the GMS for approval and ratification, along with report on the rights of the Company not recorded in the books as a result of write-off of receivables.
- h. Provide explanation to GMS regarding the Annual Report.
- i. Submit the Balance Sheet and Income Statement, which

disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
- k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan.
- l. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
- m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
- n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
- o. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
- p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.

has been approved by the GMS to the Minister of Justice and Human Rights in accordance with the provisions of the legislation.

- j. Report the changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Justice and Human Rights.
- k. Maintain the Register of Shareholders, the Special Register, Minutes of AGMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Annual Report and financial documents of the Company.
- l. Keep at the domicile of the Company: Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Annual Report and financial documents of the company and other documents.
- m. Develop accounting system in accordance with Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially on the management, recording, archiving and monitoring.
- n. Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and /or the Shareholders.
- o. Establish the Company's organizational structure, complete with the details and duties.
- p. Provide an explanation about everything asked or requested by the Board of Commissioners and Shareholders.
- q. Perform other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and the provision determined by the GMS in accordance with the applicable legislation.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direktur

Jumlah anggota Direksi NASIONAL RE berjumlah 3 (tiga) orang, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan beranggotakan 2 (dua) orang Direktur. Sesuai struktur organisasi perusahaan pembagian tugas di antara anggota Direksi yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama
 - 1. Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kepengurusan perusahaan. Untuk tindakan tertentu, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
 - 2. Membawahi secara langsung Sekretaris Perusahaan.

Scope and Responsibility of Each Director

NASIONAL RE BOD consists of 3 (three) members, led by a President Director and comprises 2 (two) Directors. In accordance with the company's organizational structure, the division of tasks among the members of the Board of Directors established by the General Meeting of Shareholders, are as follows:

- a. President Director
 - 1. Coordinate the establishment and implementation of the Company's management policy. For certain actions, pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors must obtain approval from the Board of Commissioners.
 - 2. Directly oversees the Corporate Secretary.

3. Membawahi secara langsung Divisi Manajemen Risiko (MR).
 4. Membawahi secara langsung Aktuaris Perusahaan.
 5. Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Direktur Operasi
Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:
1. Divisi Fakultatif.
 2. Divisi *Treaty* & Retrosesi.
 3. Divisi Reasuransi Jiwa.
 4. Divisi Reasuransi Syariah.
- c. Direktur Keuangan dan SDM
1. Membawahi Divisi Keuangan & Akuntansi.
 2. Membawahi Divisi Sumber Daya Manusia & Umum.
 3. Membawahi Divisi Klaim.
 4. Membawahi Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK).

Penunjukan Direktur Pengganti

Dalam hal salah satu Direktur berhalangan hadir karena menjalani tugas di dalam ataupun ke luar negeri, maka pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a) Apabila Direktur Utama berhalangan hadir; maka Direktur Utama membuat Nota Dinas penunjukan salah satu Direktur pengganti, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Penjabat Direktur Utama.
- b) Apabila Direktur bidang berhalangan hadir; maka Direktur dimaksud membuat Nota Dinas pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Direktur Utama ataupun Direktur bidang lainnya.

Kebijakan Suksesi Direksi

Pada prinsipnya, Direksi menyampaikan kandidat untuk dicalonkan sebagai suksesornya, dengan berpedoman pada hasil assessment oleh konsultan eksternal dan penilaian Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Direksi mengajukannya kepada Pemegang Saham untuk menjalani uji kepatuhan dan kelayakan (*fit & proper test*). Namun demikian, Pemegang Saham mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan personil yang memenuhi kualifikasi, layak dan kredibel untuk diangkat menjadi Direksi.

Komposisi Direksi

Saat ini Direksi Perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang yang seluruhnya telah lolos uji kepatuhan dan kelayakan (*fit & proper test*). Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi

Alternate Director

In the event that a member of the Board of Directors is absent, then the alternate Director is determined as follow:

- a) In the absence of the President Director, then he/she should make an official written note to appoint alternate director, to perform the duties, powers and responsibilities as Acting President Director.
- b) In the absence of the Sector Director, the said Director should make an official written note on the delegation of the duties and responsibilities to President Director or other Directors.

Director Succession Policy

In principle, the Board of Directors submits the candidate to be nominated as his successor, based on the assessment from external consultants and assessment from the Board of Commissioners and Board of Directors. Subsequently, the Board of Directors proposes to the Shareholders to undergo fit and proper test. However, shareholders reserve full authority to decide personnel that is qualified, worthy and credible to be appointed as Directors.

Board of Directors Composition

Currently, the Board of Directors consists of 3 (three) persons, all of whom has passed the fit and proper test. Each member of the Board of Directors shows sufficient competence and experience

dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

to carry out their respective duties.

Tabel berikut ini menampilkan susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2015:

The following table shows the composition of the Board of Directors of the Company as of December 31, 2015:

- M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins., ACII, FIIS, , CFP®, CRMP, CRGP	Direktur Utama/President Director
- Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, CRMP, CRGP	Direktur Operasi/Director of Operation
- Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR

Pernyataan Independensi Direksi

Direksi NASIONAL RE diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas, dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan Perusahaan. Direksi NASIONAL RE menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan pada saat pengangkatan Direksi secara resmi.

Untuk itu Perusahaan menyusun ketentuan berikut:

- Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan untuk melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
- Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
- Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Statement of Independence

The Board of Directors of NASIONAL RE is required to always maintain its independence in performing their task and should not be influenced by pressures from any party and should act independently in the interests of the Company. The Board of Directors NASIONAL RE signed a statement of non-dual functions when officially appointed as the Board of Directors.

For that purpose, the Company has established the following requirements:

- In addition to the Board of Directors, any other party is prohibited from conducting or intervene in the management of the Company.
- Directors should be able to take decisions objectively, without conflict of interest and free of any pressure from any party.
- Directors are prohibited from conducting activities that could interfere with its independence in managing the Company.
- The Board of Directors shall sign the Integrity Pact as a commitment to the Board of Directors in carrying out the activities of the Company that may cause a conflict of interest.

Rapat Direksi

a. Rapat Internal Direksi

Selama tahun 2014 Direksi mengadakan Rapat Direksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 94.20%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Meeting of the Board of Directors

a. Internal Meeting of the Board of Directors

In 2015, the Board of Directors convened 23 (twenty three) times with average attendance rate of 94,20%. Details of attendance as follows:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/Number of Meeting	Jumlah Kehadiran/Attendance	% Kehadiran/Attendance (%)
M. Shaifie Zein	Direktur Utama/President Director	23	22	95.65%
Edhie Mulyono	Direktur Operasi/Director of Operation	23	23	100.00%
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR	23	20	86.96%

Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris

Dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris antara lain membahas hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2015 Direksi mengadakan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 98,85%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/ Number of Meeting	Jumlah Kehadiran/ Attendance	% Kehadiran/ Attendance (%)
Rinarno Pramudyanto	Komisaris Utama/President Commissioner	12	11	91.70%
Sulaeman	Komisaris/Commissioner	12	11	91.70%
Raymond Buisson	Komisaris Independen/Independent Commissioner	12	12	100.0%
M. Shaifie Zein	Direktur Utama/President Director	12	12	100.0%
Edhie Mulyono	Direktur Operasi/Director Operational	12	12	100.0%
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR	12	12	100.0%

Tata Tertib Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan dan tata tertib sebagai berikut:

a. Jadwal Rapat

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) kali dalam setahun.
2. Direksi dapat mengundang staf perusahaan untuk hadir dalam Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:
 - i. Seorang atau lebih anggota Direksi; dan/atau
 - ii. Permintaan Direksi; dan/atau
 - iii. Permintaan tertulis dari Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat Direksi dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh dari jumlah Direksi.

b. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan/kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain.

c. Undangan Rapat

1. Undangan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan.
2. Undangan Rapat Direksi disampaikan dalam jangka

Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others, discusses about the Company's performance, business development and other issues. In 2015 the Board of Directors held joint meeting with the Board of Commissioners for 12 (twelve) times with an average attendance rate of 98,85%. Details of attendance as follows:

Rules and Procedures of the Meeting of the Board of Directors

Board of Directors meeting was held with the provisions and rules as follows:

a. Meeting Schedule

1. The Board of Directors Meeting held at least 24 (twenty four) times a year.
2. The Board of Directors may invite the Company's staff to attend the meeting of the Board of Directors.
3. The Board of Directors may hold meetings outside of regular schedule, if deemed necessary by:
One or more members of the Board of Directors; and/or
 - i. Request the Board of Directors; and/or
 - ii. Written request of the Commissioner or the Majority Shareholder by mentioning things that will be discussed.
4. Meeting of the Board of Directors declared valid if attended by more than half of the Board of Directors.

b. Meeting Venue

Meeting of the Board of Directors may be held at the domicile of company's business activities, or elsewhere.

c. Meeting invitation

1. Invitation to Meeting of the Board of Directors is made in writing by the Corporate Secretary or Acting Corporate Secretary.
2. The Board of Directors Meeting Invitation should be

waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.

3. Undangan Rapat Direksi yang menghadirkan pihak lain dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat diadakan.
4. Undangan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Undangan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (misal: SMS, BBM, surat email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan.
6. Seluruh Direksi diharapkan dapat hadir dalam setiap Rapat Direksi. Apabila berhalangan, seorang anggota Direksi dapat memberi kuasa kepada anggota Direksi lainnya, cukup dengan disposisi, dan seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili satu orang anggota Direksi lainnya.

d. Pimpinan Rapat

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.
4. Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Direksi yang usianya tertua bertindak sebagai pimpinan rapat.

e. Agenda dan Materi Rapat

1. Materi rapat Direksi disusun berdasarkan masukan dari masing-masing anggota Direksi, dan dapat ditambahkan materi dari hasil Rapat Kepala Divisi yang harus diputuskan dalam Rapat Direksi.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai materi Rapat Direksi meliputi:
 - 1) Materi rapat adalah yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan.
 - 2) Evaluasi atas keputusan Rapat Direksi sebelumnya.

delivered at the latest 3 (three) days before the meeting date, or sooner if needed, excluding the date of the invitation and the meeting date.

3. For Meeting of the Board of Directors attended by other party, invitation should be delivered by Corporate Secretary or Acting Corporate Secretary within a period of at least 2 (two) working days before the meeting date.
4. Invitation of Meeting of the Board of Directors shall include the agenda, date, time and place of the meeting.
5. Invitation of the Board of Directors Meeting can be submitted via electronic means (eg, SMS, BBM, email letters and other electronic means) so that the invitation of meeting agenda can be promptly delivered.
6. All members of the Board of Directors are expected to attend each meeting of the Board of Directors. In the event that a member of the Board of Directors is unable to attend the meeting, he/she may authorize other member of the Board of Directors, with a disposition and a member of the Board of Directors may only represent one member of the Board of Directors.

d. Chairman of the Meeting

1. Meeting of the Board of Directors is chaired by the President Director.
2. In the absence of the President Director, Board of Directors meeting is chaired by a member of the Board appointed by the President Director.
3. In the event President Director does not make the appointment, then the most long-serving member of the Board of Directors acts as chairman of the Board of Directors Meeting.
4. In the event that the most long-serving member of the Board of Directors is more than 1 (one) person, then the oldest member of the Board of Directors acts as chairman of the meeting.

e. Meeting Agenda and Materials

1. Meeting materials are prepared based on input from each member of the Board of Directors and can include the material of Meetings of Head of Division, which should be decided in the meeting of the Board of Directors.
2. The Board of Directors Meeting materials can include the following:
 - 1) Materials that are strategic and require immediate decisions.
 - 2) Evaluation on the decision of the previous Board of Directors Meeting.

3. Materi rapat diberikan sebelum tanggal rapat bagi anggota Direksi untuk mempelajarinya.

f. Agenda dan Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan agenda rapat susulan tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai.
2. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat susulan tersebut.
3. Apabila anggota Direksi yang tidak hadir dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda rapat susulan tersebut diserahkan pada keputusan rapat.

g. Pengambilan keputusan

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah mufakat.
4. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Direksi dibuat dengan suara terbanyak.
5. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan suara tertutup.
6. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan disposisi tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

3. Materials should be provided before the date of the meeting for members of the Board of Directors to learn.

f. Additional Agenda and Supplementary Meeting

In the event that additional meeting agenda is proposed when the meeting will soon take place, then the following provisions apply:

1. Proposed supplementary agenda of the meeting shall be equipped with adequate material.
2. Supplementary meeting agenda must be approved by all members of the Board of Directors attended the meeting. To that end, members of the Board of Directors unable to attend the meeting should be contacted for approval or rejection of the supplementary meeting agenda.
3. If members of the Board of Directors unable to attend the meeting can not be reached within a reasonable time, then the approval of the subsequent meeting agenda is up to the decision of the meeting.

g. Decision-Making

1. All decisions of the Board of Directors are taken in a meeting of the Board of Directors.
2. The decision may also be taken outside the meeting of the Board of Directors, as long as all members of the Board of Directors agree on the manner and matter to be decided.
3. All meeting resolutions are adopted by consensus.
4. If the meeting fails to reach consensus, the Board of Directors meeting decisions are made by majority vote.
5. If the number consenting and dissenting votes is equal, the Meeting Chair determines the final decision, with regard to the provisions regarding accountability, except when it concerns person, the decision is made in a close voting.
6. in the event that there are more than 2 (two) alternatives of proposal and voting fail to reach a decision with number of vote casted more than $\frac{1}{2}$ (half) of total vote casted, then voting should be reconducted over two proposals that jointly gained votes more than $\frac{1}{2}$ (half) of total votes casted.
7. Each member of the Board of Directors is entitled to have 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for member of the Board of Directors represented.
8. Members of the Board of Directors who are not present confer a power of attorney to be represented at such Meeting by other member of the Board of Directors, with a written disposition given for that purpose.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi.
10. Dalam hal penambahan agenda rapat, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut.

h. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.
2. Perbedaan pendapat bukan berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.
3. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali anggota Direksi yang melakukan *dissenting opinion* dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

i. Risalah Rapat

- Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah atau Notulen Rapat.
- Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir, dan dilengkapi dengan daftar hadir.
- Risalah Asli Rapat Direksi disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan, sedangkan Direksi menyimpan salinannya.

9. A Board of Director Meeting is duly convened and entitled to adopt binding resolutions if more than ½ of the Board of Directors members are present.
10. In terms of additional meeting agenda, the Board of Directors meeting is not entitled to make a decision unless all members of the Board of Directors or his authorized representative, present and approve the addition of the meeting agenda.

h. Dissenting Opinion

The provision for Dissenting Opinion is as follows:

1. A minute of meeting must state any dissenting opinion/comment made by the Directors, along with reasons of dissenting opinion.
2. Dissenting Opinion does not mean giving the right to the said members of the Board of Directors not to implement the resolution of the meeting. Despite the differences of opinion, all members of the Board of Directors is still obliged to follow and implement the decision of the meeting.
3. The Board of Directors are jointly and severally liable for negligent act in discharging their duties for the benefit and interest of the Company, unless the member of the Board of Directors who has dissenting opinion can prove that he/she has taken action to prevent the continuation of such losses.
4. Dissenting opinion included in the resolution and minutes of meetings can serve as evidence that the said member of the Board of Directors has taken action to prevent such losses, by stating a dissenting opinion towards the resolution of the meeting. This means that the said members of the Board of Directors can be freed from the liabilities resulted from the losses incurred or continued, as a result of the implementation of the resolution of the meeting.

i. Minutes of Meeting

- Each BOD meeting much has minutes of meeting.
- Minutes of meeting is signed by the Meeting Chair and all members of BOD and is equipped with list of attendance.
- Corporate Secretary, or Acting Corporate Secretary, shall keep the original minutes of meeting, while BOD keep the copy.

- Risalah rapat Direksi harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rapat.
- Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:
 1. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
 2. Daftar hadir;
 3. Permasalahan yang dibahas;
 4. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat;
 5. Proses pengambilan keputusan;
 6. Keputusan yang ditetapkan; dan
 7. *Dissenting opinion* jika ada.

j. Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat

1. Atas setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi maka tindak lanjut pelaksanaannya harus dievaluasi.
2. Evaluasi tindak lanjut keputusan rapat dilakukan secara periodik, dan terhadap keputusan rapat yang telah diambil pada waktu sebelumnya wajib dilakukan evaluasi tindak lanjutnya pada kesempatan pelaksanaan rapat berikutnya.
3. Evaluasi tindak lanjut keputusan rapat dilakukan dengan membuat matriks yang memuat hasil keputusan rapat, jangka waktu tindak lanjut, *Person In Charge* (PIC) dan hasil tindak lanjut.

Program Orientasi dan Program Peningkatan Kompetensi Direksi

a. Program Pengenalan

Informasi dasar perusahaan kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat, meliputi:

1. Informasi atau pengetahuan internal:
 - a. Sejarah perusahaan.
 - b. Visi, Misi, Nilai-Nilai perusahaan serta sasaran perusahaan.
 - c. Struktur organisasi dan kerangka kerjanya, termasuk infrastruktur yang dimiliki perusahaan.
 - d. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris.
 - e. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
 - f. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan.
 - g. Perkembangan kinerja perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.
 - h. Proses bisnis dan jenis produk perusahaan.

- Minutes of meeting should be completed within 2 (two) days after meeting.
- Minutes of meeting should describe the events of the meeting, including:
 1. The event, place, date and time of the meeting;
 2. List of attendance;
 3. The agenda;
 4. The opinion stated during the meeting, especially in addressing strategic or material issues, including who express their opinions;
 5. The process of decision-making;
 6. Decisions adopted; and
 7. Dissenting opinion if any.

j. Evaluation on the Follow-up of Resolution

1. Each follow-up to the decision of Directors meeting should be evaluated.
2. Evaluation on the follow-up of meeting resolution is conducted periodically and to the resolution taken previously, a follow-up evaluation must be conducted during the next meeting.
3. Evaluation of the follow-up of meeting resolution is made by creating a matrix that contains the resolution of the meeting, the follow-up period, Person In Charge (PIC) and the results of follow-up.

Orientation Program and Competency Enhancement Program for Board of Directors

a. Induction Program

Company's Basic information for the new members of the Board of Directors and /or Board of Commissioners, include:

1. Internal Information or knowledge:
 - a. The history of the company.
 - b. Vision, Mission, Values and the objectives of the Company.
 - c. The organizational structure and framework, including the Company's infrastructure.
 - d. Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 - e. The Company's Long-Term Plan (RJPP).
 - f. Work Plan and Budget (RKAP) of the current year.
 - g. The Company's performance within the last 5 (five) years.
 - h. The business process and products.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Manajemen risiko perusahaan. j. Kebijakan perusahaan. k. Fungsi audit internal dan eksternal. l. Informasi lainnya yang relevan. <p>2. Informasi atau pengetahuan eksternal berkaitan dengan kegiatan perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan eksternal yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, dll. b. Posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor, pemasok, mitra usaha dan stakeholders lain. c. Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya. d. Undang-undang dan peraturan terkait. e. Informasi eksternal yang relevan. <p>3. Salinan dokumen yang disampaikan kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang baru menjabat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris. b. Anggaran Dasar. c. Laporan Tahunan tahun terakhir. d. RJP dan kontrak manajemen terakhir. e. Jadwal dan agenda rapat. f. Risalah rapat. g. Struktur organisasi dan uraian kerja. h. Laporan audit internal dan eksternal. i. Undang-undang dan peraturan lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> i. Corporate risk management. j. Corporate policies. k. Internal and external audit function. l. Other relevant information. <p>2. External information or knowledge relating to the activities of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. External development that includes political, economic, social, technological, etc. b. The position of the Company compared with competitors, suppliers, business partners and other stakeholders. c. The relationship and obligations with regulators and other relevant agencies. d. Relevant Laws and regulations. e. Relevant external information. <p>3. Copies of documents submitted to the new members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners. b. Articles of Association. c. Last year Annual Report. d. RJP and last management contract. e. Meeting schedule and agenda. f. Minutes of the meeting. g. The organizational structure and job descriptions. h. The internal and external audit reports. i. Other law and regulations. |
|--|--|

Selama tahun 2015, Direksi juga mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, diantaranya sebagai berikut:

During 2015, the Board of Directors also attended various training programs, conferences, seminars or workshops, which

No Nama/Name	Jabatan/Position	Workshop/Training/seminar	Penyelenggara/Organizer	Tempat/Venue
1. M. Shaifi e Zein	Direktur Utama/ President Director	11th International Microinsurance Conference	Maroko	Maroko
		21th Indonesia Rendezvous	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Denpasar-Bali
		Asia Pacific Agriculture Ins. Forum 2015	Guy Carpenter, Singapore	Tokyo-Japan
		ICISA Spring Meeting 2015, Yunani	ICISA	Yunani
		International Conference On Ensuring Fin	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Denpasar-Bali
		Pertemuan Tahunan CFP & RFP 2015	FPSB	Jakarta
		Seminar Manajemen Risiko IKNB	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta
		The Role Of International Financial Services	The Board Of Patrons	London
		W/S Sertifikasi Manajemen Risiko Batch3	DAI bekerjasama dg AAMAI	Jakarta
		W/S Self Assessment GCG	FKSPI	Jakarta

No Nama/Name	Jabatan/Position	Workshop/Training/seminar	Penyelenggara/Organizer	Tempat/Venue
2. Edhie Mulyono	Direktur Operasi/ Director of Operation	13th SIRC	Singapore Reins. Association bekerjasama dg RBAS	Singapore
		21th Indonesia Rendezvous	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Denpasar-Bali
		28th TAA	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Makasar
		Asia Pacific Life Ins. Congress (APLIC)	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia	Bali
		GTG-CIR 2015-041 (AGMS) Annual General	Global Takaful Group Limited	Dubai, UAE
		Menghadiri Acara APLIC	FPAI bekerjasama dg AAJI	Denpasar-Bali
		Sharing Session Penerapan Enterprise Risk	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	Jakarta
		The International Guarantee 2015	Asippindo	Denpasar-Bali
		W/S & ujian Sertifikasi Profesi MR	AAUI bekerjasama dg LSPMR	Jakarta
3. Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR	Asia Sub Committee Meeting	International Credit Insurance & Surety Associatio	Hong Kong
		International Conference On Ensuring	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Denpasar-Bali
		Peluang & Tantangan Industri Asuransi	AAMAI bekerjasama dg. Univ. Gunadarma	Denpasar-Bali
		Program Sertifikasi CRGP	PT. RAP Indonesia	Manado

Hubungan Afiliasi dengan Direksi lainnya

Seluruh anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi dengan NASIONAL RE. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan saudara. Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi

Setiap tahun Direksi menandatangani kontrak Manajemen dengan Pemegang Saham yang menyebutkan sasaran-sasaran yang harus dicapai selama setahun. Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengacu pada pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI).

Untuk tahun 2015 realisasi sasaran strategis/program kerja Direksi telah memperoleh skor 96,00, sebagaimana tabel di bawah ini:

Affiliate relationship with other Directors

All members of the Board of Directors (BOD) and families do not own shares in companies affiliated with NASIONAL RE. All members of the Board of Directors has no family relationship with other member of BOD or of the Board of Commissioners and has no family relationship to the third degree either vertically or horizontally to the side or relationship by marriage. Thus, the Board of Directors may carry out their duties and responsibilities independently and without conflict of interest between the interests of personal, family and relatives, other office or group, with the interests of the Company.

BOD Performance Appraisal

Each year, member of the Board of Directors (BOD) signed Management contract with shareholders, which outlined the goals to be achieved during the year. Assessment on the performance of the Board of Directors is prepared by the Board of Commissioners and by the AGM, with reference to the achievement of key performance indicators (KPI).

In 2015, the realization of strategic objectives/ work program of BOD scored 96.00 as shown in the table below:

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) MANAJEMEN PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015/KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF MANAGEMENT PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA - 2015

NO.	INDIKATOR/INDICATOR	SATUAN/ UNIT	FORMULA	BOBOT/ WEIGHT	TARGET 2015
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
a.	Earning After Tax (EAT)	Rp.	Tercapai sesuai RKAP/Meet the RKAP	10	200,2 Milyar
b.	Return on Equity	%	(Laba Setelah Pajak/Rata-rata Ekuitas) x 100% Profit after Tax/Average Equities	10	22,61%
c.	Risk Based Capital (RBC)	%	Kekayaan yang diperkenankan-Jumlah Kewajiban/Admitted Assets - Total Liabilities	7	Konvensional : 205,79%
			Batas tingkat solvabilitas Minimum/Minimum Solvency Margin Requirement		Syariah : 50,79%
d.	Return On Asset	%	(Laba Sebelum Pajak/Rata-rata Aset) x 100% Profit Before Tax/Average Assets	5	7,81%
a.	Pertumbuhan Market Share/Market Share Growth	%		5	25,87%
b.	Optimalisasi Kapasitas Konvensional/ Optimization of Conventional Capacity	%	<u>Premi Netto/Net Premium</u> Ekuitas Murni /Pure Equities (Ekuitas Konvensional dikurangi Modal disetor Syariah)/ Conventional Equities Net of Sharia Paid-in Capital	5	285,68%
TOTAL BOBOT KEUANGAN /TOTAL WEIGHT OF FINANCE				42	
a.	Customer Engagement	index	Hasil Survey kepuasan Pelanggan/Result from the Survey on Customer Engagement	5	75
b.	Customer Satisfaction	index	Hasil Survey kepuasan Pelanggan/Result from the Survey on Customer Satisfaction	5	75
TOTAL BOBOT FOKUS PELANGGAN/TOTAL WEIGHT OF CUSTOMER FOCUS				10	
a.	Loss Ratio	%	Klaim Netto/Net Claim + EKRS	5	41,89%
b.	Pertumbuhan premi/PREMIUM GROWTH	%	Premi Bruto/Gross Premium (n) - Premi Bruto /Gross Premium (n-1) Premi Bruto/Gross Premium (n-1)	5	75,0%
c.	Underwriting Yield	%	Hasil Underwriting Bersih/Net Underwriting Yield Premi Bruto/Gross Premium	5	5,86%
d.	Yield On Investment	%	Hasil Investasi/Investment Yield Rata-rata Investasi/Average Investment	5	6,58%
TOTAL BOBOT EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES/TOTAL WEIGHT OF EFFECTIVENESS OF PRODUCT AND PROCESS				20	
FOKUS TENAGA KERJA/FOCUS ON EMPLOYEE					
	Produktifitas Pegawai/Employee Productivity	Rp juta/ Pegawai/ MILLION / EMPLOYEE	Laba Setelah Pajak/Profit After Tax	5	Rp1.118 juta / million
			Rata-rata Jumlah Pegawai (tetap dan kontrak)/Total Score of Employee Engagement		
	Keterikatan Pegawai/Employee Engagement		Total Nilai Keterikatan Pegawai/Total Score of Employee Engagement	5	75
			Jumlah responden/Number of Respondent		
TOTAL BOBOT FOKUS TENAGA KERJA/TOTAL WEIGHT OF FOCUS ON EMPLOYEE				10	
	Skor KPKU	Skor/Score	Hasil assesment KPKU/KPKU Assessment Result	6	376
	Skor GCG	Skor/Score	Hasil assesment GCG/GCG Assessment Result	6	85
	Maturity Level Manajemen Risiko	Skor/Score	Hasil Assesment Manajemen Risiko/Risk Management Assessment Result	6	3,0
TOTAL BOBOT KEPEMIMPINAN/TOTAL WEIGHT OF LEADERSHIP				18	
TOTAL BOBOT/TOTAL WEIGHT				100	

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan Remunerasi Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dimana selanjutnya diajukan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dimana untuk realisasinya dengan mempertimbangkan prestasi KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Direksi Tahun 2015

Remunerasi Direksi meliputi gaji, tunjangan pakaian, tunjangan hari raya, dan tantiem yang telah dibayarkan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut Rp9.288.070.475

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi NASIONAL RE per 31 Desember 2015 telah mencerminkan keberagaman dalam hal pengalaman, latar belakang pendidikan, dan kompetensi sehingga seluruh anggota Direksi dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebaik mungkin.

KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun auditor eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan pengawas dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan PT Reasuransi Nasional Indonesia termasuk laporan keuangan berkala. Proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Procedures for the Determination of BOD Remuneration

The Determination of BOD Remuneration refers to the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014, and submitted to be decided in GMS, with the realization of which considers the KPI of BOC and BOD.

Remuneration of the Board of Directors in 2015

Remuneration, including salary, allowances and others that was paid in 2015, amounted to Rp9,288,070,475

Diversity of Composition of the Board of Directors

The Composition of the Board of Directors of NASIONAL RE per December 31, 2015 has reflected the diversity in terms of experience, educational background and competency so that all members of the Board of Directors can support each other in performing their duties and obligations as good as possible.

Audit Committee

The Audit Committee was formed to strengthen the supervisory functions of the Board of Commissioners and increase public confidence in the management of the company.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee has the duties and responsibilities as follow:

1. Assess the audit activities and results, conducted by the Internal Audit Unit (IAU) and the external auditors, in order to prevent the occurrence of supervisory and reporting that do not meet the standards .
2. Provide recommendations for the improvement of the Company's management control system and its implementation.
3. Ensure a satisfactory review procedures upon information issued by PT Reasuransi Nasional Indonesia including periodic financial statements. Projection/*forecast* and other financial information to be submitted to the Shareholders.
4. Identify issues that require the attention of the Board of Commissioners.

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan perundangundangan yang berlaku.

Kualifikasi Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Untuk dapat menduduki posisi sebagai anggota Komite Audit maka kandidat harus memenuhi prasyarat berikut ini:

- a. Memiliki pengetahuan memadai mengenai industri asuransi termasuk segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit.
- c. Mampu berkomunikasi efektif.
- d. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- e. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- f. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian internal perusahaan.
- g. Memiliki pemahaman tentang konsep *auditing*.
- h. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit.

Independensi Komite Audit

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE. Anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan Perusahaan sebelum menjabat dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan Perusahaan.

Susunan Komite Audit

Koordinator : Raymond Buisson
 Anggota : Teguh Prastiyo

5. Discharge other duties assigned by the Board of Commissioners, to the extent that all are within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association and the applicable legislation .

Educational Qualification and Employment History of Audit Committee Members

To assume the position as a member of the Audit Committee, the candidate must meet the following requirements:

- a. Possessing adequate knowledge on the insurance industry, including all rules and regulations.
- b. Possessing education and employment backgrounds in the sector of financial reporting or auditing.
- c. Able to communicate effectively.
- d. Having a good character, ethics and professional responsibility.
- e. Possessing adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance (GCG).
- f. Possessing adequate understanding of the risk concept and risk management in business activities as well as internal control.
- g. Possessing an understanding of the concept of auditing.
- h. Listed as member of professional organization of Audit Committee.

Independence of the Audit Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Audit Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the NASIONAL RE. Members of the Audit Committee do not have the authority to design, lead and control the Company prior to serve as member of Audit Committee and are not former head or employee of public accounting firm that examined the books of the Company.

Composition of the Audit Committee

Chairman : Raymond Buisson
 Member : Teguh Prastiyo

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sedikitnya 12 (dua belas) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Charter komite Audit.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam perusahaan, serta membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota dewan komisaris dan Direksi serta membantu menyusun sistem penggajian, memberikan tunjangan, fasilitas lainnya dan memantau pelaksanaannya.

Komite ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab mencari calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris, yang kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dapat dipertimbangkan oleh Pemegang Saham.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam penentuan anggota komite nominasi dan remunerasi, Perusahaan tidak mempunyai kualifikasi khusus terkait latar belakang pendidikan anggota komite, namun memprioritaskan pengalaman kerja dari kandidat.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee member attended meeting at least 12 (twelve) times a year as stipulated in the Charter of the Audit Committee.

The Nomination and Remuneration Committee

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee has the duty and responsibility of preparing the selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Commissioners, Directors and other executives, as well as preparing the system for assessment and provide recommendations on the number of BOC and BOD and assisting the establishment of the payroll system, provision of allowances, other facilities and monitoring the execution.

The Committee also has the duty and responsibility of searching candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be reported to the Board of Commissioners, who will submit it to shareholders for their consideration.

Qualification of Education and Employment History of Member of Nomination and Remuneration Committee

In selecting members of the Nomination and Remuneration Committee, the Company does not require certain educational qualifications, but rather prioritizes candidates with experience.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Nomination and Remuneration Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the NASIONAL RE.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Koordinator : Sulaeman
 Anggota : Raymond Buisson

Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Chairman : Sulaeman
 Member : Raymond Buisson

KOMITE-KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam menjalankan fungsi pengawasannya Dewan Komisaris juga dibantu komite-komite berikut:

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau sistem dan pelaksanaan Manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai preferensi risiko dan toleransi risiko yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dalam memantau penerapan Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan dan penerapan manajemen risiko, membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, serta menilai efektifitas Manajemen Risiko, termasuk menilai preferensi risiko dan toleransi risiko yang disusun oleh Direksi.

Komite secara rutin melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko oleh jajaran Direksi dan pelaksana organisasi.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In discharging its duties of supervision, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Policy Committee and the Nomination and Remuneration Committee

The Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility for assisting the Board of Commissioners in reviewing the risk management system developed by the Board of Directors, assessing its effectiveness and risk tolerance that can be taken by the Company.

Duties and Responsibilities

Risk Monitoring Committee has the duties and responsibilities of assisting the Board of Commissioner in assessing the risk management system prepared by the Board of Directors, as well as assessing the effectiveness of risk management. The Committee also monitors the implementation of risk management prepared by the Board of Directors, as well as assessing the risk preference tolerance. The committee periodically runs the monitoring on implementation of the risk management by BOD and all staff.

Independence of the Risk Monitoring Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Risk Monitoring Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the NASIONAL RE.

Rapat Komite

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Realisasi rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.

Susunan Komite Pemantau Risiko

Koordinator	: Rinarno Pramudyanto
Anggota	: Sulaeman
Anggota	: Ricardo Pardede

Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Tugas dan Tanggung Jawab

Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan *Good Corporate Governance* secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi, dan memantau pelaksanaannya serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*).

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Dalam penentuan anggota Komite Kebijakan *Corporate Governance*, Perusahaan tidak mempunyai kualifikasi khusus terkait latar belakang pendidikan calon anggota komite, namun para kandidat harus pernah mengikuti pelatihan tentang *Good Corporate Governance*.

Independensi Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite *Corporate Governance* tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

Meeting of the Committee

The Risk Monitoring Committee convenes meeting at least 4 (four) times a year as stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter. In realization, the Committee met 11 (eleven) times.

Composition of the Risk Monitoring Committee

Chairman	: Rinarno Pramudiyanto
Member	: Sulaeman
Member	: Ricardo Pardede

Corporate Governance Committee

Duties and responsibilities

Assisting the Board of Commissioner in reviewing the Good Corporate Governance policy thoroughly, which has been prepared by the Board of Directors, and also monitoring the implementation and assessing the consistency of its application, including those relating to Business Ethics and Corporate Social Responsibility

Educational qualification and employment history of Corporate Governance Committee members

In selecting members of Corporate Governance Committee, the candidate is not required to have certain qualifications, regarding educational background, but the candidate shall have been trained on GCG implementation.

Independence of the Corporate Governance Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Corporate Governance Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the NASIONAL RE.

Susunan Pengurus

Koordinator : Raymond Buisson
 Anggota : Sulaeman

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat, hubungan kelembagaan, hubungan investor serta kesekretariatan Direksi.

Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan

Mengacu pada peraturan Bapepam IX.I.4 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan serta Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara, pada dasarnya tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:

- 1) Mengelola strategi komunikasi untuk membangun citra perusahaan.
- 2) Mewakili perusahaan dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 3) Menginformasikan kinerja perusahaan dan *corporate action* kepada pihak yang membutuhkan dan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Mengelola mekanisme pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan perusahaan.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat direksi, rapat direksi dengan komisaris, rapat kinerja perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta keprotokolan Direksi dan administrasi kesekretariatan Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 22/KEP/DIR/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 mengenai Penetapan Sekretaris Perusahaan, bahwa Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Direktur Keuangan dan SDM sedangkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Kepala Divisi SDM & Umum.

Dalam perjalanannya, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 56/KEP/DIR/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 mengenai Struktur Organisasi Perusahaan, Perusahaan telah membentuk unit Bagian Sekretariat Perusahaan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan, yang hingga saat ini masih dijabat oleh Direktur Keuangan & SDM berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01-A/KEP/DIR/I/2014 tanggal 03 Januari 2014.

Composition of the Committee

Chairman : Raymond Buisson
 Member : Sulaeman

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is responsible for formulating the policies, planning and control of corporate communications, institutional relations, investor relations, as well as the secretariat of the Board of Directors.

Legal Basis for the Appointment and Terms of Office

Referring to Bapepam Rules IX.I.4 about the formation of the Corporate Secretary and the Decree of Minister of SOEs No.: KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices In State-Owned Enterprises, basically Corporate Secretary duties include:

- 1) Managing communication strategy in order to build corporate image.
- 2) Representing the Company in communicating the Company's activities to all stakeholders.
- 3) Providing information on the Company's performance and corporate action for the interest of other parties and stakeholders.
- 4) Managing information disclosure mechanism, internally and externally, in accordance with the interests of the Company.
- 5) Coordinating BOD internal meeting, BOD meeting with BOC, meeting on the Company's performance and the General Meeting of Shareholders, as well as the protocol and secretarial administration of the Board of Directors.

As per Board of Directors Decree No. 22/KEP/DIR/V/2013 dated May 15, 2013 regarding the Establishment of the Corporate Secretary, the Corporate Secretary responsibility was held by the Director of Finance and HR whereas the execution of the Corporate Secretary function was performed by the HR & General Affairs Division Head.

In the course of time, in accordance with the Directors' Decree No. 56/KEP/DIR/XII/2013 dated December 18, 2013 on the Organizational Structure, the Company has established a Corporate Secretariat unit under the coordination of Corporate Secretary, the function of which is still assumed by Director of Finance & HR, by virtue of BOD Decree No. 01-A/KEP/DIR/I/2014 dated January 03, 2014. Furthermore, for daily activities Head

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 09/KEP/DIR/III/2014 tentang Mutasi dan Rotasi Pejabat/Pegawai sejak tanggal 17 Maret 2014.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk membantu kelancaran tugasnya, Direksi dibantu oleh sejumlah komite yaitu: Komite Penyelesaian Klaim, Komite Akseptasi *Underwriting*, Komite Kebijakan Investasi, dan Komite Investasi. Selain itu, Direksi juga dibantu oleh Satuan Pengawas Internal atau SPI.

Komite Penyelesaian Klaim

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Penyelesaian Klaim bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisis usulan penyelesaian klaim yang disampaikan oleh Divisi Reasuransi Jiwa, Divisi Reasuransi Syariah, dan Divisi Klaim dalam rangka penyelesaian klaim.

Melakukan *review* terhadap setiap usulan penyelesaian klaim yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan penyelesaian klaim yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada standar operasi dan prosedur yang ditetapkan.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap.

Susunan Komite Penyelesaian Klaim

Koordinator : Aviantono Y.
Anggota : Noe'man Tohepaly
Anggota : Arya Sidharta

Komite Akseptasi Underwriting

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Akseptasi *Underwriting* bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisis usulan akseptasi khusus yang disampaikan oleh Divisi

of Corporate Secretariat Unit is assigned to become Acting Corporate Secretary based on the BOD Decree No. 09/KEP/DIR/III/2014 on Employee Rotation as per March 17, 2014.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

To help the Board of Directors in discharging their duties, a number of Committee is established, namely: Claims Settlement Committee, Acceptances Underwriting Committee and Investment Committee and Risk Management Committee. In addition, the Board of Directors is also assisted by the Internal Audit Unit or IAU.

Claims Settlement Committee

Duties and Responsibilities

Claims Settlement Committee is responsible for providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors regarding the results of the analysis on the proposed settlement of the claims submitted by the Life Reinsurance Division, Sharia Reinsurance Division and Claims Division for the settlement of claims.

Conducting review of any proposed settlement of claims in accordance with the authority and provisions of the settlement of claim which is the authority of the Board of Directors, based on common transaction limits and with reference to the standards operation procedures.

The Committee shall accomplish the duties in no later than 2 (two) working days after the proposal is received completely.

Composition of the Claims Settlement Committee

Coordinator : Aviantono Y.
Member : Noe'man Tohepaly
Member : Arya Sidharta

Underwriting Acceptance Committee

Duties and Responsibilities

The Underwriting Acceptance Committee is responsible for providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors on the results of the analysis on the proposal

Underwriting Facultative, Divisi *Treaty* dan Retrosesi, Divisi Reasuransi Jiwa dan Divisi Reasuransi Syariah dalam rangka memutuskan akseptasi yang akan dilakukan.

Selain itu juga bertugas melakukan review terhadap setiap usulan akseptasi yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan akseptasi yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada standar operasi dan prosedur yang ditetapkan.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap.

Susunan Komite Akseptasi Underwriting

Koordinator : Sukmo Prayogo
 Anggota : R. Joko Slamet P.
 Anggota : Mulkan Lubis

Komite Investasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan arahan investasi perusahaan. Membantu Direksi dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan.

Disamping itu, Komite Investasi juga bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisis usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang disampaikan oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi dalam rangka memutuskan pelaksanaan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi. Melakukan *review* terhadap setiap usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada pedoman investasi yang ditetapkan.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap. Dalam hal Anggota Komite Investasi tidak berada ditempat oleh karena dinas luar, cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi Anggota Komite Investasi dapat langsung disampaikan kepada Direksi.

of specific acceptances submitted by the Facultative Division, Division of Treaty and Retrocession, Division of Life Reinsurance and Sharia Reinsurance Division in order to decide on the acceptance policy.

The committee is also assigned to review each proposal on acceptances in accordance with the authority and provisions of acceptances which are the authority of the Board of Directors, based on the limits of common transaction and with reference to the standards and procedures for specified operation.

The committee shall carry out its duties not later than 2 (two) working days after the proposal is received completely

Composition of Underwriting Acceptance Committee

Coordinator : Sukmo Prayogo
 Member : R. Joko Slamet P.
 Member : Mulkan Lubis

Investment Committee

Duties and Responsibilities

The Investment Committee is responsible for assisting BOD in formulating the policy and directive for the Company's investment. As well as monitoring the execution of investment policy and directive.

In addition, the Investment Committee is also in charge of providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors regarding the results of the analysis on the proposal of placement, extension or withdrawal of investment submitted by the Division of Finance and Accounting in order to decide the implementation of the placement, extension or withdrawal of investment . Conducting review on each of proposal of placement, extension or withdrawal is the authority of the Board of Directors, based on the common transaction limits and with reference to the investment guidelines.

The committee shall carry out its duties not later than 2 (two) working days after the proposal is received completely. In the event that a member of the Investment Committee is not in place due to business trip, on leave or unable to attend for any reason, then at least 2 (two) recommendations of Investment Committee Members can be submitted directly to the Board of Directors.

Susunan Komite Investasi

Koordinator	: Direktur Utama
Anggota	: Direktur Keuangan dan SDM
Anggota	: Faried Susanto
Anggota	: Andrie Prasetyo
Anggota	: Ari Priasto

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Struktur dan Kedudukan SPI

Satuan Pengawas Internal (SPI) dipimpin oleh seorang kepala setingkat kepala divisi dan strukturnya berada langsung di bawah Direktur Utama. Jumlah pegawai SPI posisi per 31 Desember 2015 ada 12 (dua belas) orang termasuk Kepala SPI, dengan berbagai latar belakang pendidikan

Kepala SPI sesuai SK Direksi No. 27/KEP/DIR/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 terhitung per 1 Juli 2012 dijabat oleh Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, *Chartered Accountant*, CRMP Sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam SPI (*Internal Audit Charter*) seorang kepala SPI harus memenuhi kualifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 diutamakan jurusan akuntansi, memiliki sertifikasi gelar profesi dan/atau berpengalaman di bidang internal audit serta memiliki pengetahuan di bidang perasuransian.
2. Apabila kualifikasi di atas tidak terpenuhi, maka Kepala SPI harus memiliki pengalaman di bidang operasional perusahaan.

Sesuai Piagam SPI disebutkan bahwa tujuan SPI adalah meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional, serta meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Composition of the Investment Committee

Chairman	: President Director
Member	: Director of Finance and HR
Member	: Faried Susanto
Member	: Andrie Prasetyo
Member	: Ari Priasto

Internal Audit Unit (IAU)

Structure and Position of IAU

Internal Audit Unit (IAU) is chaired by a head of division who reports directly to the President Director. Number of employees of the IAU, as of December 31, 2015 was 12 (twelve) members, including the Head of Internal Audit, with a variety of educational backgrounds.

Based on BOD Decree No.27/KEP/DIR/VI/2012, dated June 29, 2012, IAU is chaired by Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, Chartered Accountant, CRMP In accordance with the provisions set forth in the Internal Audit Charter, Head of IAU must meet the qualifications as follows:

1. Possessing a minimum educational background of Bachelor Degree preferably majoring in accounting, professional certification and/or experience in the sector of internal auditing, as well as having knowledge of insurance.
2. If the said requirement is not met, then the Head of Internal Audit should have experience in the areas of company operations.

As stipulated in its Charter, IAU's goal is to increase the value and improve operational performance, as well as render effective risk management and Good Corporate Governance.

Dalam struktur organisasi perusahaan, unit SPI digambarkan sebagai berikut:

In the organizational structure of the company, IAU is described as follows:



Wewenang SPI

Untuk memenuhi tugas dan kewajibannya, Kepala dan Staf SPI diberi wewenang penuh untuk:

1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, memilih obyek pemeriksaan, menetapkan ruang lingkup audit dan mengaplikasikan semua teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
2. Memiliki akses tanpa batas terhadap semua fungsi, catatan, harta milik (*asset*) dan pegawai.
3. Memiliki akses langsung untuk kapan saja berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan *auditor* eksternal (Kantor Akuntan Publik (KAP)/regulator).
5. Memperoleh data dan penjelasan terkait dengan tugasnya dari semua satuan kerja yang diaudit, dan dapat meminta jasa bantuan lainnya dari narasumber profesional.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana *audit internal* tahunan (Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)).
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan,

The Authority of IAU

In discharging their duties and obligations, the Head and Staff of IAU are fully authorized to:

1. Allocate resources, scheduling, choose the object of inspection, define the scope of audit and apply all the techniques deemed necessary to achieve the objectives of the audit.
2. Have unlimited access to all functions, records, property (assets) and employee.
3. It have a direct access to communicate with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee, at any time.
4. Coordinate its activities with the activities of the external auditors Public Accounting Firm (KAP)/regulator.
5. Obtain the data and explanations related to their duties from all units to be audited and may request other services from professional sources.

Duties and Responsibilities

- a. To prepare and implement annual internal audit plan (Annual Audit Work Program (PKAT)).
- b. To test and evaluate the implementation and internal control and risk management systems in accordance with the Company's policy.

- c. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, manajemen risiko dan kegiatan perusahaan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua unit (*auditee*).
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SPI.
- i. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perihal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015, laporan kegiatan Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Kerja Pengawasan
2. Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SPI

Dalam Piagam SPI butir II.2 tentang Organisasi disebutkan bahwa Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Review dan Penilaian Sistem Pengendalian Internal

Pada setiap kali akan dimulai suatu audit, auditor wajib mereview dan menilai keadaan sistem pengendalian internal obyek yang diaudit (unit kerja) sebagai dasar:

1. Untuk menentukan luasnya prosedur audit dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan serta penyusunan prosedur audit.
2. Untuk memberikan saran-saran perbaikan/rekomendasi kepada manajemen.
3. Sistem pengendalian internal seperti telah dijelaskan sebelumnya meliputi review atas hal-hal yang menyangkut:
 - Lingkungan Pengendalian
 - Penilaian Risiko

- c. To conduct audit and assess of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, risk management and other corporate activities.
- d. To Provide suggestions for improvements and objective information about the activities to be audited, on all units (auditee).
- e. To make the audit report and submit a follow-up report on the implementation of the findings and improvements that have been suggested.
- f. To monitor, analyze and report on the implementation of the follow-up of findings and improvements that have been suggested.
- g. Work closely with the Audit Committee.
- h. Develop a program to evaluate the quality of the Internal Audit activities.
- i. Conducting special audit if deemed necessary.

As stipulated in the Work Plan & Budget (RKAP)- Regarding the Annual Monitoring Work Program (PKPT) 2015, the activities of the Internal Audit Unit are as follows:

1. Plan and Realization of Audit Duties.
2. Plan and Realization of Follow Up

The Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Unit

As stipulated In the IAU Charter point II.2 regarding the Organization, Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Review and Assessment of Internal Control Systems

In the beginning of every audit, the auditor shall review and assess the state of the internal control system of the audit object (unit) as a basis:

1. To determine the scope of the audit procedures and the depth of the audit to be performed, as well as the preparation of audit procedures.
2. To provide suggestions for improvement/ recommendations to management.
3. The system of internal control, as previously described, includes a review of matters relating to:
 - Control Environment
 - Risk Assessment

- Aktivitas Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan

- Control Activity
- Information and Communication
- Monitoring

Tahap-Tahap Review Dan Penilaian Sistem Pengendalian Internal.

1. Pengumpulan data dan informasi
Kumpulkan data mengenai sistem pengendalian internal antara lain dengan jalan mempelajari manual yang ada, mempelajari operasi yang sesungguhnya dan mengadakan wawancara (*interview*) dengan pejabat yang berkepentingan.
2. Penelaahan.
Siapkan catatan tertulis mengenai sistem pengendalian internal melalui media sebagai berikut:
 - 1) Daftar pertanyaan tentang pengendalian internal.
 - 2) Bagan Arus (*Flow-Chart*).

Daftar dilengkapi dengan uraian tertulis (*narrative*). Untuk auditor yang belum biasa menggunakan bagan arus dapat dijalankan sebaliknya, yaitu membuat gambaran garis besar secara tertulis dan kemudian dilengkapi dengan bagan arus.

Stages of Review and Assessment of Internal Control Systems.

1. Collecting data and information
Collecting data on the internal control system, among others, by studying the existing manual, learning the actual operation and conducting interview with the officials concerned.
2. Reviewing.
Preparing a written record of the internal control system through the media as follows:
 - 1) List the question of internal control.
 - 2) Flow Chart

For auditors who have not been accustomed to using the flow chart can use the other way around, by preparing a written outline and then fitted with a flow chart.



Subagio Istiarno, Kepala SPI/Head of Internal Audit Unit

Lahir di Solo, 4 November 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE Swadaya, Jakarta pada tahun 1994. Menyelesaikan pendidikan S2 untuk S2- STIE IPWI, Program Studi Manajemen Keuangan STIE IPWI, Jakarta pada tahun 2000. Beliau juga memperoleh pendidikan profesi yaitu: Akuntan – PPAk Universitas Indonesia (2004) dengan Register Negara No.D- 38.373 tgl 13-7-2004; dan Chartered Accountant IAI Jakarta (2013). Subagio ditunjuk sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan SK Direksi No.10/2012 tanggal 1 Juli 2012.

Subagio Istiarno, Born in Solo on November 4, 1962. Graduated with a Bachelor degree in Economics majoring in Accounting from STIE Swadaya, Jakarta in 1994. Graduated with a Master degree for S2-STIE IPWI, Financial Management Program of STIE IPWI, Jakarta in 2000. He also obtained a professional education of: Accountant-PPAk University of Indonesia (2004) with State Registers No.D-38.373 dated 13-7-2004; and Chartered Accountant IAI Jakarta (2013). Has been appointed as Head of Internal Audit based on the Board of Directors Decree No.10/2012 dated July 1, 2012.

AUDITOR EKSTERNAL

Penunjukan Auditor Eksternal

Sesuai butir 3 keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terhadap laporan tahunan 2014 tanggal 6 Maret 2015 diputuskan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk general audit tahun buku 2015 akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan kesamaan KAP yang akan melakukan general audit laporan keuangan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun buku 2015.

Berdasarkan surat Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tanggal 15 Mei 2015 perihal penunjukkan KAP SMR sebagai pelaksana audit umum laporan keuangan tahun 2015 PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan anak perusahaan disebutkan bahwa KAP Soejatna, Mulyana & Rekan (SMR) telah ditetapkan sebagai pelaksana audit umum laporan keuangan tahun 2015 untuk PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia beserta anak perusahaannya.

Kriteria Penunjukan

Penunjukan KAP Soejatna Mulyana dan Rekan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan telah melalui tahapan proses seleksi yang berdasarkan kriteria berikut:

1. Berpengalaman sebagai auditor lembaga keuangan non-bank.
2. Memahami regulasi lembaga keuangan non-bank di Indonesia, serta peraturan lainnya yang relevan.
3. Memahami produk asuransi/reasuransi.
4. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko.

Imbalan Jasa

KAP Soejatna Mulyana dan Rekan yang ditunjuk oleh Perusahaan telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank dengan tepat waktu. KAP juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Jumlah imbalan jasa yang diberikan Perusahaan kepada KAP Soejatna, Mulyana & Rekan tersebut adalah sebesar Rp110 juta (seratus sepuluh juta rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan pajak lainnya yang terkait. Tidak terdapat jasa lain yang diberikan selain jasa *financial auditing*.

EXTERNAL AUDITOR

Appointment of External Auditor

In accordance with point 3 of GMS resolution on the Annual Report 2014 on March 6, 2015, it has been decided that the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) for conducting general audit for the fiscal year 2015 will be conducted later, by taking consideration the same KAP that will conduct the general audit on the financial statement of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia for the fiscal year 2015.

Based on the letter of the Board of Directors of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dated May 15, 2015 concerning the appointment of the KAP SMR to conduct general audit of financial statements 2015 of PT Askrindo (Persero) and its subsidiaries, KAP Soejatna, Mulyana & Partners (SMR) was appointed to implement the general audit on the financial statements 2015 of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia and its subsidiaries.

Criteria for Appointment

The appointment of KAP Soejatna, Mulyana & Partners, Independent External Auditors, refers to the applicable legislation and has been through stages of selection process based on the following criteria:

1. Experienced as auditor of non-bank financial institutions.
2. Understanding the regulation of non-bank financial institutions in Indonesia, as well as other relevant regulations.
3. Understanding insurance/reinsurance.
4. Experienced and knowledgeable about risk management.

Fees

KAP Soejatna, Mulyana & Partners, appointed by the Company, has submitted the audit results and management letter to the Company in a timely manner. KAP has also committed their work independently and met the criteria agreed beforehand.

Total fee for KAP Soejatna, Mulyana & Partners services rendered to the Company amounted to Rp110,000,000,00 (one hundred and ten million rupiah) including VAT at 10% (ten percent) and other related taxes. There are no other services provided in addition to financial auditing services.

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Konsep Pengelolaan Risiko Perusahaan

Situasi lingkungan eksternal dan internal Perusahaan yang mengalami perubahan dengan pesat telah menimbulkan risiko yang semakin kompleks bagi kegiatan usaha Perusahaan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi lingkungan pengendalian, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal.

Bagi Perusahaan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola Perusahaan mengenai kemungkinan kerugian Perusahaan di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Perusahaan, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Perusahaan serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan.

Bagi regulator, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan yang dapat mempengaruhi permodalan Perusahaan dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan atas Perusahaan.

Esensi dan penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perusahaan.

Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran dan kompleksitas usaha perasuransian, maka tidak terdapat sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh perusahaan sehingga setiap perusahaan harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada masing-masing perusahaan. Risiko dalam konteks Perusahaan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

The Concept Of Enterprise Risk Management

Rapid changes in the Company's external and internal environment pose increasingly complex risks for the Company's operations and hence increases the need for the practice of sound corporate governance (GCG) and the application of risk management which includes the control environment, policies, procedures and risk limits, process of identification, measurement, monitoring, information systems and risk management and internal control systems.

For the Company, the application of risk management increases shareholder value, provides overview to the management about the possible loss of the Company in the future, improves methods and systematic decision making process based on the availability of information and is used as the basis for a more accurate measurement of the Company's performance and to assess the risks inherent in the instruments or the Company's business, as well as creates a strong risk management infrastructure in order to improve the competitiveness of the Company.

For regulator, the application of risk management will facilitate an assessment of the potential losses faced by the Company that may affect the Company's capital and as one of the basis of assessment in setting strategy and oversight of the Company's focus.

The essence in the implementation of risk management is the adequacy of procedures and methodologies of risk management so that the Company's operations can still be controlled (*manageable*) within the acceptable boundary/limit and is profitable.

However, given the differences in market conditions and the structure, size and complexity of the insurance business, there is no such a thing as the universal system of risk management for all companies, so that each company has to develop its risk management system in accordance with the functions and organization. Risk is a potential occurrence, both predictable (*anticipated*) or unexpected (*unanticipated*) which can bring positive or negative impact on the Company's earnings and

yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif maupun positif terhadap pendapatan dan permodalan Perusahaan. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Perusahaan harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang masih mungkin timbul dari kegiatan Perusahaan meskipun telah dikendalikan (*residual risks*), termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.

Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut Perusahaan perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Perusahaan mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga Perusahaan dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha dimaksud.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan Perusahaan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan oleh pihak pengambilan keputusan dalam Perusahaan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perusahaan melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

Perusahaan telah memastikan bahwa semua potensi risiko Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dimitigasi dampaknya sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan stratejik yang dilakukan dalam suatu proses yang disebut proses *Enterprise Risk Management (ERM) System*.

Kerangka pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan Sistem Informasi Manajemen, pengukuran dan pemantauan risiko, dan berbagai kebijakan, prosedur, limit transaksi, acuan, serta beberapa perangkat bantu pengelolaan risiko lainnya. Kerangka pengelolaan risiko Perusahaan dalam jangka panjang yang tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sedang dilakukannya, yang nantinya akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektifitasnya sesuai standar yang berlaku. Penerapan ERM System yang dilakukan Perusahaan dipicu oleh kesadaran akan kebutuhan pengelolaan Perusahaan secara lebih baik.

capital. To be able to apply the risk management process in the early stage the Company shall accurately identify the risks by studying the existing risk (*inherent risks*) and potential risk arising from the activities of the Company, despite the fact that the control system is in place (*residual risks*), including risk from related companies and other affiliates.

After accurately identifying the risks, then the Company shall conduct measurement, monitoring and risk control. Risk measurement is intended to enable the Company to calculate the risk exposure inherent in its business activities, to predict the impact on capital that should be maintained in order to support the business activities.

Meanwhile, in order to carry out the monitoring of risk, the Company shall conduct an evaluation on the risk exposure, especially the material risks and /or risks that can impact on the Company's capital. Monitoring results, including evaluation on risk exposure, was reported in a timely, accurate and informative manner to be used by the decision-maker, including the required follow-up. Furthermore, based on the monitoring results, the Company mitigates the risks, among others, by additional capital, hedging and other risk mitigation techniques.

The Company has ensured that the potential risks have been identified, analyzed, evaluated and mitigated, to prevent them from hindering the achievement of its strategic objectives, which was done using Enterprise Risk Management (ERM) system.

The Company's risk management framework includes active supervision from the Board of Commissioners and the Board of Directors, adequate Management Information Systems, risk measurement and monitoring and a variety of policies, procedures, transaction limits, references, as well as several other risk management means. The Company's risk management framework in the long term is stipulated in the Company's Long-Term Plan (RJPP) construction is being carried out, which will be evaluated periodically to ensure its effectiveness in accordance with the applicable standards. The application of ERM system is triggered by the awareness of the need to have better management.

Langkah-langkah Pengelolaan Risiko Perusahaan

Enterprise/Corporate Risk Management Moves

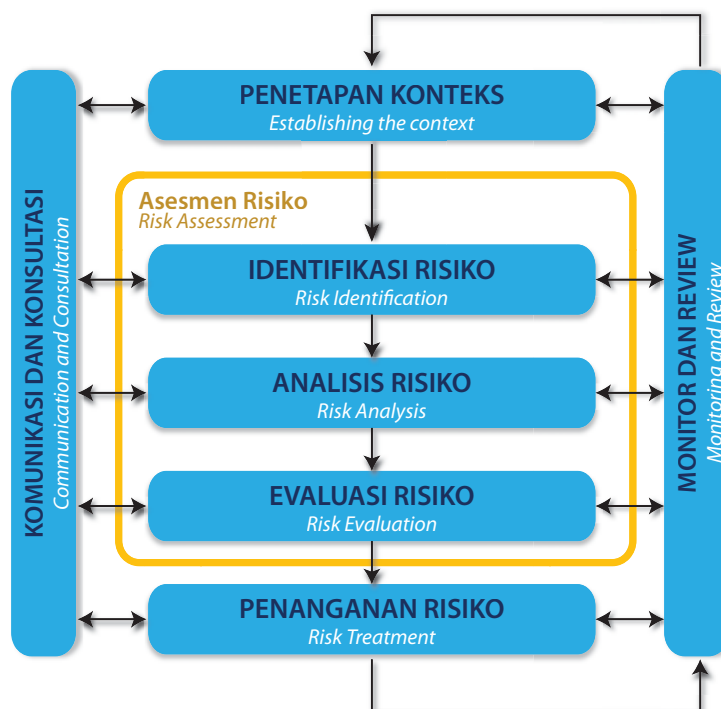
Bagan 1: Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Chart 1: Risk Management Framework



Bagan 2: Proses Kerja Manajemen Risiko

Chart 2: Risk Management Working Process



Proses manajemen risiko di PT Reasuransi Nasional Indonesia. mengadopsi standar *ISO 31000:2009 Risk Management – International Standard*. Di dalam melakukan *assessment*, PT Reasuransi Nasional Indonesia menggunakan metode *Risk and Control Self Assessment (RCSA)* di dalam penilaian risiko dan kontrol perusahaan. Beberapa keunggulan yang menjadi alasan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *risk awareness* di seluruh perusahaan, karena melibatkan seluruh fungsi dan seluruh *level*.
2. Meningkatkan *risk ownership* bagi mereka yang bertanggungjawab dalam melaksanakan operasional.
3. Mengintegrasikan sudut pandang dari sisi operasional dan *top management*.
4. Mampu mengeluarkan dan memanfaatkan pengetahuan dan wawasan kolektif.
5. Terstruktur dan terdokumentasi.
6. Merupakan sebuah metode yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengkaji seluruh risiko dan control perusahaan.

Tahapan Penyusunan ERM System dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko (*risk identification*)
2. Analisis risiko (*risk analysis*) dan evaluasi risiko (*risk evaluation*)
3. Melakukan penanganan risiko (*risk treatment*).
4. Melakukan pemantauan risiko (*risk monitoring*) dan pelaporan risiko (*risk reporting*)

The risk management process at PT Reasuransi Nasional Indonesia adopted the ISO standard 31000:2009 Risk Management-International Standard. PT Reasuransi Nasional Indonesia adopted Risk and Control Self Assessment (RCSA) for assessing risk and control. Some of the advantages of this method are as follows :

1. Increasing risk awareness throughout the Company, because it involves all functions and all levels.
2. Increasing risk ownership for those who are responsible for carrying out the operations.
3. Integrating viewpoint of the operational side and top management.
4. Capable of extracting and utilizing the collective knowledge and insights.
5. Structured and documented.
6. Representing a comprehensive method to identify and assess risks and controls throughout the company.

The stages of Drafting the ERM System can be described as follows :

1. Risk identification
2. Risk analysis and risk evaluation.
3. Risk treatment.
4. Risk monitoring and risk reporting.

Framework dan Proses Enterprise Risk Management PT Reasuransi Nasional Indonesia

Profil Risiko Dan Mitigasi Risiko

1. Risiko Underwriting

Risiko underwriting adalah risiko kerugian yang timbul karena ketidaksesuaian antara pendapatan *underwriting* dengan beban underwriting. Tergolong dalam risiko ini adalah: *underwriting*, penetapan cadangan (*reserve*), klaim, dan retrocesi (tidak termasuk risiko *default*).

Eksposur risiko Perusahaan terkait risiko *underwriting* dapat disebabkan oleh penetapan harga (*pricing*) yang tidak optimal dan atau karena meningkatnya frekuensi klaim pada tingkat yang tidak wajar atau karena adanya bencana alam luar biasa besar seperti gempa bumi, tsunami dan atau oleh adanya kejadian luar biasa seperti serangan teroris.

Mitigasi Risiko:

1. Melakukan perencanaan dan pemantauan proses *underwriting* yang cermat;
2. Menerapkan penetapan limit risiko maksimum dan eksposur katastrofik maksimum (secara agregat);
3. Penetapan limit kewenangan *underwriting* per kontrak;
4. Pemilihan dan penilaian risiko dan penetapan harga yang tepat oleh *underwriters* dengan memperhatikan ketentuan Regulator terkait;
5. Pengembangan pemodelan skenario kerugian (*loss scenario modelling*);
6. Review aktuarial internal oleh tim yang independen;
7. Penetapan dan pemantauan program retrocesi secara optimum.

2. Risiko Default

Risiko *Default* adalah risiko kerugian jika pihak lain (*counterparty*) gagal memenuhi kewajibannya atau gagal melaksanakan kewajiban tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Pihak lain yang dimaksud adalah mitra retrocesi, broker, ceding, mitra kerja investasi dan lain-lain.

Mitigasi Risiko:

1. Proses seleksi dan pemeringkatan ceding dan mitra retrocesi;
2. Pengembangan profil risiko terkini dari ceding dan mitra

Framework and Process of the Enterprise Risk Management of PT Reasuransi Nasional Indonesia

Risk Profile And Risk Mitigation

1. Underwriting Risks

Underwriting risk is the risk of losses arising from mismatch between income and expenses deriving from underwriting. Fallen into this category of risk are: *underwriting*, determination of reserves, claims and retrocession (not including the risk of default).

The Company's risk exposures related to underwriting risk may result from unoptimal pricing or increased claims frequency at unusual level or due to large natural disasters such as earthquakes, tsunamis and or extraordinary events such as the attack terrorists.

Risk Mitigation:

1. Planning and monitoring prudent underwriting process;
2. Applying the maximum risk limits and maximum catastrophe exposure (in the aggregate);
3. Defining Underwriting authority limits per contract;
4. Selection and risk assessment and appropriate pricing by the *underwriters* to the provisions of relevant regulators;
5. Loss scenario modeling development;
6. Internal actuarial review by an independent team;
7. Setting and monitoring of retrocession program at its optimum way.

2. Default Risk

Default risk is the risk of loss if another party (*counterparty*) fails to meet its obligations or fails to carry out such obligations in accordance predetermined time. Other party here is the retrocession partners, brokers, ceding, investment partners and others.

Risk Mitigation:

1. Selecting and rating the ceding and retrocession partners;
2. Developing current risk profile of the ceding and retrocession

retrosesi, dengan memahami tingkat sensitivitas mereka terhadap tekanan faktor-faktor luar biasa;

3. Pengendalian atas eksposur *default* dengan analisis kemampuan para *counterparty* untuk membayar (memenuhi kewajiban mereka), baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai skenario;
4. Setiap triwulanan, Direksi memperoleh hasil analisis kinerja kolektabilitas, profitabilitas dan transaksi dengan mitra kerja dalam bentuk laporan *collection ratio*. Apabila perlu, kerjasama dengan mitra kerja harus ditinjau kembali dan seluruh tindakan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk mencegah terganggunya kondisi keuangan Perusahaan.
5. Satuan kerja bagian penagihan melakukan *review* secara triwulanan guna menetapkan atau memuktahirkan kolektibilitas atau kualitas transaksi yang meliputi klasifikasi eksposur risiko *default*, dan mencatat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arsip dokumen terkait kinerja ceding dan mitra kerja.
6. Memiliki sistem informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi terjadinya konsentrasi risiko dalam portofolio ceding dan transaksi lain berisiko default.
7. Program penjadwalan kembali pembayaran piutang;

3. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang muncul karena adanya fluktuasi nilai atau pendapatan dari aset, suku bunga, dan valuta asing atau adanya pergerakan variabel pasar dan portofolio yang dimiliki Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan (*adverse movement*).

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan yakni kegiatan investasi dalam bentuk surat berharga termasuk saham/obligasi dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga lainnya.

Mitigasi Risiko:

1. Adanya kebijakan investasi yang jelas, termasuk limit dan prosedur pengambilan keputusan investasi;
2. Pemilihan dan pemingkatan manajer investasi eksternal (MI); Penerapan manajemen portofolio dengan diversifikasi instrument investasi sesuai ketentuan regulasi dan dalam batas-batas *risk-appetite* perusahaan;
3. Pemantauan pergerakan pasar secara *real-time* dan penetapan *limit cut lost* atas aset-aset yang ditangani sendiri maupun yang ditangani manajer investasi eksternal (MI);

partners, by understanding their sensitivities towards pressure from extraordinary factors;

3. Controlling default exposure by analyzing counterparty ability to pay (their obligations), both historically and in the future, based on historical financial growth and cashflow projections with various scenarios;
4. Each quarter, the Board of Directors obtain analytical results on collectability, profitability and transactions with partners in the form of *collection ratio* report. If deemed necessary, the cooperation with partners shall be reviewed and all necessary corrective actions should be taken to prevent disruption of the Company's financial condition.
5. Collection Unit conducts review on a quarterly basis in order to establish or update the collectibility or quality of transactions, including the default risk exposure and recorded as an integral part of the archive of documents related to the performance of ceding and partners.
6. Possessing information systems that enables the Board of Directors to identify concentration of risk in the portfolio and other transactions ceding default risk.
7. Rescheduling debt payment program;

3. Market Risk

Market risk is the risk arising from the fluctuations in the value of assets or income, interest rates and foreign exchange, or the movement of market variables and the Company's portfolio, which could harm the Company (*adverse movement*).

Market Risk is among others included in the functional activity of the Company in marketable securities including stocks/bonds and investments in money market and participation in other institutions .

Risk Mitigation:

1. Applying clear investment policy, including limits and investment decision-making procedures;
2. Selecting and rating the external investment managers (MI); Applying portfolio management with a diversified investment instruments in accordance with regulations and within the limits of the Company's *risk-appetite*;
3. Monitoring market movements in real-time and deciding limits cut lost over assets internally and externally managed.

4. Satuan kerja terkait mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar.
5. Melakukan diversifikasi investasi dengan komposisi optimum dalam batas-batas sesuai ketentuan regulasi.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang muncul karena ketidakcukupan sumber daya finansial Perusahaan untuk memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo, antara lain adalah:

- a. Risiko Likuiditas Pasar.
Yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan sulit untuk menutup posisi tertentu dengan harga pasar sebelumnya karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memungkinkan;
- b. Risiko Likuiditas Pendanaan.
Yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan tidak memperoleh dana untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas *underwriting*, investasi dan penanaman dana lainnya, serta kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang (jika suatu waktu Perusahaan menerbitkannya).

5. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang muncul karena kegagalan dan kelemahan proses internal, orang, dan sistem di Perusahaan serta adanya peristiwa-peristiwa eksternal yang gagal diantisipasi oleh Perusahaan, termasuk tindak kriminal oleh pihak eksternal, perubahan regulasi yang tidak terantisipasi dengan baik.

Risiko operasional yang dihadapi oleh NASIONAL RE pada setiap aktivitas fungsional Perusahaan, seperti kegiatan *underwriting*, investasi, operasional dan layanan pembayaran klaim, *trading*, pendanaan, teknologi informasi, dan manajemen sumber daya manusia.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan karena rendahnya kemampuan Perusahaan untuk melakukan transaksi yang bernilai tambah. Komponen penting risiko operasional antara lain:

1. Kemampuan kegiatan operasional dipengaruhi oleh adanya kerusakan infra struktur, bencana alam, serta bentuk gangguan teknis lainnya yang dapat menurunkan kemampuan kegiatan operasional Perusahaan;

4. Related work units periodically assess the tendency of exchange rate changes or the possibility of occurrence of market pressures.
5. Diversifying investments with an optimum composition within the limits of appropriate regulatory provisions.

4. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that arises due to insufficient financial resources to meet the Company's obligations at maturity, among others are:

- a. Market Liquidity Risk.
The risk arising when the Company finds difficulty in closing a particular position with the previous market price due to the market liquidity conditions that do not allow to;
- b. Funding Liquidity Risk.
The risk arising when the Company fails to obtain certain amount of funds to meet obligations at maturity. Liquidity risk can be attached to underwriting activities, investment and fund placement and financing activities and the issuance of debt securities (should the company issue it).

5. Operational Risk

Operational risk is the risk arising due to failures and weaknesses in internal processes, people and systems in the Company, as well as due to the Company's failure to anticipate external occurrence, including crime committed by external party, unanticipated regulatory changes.

Operational risks were faced by the NASIONAL RE in each functional activity of the Company, such as underwriting activity, investment, operational and claims payment services, trading, finance, information technology and human resource management.

Operational risk could lead to financial losses, directly or indirectly and the potential of losing opportunity to earn profit due to the incapability of the Company to perform value-added transactions. The essential component of operational risk is listed below:

1. Operating activity capability can be affected by infrastructure damage, natural cataclysm and other forms of technical problems which degrade the corporate operating activity capability.

2. Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi terbesar atas kegagalan operasional. Risiko yang ditimbulkan antara lain berkaitan dengan *human error*, rendahnya integritas dan profesionalisme, rendahnya kerjasama dan konflik karyawan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, serta rendahnya budaya pengendalian.
3. Pelaksanaan Transaksi, Risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terkait erat dengan risiko penyelesaian transaksi antara lain pembuatan kontrak dan administrasi yang berpotensi menimbulkan perselisihan (*dispute*).
4. Rekonsiliasi data Akunting, Proses rekonsiliasi data transaksi berperan penting dalam upaya melindungi Perusahaan terhadap risiko kerugian yang disebabkan eksposur keuangan yang tidak atau belum dibukukan.

Mitigasi Risiko:

1. Pelaksanaan *Control Self-Assessment (CSA)* secara teratur oleh para manajer dan karyawan serta tim kerja;
2. Pengembangan kerjasama baik dalam bentuk kemitraan dan atau *outsourcing* dengan pihak lain guna meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam aspek-aspek tertentu yang lemah atau yang bukan merupakan kompetensi utama perusahaan;
3. Pengasuransian aset-aset Perusahaan dengan biaya yang paling *cost-effective*;
4. Pengembangan matriks kebutuhan dan peningkatan kompetensi karyawan dan manajer, sistem, dan proses secara menyeluruh;
5. Penerapan rating perusahaan dari lembaga pemeringkat yang diakui;
6. Peninjauan dan pemuktahiran prosedur (SOP) secara teratur;
7. Pencadangan dana talangan untuk kerugian operasional. Dana talangan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan selebihnya dialihkan ke pihak lain dalam bentuk asuransi.

6. Risiko Strategis

Risiko Strategis yang dihadapi oleh NASIONAL RE adalah risiko yang terkait dengan ketepatan strategi bisnis dan kebijakan strategik perusahaan disebabkan adanya perubahan lingkungan eksternal Perusahaan baik saat ini maupun saat yang akan datang. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan social, teknologi, dan lingkungan alam (*nature*).

Mitigasi Risiko:

1. Menetapkan rencana strategis (*corporate plan*) secara tertulis berjangka waktu 5 tahun, mencakup aspek-aspek

2. Human Resources, one of the components that give the largest contribution to the failure of operations. Risks posed among others are related to human error, lack of integrity and professionalism, lack of cooperation and conflict employees, lack of knowledge and skills, as well as low control culture.
3. Execution of transaction, risks related to the execution of transactions is closely related to transaction settlement risk, among others, contracting and administration with potential disputes.
4. Accounting data reconciliation, process of reconciliation of transaction data plays an important role in efforts to protect the Company against losses caused by the financial exposure that is not or has not been recorded.

Risk Mitigation

1. Implementing Control Self-Assessment (CSA) on a regular basis, by managers and employees and work teams;
2. Building cooperation in the form of partnerships and or outsourced to external parties in order to increase the ability of the Company in certain aspects, which are not the Company's strength nor its a core competencies;
3. Protecting the Company's assets with the most cost effective insurance;
4. Developing the matrix of needs and improvement of the competence of employees and managers, systems and processes as a whole;
5. Implementing corporate rating from recognized rating agencies;
6. Reviewing and updating the procedures (SOP) on a regular basis;
7. Providing allowances for operational losses in accordance with the ability of the Company and the remainder was transferred to other party in the form of insurance.

6. Strategic Risk

Strategic risk faced by the NASIONAL RE is the risk associated with the accuracy of the company's business strategy and strategic policies, in coping with the changes in the external environment both now and in the future. External environment encompasses the political environment, economic environment, social environment, technology and the natural environment (*nature*).

Risk Mitigation:

1. Set up a strategic plan (*corporate plan*) in writing for a term of 5 years, covering aspects such as business goals,

seperti tujuan usaha, pertumbuhan usaha, pangsa pasar, pendapatan, produk dan aktivitas baru, termasuk alokasi sumber daya untuk melaksanakan kebijakan atau strategi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Rencana strategis ditetapkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Komisaris. Direksi yang membawahi beberapa aktivitas fungsional yang berbeda harus memastikan bahwa tidak terdapat benturan tujuan dan memastikan bahwa para pejabat dan pegawai Perusahaan pada setiap jenjang organisasi telah memahami dan melaksanakan rencana strategik tersebut.
3. Penetapan prosedur dan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau kemajuan dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.
4. Satuan kerja manajemen risiko atau satuan kerja lain yang diberi wewenang dan tanggung jawab mengelola risiko strategik melakukan analisis dan melaporkan laporan aktual dibandingkan dengan target kepada Direksi secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan. Dan apabila terjadi hambatan pencapaian target, Perusahaan melakukan Identifikasi faktor-faktor penyebab internal dan eksternal yang menghambat pencapaian tersebut.
5. Apabila terjadi hambatan karena masalah internal, Perusahaan harus melaksanakan penilaian faktor-faktor tersebut, menyusun rencana tindakan dan melakukan koordinasi secara internal mengenai pelaksanaan tindakan korektif atau penyesuaian target. Dalam hal ini, Direksi terlibat dalam proses penilaian kembali dan penyesuaian target tersebut.

7. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan operasional Perusahaan yang menimbulkan publikasi negatif atau persepsi negatif di antara para stakeholders terhadap Perusahaan. Risiko reputasi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan volume usaha atau peningkatan biaya kehumasan.

Mitigasi Risiko:

1. Adanya kebijakan tertulis dan transparan sejalan dengan ketentuan yang berlaku bagi kepentingan pihak stakeholders dan publik dengan cara mengungkapkan kinerja keuangan Perusahaan, serta jasa dan produk yang ditawarkan, profesionalisme serta etika usaha Perusahaan;
2. Menjaga hubungan baik dengan media dan melakukan pemantauan berita/publikasi yang bersifat negatif di pasar termasuk arus dan jaringan informasi atau berita tersebut;

business growth, market share, revenue , products and activities, including the allocation of resources to implement the policy or strategy to achieve those objectives.

2. The strategic plan is set by the Board of Directors and approved by the Commissioner. The Board of Directors is in charge of several different functional activities to ensure that there is no conflicting goals and ensuring that the Company's officers and employees at every level of the organization understand and implement the strategic plan.
3. Establish procedures and financial control process that aims to monitor progress towards targets and to ensure that the risks taken are still within tolerable limits.
4. Risk management unit or other work unit which were given the authority and responsibility to manage strategic risk shall perform analysis and report to the Board of Director the realization compared with the target on a regular basis according to the needs of the Company. Should there was a hindrance in achieving targets, the Company shall Identify the internal and external factors that causing that hinderance.
5. In the event that there is resistance due to internal problems, the Company must carry out an assessment of these factors, develop a plan of action and coordinate internally on the implementation of corrective action or adjustment of the target. In this case, the Board of Directors is engaged in a process of re-assessment and adjustment of the target.

7. Reputation Risk

Reputation risk is the risk caused by the Company's operational activities that cause negative publicity or negative perception among the stakeholders of the Company. Reputation risk can lead to a decrease in revenue and business volume or an increase in the cost of public relations.

Risk Mitigation

1. The existence of written and transparent policies in line with the applicable regulations for the interests of stakeholders and the public by making the Company's financial performance, as well as services and products offered, professionalism and ethics of the Company;
2. Maintaining good relations with the media and news monitoring /negative publicity in the market including current news and information network or such;

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perusahaan gagal mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Komitmen dan Peran Aktif Komisaris dan Direksi dalam Manajemen Risiko

Direksi NASIONAL RE dengan persetujuan Komisaris menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang tercantum di dalam pedoman Manajemen Risiko.

Peran dan tanggung jawab Komisaris, meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Peran dan tanggung jawab Direksi, meliputi:

- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;

8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk caused by the Company's failure to comply with or implement laws and regulations and other applicable regulations. In practice compliance risk is inherent in the Company's risk related to legislation and other applicable regulations.

Commitment and Active Role of the Commissioners and Directors in Risk Management

The Board of Directors of NASIONAL RE with the approval of the Board of Commissioners determines clear authority and responsibility at every level of position, related to risk management in the Company, as stipulated in the Risk Management guidelines.

Roles and responsibilities of the Board of Commissioners, include:

1. Approve and evaluate the risk management policies, conducted at least once a year or more in the event of changes in the factors that affecting the Company's business activities significantly;
2. Evaluate the accountability of the Board of Directors in the implementation of risk management policies mentioned above, at least on a quarterly basis;
3. Evaluate and determine the request or suggestion coming from the Board of Directors relating to transactions or business activities that go beyond the authority of the Board of Directors to decide and hence require approval from the Board of Commissioners.

Roles and responsibilities of the Board of Directors include:

- Formulate policies and strategies for risk management in writing and include the establishment and approval of a comprehensive overall risk limits, per type of risk and per functional activity (operations) of the Company. Formulation of policies and risk management strategies is performed at least once a year or more in the event of a change in the factors affecting the Company's business significantly;
- Be Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken by the Company as a whole, including evaluating and providing direction risk management strategies based on the report submitted by the risk management unit and delivery of accountability reports to the Board of Commissioners on a quarterly basis;

- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku;
 - Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
 - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko;
 - Memastikan bahwa satuan kerja manajemen risiko memiliki sumber daya, wibawa, kompetensi dan independensi yang memadai untuk memantau, mengevaluasi dan memvalidasi penerapan proses manajemen risiko oleh satuan-satuan kerja operasional di dalam Perusahaan yang melakukan dan menyelesaikan transaksi-transaksi usaha;
 - Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai kebutuhan Perusahaan, untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
- Evaluate and decide on transactions exceeding the authority of officials below the level of the Board of Directors or transactions that require approval in accordance with internal policies and procedures;
 - Develop risk management culture at all levels of the organization, among others, including adequate communication to all levels of the organization on the importance of effective internal controls;
 - Ensure competency enhancement of human resources related to the implementation of risk management, among others, with education and training programs that are sustainable, especially with regard to risk management systems and processes ;
 - Ensure that the risk management unit has the resources, authority, competence and independence sufficient to monitor, evaluate and validate the application of risk management processes by operational units within the Company that undertake and complete business transactions;
 - Carry out periodic review of the Company's frequency as needed, to ensure :
 - The accuracy of risk assessment methodologies ;
 - Adequacy of risk management information system implementation; and
 - Appropriateness of policies, procedures and risk limits.

Indikator Risiko Kunci (*Key Risk Indicators*)

Indikator risiko kunci adalah suatu peristiwa atau hal tertentu yang memberikan indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko. Penggunaan indikator risiko kunci dalam aktivitas pemantauan risiko dapat memberikan peringatan atau informasi lebih dini kepada manajemen entitas bahwa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko semakin meningkat. Hal tersebut dapat terwujud karena pemantauan dilakukan untuk fokus terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko, bukan terhadap peristiwa risiko itu sendiri. Berdasarkan peringatan atau informasi tersebut entitas dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko maupun dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut (jika terjadi).

Di dalam setiap masing-masing risk description yang teridentifikasi di dalam pengelolaan manajemen risiko di NASIONAL RE memiliki Indikator risiko kunci yang sesuai dengan

Key Risk indicators

Key risk indicator is a particular event that indicates the occurrence of risk. The use of key risk indicators in risk monitoring activities is to provide an early warning or information to the management about the increasing possibility of a risk event. This can be realized since the monitoring process is focused on events that indicate the occurrence of risk event, not the risk event itself. Based on this warning or information, the entity can perform various mitigation measures in order to reduce the likelihood and impact of risk events posed by the risk (if it happens).

Each identified risk description in the risk management system applied at NASIONAL RE has the key risk indicators corresponding

masing-masing risiko tersebut. Sehingga indicator risiko kunci tersebut akan berperan sebagai suatu sistem peringatan dini (*early warning*).

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) yang dikeluarkan pada tahun 1992 pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan Direksi, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini :

- Efektivitas dan efisiensi operasi
- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses tersebut.

Komponen pengendalian internal menurut *COSO* adalah:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*).

Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh board.

2. Penaksiran risiko (*Risk Assessment*)

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.

3. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*).

Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.

to each of these risks, to serve as an early warning system.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Based on COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission), launched in 1992, internal control is a process affected by entity's Board of Directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

- Effectiveness and efficiency of operations
- Reliability of Financial Reporting
- Compliance with Applicable laws and regulations

COSO views internal control as a series of actions, which covers the entire process within the organization. Internal controls are in the basic management processes, including planning, implementation and monitoring.

Control is not something that is added in the management process, but is indeed an integral part of the process.

Internal control components according to *COSO* are:

1. Control environment.

Control environment factors include the integrity, ethical values and competence of the entity's people; management's philosophy and operating style; the way management assigns authority and responsibility and organizes and develops its people; and the attention and direction provided by the board of directors.

2. Risk assessment.

The mechanism is set for the identification, analysis and management of relevant risks to various activities conducted whereby the Company domiciles.

3. Control Activities.

Implementation of the policies and procedures set forth by the management to ensure the achievement of the entity's objectives.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*).

Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5. Pemantauan (*monitoring*).

Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya

Kelima komponen pengendalian internal di atas memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Larry F. Konrath (1999) menggambarkan kelima komponen tersebut bagaikan sebuah bangunan rumah dimana Lingkungan Pengendalian menjadi pondasinya. Penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilarnya. Sedangkan Monitoring menjadi atapnya. Dengan demikian, sebuah pengendalian internal akan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing.

Menurut COSO, semua orang dalam organisasi yaitu Manajemen, Dewan direksi, Komite Audit, dan Personil lainnya bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, karena semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan baik apabila ada salah satu anggota yang tidak menjalankan perannya dalam pengendalian internal.

Pihak-pihak luar seringkali memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, seperti Auditor eksternal, Badan Regulasi dan legislatif, customer, analis keuangan, dan media massa. Namun demikian pihak ketiga tersebut tidak bertanggung jawab terhadap pengendalian internal karena mereka bukan bagian dari organisasi maupun bukan bagian dari sistem pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dijalankan perusahaan adalah menggunakan metode COSO sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional

4. Information and Communication.

System that allows any person or entity to obtain and exchange information required for implementing, managing and controlling operations.

5. Monitoring

Internal control systems need to be monitored, this process aims to assess the quality of system performance over time. It is run through the activity of continuous monitoring, separate evaluations, or a combination of both.

The five components of internal control above are closely related to each other. Larry F Konrath (1999) describes those five components as a house, with Environmental Control becomes the foundation. Risk assessment, control activities and information and communication become pillars. While monitoring serves as the roof. Thus, an internal control would be rendered effective if the five elements are well established and operating in accordance proportions respectively.

According to COSO, every person in the organization, namely Management, Board of Directors, Audit Committee and other personnel are responsible for internal control, because everyone in the organization has a role in internal control, so that internal control will not work properly should one of its members does not perform his/her role in internal control.

Outsiders may often contribute to the achievement of corporate goals, such as external auditors and legislative and Regulatory Agencies, customers, financial analysts and the media. However, those third parties are not responsible for the internal control because they are not part of the organization, nor part of the internal control system.

Internal Control System of the Company

The Internal control system adopted by the Company uses COSO method as described above, a process which is conducted by the Board of Commissioners, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance about the achievement of 3 (three) objectives, namely:

1. Effectiveness and efficiency of the operation.

2. Keandalan informasi baik informasi yang bersifat keuangan maupun operasional
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Komitmen pentingnya pengendalian internal dapat dilihat pada:

1. Standar Profesional Auditor internal mengenai keharusan menguji sistem pengendalian internal.
2. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Industri Asuransi atau industri lain yang relevan.

Berdasarkan pengertian, tujuan dan komitmen di atas, pengendalian internal dinilai dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi I yaitu pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai.
- b. Dimensi II yaitu pengendalian internal dievaluasi dalam dua tingkat yaitu:
 - 1) Tingkat entitas, pengendalian internal berlaku terhadap keseluruhan unit kerja seperti kebijakan, *codes of conduct*.
 - 2) Tingkat aktivitas, pengendalian yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- c. Dimensi III, yaitu lima komponen pengendalian internal sebagai batasan dan kerangka kerja dalam mengevaluasi dengan menyediakan kriteria penaksiran yang diklasifikasikan dalam:

- 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*)
Auditor internal melakukan evaluasi kecukupan dan keefektifan atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan perilaku manajemen puncak, direksi dan pemilik entitas atas pengendalian dan kepentingannya. Seperti:
 - Integritas dan nilai etis;
 - Komitmen terhadap kompetensi;
 - Filosofi manajemen dan gaya operasi;
 - Struktur organisasi;
 - Dewan direksi atau komite audit;
 - Pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab;
 - Kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia.

- 2) Penilaian risiko (*risk assessment*)
Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dengan mengidentifikasi dan menganalisis tanggapan dan tindakan yang dilakukan manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini penilaian risiko

2. Reliability of information, both financial and operational.
3. Compliance with applicable laws and regulations, including Company internal regulations.

Commitment to internal control is evident by:

1. Internal Auditor Professional Standards, regarding the necessity to test the internal control system.
2. Applicable rules and regulations in the insurance industry or other relevant industries.

Based on the meaning, purpose and commitment above, internal control is assessed based on the following 3 (three) dimensions:

- a. Dimension I, internal controls is designed to provide reasonable assurance that the internal control objectives can be achieved.
- b. Dimension II, internal control is evaluated in two levels, namely:
 - 1) The entity level, internal control applies to the whole unit, such as policies, codes of conduct.
 - 2) The activity level, internal control is designed to achieve a particular goal, such as the Standard Operating Procedure (SOP).
- c. Dimension III, the five components of internal control as a guidance and a framework for evaluating by providing assessment criteria classified into:

- 1) Control Environment
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the actions, policies and procedures, which reflect the overall behavior of top management, BOD and the owner of the entity, for control and interests. such As:
 - Integrity and ethical values;
 - Commitment on competence;
 - Management philosophy and operating style;
 - The structure of the organization;
 - The Board of Directors or audit committee;
 - Delegation of authority and responsibility;
 - The policies and practices of human resources.

- 2) Risk assessment
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness by identifying and analyzing the responses and actions taken over the management of risks relevant to the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. In this case, the risk

dilihat dari asersi manajemen yang harus dipenuhi, yaitu:

- Keberadaan dan kejadian;
- Kelengkapan;
- Penilaian dan alokasi;
- Hak dan kewajiban;
- Penyajian dan pengungkapan.

assessment from the management's assertions that must be met, namely:

- The existence and occurrence;
- Completeness;
- Assessment and allocation;
- The rights and obligations;
- Presentation and disclosure.

3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan, yakni:

1. Adanya pemisahan tugas;
2. Adanya otorisasi atas transaksi dan aktivitas;
3. Adanya dokumen dan pencatatan yang memadai;
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan;
5. Pengujian independen atas kinerja.

3) Control Activity

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the policies and procedures established by the management to achieve financial reporting purposes, namely:

1. Separation of duties;
2. Authorization of transactions and activities;
3. Adequate documents and records;
4. Physical control over assets and records;
5. Independent testing for performance.

4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas terhadap metode-metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas atas aset-aset terkait.

Aktivitas pengendaliannya dapat berupa:

1. Keberadaan;
2. Kelengkapan;
3. Akurasi;
4. Klasifikasi;
5. Ketetapan waktu;
6. Posting dan pengikhtisaran.

4) Information and communication

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the methods used to identify, organize, classify, record and report entity transactions and to maintain accountability for related assets.

Control activities may include:

1. Existence;
2. Completeness;
3. Accuracy;
4. Classification;
5. Timeliness;
6. Posting and summarizing.

5) Pemantauan (*monitoring*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari penaksiran terus menerus dan periodik yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa efektivitas rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian sedang berjalan sesuai dengan tujuannya atau perlu dimodifikasi.

Ciri-ciri pengendalian internal yang efektif:

- a. Tujuannya jelas;
- b. Dibangun untuk tanggungjawab bersama;
- c. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan;
- d. Didokumentasikan;
- e. Dapat diuji dan direview;
- f. Dapat dikelola.

5) Monitoring

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of continuous and periodic assessment carried out by the management to ensure whether the effectiveness of the design and implementation of the control structure is in accordance with the objectives or need to be modified.

The characteristics of an effective internal control:

- a. Clear objectives;
- b. Built for shared responsibility;
- c. The costs is justified to the achieve goal;
- d. Documented;
- e. Can be tested and reviewed;
- f. Can be managed.

Pada perusahaan reasuransi, lima komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

In the reinsurance industry, the above five components can be described as follows:

1. Lingkungan pengendalian seperti:
 - a. Memahami lingkungan bisnis reasuransi
 - b. Supervisi dan pemantauan seperti kontrol atas kebijakan penerbitan polis/dokumen, batas (limit) persetujuan klaim.
2. Penilaian risiko berupa:
 - a. Peningkatan solvabilitas sebagai persyaratan dari regulator (pemerintah);
 - b. Belum adanya kebijakan terkait dengan pengawasan dan *update* data polis/peserta;
 - c. Kegagalan untuk memperbaharui data peserta yang mengakibatkan salah penilaian dalam menentukan premi.
3. Aktivitas pengendalian
Aktivitas pengendalian ini terkait pada siklus yang ada, seperti:
 - a. Siklus pendapatan yaitu cara perusahaan reasuransi dalam memelihara keandalan master data pemegang polis/peserta.
 - b. Siklus biaya yaitu kebijakan mengenai persetujuan pembayaran/pengajuan klaim, audit pengajuan klaim peserta.
4. Informasi dan komunikasi
Pada tahap ini, Auditor internal memastikan apakah sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan, diinformasikan dan dikomunikasikan ke semua unit kerja.
5. Pemantauan
Auditor internal melakukan kegiatan pengawasan yang sedang berjalan, evaluasi secara terpisah dan pelaporan atas manajemen risiko.

Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk dapat menghasilkan dan melakukan evaluasi pengendalian internal yakni:

1. *Internal Control Questionnaires*
Merupakan cara yang paling sederhana dan praktis. Hal ini dengan memberikan pertanyaan yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal di suatu unit kerja.
2. *Flowchart*
Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit kerja/divisi, misalnya penerbitan polis, penerbitan invoice (faktur), kelayakan penerimaan Principal, sistem dan prosedur akseptasi, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan akseptasi (*offer*), persetujuan akseptasi (*R/I Slip*) sampai dengan pembayaran premi yang berasal dari *offer* tersebut.
3. *Narrative*
Hal ini dilakukan auditor internal dengan cara menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas, prosedur penerbitan polis.

1. The control environment such as:
 - a. Understanding the reinsurance business environment
 - b. Supervision and monitoring, such control over policy issuance/document, the limit of claim approval.
2. Risk Assessment, such as:
 - a. Increase in solvency as requirements from the regulator (government);
 - b. The absence of policies related to surveillance and policy/participants data update;
 - c. Failure to renew the participant data resulting in incorrect assessments in determining the premium.
3. Control activities
The control activities are related to the following cycle:
 - a. Revenue cycle, how reinsurers in maintaining the reliability of the data master of policyholder/participant.
 - b. Cost Cycle, the policy regarding approval of payment/ submission of claims, claims submission audit.
4. Information and communication
At this stage, the internal auditor ensures whether the systems and procedures have been defined, shared and communicated to all work units.
5. Monitoring
Internal auditors conducting ongoing monitoring, evaluation and reporting separately on risk management.

There are three ways that can be used to prepare and evaluate the internal control:

1. *Internal Control Questionnaires*
It is the most simple and practical. It is performed by asking questions that can be used to understand and evaluate the internal control in a work unit.
2. *Flowchart*
Flowchart depicts the flow of documents in the system and procedures in a work unit/division, for example, policy issuance, invoice issuance, the feasibility of Principal acceptance, system and procedures of acceptance, debt and cash disbursements, described as the flow of documents ranging from acceptance request (*offer*), approval acceptances (*R/I slip*) to the premium payment from the offer.
3. *Narrative*
It is brought about by the internal auditors by describing using memo, accounting systems and procedures applied in the company, such as cash disbursements procedures, policy issuance procedures.

KODE ETIK

Pedoman Etika Dan Perilaku Perusahaan (*Code Of Conduct*)

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan yang disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Komitmen untuk menegakkan kode etik di Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Keberadaan Pedoman Perilaku

Code of Conduct adalah panduan berperilaku yang menjabarkan tingkah laku moral dan etika yang diharapkan dari para Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan. Lebih lanjut, panduan ini memaparkan lebih rinci tentang kebijakan, standar dan prosedur Perusahaan serta bagaimana seharusnya para anggota Perusahaan bertingkah laku sebagai bagian dari tenaga kerja Perusahaan.

Tujuan Pedoman Perilaku

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* ini akan terus dikaji secara berkala dan berkelanjutan serta dilakukan penyesuaian dengan perubahan dinamika lingkungan usaha dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penerapan Pedoman Perilaku bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk karakter individu Perusahaan yang disiplin dan beretika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing serta dalam berinteraksi dengan sesama individu dalam Perusahaan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya.
2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan Perusahaan.
3. Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam Perusahaan.

CODE OF CONDUCT

Code Of Conduct

Code of Conduct is part of the Company's GCG Guidelines drawn up on the consideration that, in managing the organization, not only must the Company comply with the laws and regulations, but also uphold ethical norms and values. The commitment to uphold the code of conduct in the Company is expected to increase and strengthen the reputation of the Company.

The Existence of Code of Conduct

The Code of Conduct is a guide that outlines the behavior of moral and ethical behavior expected of the Board of Commissioners, Directors, Employees and other businesses doers related to the Company's business. Furthermore, this guide describes more detailed on policies, standards and procedures of the Company and the members of the Company's, as well as how to behave as part of the Company's workforce.

The Purpose of Code of Conduct

As a guideline that is dynamic in nature, Code of Conduct will continue to be reviewed on a regular and an ongoing basis and be adjusted to the changing dynamics of the business environment with regard to the applicable Company's values, laws and regulations.

The purpose of the implementation of Code of Conduct for the Company are as follows:

1. Forming the Company's disciplined and ethical individual character in carrying out their duties and responsibilities as well as in interacting with other individuals within the Company and with other stakeholders.
2. Creating a conducive working atmosphere within the Company.
3. As guidelines that regulate, supervise and prevent the abuse of power and position of each individual within the Company.

Isi Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku Perusahaan berisikan mengenai:

1. Etika Bisnis
 - a. Etika terhadap Perusahaan Asuransi;
 - b. Etika terhadap Sesama Perusahaan Reasuransi;
 - c. Etika terhadap Broker Reasuransi;
 - d. Etika terhadap Broker Retrosesioneer;
 - e. Etika terhadap Retrosesioneer;
 - f. Etika terhadap Mitra Bisnis;
 - g. Etika terhadap Regulator;
 - h. Etika terhadap Masyarakat;
 - i. Etika terhadap Pegawai;
 - j. Etika terhadap Pemegang Saham.
2. Etika Kerja
 - a. Kepatuhan terhadap Hukum;
 - b. Benturan Kepentingan;
 - c. Donasi dan Hadiah;
 - d. Anti Diskriminasi;
 - e. Integritas Laporan Keuangan;
 - f. Perlindungan informasi Perusahaan;
 - g. Perlindungan Harta Perusahaan;
 - h. Kegiatan Sosial dan Politik;
 - i. Perilaku sebagai Atasan;
 - j. Perilaku sebagai Bawahan;
 - k. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan.
3. Penanganan Masalah Etika
 - a. Bagaimana Mengidentifikasi Masalah Etika;
 - b. Kemana Harus Melapor;
 - c. Perlindungan terhadap Saksi dan Pelapor.
4. Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku
 - a. Organisasi;
 - b. Penerapan Pedoman Perilaku;
 - c. Penegakan Pedoman Perilaku;
 - d. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku;
 - e. Pernyataan kepatuhan.

Code of Conduct Content

The Company's Code of Conduct consists of:

1. Business Ethics
 - a. Ethics to the Insurance Company;
 - b. Ethics to the Fellow Reinsurance Company;
 - c. Ethics to the Reinsurance Brokers;
 - d. Ethics to the Retrocessionaire Broker;
 - e. Ethics to the Retrocessionaire;
 - f. Ethics to the Business Partners;
 - g. Ethics to the Regulator;
 - h. Ethics to the Society;
 - i. Ethics to the Employee;
 - j. Ethics to the Shareholders.
2. Work Ethics
 - a. Compliance with Laws;
 - b. Conflict of Interest;
 - c. Donations and Gratification;
 - d. Anti Discrimination;
 - e. Integrity of Financial Statements;
 - f. Protection of Company information;
 - g. Protection of Company Property/Assets;
 - h. Social and Political Activity;
 - i. Behavior as Superior;
 - j. Behavior as Subordinate;
 - k. Ethical Behavior toward Fellow Employees.
3. Handling Ethical Issues
 - a. How to Identify Ethical Issues;
 - b. Where to Report;
 - c. Protection of Witness and Reporter.
4. Implementation and Enforcement of Code of Conduct
 - a. Organization;
 - b. Implementation of Code of Conduct;
 - c. Enforcement of Code of Conduct;
 - d. Sanctions for Violation of Code of Conduct;
 - e. Statement of Compliance.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dasar Hukum

Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di NASIONAL RE ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEP/DIR/II/2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Whistleblowing System ini merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi dalam Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor dan Perusahaan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan Pelapor.

Mekanisme Whistleblowing

Mekanisme pelaporan pelanggaran disosialisasikan kepada seluruh *Stakeholders* dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* di NASIONAL RE.

Perusahaan wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perusahaan telah menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran.

Perusahaan telah menetapkan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang terdiri dari Bagian SPI, Bagian SDM dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelaporan/penyungkapan berdasarkan kategori Pelapor seperti:

- Direksi, jika Terlapor adalah Insan Perusahaan selain Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah Direksi.
- Direktur Utama, jika Terlapor adalah Dewan Komisaris, Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance*.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Legal Basis

The guidelines and procedures for handling report of violations (*whistleblowing*) at NASIONAL RE is stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 06 /KEP/DIR/II/2014 on Guidelines for Reporting Violations System (*Whistleblowing System*).

Whistleblowing System is a system that serves as a medium for a witness, to convey information regarding the indication of violations that occurred in the Company. Internally in the Company, reporting violations is the a way to encourage employees to be more willing to act to prevent fraud and corruption by reporting it to parties assigned to handle it. The Company is committed to protecting the Whistleblower and the Company adheres to all relevant legislation and best practices applicable in the implementation of the Whistleblower protection.

Whistleblowing Mechanism

The mechanism on violation reporting is disseminated to all stakeholders in order to implement the GCG principles at NASIONAL RE.

The Company is required to receive the report of violations from internal as well as from external parties. The Company has provided 2 (two) alternatives of management reporting, namely through the Board of Directors and through the Board of Commissioners, in accordance with level of suspected violators.

The Company established the Violation Report Management Team, consisting of Internal Audit Unit (IAU), Human Resources Department and other units under the authority of the Board of Directors, based on the decision of the BOD. The parties that are authorized to follow up reporting/disclosure by the Reporting category are:

- Board of Directors, if the Reported person is employee of the Company, except those serving in GCG Compliance Team, Board of Commissioners and Board of Directors.
- Board of Commissioners, if the Reported is member of the Board of Directors.
- President Director, if the Reported is member of BOC and GCG Compliance Team

Penyampaian Pelaporan:

- a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi/Direktur Utama/Dewan Komisaris NASIONAL RE u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
- b. Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
- c. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

Penerimaan Pelaporan:

- Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh *Stakeholders* dan/atau Perwakilan *Stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis.
- Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pelaporan Pelanggaran pada saat *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* mengajukan Pelaporan Pelanggaran.
- Perusahaan wajib memberikan tanda terima, jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
- Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *Stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi buku identitas *Stakeholders* dan perwakilan *Stakeholders* dan Surat kuasa dari *Stakeholders*.
- Jika perwakilan *Stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
- Penerima Pelaporan Pelanggaran adalah Direksi/Direktur Utama/Dewan Komisaris u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

Sejak dilakukannya sosialisasi atas mekanisme *whistleblowing* pada Februari 2014, sampai dengan akhir Desember 2015 tidak ada pengaduan pelanggaran.

Report Submission:

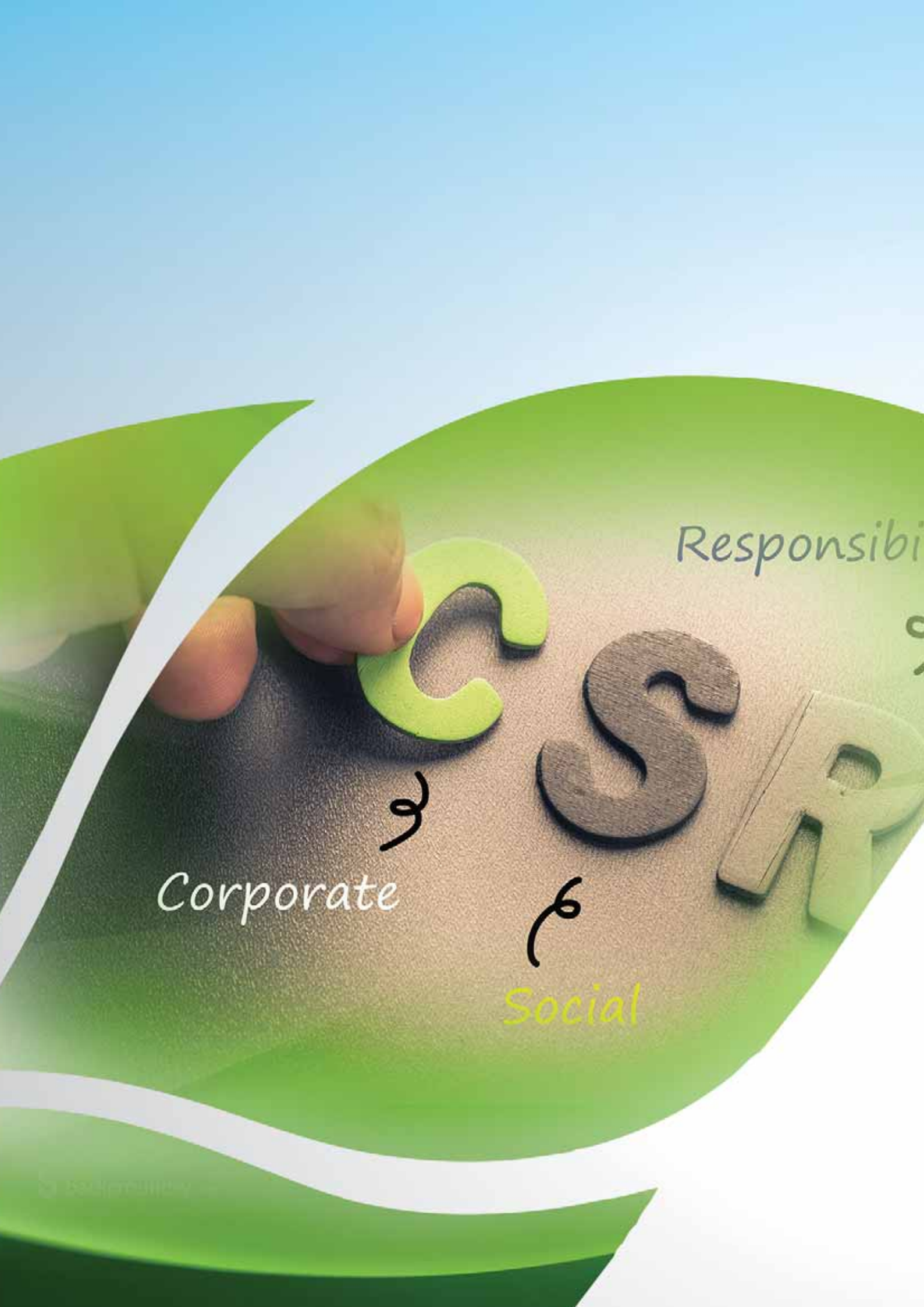
- a. Delivering an official letter addressed to the Board of Directors/President Director/Board of Commissioners of the NASIONAL RE to the attention of Violation Report Management Team, by hand delivery or by mail to the Company, Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
- b. Reporting violations in writing shall be furnished with a copy of identity and supporting evidence such as documents relating to the transactions carried out and/or reporting the violation to be delivered.
- c. Reporting violations in writing without copy of identity shall be furnished with copy of supporting documents, such as: documents relating to the transactions carried out and/or reporting the violation to be delivered.

Receiving Report:

- The Company receives reports of violations submitted by stakeholders and/or representative of stakeholders, both orally and in writing.
- The Company provides an explanation of the policies and procedures of resolving Violation Report, the moment *Stakeholders* and/or representatives filing Violation Report.
- The company must provide receipt, if report is submitted in writing and bearing identity.
- If the violations report is filed by representative of stakeholder, in addition to the above documents they it should also submit other documents, namely copy of identity of *Stakeholders*, representative of *Stakeholders* and the power of attorney from stakeholders.
- If the representatives of stakeholders is an institution or a legal entity, it must be accompanied by document stating that the party applying for Reporting Violations is authorized to represent the organization or legal entity.
- Recipient of Violations Report are Board of Directors/President Director/Board of Commissioners, to the attention of Violation Report Management Team.

Since the dissemination of whistleblowing mechanism in February 2014, until the end of December 2015 there are no complaints of violations reported throughout 2014.





Responsibility

C

S

R

Corporate

Social



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sejak tahun lalu, Perusahaan sudah merencanakan kegiatan CSR yang lebih beragam lagi jenisnya untuk direalisasikan dengan tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan, khususnya di lingkungan industri asuransi dan reasuransi dan secara umum di industri keuangan non bank dan industri secara makro.

Sejalan dengan rencana tersebut pada tahun 2015 ini Perusahaan dapat melaporkan kegiatan-kegiatan berikut ini sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya:

1. Bantuan untuk Yayasan Mitra Kencana Cendekia (YKMC)

Pada tanggal 26 Januari 2015, NASIONAL RE melakukan Bakti Sosial Kemasyarakatan untuk Yayasan Mitra Kencana Cendekia (YKMC). Yayasan ini bergerak dalam bidang rehabilitasi pengguna narkoba. Dalam kegiatan ini, Nasional Re menyerahkan santunan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu kegiatan operasional YKMC.

2. Bantuan untuk Korban Kebakaran di Jl. Lautze

Pada tanggal 3 Maret 2015, NASIONAL RE menyerahkan bantuan berupa sandang & peralatan kerja bakti untuk korban kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jl. Lautze, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bencana kebakaran ini telah membuat sekitar 2000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Jumlah bantuan yang disalurkan oleh NASIONAL RE mencapai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Renovasi Gedung

Sebagai bentuk kepedulian NASIONAL RE terhadap dunia pendidikan di Indonesia, pada tanggal 14 April 2015, Perusahaan menyerahkan bantuan dana dengan total sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dua sekolah berikut:

- a) SMK Assa'idiyyah 2 Kudus
- b) Pondok Pesantren Nusantara Satu Kudus.

4. Program Ramadhan

Sebagai bagian dari Program Ramadhan 1436 H, NASIONAL RE menyerahkan bantuan amal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bantuan ini diserahkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2015.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Since last year, the Company has already set a plan to conduct a more diverse CSR activity with the aim to enhance corporate image, especially in the insurance and reinsurance industry, and in general in non-bank financial industry and the industry as a macro.

In line with that, hereby the Company report the following activities in 2015, as the embodiment of its social responsibility:

1. Donation to Yayasan Mitra Kencana Cendekia (YKMC)

On January 26, 2015, the NASIONAL RE conducted social service activity for Yayasan Mitra Kencana Cendekia (YKMC). This foundation engages in the rehabilitation of drug abuser. During this activity, NASIONAL RE handed over a donation worth Rp10,000,000, - (ten million rupiah) to assist the operational of YKMC.

2. Donation for Fire Disaster Victims at Jl. Lautze

On March 3, 2015, NASIONAL RE donated clothes and tools for victims of fires disaster victims that occurred in the densely populated area at Jl. Lautze, Sawah Besar. The fire disaster has taken about 2000 people homeless. Total donation provided by NASIONAL RE was Rp10,000,000, - (ten million rupiah).

3. Building Renovation

As a form of its concern towards education in Indonesia, on 14 April 2015, Nasional Re donated funds totaling Rp100.000.000, - (one hundred million rupiah) for the two following schools:

- a) SMK Assa'idiyyah 2 Kudus
- b) Pondok Pesantren Nusantara Satu Kudus.

4. Ramadhan Program

As part of the Program of Ramadan 1436 H, NASIONAL RE donated Rp50,000,000 (fifty million rupiah), delivered through the National Zakat Agency (BAZNAS) and was held on June 18, 2015.

5. **Bakti Sosial**

Bekerjasama dengan Corps Willys Rawakadang & Kafegama 79, NASIONAL RE melakukan kegiatan bakti sosial pada tanggal 25 Juni 2015. Dalam kegiatan ini, Perusahaan menyerahkan bantuan dana sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Sumbawa tersebut

6. **Santunan untuk Yatim Piatu**

Pada tanggal 26 Juni 2015, NASIONAL RE mengadakan acara Buka Puasa Internal dan dalam acara ini Perusahaan juga memberikan santunan untuk yatim piatu dari Yayasan Al Makmur Cikini Jakarta Pusat dan Rumah Yatim Ramawangun Jakarta Timur, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. **Kunjungan ke Panti Sosial**

Pada tanggal 8 Agustus 2015, NASIONAL RE mengadakan kegiatan CSR berupa kunjungan ke ke Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Jakarta Selatan, dimana NASIONAL RE memberikan bantuan berupa perlengkapan sembako dan perlengkapan rumah tangga, senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

8. **CSR ke Sekolah Luar Biasa**

Pada tanggal 11 Agustus 2015, NASIONAL RE mengadakan kegiatan CSR berupa kunjungan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Frobel Montessori Condet Balekambang Jakarta Timur, dimana NASIONAL RE memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

9. **Pengadaan Masker**

NASIONAL RE turut berpartisipasi dalam upaya mengurangi dampak bencana asap dengan memberi bantuan dana sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Badan SAR Nasional (Basarnas) . Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2015.

10. **Bantuan untuk Warakawuri**

Pada tanggal 29 September 2015, NASIONAL RE melakukan kegiatan CSR di lingkungan KOREM 061/Suryakencana, Batalyon Infanteri 315/Garuda – Bogor, Jawa Barat, dengan sasaran adalah para warakawuri. Bantuan diberikan dalam bentuk Natura senilai Rp100,325,000 (seratus juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. **Social Service**

In collaboration with Willys Corps Rawakadang & Kafegama 79, NASIONAL RE conducted social activities on June 25, 2015. In this event, the Company donated Rp5,000,000, - (five million rupiah) to assist the implementation of activities that took place in Sumbawa

6. **Donation for Orphans**

On June 26, 2015, NASIONAL RE held an Internal event of Iftar (breaking fast) and during this event, the Company also donated the orphans from Yayasan Al Makmur Cikini, Central Jakarta and Rumah Yatim Ramawangun, East Jakarta, amounted to Rp10,000,000, - (ten million rupiah).

7. **Visit to Social Institution**

On August 8, 2015, NASIONAL RE conducted CSR activity by visiting Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, South Jakarta, where the Company donated groceries and household supplies, worth Rp40 million, - (forty million rupiah).

8. **CSR to School for the Retarded (SLB)**

On August 11, 2015, NASIONAL RE conducted a CSR activity of visiting SLB Frobel Montessori, Condet Balekambang, East Jakarta, a school for children with special needs, and donated school supplies worth Rp55.000.000, - (fifty five million rupiah).

9. **Procurement of Mask**

NASIONAL RE participated in the efforts to reduce the impact of smoke disaster by providing financial assistance amounting to Rp22,000,000 (twenty two million) to the National Search and Rescue Agency (Basarnas). This activity was conducted in September 2015.

10. **Donation for Military Retired (Warakawuri)**

On September 29, 2015, NASIONAL RE conducted CSR activity at KOREM 061 / Suryakencana, Infantry Battalion 315 / Garuda-Bogor, West Java, and targeting Military Retired (widows of army member). Donation is provided in the form of benefit in kind worth Rp100,325,000 (one hundred million three hundred twenty five thousand rupiah).

11. Bantuan Khitanan Massal

Tanggal 19 Desember 2015, NASIONAL RE memberi bantuan untuk pelaksanaan Khitanan Massal di RW 2 Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini NASIONAL RE memberikan bantuan berupa paket tas sekolah & sepeda mini kepada peserta khitanan massal sebanyak ± 60 anak.

11. Donation for Mass Circumcision

On December 19, 2015, NASIONAL RE made a donation for the implementation of mass circumcision at RW 2 Kelurahan Kwitang, Central Jakarta. In this activity, NASIONAL RE gave away school bags and mini bikes to more than 60 children participants of mass circumcision.

Total Alokasi Dana CSR

Total dana yang dialokasikan Perusahaan untuk kegiatan CSR pada tahun 2015 mencapai Rp482,325,000 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Total CSR Allocation

Total funds allocated for the Company's CSR activities in 2015 reached Rp482,325,000 (four hundred and eighty-two million three hundred twenty five thousand rupiah).





SUMMARY REPORT



3.19 28.66 9.35

31.85 4.37 6.90

Item	Value	Item	Value	Item	Value
1	12	4	32	7	55
2	18	5	40	8	62
3	25	6	48	9	70
4	32	7	55	10	78
5	40	8	62	11	85
6	48	9	70	12	92
7	55	10	78	13	100



LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015**

**DIRECTOR'S STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS
OF PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA (THE COMPANY)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We the undersigned :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama / Name | : | M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRMP, CRGP |
| Alamat Kantor / Office Adress | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili / Residential Adress | : | Perumahan Pondok Timur Mas
Blok A No 10 Jakasetia, Galaxy-Bekasi |
| Nomor telepon / Telephone number | : | 021-3140009, 3179373 |
| Jabatan/ Title | : | Direktur Utama / President Director |
| 2. Nama / Name | : | Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRMP, CRGP |
| Alamat Kantor / Office Adress | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili / Residential Adress | : | Jl. Pangadegan Utara No. 4 RT 12 RW 006
Pangadegan, Pancoran, Jakarta Selatan |
| Nomor telepon / Telephone number | : | 021-3140009, 3179373 |
| Jabatan/ Title | : | Direktur Operasi / Director Of Operations |
| 3. Nama / Name | : | Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP |
| Alamat Kantor / Office Adress | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili / Residential Adress | : | Jl. Lembah Pinang I Blok I/14 No. 21-22
Kav. DKI Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur |
| Nomor telepon / Telephone number | : | 021-3140009, 3179373 |
| Jabatan/ Title | : | Direktur Keuangan dan SDM /
Director Of Finance And Human Resources |

dengan ini menyatakan bahwa :

hereby state that :

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ; | 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2015 ; |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia ; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar ; | 3. a. The information contained in the company's financial statements in complete and correct ; |
| b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ; | b. The company's financial statements do not contain incorrect material information or facts and do not omit material information or fact ; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Reasuransi Nasional Indonesia. | 4. We are responsible for internal control system of PT Reasuransi Nasional Indonesia. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is issued to the best our knowledge and biliefe.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
Direksi/Board of Directors
11 Januari / January 11, 2016


M. Shaifie Zein


Edhie Mulyono


Rusdianto



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1958,25 Agustus 1998

Nomor: 001/SMR/LAI-NASRE/II/2016

Number: 001/SMR/LAI-NASRE/II/2016

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Reasuransi Nasional Indonesia

*The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors
PT Reasuransi Nasional Indonesia*

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya

We have audited the accompanying financial statements of PT Reasuransi Nasional Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2015, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for the internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the State Financial Audit Standards prescribed by the Badan Pemeriksa Keuangan (the Audit Board of the Republic of Indonesia). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998,25 Agustus 1998

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan surat kami nomor: 001/SMR/LAK-NASRE/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.

An audit involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2015, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The compliance to the applicable laws and regulations and the internal controls are presented in a separate report number 001/SMR/LAK-NASRE/I/2016 dated 12 January 2016.



Drs. Sukarna Rusdjana, CA, CPA.

Izin Akuntan Publik No. AP.0492 / Public Accountant License No. AP.0492

Jakarta, 12 Januari 2016 / January 12, 2016

PERHATIAN UNTUK PEMBACA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar, prosedur, dan praktek audit atas laporan keuangan ini adalah sesuai dengan yang diterima dan diterapkan di Indonesia.

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, changes in equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Rukan Taman Meruya, Blok M/78, Jakarta Barat 11620 Indonesia

Phone : (62-21) 5868275, 5868276, 5865365 Fax.: (62-21) 5865365, E-mail : soejatna@bit.net.id

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
AS OF 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(In Rupiah)

	Catatan / Note	2015	2014 Disajikan Kembali/ Restatement	2013 Disajikan Kembali/ Restatement	
ASET					ASSETS
Kas dan setara kas	3.	16.633.101.243	2.460.031.933	3.749.156.911	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha					Trade Receivables
Piutang Reasuransi	4.	353.446.457.168	494.032.395.900	193.700.452.516	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	5.	52.209.884.683	34.591.739.372	6.873.434.468	Retrocession receivables
Jumlah Piutang Usaha		405.656.341.851	528.624.135.272	200.573.886.984	Total Trade Receivables
Piutang Ujroh	6.	9.329.946.220	8.895.604.636	10.330.689.238	Ujroh receivables
Aset Retrosesi					Retrocession Assets
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan - Bagian Retrosesi	7.	422.547.076.770	81.327.573.012	26.516.561.808	Un-earned premium Retrocession Share
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	8.	664.107.711.421	589.528.484.255	279.687.537.638	Estimated claim - retrocession Share
Jumlah Aset Retrosesi		1.086.654.788.191	670.856.057.267	306.204.099.446	Total Retrocession Assets
Biaya dibayar dimuka	9.	43.865.809	82.971.000	24.230.210	Prepaid expenses
Piutang hasil Investasi	10.	7.708.424.639	5.616.204.594	4.515.632.009	Investment income receivable
Piutang Lain-lain	11.	3.428.924.302	3.046.811.585	4.180.436.765	Other Receivables
Instrumen Investasi :					: Investment Instrument
Dana Jaminan	12.	51.000.000.000	47.000.000.000	47.000.000.000	Guarantee funds
Deposito Biasa	13.	1.820.129.530.788	1.145.671.475.791	631.911.585.445	Deposits
Surat Berharga :					: Securities
Saham Yang Diperdagangkan	14.	72.930.428.377	43.856.462.214	43.749.544.400	Stocks for Trading
Saham Tersedia Untuk Dijual		-	-	-	Stocks Available for Sale
Obligasi Yang diperdagangkan	15.	276.650.530.622	359.871.673.254	374.885.583.509	Bonds for Trading
Obligasi Tersedia Untuk Dijual		-	-	-	Bonds Available for Sale
Reksadana	16.	165.222.566.483	52.424.428.148	37.449.454.177	Mutual Funds
(Cadangan Penyisihan Obligasi)					(Reserve Allowance Bonds)
Jumlah Surat Berharga		514.803.525.482	456.152.563.616	456.084.582.086	Total Investment
Penyertaan Saham	17.	1.423.700.000	1.423.700.000	1.423.700.000	Investment in Share
Jumlah Instrumen Investasi		2.387.356.756.270	1.650.247.739.407	1.136.419.867.531	Total Investment Instrument
Aset Tetap					Fixed Assets
Nilai Perolehan	18.	177.730.394.774	61.432.407.453	56.127.723.092	Cost
Akumulasi Penyusutan		(11.283.845.500)	(10.394.051.771)	(8.050.035.472)	Accumulated depreciation
Nilai Buku Aset Tetap		166.446.549.273	51.038.355.681	48.077.687.620	Net book value
Aset Pajak Tangguhan	19.	28.941.264.631	8.437.393.123	7.109.291.632	Deferred tax asset
Aset Lain-lain	20.	31.225.693.667	28.164.139.612	28.378.557.284	Other assets
Cadangan Penyisihan Aset Lain		(27.000.000.000)	(27.000.000.000)	(27.000.000.000)	Allowance for other assets
Aset Lain-lain		4.225.693.667	1.164.139.612	1.378.557.284	Other assets
JUMLAH ASET		4.116.425.656.097	2.930.469.444.110	1.722.563.535.630	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
/ See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
AS OF 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(In Rupiah)

	Catatan / Note	2015	2014 Disajikan Kembali/ Restatement	2013 Disajikan Kembali/ Restatement	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Utang Klaim Reasuransi	21.	72.045.599.652	49.091.973.567	25.943.144.089	Reinsurance claim payables
Utang Premi Retrosesi	22.	55.437.660.098	28.658.729.156	7.300.756.456	Retrocession premium payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	23.	1.380.616.866.850	1.114.816.724.377	746.753.047.036	Estimated Own Claim Retention
Premi Yg Belum Merupakan Pendapatan	24.	1.314.646.332.736	915.415.412.784	507.710.223.676	Un-Earned Premium
Kontribusi Diterima Dimuka	25	-	-	990.576.385	Contribution received in advance
Beban Yang Masih Harus Dibayar	26.	22.321.813.643	18.372.387.572	13.163.996.992	Accrued expenses
Utang Pajak	27.	36.819.905.407	8.042.015.629	11.020.412.361	Taxes payable
Utang Zakat	28.	819.964.322	575.224.089	447.438.374	Zakat Payable
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	29.	23.959.764.348	22.976.083.443	17.576.657.110	Post Service Benefit Liability
Kewajiban Pajak Tangguhan		-	21.134.504	-	Deferred tax liability
Utang Lain-Lain	30.	2.791.612.265	2.323.944.389	2.805.330.808	Other payables
Jumlah Liabilitas		<u>2.909.459.519.321</u>	<u>2.160.293.629.509</u>	<u>1.333.711.583.289</u>	Total Liabilities
Dana Tabarru (Peserta)	31.	24.141.892.523	21.485.294.416	17.325.340.106	Tabarru Fund (Participant)
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham	32.	538.000.000.000	463.000.000.000	213.000.000.000	Authorized Capital
Selisih Penilaian- Saham Yang Tersedia Untuk Dijual			-	-	Difference Assessment of securities available for sale
Saldo laba :					Retained Earnings:
Cadangan Umum		300.022.728.820	167.865.806.930	95.064.550.262	General reserve
Cadangan Tujuan		5.799.073.141	5.799.073.141	5.799.073.141	Allocated reserve
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		251.072.690.624	132.156.921.289	72.801.257.943	Current year profit
Komponen Ekuitas Lainnya	33.	87.929.751.667	(20.131.281.175)	(15.138.269.113)	Other Equity Components
Jumlah Saldo Laba		<u>644.824.244.253</u>	<u>285.690.520.185</u>	<u>158.526.612.235</u>	Total Retained earning
JUMLAH EKUITAS		<u>1.182.824.244.253</u>	<u>748.690.520.185</u>	<u>371.526.612.235</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>4.116.425.656.097</u>	<u>2.930.469.444.110</u>	<u>1.722.563.535.630</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
/ See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

	Note	2015	2014 Disajikan Kembali/ Restatement	2013 Disajikan Kembali/ Restatement	
PENDAPATAN PREMI					PREMIUM REVENUES
Premi Bruto	34	3.451.755.982.573	2.095.931.414.310	1.296.536.113.161	Gross Premium
Premi Retrosesi		(1.213.156.829.515)	(242.487.422.569)	(83.085.023.024)	Retrosession Premium
Pembentukan PYBMP Tahun Berjalan		(861.791.105.051)	(799.151.507.411)	(418.583.602.820)	Current Year Un-earned Premium
Pencairan PYBMP Tahun Lalu		799.151.507.411	418.583.602.820	251.394.695.401	Last Year Un-earned Premium
Penurunan (kenaikan) PYBMP		(62.639.597.640)	(380.567.904.591)	(167.188.907.417)	Decrease (Increase) Un-Earned Premium
JUMLAH PENDAPATAN PREMI	34	2.175.959.555.418	1.472.876.087.151	1.046.262.182.720	TOTAL PREMIUM REVENUES
BEBAN UNDERWRITING					UNDERWRITING EXPENSES
Beban Klaim					Claim expenses
Klaim Bruto	35	1.240.356.956.282	867.381.453.321	521.713.056.067	Gross Claim
Klaim Retrosesi		(156.320.620.315)	(104.614.304.051)	(38.041.841.270)	Retrosession Claim
Pembentukan EKRS		679.956.688.768	471.563.155.078	434.187.317.728	Current Year Estimated Own Claim Retention
Pencairan EKRS		(471.563.155.077)	(434.187.317.728)	(291.680.248.109)	Last Year Estimated Own Claim Retention
Kenaikan EKRS		208.393.533.691	37.375.837.350	142.507.069.620	Increase estimated own claim retention
Jumlah Beban Klaim	35	1.292.429.869.657	800.142.986.620	626.178.284.417	Total claim expenses
Beban Komisi Netto	36	691.395.755.679	544.442.967.625	359.335.137.419	Net Commission Expense
Beban Underwriting Lain Netto	37	5.625.459.437	3.720.566.976	1.718.151.407	Underwriting other expenses - Net
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING		1.989.451.084.773	1.348.306.521.221	987.231.573.243	TOTAL UNDERWRITING EXPENSES
HASIL UNDERWRITING		186.508.470.644	124.569.565.930	59.030.609.477	UNDERWRITING INCOME
PENDAPATAN UJRAH	38	24.154.978.060	21.644.007.857	23.929.265.140	UJRAH INCOME
ALOKASI SURPLUS DANA TABARRU	39	1.693.857.427	1.170.512.044	2.355.249.242	ALLOCATION OF TABARRU FUND SURPLUS
HASIL INVESTASI	40	185.420.084.370	88.021.757.609	54.474.755.056	INVESTMENT INCOME
BEBAN USAHA	41	(116.398.528.247)	(88.689.416.377)	(71.082.985.900)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		281.378.862.255	146.716.427.063	68.706.893.014	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	42	13.811.175.394	4.129.786.256	12.783.266.373	OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK		295.190.037.649	150.846.213.318	81.490.159.388	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Penghasilan telah dikenakan Pajak Final Beda Tetap dan Beda Temporer	28.	(178.483.367.730)	(91.301.793.951)	(59.093.277.813)	Permanent and Temporary Differens Income subject to final tax
PENGHASILAN KENA PAJAK	28.	138.582.884.939	19.210.729.351	39.397.908.653	TAXABLE INCOME
ESTIMASI PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT :					ESTIMATED INCOME TAX AND ZAKAT:
Pajak Kini	28.	(63.822.388.714)	(19.421.034.928)	(15.392.573.361)	Current tax
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	28.	20.525.006.012	1.306.966.987	7.151.110.290	Deferred tax income (expense)
Zakat	29.	(819.964.322)	(575.224.089)	(447.438.374)	Zakat
JUMLAH ESTIMASI PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT		(44.117.347.024)	(18.689.292.029)	(8.688.901.445)	TOTAL ESTIMATED INCOME TAX AND ZAKAT
LABA SETELAH PAJAK DAN ZAKAT		251.072.690.624	132.156.921.289	72.801.257.943	EARNING AFTER TAX AND ZAKAT
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas Program Manfaat Pasti		(1.239.399.839,0)	(4.993.012.062)	(15.138.269.113)	Actuarial Gain (Loss) Define Benefit Program
Selisih Penilaian Kembali Aset tetap		109.300.432.681	-	-	
LABA KOMPREHENSIF		359.133.723.466	127.163.909.227	57.662.988.830	COMPREHENSIVE INCOME

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
/ See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
 (Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEARS ENDED
 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
 (In Rupiah)

	Ditempaikan dan Disetor Penuh/ Subscribed and Paid-in Capital	Saldo Laba / Retained earnings			Pendapatan Komprehensif Lain / Other comprehensive income	Jumlah / Total	
		Ditetapkan Penggunaannya / Allocated to		Laba Tahun Berjalan / Current Year Profit			
		Cadangan Umum / General Reserve	Cadangan Tujuan / Allocated Reserve				
Saldo per 31 Desember 2012	138.000.000.000	49.459.040.259	5.799.073.141	53.846.733.166	-	247.104.846.567	Balance as at 31 December 2012
Tambahan Modal Disetor	75.000.000.000	-	-	-	-	75.000.000.000	Additional paid-in capital
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan				(460.661.717)		(460.661.717)	Partnership and Community Development Program
Kenaikan/(penurunan) saham yang tersedia untuk dijual belum direalisasi				(7.780.561.447)		(7.780.561.447)	Unrealized Increase (decrease) in market price securities available for sale
Laba Bersih tahun berjalan		45.605.510.003		72.801.257.943		72.801.257.943	Current year net profit
Pembentukan Dana Cadangan				(45.605.510.003)		-	Allocation for reserve fund
Komponen Ekuitas Lainnya				72.801.257.943	(15.138.269.113)	(15.138.269.113)	Other Equity Components
Saldo per 31 Desember 2013	213.000.000.000	95.064.550.262	5.799.073.141	72.801.257.943	(15.138.269.113)	371.526.612.235	Balance as at 31 December 2013 (Restate)
Tambahan Modal Disetor	250.000.000.000	-	-	-	-	250.000.000.000	Additional paid-in capital
Kenaikan/(penurunan) saham yang tersedia untuk dijual belum direalisasi				-		-	Unrealized Increase (decrease) in market price securities available for sale
Laba Bersih tahun berjalan		72.801.256.668		132.156.921.289		132.156.921.289	Current year net profit
Pembentukan Dana Cadangan				(72.801.256.668)		-	Allocation for reserve fund
Komponen Ekuitas Lainnya				(1.275)	(4.993.012.062)	(4.993.012.062)	Other Equity Components
Koreksi Saldo Imbalan Paska Kerja				(1.275)		(1.275)	Ajustment for post employment benefits
Saldo per 31 Desember 2014	463.000.000.000	167.865.806.930	5.799.073.141	132.156.921.289	(20.131.281.175)	748.690.520.185	Balance as at 31 Desember 2014
Tambahan Modal Disetor	75.000.000.000	-	-	-	-	75.000.000.000	Additional paid-in capital
Kenaikan/(penurunan) saham yang tersedia untuk dijual belum direalisasi				-		-	Unrealized Increase (decrease) in market price securities available for sale
Laba Bersih tahun berjalan		132.156.921.890		251.072.690.624		251.072.690.624	Current year net profit
Pembentukan Dana Cadangan				(132.156.921.890)		-	Allocation for reserve fund
Komponen Ekuitas Lainnya				600	108.061.032.842	108.061.032.842	Other Equity Components
Koreksi Saldo Imbalan Paska Kerja				600		600	Ajustment for post employment benefits
Saldo per 31 Desember 2015	538.000.000.000	300.022.728.820	5.799.073.141	251.072.690.624	87.929.751.668	1.182.824.244.253	Balance as at 31 Desember 2015

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan / See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
 (Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 STATEMENTS OF CASH FLOWS
 FOR THE YEARS ENDED
 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
 (In Rupiah)

	2015	2014	2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Premi	2.894.687.739.676	1.404.741.440.337	976.645.812.187	Cash received from premium
Penerimaan Klaim Retrosesi	154.607.938.738	81.513.402.525	38.717.216.159	Cash flow from retrocession claims
Penerimaan Lain-lain	11.460.244.767	7.403.873.574	7.839.960.968	Cash received from other income
Pembayaran Premi Retrosesi	(1.007.550.018.580)	(233.777.979.877)	(90.458.024.379)	Payments for retrocession premiums
Pembayaran Klaim	(1.387.277.347.192)	(971.655.373.380)	(602.764.036.401)	Claims payments
Pembayaran Beban Pemasaran	(8.395.512.787)	(6.103.575.257)	(4.836.123.094)	Marketing expenses
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(87.257.580.918)	(66.266.024.210)	(51.078.412.881)	General and administrative expenses
Pembayaran Pajak	(11.502.251.025)	(10.315.695.581)	(3.842.570.490)	Payments for taxes
Pembayaran Uang Muka	(18.149.861.805)	(11.337.552.745)	(3.695.031.529)	Advances
Pengeluaran Lain-lain	(43.020.467.314)	(79.733.410.221)	(37.650.920.272)	Other disbursement
	<u>497.602.883.560</u>	<u>114.469.105.164</u>	<u>228.877.870.267</u>	Net cash received from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan Hasil Investasi	158.326.676.183	93.401.854.218	56.292.647.206	Investment income
Pencairan Deposito	2.858.949.130.138	1.914.665.617.944	1.089.140.495.066	Deposit withdrawals
Pencairan Obligasi	107.792.965.000	138.885.393.387	136.743.179.150	Bond withdrawals
Pencairan Reksadana	5.000.000.000	8.963.776.701	13.589.000.000	Mutual funds withdrawals
Pencairan Saham	1.475.946.989	5.023.559.872	7.122.451.631	Sale of stocks
Hasil Penjualan Aset Tetap	427.608.250	10.100.000	413.573.500	Fixed assets disposals
Penempatan Deposito	(3.532.450.111.833)	(2.257.572.722.464)	(1.265.352.558.524)	Deposit placement
Penempatan Obligasi	(30.898.023.066)	(248.316.186.192)	(238.965.374.538)	Purchases of bonds
Penempatan Saham	-	2.204.830	(4.662.937.300)	Purchases of stocks
Penempatan Reksadana	(121.420.000.000)	(17.000.000.000)	(19.000.000.000)	Deposit in mutual funds
Perolehan Aset Tetap dan Perangkat Lunak	(6.184.174.569)	(4.252.726.269)	(3.570.605.175)	Cash disbursement for fixed assets and softwares
Penerimaan Jasa Giro	550.168.656	430.897.832	413.573.500	Cash received from bank interests
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(558.429.814.250)</u>	<u>(365.758.230.141)</u>	<u>(227.836.555.484)</u>	Net cash used for investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES
Penambahan Modal Disetor	75.000.000.000	250.000.000.000	-	Additional paid-in capital
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	<u>75.000.000.000</u>	<u>250.000.000.000</u>	<u>-</u>	Net cash received from funding activities
(KENAIKAN) PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	14.173.069.310	(1.289.124.978)	1.041.314.782	(INCREASE) DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL	2.460.031.933	3.749.156.911	2.707.842.129	BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR	<u>16.633.101.243</u>	<u>2.460.031.933</u>	<u>3.749.156.911</u>	ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT
Terdiri dari :				: Comprising of
Kas	123.464.832	156.816.416	98.901.726	Cash on hand
Bank	16.509.636.411	2.303.215.517	3.650.255.185	Cash in banks
Jumlah	<u>16.633.101.243</u>	<u>2.460.031.933</u>	<u>3.749.156.911</u>	Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan / See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of

1 Informasi Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Reasuransi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut perusahaan didirikan berdasarkan akta No. 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Akta diatas diubah dengan akta No. 53 tanggal 15 September 1994 di hadapan Achmad Abid, SH, Notaris Pengganti di Jakarta dan akta No. 15 tanggal 7 Oktober 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 tanggal 11 Oktober 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1994 No. 103 Tambahan No. 10862.

Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 21 April 1998 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, yang menyebutkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan kembali susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan. Kemudian diubah dalam akta No. 37 tanggal 16 Juni 2000 dibuat di hadapan Nyonya Vita Buena, SH, Notaris pengganti Sutjipto SH, di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-00902. HT.01.04.TH.2002 tanggal 18 Januari 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 74 tanggal 13 September 2002 Tambahan No. 727.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto SH, di Jakarta, yang menyebutkan menambah bidang usaha Perseroan yaitu Reasuransi Syariah, dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 65.000.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diambil seluruhnya oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005. Perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, mengalami penambahan sesuai dengan akta No. 108 tanggal 22 Pebruari 2007 dari Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp 85.000.000.000 (delapan puluh lima milyar rupiah) yang disetor seluruhnya oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4562 tanggal 9 April 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 81 tanggal 9 Oktober 2007, Tambahan No. 1148/2007.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan akta No. 12 tanggal 8 Agustus 2008 di hadapan Umaran Mansjur, SH, Notaris di Jakarta, yang menyatakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-68917.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI No. 85 tanggal 21 Oktober 2008 dan Tambahan No. 20697/2008.

1 General Information

a. Establishment and General Information

PT Reasuransi Nasional Indonesia ("the Company") was established on the basis of the deed No. 129 dated 22 August 1994, of the notary Sutjipto SH, in Jakarta. The deed was then amended with the deed No. 53 dated 15 September 1994, made before the notary Achmad Abid, SH, a substitute notary in Jakarta and the deed No. 15 dated 7 October 1994, made before the notary Sutjipto SH, in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his letter No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 dated 11 October 1994 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 27 December 1994 No. 103 and Supplement thereto No. 10862.

The Company's articles of association have been amended with the decision of meeting No. 62 dated 21 April 1998, made before the notary Sutjipto SH, in Jakarta, which approved the change in the Company's articles of association to conform to the Law No. 1 of 1995 on limited liability companies and approved the reappointment of previous members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Further amendment was with the deed No. 37 dated 16 June 2000 made before the notary Mrs. Vita Buena, SH, acting as a substitute to notary Sutjipto SH, in Jakarta. The amendment of the Company's articles of association were received and registered by the Director General of General Legal Administration – the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. C-00902. HT.01.04.TH.2002 dated 18 January 2002 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated 13 September 2002 and Supplement thereto No. 727.

Based on the decision of meeting No. 42 dated 10 August 2005, made before the notary Aulia Taufani, SH, acting in substitute to notary Sutjipto SH, in Jakarta, the Company's line of business is extended by adding Sharia reinsurance business unit, and the Company's issued and paid-in capital was increased from Rp 65,000,000,000 (sixty five billion rupiah) to Rp 75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) which was fully paid in by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The increase was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 dated 31 August 2005. The Company's issued and paid-in capital, was further increased in accordance with the deed No. 108 dated 22 February 2007 from Rp 75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) to Rp 85,000,000,000 (eight five billion rupiah) which was subscribed and fully paid by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The notary deed No.108 was registered in the database of Sisminbakum of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. W7-HT.01.04-4562 dated 9 April 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 9 October 2007; Supplement thereto No. 1148/2007.

Based on the amendment of the Company's articles of association, the deed No. 12 dated 8 August 2008, made before the notary Umaran Mansjur, SH, in Jakarta, which approved the change in the Company's authorized capital to conform to the Law No. 40 of 2007 on limited liability companies. The approval was granted by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. AHU-68917.AH.01.02 of 2008 dated 24 September 2008 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 dated 21 October 2008 and Supplement thereto No. 20697/2008.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang pengalihan dana cadangan umum PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 29 November 2010 diputuskan untuk mengalihkan sebagian dana cadangan umum pada ekuitas usaha konvensional PT Reasuransi Nasional Indonesia maksimal sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi ekuitas usaha syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia mulai berlaku sejak 30 November 2010. Sampai dengan 31 Desember 2010 pengalihan dana cadangan tersebut terealisasi sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah). Dengan adanya pengalihan tersebut, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham terdiri dari 103.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setara Rp103.000.000.000 (seratus tiga milyar rupiah).

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan Notulen Rapat RUPSLB PT Reasuransi Nasional tanggal 26 Juli 2011, Nomor 15/RR/DIR, perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari Induk Perusahaanan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah). Pencatatan aset tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, dengan laporannya nomor: 417.1.6.3.11.05.11 perihal Penilaian Aset PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan hasil penilaian berdasarkan nilai pasar (market value) pada tanggal 20 Mei 2011, sebesar Rp35.078.800.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Dengan demikian jumlah modal disetor per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp138.000.000.000 (seratus tiga puluh delapan milyar rupiah). Akta Notaris mengenai penambahan modal disetor tersebut tertanggal 29 Juli 2011 dengan nomor Akte 9.

Berdasarkan Surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Nomor : S-208/MBU/2013 tanggal 4 (empat) April 2013 (dua ribu tiga belas) perihal Konversi Pinjaman Subordinasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, memutuskan pinjaman subordinasi sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) dialihkan menjadi penyertaan modal PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) pada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Dengan demikian modal disetor PT Reasuransi nasional Indonesia per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas milyar rupiah).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 23 September 2014 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sepakat menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga per 31 Desember 2014 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga milyar rupiah).

Selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 24 Juli 2015 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), sehingga per 31 Desember 2015 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp538.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan milyar rupiah).

Based on extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on 29 November 2010 on transfer of general reserve fund of PT Reasuransi Nasional Indonesia it was decided to reallocate some of the general reserve fund, the equity of the conventional business of PT Reasuransi Nasional Indonesia, to equity of syariah business unit of PT Reasuransi Nasional Indonesia at a maximum amount of Rp20,000,000,000 (twenty billion rupiah) effective 30 November 2010. By December 31, 2010 the realized transfer of reserve funds was Rp18.000.000.000 (eighteen billion rupiah). With the transfer of the paid up capital of the Company has been issued and fully paid by shareholders consisting of 103,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000, - (one million rupiah) or equivalent to Rp103.000.000.000 (one hundred and three billion rupiah).

For addition in the paid-in capital, based on minute of extra ordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated 26 July 2011 No 15/RR/DIR the Company has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp35.000.000.000 (thirty five billion rupiah). The valuation is made by the public appraisal company Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, with their report number 417.1.6.3.11.05.11, based on current market value on 20 May 2011 of Rp35.078.800.000 (thirty five billion seventy eight million eight hundred thousand rupiah) . It resulted at 31 December 2011 the amount of paid-in capital of Rp138.000.000.000 (one hundred and thirty eight billion rupiah). The notary deed of the paid-up capital increase was dated July 29, 2011 with the deed number 9.

Based on the letter of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Number: S-208/MBU/2013 date four (4) April 2013 (two thousand and thirteen) about PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Convertible Subordinated Loan on PT Reasuransi Nasional Indonesia, decided subordinated loans amounting Rp75.000.000.000 (seventyfive billion dollars) was converted into equity of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) on PT Reasuransi Nasional Indonesia. Thus the paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesian per December 31, 2013 to Rp213.000.000.000 (two hundred and thirteen billion rupiah).

Based on the General Meeting of Shareholders' Extraordinary Company dated 23 September 2014 regarding additional paid-in capital of Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) agreed to increase the paid up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia amounting Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah) so by December 31, 2014 paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia become Rp463.000.000.000 (four hundred sixty three billion rupiah).

Subsequently in 2015 by the decision taken in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on July 24, 2015 concerning the increase in paid-up capital of initially Rp75.000.000.000 (seventy five billion rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) added to the paid-up capital PT Reasuransi Nasional Indonesia so that as at December 31, 2015 the paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia becomes Rp538.000.000.000 (five hundred and thirty-eight billion rupiahs).

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i Menyelenggarakan usaha pertanggung ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/umum dan/atau Perusahaan asuransi jiwa.
 - ii Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
 - iii Melakukan retrocesi atau reasuransi sub i di atas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

b. Misi, Visi, Tujuan dan Lapangan Usaha

i. Misi Perusahaan

Pernyataan misi perusahaan yang merupakan tujuan jangka panjang perusahaan yang menjadi landasan usaha perusahaan, dirumuskan seperti dibawah ini :

- 1) Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah;
- 2) Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional;
- 3) Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada stakeholder lainnya.

ii. Visi Perusahaan

Pernyataan misi tersebut yang menunjukkan peran yang akan diambil oleh perusahaan sejalan dengan cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang atau *visi* perusahaan, yaitu :

"Menjadi perusahaan reasuransi yang terpercaya, tangguh, dan terus tumbuh".

iii. Tujuan dan Lapangan Usaha

Sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pendirian tujuan dan lapangan usaha dari perseroan adalah

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah dibidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya dibidang reasuransi dalam arti seluas-luasnya;
- 2) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Perseroan menyelenggarakan segala macam usaha reasuransi;
- 3) Perseroan dapat pula menjalankan usaha yang sama dengan bidang usaha Perseroan tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, secara bersama-sama dengan perusahaan atau badan lain sepanjang usaha tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang dan ketentuan berlaku dalam Anggaran Dasar

c. Struktur Organisasi

Susunan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:

The goals and objectives of the Company are to participate in implementing the government policies and in supporting the government's programs in economy and national development in general, and running high quality and competitive reinsurance business in particular, to generate profit and to increase the Company's value by applying limited liability company principles, and by providing services in reinsurance to cover risks faced by insurance companies, either on the basis of conventional principles or syariah principles.

To achieve the above goals and objectives, the Company conducts the following businesses:

- i reinsurance business against risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;
- ii reinsurance of loss/general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers; and
- iii retrocession or reinsurance of point i. above to insurance and/ or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers

To conduct part of the reinsurance business under sharia principles a sharia unit is established.

b. Mission, Vision, Objectives and Line of Business

i. The Company's Mission

The mission statement of the Company which is the Company's long-term goals that underlie the company's business, defined as below:

- 1) Providing services and solutions on general reinsurance and life insurance, both in conventional and syariah basis;
- 2) Providing services in the National, Regional, and International markets;
- 3) Provide benefits to partners in improving the performance of insurance companies and the capacity of national insurance and to other stakeholders.

ii. Company's Vision

The mission statement that shows the role to be taken by the Company in line with the goals to be achieved in the future or the vision of the Company, i.e.:

"To be most trusted, strong and growing reinsurance company"

iii. Objectives and Line of Business

As stated in the Articles of Incorporation, the goals and line of business of the Company are:

- 1) To conduct and support government policies and programs in the field of economic and national development in general, especially in the field of reinsurance in the broadest sense;
- 2) To achieve the objectives the Company organizes all kinds of reinsurance business;
- 3) The Company may also carry out the same ventures with the business of the Company in points 1 and 2 above, together with other companies or other entities as long as these ventures do not violate the laws and regulations in force as well as conditions and provisions in the Articles of Association.

c. The Company's Management

Members of the Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:

	Tahun 2015/ Year 2015	Tahun 2014/ Year 2014	
Komisaris			Commissioners
Komisaris Utama	Rinarno Pramudiyanto	Rinarno Pramudiyanto	President
Komisaris	Sulaeman	Sulaeman	Commissioner
Komisaris Independen	Raymond Buisson	Raymond Buisson	Independent
	Tahun 2015/ Year 2015	Tahun 2014/ Year 2014	
Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	M.Shaifie Zein	M.Shaifie Zein	President Director
Direktur Operasi	Edhie Mulyono	Edhie Mulyono	Operations Director
Direktur Keuangan dan SDM	Rusdianto	Rusdianto	Finance and Human Resources Director
Komisaris			
Pengangkatan Komisaris berlaku untuk 3 tahun sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2015 adalah berdasarkan SK Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia No. 73/KEP/DIR/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia.			<i>Appointment of members of the Board of Commissioners is valid for 3 years effective 1 June 2012 until 31 May 2015 is based on the directors of PT Asuransi Kredit Indonesia decree No. 73/KEP/DIR/VI/2012 dated 1 June 2012 on dismissal and appointment of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia.</i>
Perpanjangan sementara Jabatan Komisaris, berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 1 Juni 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Sementara Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia, memutuskan antara lain :			<i>Extension of the temporary post of Board of Commissioners, by decision of RUPS LB dated June 1, 2015 regarding the Stipulation Appointment While the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia, decided include:</i>
1. Menetapkan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat untuk tetap menjalankan pekerjaan sebagai Dewan Komisaris dengan susunan anggota Dewan Komisaris yang sama sampai dengan adanya RUPS PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang penetapan pengangkatan definitif Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia.			<i>1. Establish the Board of Commissioners currently serving to stay in the work as the Board of Commissioners to the Board of Commissioners the same until the RUPS PT Reasuransi Nasional Indonesia on the appointment of a definitive determination of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia.</i>
2. Selama menjabat, Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia memiliki hak dan kewajiban, kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan yang berlaku saat ini.			<i>2. During his tenure, the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia has the right and duty, power and authority and responsibility similar to that prevailing today.</i>
Direksi			
Penetapan Direksi M.Shaifie Zein dan Edhie Mulyono berlaku sejak tanggal 12 November 2010 sesuai dengan SK Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia No. 124/KEP/DIR/XI/2010 tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Direktur Utama dan Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia setelah adanya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No KEP-395/BL/2010 tgl 25 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas nama M.Shaifie Zein dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-396/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Edhie Mulyono. Atas SK tersebut di atas telah diaktakan pada 4 Februari 2011 Nomor 1.			<i>The appointment of members of the Board of Directors (Mr. M.Shaifie Zein and Mr. Edhi Mulyono) is effective 12 November 2010, based on the directors of PT Asuransi Kredit Indonesia decree No. 124/KEP/DIR/XI/2010 dated 12 November 2010 on appointment of president director and director of operation of PT Reasuransi Nasional Indonesia following the decree of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-395/BL/2010 dated 25 August 2010 on confirmation of result of fit and proper assessment of M.Shaifie and the decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No KEP-396/BL/2010 dated 25 August 2010 on confirmation of result of fit and proper assessments of Edhi Mulyono. A notary deed No 1 for the decrees were made on 4 February 2011.</i>
Pengangkatan Direktur Keuangan Rusdianto sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia No 4 tanggal 23 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Umaran Mansjur, notaris di Jakarta. Akta pengangkatan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-08306 tanggal 07 April 2010.			<i>The appointment of Mr. Rusdianto, is based on the statement of extraordinary shareholders' general meeting of PT Reasuransi Nasional Indonesia No. 4 dated 23 March 2010, made before the notary Umaran Mansjur, in Jakarta. The certificate of appointment has been accepted and registered in the database of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-08306 dated 7 April 2010.</i>
Perpanjangan sementara Jabatan Direksi, sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 30 Juli 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Sementara Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia, memutuskan :			<i>Extension of the temporary post Board of Directors, by decision of RUPS LB dated June 1, 2015 regarding the Stipulation Appointment While the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia, decided</i>
1. Menetapkan Direksi yang saat ini menjabat untuk tetap menjalankan pekerjaan sebagai Direksi dengan susunan anggota Direksi yang sama sampai dengan adanya RUPS PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang penetapan pengangkatan definitif Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia.			<i>1. Establish the Board of Directors currently serving to stay in the work as the Board of Commissioners to the Board of Commissioners the same until the RUPS PT Reasuransi Nasional Indonesia on the appointment of a definitive determination of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia.</i>

2. Selama menjabat, Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia memiliki hak dan kewajiban, kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan yang berlaku saat ini.

Unit Syariah

Sesuai surat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) No. U-158/DSN-MUI/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, maka susunan Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS
Anggota	Drs. H. Safaruddin Rozali, MM
Anggota	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH, MM

Struktur organisasi PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- i. Divisi Underwriting Treaty dan Retrosesi yang membawahi 2 bagian:
 - Bagian Retrosesi
 - Bagian Treaty
- ii. Divisi Underwriting Fakultatif yang membawahi 3 Bagian
 - Bagian Facultative Fire dan Engineering
 - Bagian Facultative Marine/ Aviation/ Engineering
 - Bagian Underwriting Financial & Suretyship
- iii. Divisi Reasuransi Jiwa yang membawahi :
 - Bagian Reasuransi Jiwa
 - Risk Consult B.D
 - Aktuaris Perusahaan
 - Underwriter
 - Teknik Administrasi
- iv. Divisi Klaim yang membawahi 2 bagian
 - Bagian Klaim Fire dan Engineering
 - Bagian Klaim Non-Fire dan Engineering
- v. Divisi Reasuransi Syariah yang membawahi 3 bagian
 - Bagian Underwriting Umum
 - Bagian Underwriting Jiwa
 - Bagian Keuangan dan Akuntansi
- vi. Divisi Keuangan dan Akuntansi yang membawahi 3 bagian
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Akuntansi
 - Bagian Penagihan
- vii. Divisi SDM dan Umum yang membawahi 2 bagian
 - Bagian Sumber Daya manusia dan Operasional
 - Bagian Umum
 - Tim Perencanaan Strategis SDM
- viii. Divisi Manajemen Risiko membawahi 1 bagian
 - Bagian Perencanaan dan Pengembangan dan Manajemen Risiko
- ix. Aktuaris Perusahaan
- x. Satuan Pengawas Intern membawahi Senior Auditor dan Auditor
- xi. Sekretaris Perusahaan yang membawahi 2 Bagian.
 - Bagian Sekretaris dan Humas
 - Bagian Hukum dan Kepatuhan
- xii. Divisi Informasi/ Komunikasi & Teknologi, yang membawahi 2 bagian:
 - Bagian Perencanaan dan Strategi IKT
 - Bagian Tim Operasional dan Layanan

Jumlah karyawan tetap tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:

2. During his tenure, the Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia has the right and duty, power and authority and responsibility similar to that prevailing today.

Sharia Unit

In conformity with the letter of Dewan Syariah Nasional (National Sharia Board) No. U-158/DSN-MUI/VIII/2005 dated 27 August 2005 on Recommendation of Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah), the members of Sharia Supervisory Board of PT Reasuransi Nasional Indonesia are as follows:

Chairman	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS
Members	Drs. H. Safaruddin Rozali, MM
Members	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH, MM

Organizational structure PT Reasuransi Nasional Indonesia 2015 are as follows:

- i. Underwriting Treaty and Retrocession Division, which supervises 2 Unit :
 - Retrocession
 - Treaty
- ii. Facultative underwriting Division, which supervises 2 units
 - Facultative Fire and Engineering
 - Facultative Marine/ Aviation/ Engineering
 - Underwriting Financial & Suretyship
- iii. Life Division, which supervises :
 - Life Reinsurance Risk
 - Risk Consult B.D
 - Actuary
 - Underwriter
 - Technical Administration
- iv. Claim Division, which supervises 2 units
 - Claim Fire and Engineering
 - Claim Non-Fire & Engineering
- v. Sharia Reinsurane Division, which supervises 3 units
 - General Underwriting
 - Life Underwriting
 - Finance and Accounting
- vi. Finance and Accounting Division, which supervises 3 units
 - Finance
 - Accounting
 - Collection
- vii. Human Resources and General Affairs Division, which supervises 2 units
 - Human Resources and Operational
 - General Affairs
 - HR Planning & Starategic Team
- viii. Risk Management Division, which supervises 1 units
 - Planning and Development and Risk Management
- ix. Actuary
- x. Internal Control Unit in charge of level Senior Auditor and Auditor.
- xi. Corporate Secretary which supervises 2 units:
 - Secretary and Human Relationships Unit
 - Law and Compliance Unit
- xii. Communication/ Information & Tehnologi
 - Planning and Strategic Unit
 - Operational and Service Team Unit

The number of permanent employees in 2015 increased by 25 (twenty five) of the following composition:

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	
i. Menurut jabatan			<i>In terms of position/job title</i>
Kepala Divisi	12	10	Heads of Divisions
Kepala Bagian	23	22	Heads of Units
Kepala Seksi	48	50	Heads of Sections
Pelaksana	69	44	Officers
Pegawai Dasar	15	16	Junior duty officers
Jumlah	167	142	Total
ii. Menurut jenjang pendidikan			<i>In terms of educational background</i>
Strata 2	15	15	Strata 2
Strata 1	130	103	Strata 1
Sarjana Muda / D3	6	7	Diploma degree / D3
Sekolah Lanjutan Atas	12	13	Senior High School
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	3	3	Junior High School
Sekolah Dasar	1	1	Elementary School
Jumlah	167	142	Total
iii. Menurut jenjang pendidikan / Keahlian			<i>In terms of professional background :</i>
AAIK - Ahli Asuransi Indonesia Kerugian	5	5	AAIK - Indonesian General Insurance Expert
AAIJ - Ahli Asuransi Indonesia Jiwa	1	1	AAIJ - Indonesian Life Insurance Expert
AAAIK - Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian	10	9	AAAIK - Adjutant Indonesian General Insurance Expert
AAAIJ - Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa	11	11	AAAIJ - Adjutant Indonesian Life Insurance Expert
FSAI - Fellow Society of Actuary Indonesia	1	1	FSAI - Fellow Society of Actuary Indonesia
ANZIF - Australian New Zealand Institute of Insurance and Finance	1	1	ANZIF - Australian New Zealand Institute of Insurance and Finance
ACII - Associate of the Chartered Institute	4	4	ACII - Associate of the Chartered Institute
AMII - Associate Malaysian Insurance Institute	8	8	AMII - Associate Malaysian Insurance Institute
FIIS - Fellow Islamic Insurance Society	2	2	FIIS - Fellow Islamic Insurance Society
AIIS - Associate of Islamic Insurance Society	9	8	AIIS - Associate of Islamic Insurance Society
IPGDI - The Associated Parliamentary Group for Design and Innovation	1	2	IPGDI - The Associated Parliamentary Group for Design and Innovation
	53	52	

c. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk)

i. Pendirian Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), selanjutnya disebut dengan "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 dengan akta Nomor 2 tanggal 6 April 1971 oleh Prabowo Achmad Kadijono, SH, Notaris Pengganti di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, diantaranya melalui Akta Nomor 18 tanggal 19 Mei 1998 oleh Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan NO.C2-7.504.HT.01.01.TH.98 tertanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Nopember 1998 nomor 92, Tambahan Nomor 6370.

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 30 Nopember 2005 oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), yang berasal dari kapasitas konversi cadangan umum Perusahaan, dengan komposisi pemegang saham yaitu Negara Republik Indonesia sebesar Rp180.000.000.000 (180.000 saham) dan Bank Indonesia sebesar Rp220.000.000.000 (220.000 saham). Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-34240 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 mei 2006 nomor 40, tambahan Nomor 508.

c. About the Parent Company

i. Establishment of the Company

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), hereinafter referred to as "the Company", was incorporated on the basis of the Government Regulation No. 1 of 1971 dated 11 January 1971, under the notary deed No. 2 dated 6 April 1971 of the notary Prabowo Achmad Kadijono, SH. The Company's Articles of Association have been amended in a number of times, the latest of which was with the notary deed No. 18 dated 19 May 1998 of the notary Imas Fatimah. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice with his letter No.C2-7.504.HT.01.04.TH.98 dated 25 June 1998 and were published in the State Gazette No. 92 dated 16 November 1998, and Supplement there to No. 6370

With the notary deed No. 29 dated 30 November 2005 of the notary Imas Fatimah, SH, an increase in paid-in capital was made from the initially Rp 320.000.000.000 (three hundred and twenty billion rupiah) to become Rp 400.000.000.000 (four hundred bil, originating from conversion of the Company's general reserve, with the share holding: the Government of the Republic of Indonesia: Rp180.000.000.000 (180.000 shares) and Bank Indonesia: Rp220.000.000.000 (220.000 shares). The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. C-34240 HT. 01.04.TH.2005 dated 22 December 2005, and was published in the State Gazette No. 40 dated 19 May 2006, and the Supplement thereto No. 508

Selanjutnya berdasarkan Akta No.63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, dihadapan Imas Fatimah. SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah mengambil keputusan antara lain : Perubahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah); menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan/portopel) sejumlah 850.000 saham (Rp850.000.000.000) diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; menyetujui penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diatur dalam PP No. 65 tahun 2007. Dengan penambahan tersebut, maka modal ditempatkan yang semula Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) menjadi Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar). Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-25451.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2009 nomor 96, Tambahan Nomor 27910.

Perubahan selanjutnya terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sesuai dengan Akta No.102 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Imas fatimah, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-72573.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008 tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan : penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 dan perkembangan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2009 Nomor 96, Tambahan Nomor 27911

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telah ditetapkan kembali penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi perubahan besarnya modal yang semula Rp 1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah), yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah. SH, M, Kn No. 17 tanggal 22 April 2010.

Perusahaan berdomisili di Jakarta, dan berkantor pusat di jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta, dengan kantor cabang di Kemayoran, Cikini, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, Bandung, Semarang, Balikpapan, Palembang, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Pekanbaru, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Padang, dan Samarinda. Perusahaan juga memiliki Kantor Unit Pelayanan yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Batam, Bekasi, Tangerang, Jember, Madiun, Malang, Madura, Pangkal Pinang, Surakarta, Tangerang, Tegal, Bengkulu, Bogor, jogjakarta, Purwokerto, Jambi, Mataram, Cirebon, Serang-Banten, Kediri, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Kendari, Palu, Sukabumi, Pati, Magelang, Tasikmalaya dan Kisaran.

Subsequently, with the deed No. 63, on the shareholders' decision dated 24 April 2008, taken in general meeting of the shareholders, made before the notary Imas Fatimah, SH, the shareholders have agreed to: increase the Company's authorized capital from initially Rp500.000.000.000 (five hundred billion rupiah) to Rp 2.500.000.000.000 (two trillion and five hundred million rupiah); subscribed 850.000 shares (equivalent Rp850.000.000.000) by the Government of the Republic of Indonesia; the additional investment by the Government of the Republic of Indonesia comes from the 2007 state budget, as specified in the Government Regulation No. 65 of 2007. With the additional investment, the subscribed and paid-in capital increased from initially Rp400.000.000.000 (four hundred million rupiah) to become Rp1.250.000.000.000 (one trillion and two hundred fifty million rupiah). The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. AHU-25451.AH.01.02 of 2008 dated 14 May 2008, and was published in the State Gazette No. 96 dated 1 December 2009, and the Supplement thereto No. 27910.

Further amendment to the Company's Articles of Association was with the deed No. 102 dated 15 Augusts 2008 of the notary Imas Fatimah, SH, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. AHU-72573.AH.01.02. of 2008 dated 13 October 2008, on changes in the Company's goals and objectives as well as in its activities to be in line with the Law No. 19 of 2003, Law No.40 of 2007, the Government Regulation No.45 of 2005 and requirements in the Company's management. The amendment was published in the State Gazette No. 96 dated 1 December 2009, and the Supplement thereto No. 27911

With the Government Regulation No. 64 of 2009 dated 31 October 2009, an additional investment of Rp 250.000.000.000 (two hundred and fifty million rupiah) was made by the Government of the Republic of Indonesia, originating from the year 2009 State Budget. With the additional investment, the subscribed and paid-in capital increased from initially Rp 1.250.000.000.000 (one trillion two hundred and fifty billion rupiah) to become Rp1.500.000.000.000 (one trillion and five hundred billion rupiah). The change in the subscribed and paid-in capital was documented in the notary deed No 17 dated 22 April 2010 of the notary Imas Fatimah,SH.,M.Kn.

The Company domiciles in Jakarta, with the head office located at Jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta, and with branch offices at Kemayoran, Cikini, Medan, Makassar, Surabaya, Denpasar, Bandung, Semarang, Balikpapan, Palembang, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Pekanbaru, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Padang, Samarinda, Jayapura and Jogjakarta. The Company also have Service Unit Offices located at Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Batam, Bekasi, Tangerang, Jember, Madiun, Malang, Madura, Pangkal Pinang, Surakarta, Tangerang, Tegal, Bengkulu, Bogor, Purwokerto, Jambi, Mataram, Cirebon, Serang-Banten, Kediri, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Kendari, Palu, Sukabumi, Pati, Magelang, Tasikmalaya and Kisaran.

ii. Maksud, Tujuan dan Kegiatan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Pada awalnya maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan ini adalah untuk membantu kelancaran dan pengamanan perkreditan bank-bank terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap risiko atas kredit lainnya diluar perbankan. Selanjutnya dengan adanya perkembangan dunia usaha, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan juga mengalami penyesuaian sebagaimana yang dinyatakan dalam akta pendiriannya yaitu, melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang diberikan oleh Bank atau lembaga pembiayaan melaksanakan penutupan pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari debitur yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 2) Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
- 3) Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
- 4) Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Entitas Anak

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mempunyai 3 (tiga) anak perusahaan yaitu:

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

Pada saat pendirian perusahaan, bidang usaha yang dijalankan termasuk reasuransi yaitu menutup pertanggungan ulang atas risiko-risiko asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Namun, dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Perusahaan harus memisahkan antara usaha asuransi dan reasuransi. Untuk itu, pada tanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Akta No.129 dan 130 dengan Notaris Sutjipto, SH. Perusahaan mendirikan Entitas Anak dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%, yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia yang bergerak dalam usaha reasuransi, yang sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas pertanggungan nasional.

Maksud dan tujuan dari mendirikan Entitas Anak adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

ii. The Company's Goals, Objectives and Lines of Business

Initially, the Company's goals and objectives are to assist direction and safe flows of loan fund from banks to medium and small scale industries, and to provide risk of loans insurance of other non-bank financial institutions. Further, with development in business activities, the Company's goals and objectives are changed accordingly, as specified in the Articles of Association, i.e. ventures into insurance businesses, including those under syariah principles, optimizing the Company's resources, to provide high quality services and competitive advantage to derive profit and to add value to the Company, under good corporate principles.

To achieve the goals and objectives, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) engages in the following business activities:

- 1) Provide coverage against risks of non-repayment of loans and / or financing, including financing based on Sharia principles, of debtors, especially loans to Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives (MSME) provided by the Bank or financial institution, provides insurance coverage for risks of non repayment of the credit given by banks or other financial institutions
- 2) Provides direct insurance of any kind of loss insurance, and the like from inside and domestic and overseas entities, either by itself or together with other insurance companies, either for retained by itself or reinsured them to other insurance companies after considering the ability of the Company
- 3) Provides indirect insurance from domestic and overseas insurance / reinsurance companies for any type of insurance, either retained by itself or reinsured them to other insurance companies after considering the ability of the Company
- 4) Perform other activities commonly conducted by insurance companies paying due regard to the legal and regulatory provisions.

iii. Subsidiary Company

PT Asuransi Kredit Indonesia has 3 (three) subsidiaries, namely:

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

At the time of its incorporation, the Company's lines of business include reinsurance and life insurance. With the adoption of Law No. 2 of 1992 on line of business of insurance companies, the Company was required to separate insurance business from reinsurance one. It was, therefore, on 22 Augusts 1994, based on the deeds No.129 and 130 of the notary Sutjipto, SH, the Company established a 99,99% interest subsidiary, PT Reasuransi Nasional Indonesia, which engages in reinsurance business, which at the same time is intended to increase the national capacity in insurance business activities.

The establishment of the Subsidiary is intended to support and participate in the Government's policies and programs relating to national economy and development in general, and in providing high quality and competitive insurance businesses in particular, and to gain profit in order to add value to the Company, under good corporate principles, by providing services in risks reinsurance to other insurance companies, either under conventional or sharia principles.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, PT Reasuransi Nasional Indonesia melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi Perusahaan Asuransi Kerugian/Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b) Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- c) Melakukan retrosesi atau reasuransi sub a. Diatas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- d) Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

Pada bulan Desember 2006, Perusahaan telah meningkatkan penyertaan saham ke Entitas Anak menjadi sebesar Rp84.999.000.000 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp74.999.000.000 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar rupiah). Peningkatan setoran modal tersebut telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia No.108 tanggal 22 Februari 2007 dengan Notaris Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang pengalihan dana cadangan umum PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 29 November 2010 diputuskan untuk mengalihkan sebagian dana cadangan umum pada ekuitas usaha konvensional PT Reasuransi Nasional Indonesia maksimal sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi ekuitas usaha syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia mulai berlaku sejak 30 November 2010. Sampai dengan 31 Desember 2013 pengalihan dana cadangan tersebut terealisasi sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah).

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan Notulen Rapat RUPSLB PT Reasuransi Nasional tanggal 26 Juli 2011, Nomor 15/RR/DIR, perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari Induk Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Askrido (Persero) Nomor: S-208/MBU/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Konversi Pinjaman Subordinasi PT Askrido (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia memutuskan untuk mengalihkan pinjaman Subordinasi PT Askrido (Persero) sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) menjadi Modal Disetor atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebanyak 75.000 lembar saham senilai @ Rp1.000.000, sehingga keseluruhan saham PT Askrido (Persero) menjadi sebanyak 212.999 lembar saham senilai @ Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

To achieve the goals and objectives, PT Reasuransi Nasional Indonesia engages in the following business activities:

- a) reinsurance of risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;
- b) b. reinsurance of loss/general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers;
- c) retrocession or reinsurance of point a. above to insurance companies and / or reinsurance, directly or through reinsurance brokers; and
- d) d. provide partial reinsurance services under syariah principles by establishing a syariah unit.

In December 2006, the Company has increased its investment in the Subsidiary from initially Rp74.999.000.000 (seventy four billion and nine hundred and ninety nine billion rupiah) to Rp84.999.000.000 (eighty four billion and nine hundred and ninety nine billion rupiah). The increase in investment is made by the decision of a meeting to amend the Subsidiary's Articles of Association with the deed No.108 dated 22 February 2007 of the notary Sutjipto, SH.

Based on extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on 29 November 2010 on transfer of general reserve fund of PT Reasuransi Nasional Indonesia it was decided to reallocate some of the general reserve fund, the equity of the conventional business of PT Reasuransi Nasional Indonesia, to equity of syariah business unit of PT Reasuransi Nasional Indonesia at a maximum amount of Rp20.000.000.000 (twenty billion rupiah) effective 30 November 2010. By 31 December 2013 the re-allocation of an amount of Rp18.000.000.000 (eighteen billion rupiah) was realized.

For addition in the paid-in capital, based on minute of extra ordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated 26 July 2011 No 15/RR/DIR the Subsidiary has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company: PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp 35.000.000.000 (thirty five billion rupiah). The amount is recognized as paid-in capital.

Based on the letter of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Number: S-208/MBU/2013 dated 4 April 2013 concerning PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Convertible Subordinated Loan to PT Reasuransi Nasional Indonesia, it was decided to divert the Subordinated Loans to Paid-in Capital on behalf of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia in PT Reasuransi Nasional Indonesia of Rp75.000.000.000 (seventy five billion rupiah), equals to 75,000 shares of par value of Rp1.000.000 each, so that the entire stock of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia become 212 999 shares of par value of Rp1.000.000 (one million rupiah) each.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 23 September 2014 tentang penambahan disetor sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), PT Askrindo (Persero) menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga per 31 Desember 2014 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp 463.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar rupiah).

Selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 24 Juli 2015 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), sehingga per 31 Desember 2015 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp 538.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan milyar rupiah).

2) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Dalam rangka memanfaatkan peluang pasar penjaminan syariah yang masih terbuka, pada penghujung tahun 2013 perusahaan telah mendirikan Entitas Anak yakni PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, dengan modal setor sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) Perusahaan ini telah memperoleh izin dari Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Desember 2013 dan telah beroperasi sejak Mei 2014.

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan ini adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya penyelenggaraan usaha di bidang Penjaminan Pembiayaan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- melakukan penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- melakukan usaha-usaha lain yang masih memiliki keterkaitan dengan usaha kafalah (penjaminan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) PT. Usayasa Utama

Tujuan Pemegang Saham membentuk PT Usayasa Utama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan usaha, baik produk eksisting maupun produk-produk baru yang akan dikembangkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) serta menambah jejaring bisnisnya. Dengan demikian, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dapat lebih fokus dalam menggali produk-produk baru, menyempurnakan produk eksisting, meningkatkan pelayanan pelanggan dan mengembangkan prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*).

PT Usayasa Utama didirikan pada tanggal 7 Oktober 1997 dengan Akta Pendirian Perusahaan dibuat di hadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa, S.H. yaitu Akta No. 5 tahun 1997. Perusahaan ini didirikan oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) sebagai pemegang saham mayoritas dan Koperasi Karyawan Askrindo (KKA) sebagai pemegang saham minoritas.

Based on the decision made in Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Indonesia on 23 September 2014, on additional paid-in capital, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) has added Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah) in paid-in capital in PT Reasuransi Nasional Indonesia, resulting in the paid-in capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia of Rp 463.000.000.000 (four hundred and sixty three billion rupiah).

Subsequently in 2015 by the decision taken in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on July 24, 2015 concerning the increase in paid-up capital of initially Rp 75.000.000.000 (seventy five billion rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) added to the paid-up capital PT Reasuransi Nasional Indonesia so that as at December 31, 2015 the paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia becomes Rp 538.000.000.000 (five hundred and thirty-eight billion rupiahs).

2) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

In order to take advantage of market opportunities that are still open for sharia insurance, at the end of 2013, the Company has established a subsidiary named PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, with a paid up capital of 100 billion rupiahs. The company has obtained a license from the National Sharia Board and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on December 28, 2012 and has been operating since May 2013.

The goals and objectives are to contribute to the establishment of the Company and to implement and support the government's policies and programs in the fields of economics and national development in general, especially in the field of financing insurance business under Islamic principles as well as optimizing the utilization of company resources to produce high-quality services and strong competitiveness to increase the value of the Company by applying the principles of good corporate governance.

To achieve the goals and objectives, the Subsidiary engages in the following business activities:

- provides financing insurance under syaria principles;
- undertake other businesses that still has business relationship with kafalah (guarantee) in accordance with prevailing legal and regulatory requirements.

3) PT. Usayasa Utama

The objective of the Shareholders in establishing PT Usayasa Main is to increase growth in revenue, both from existing products and or new products that will be developed by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and increase business networking. Thus, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) will be more focused in exploring new products, enhance existing products, improve customer service and develop the principle of customer recognition (*Know Your Customer*).

PT Usayasa Utama was established on October 7, 1997 with the notary deed No. 5 in 1997 of the notary Sulami Mustafa, SH. The company was founded by Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) as the majority shareholder and Askrindo Employees Cooperative (KKA) as minority shareholders.

Pada awal tahun 2014, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mengambil alih sebagian tersebut sebesar saham 95% dan telah di sahkan berdasarkan Akta Notaris Hadijah, SH No. 28 tanggal 30 Januari 2014. Pengambilalihan ini dilatar-belakangi oleh kepentingan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) memasarkan produk-produknya yang diageni oleh PT Usayasa Utama.

Sesuai risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Desember 2014, modal dasar Perseroan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terbagi dalam 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham.

Dari modal saham tersebut telah disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham <i>Name of Shareholder</i>	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Nominal <i>Par</i>	Jumlah Rupiah <i>In Rupiah Amount</i>	% (Prosentase) Saham <i>percentage shareholding</i>
1	PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Persero.	2.375	1.000.000	2.375.000.000	95,00%
2	PT Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA)	125	1.000.000	125.000.000	5,00%
Jumlah modal disetor / <i>The amount of paid-in capital</i>				2.500.000.000	100,00%

Dengan menjadi pemegang saham pengendali, maka PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dapat memanfaatkan keberadaan PT Usayasa Utama secara optimal dalam mendukung fungsi pemasaran produk PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Selain itu, PT Usayasa Utama dapat menjadi "jembatan" dan instrument bagi Askrindo untuk memasuki industri penunjang bisnis asuransi yang diperkirakan mampu memberikan yield yang relatif tinggi.

In early 2014, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) took over the majority stake of 95% and has been legalized by the deed number 28 dated January 30, 2014 of the notary Hadijah, SH. This acquisition was triggered by the interest of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) for marketing its products for which PT Usayasa Utama acts as one of the agents.

Correspond minutes of the General Meeting of the Extraordinary Shareholders (EGM) on December 23, 2014, the Company's authorized capital was Rp10.000.000.000, - (ten billion rupiah) divided into 10,000 (ten thousand) shares with a par value of Rp1,000,000, - (one million rupiah) per share.

Of the share capital has been paid by 25% (twenty five percent) or 2.500 (two thousand five hundred) shares with an aggregate nominal value of Rp2.500.000.000, - (two billion five hundred million rupiah) with the following composition:

By becoming the controlling shareholder, then Askrindo can exploit the presence of PT Usayasa Main optimally in support of marketing functions of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) products. In addition, PT Usayasa Utama can act as bridging unit and instrument for the needs of business partners, for PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to enter the insurance business support industry which is predicted to provide a relatively high yield business

iv. Permodalan

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah merealisasikan penambahan PMN sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) tanggal 28 Desember 2007 sesuai dengan akta No. 63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, dihadapan notaris Imas Fatimah, SH, dan Surat dari Meneg BUMN No. S-137/MBU/2010 tanggal 3 Maret 2010 ditetapkan penambahan penyertaan modal negara RI sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga keseluruhan PMN RI menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000 (satu triliun seratus milyar rupiah).

Penambahan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham menjadi 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2009 telah ditetapkan kembali penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi perubahan struktur permodalan yang semula Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah), sesuai akta notaris Imas Fatimah,SH.,MKn notaris di Jakarta No. 17 tanggal 22 April 2010.

iv. Capital

Addition in the Government Investment.

The President's Instruction (Inpres) No. 6 of 2007 is a policy to expedite development in real sector and empowerment of small scale and medium industries to boost growth in the national economy. In relation to the policy, on 28 December 2007 the Government added its investment by Rp850.000.000.000 (eight hundred and fifty billion rupiah), with the deed No. 63 dated 24 April 2008, of the notary Imas Fatimah, SH. The deed was made following the decision of the shareholders which was made outside their general meeting. Further, with the letter No. S-137/MBU/2010 dated 3 March 2010, the Minister of SOEs has decided to add another Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah) to its investment originating, resulting in a total of Rp1.100.000.000.000 (one trillion and one hundred billion rupiah) of the additional Government's investment.

The additional investment is intended to increase the Company's business capacity and to strengthen its capital structure for insuring loans provided to the community's businesses and for improving micro business activities, and in turn to increase growth in the national economy.

Based on the deed No. 102 dated 15 Augusts 2008 of the notary Imas Fatimah, SH, the subscribed and paid-in capital of the Company is 1.250.000 shares of par value of Rp1.000.000 (one million rupiah) each, and based on the Government Regulation No. 64 of 2009 additional investment was made by the Government in the amount of Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah), originating from the year 2009 state budget. It resulted in increase of the Company's paid-in capital from initially Rp1.250.000.000.000 (one trillion two hundred and fifty billion rupiah) to become Rp1.500.000.000.000 (one trillion and five hundred billion rupiah), which is documented in the notary deed No. 17 dated 22 April 2010 of the notary Imas Fatimah,SH.,MKn.

Berdasarkan PP 81 tahun 2010 Pemerintah menambah PMN RI sebesar Rp 900.000.000.000 (sembilan ratus milyar rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus milyar rupiah). Selanjutnya pada tahun 2011 sesuai PP No. 60 tahun 2011 tanggal 29 Des 2011 Pemerintah menambah PMN sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus milyar rupiah) dan pada tahun 2013 berdasarkan surat dari Menteri Negara BUMN No. S-390/MBU/2013 tanggal 25 Juli 2013, Pemerintah memberikan kembali tambahan PMN sebesar Rp 831.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh satu milyar rupiah), sehingga total PMN sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp3.631.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh milyar rupiah) sehingga berdasarkan Perubahan anggaran dasar Perusahaan, modal menjadi 3.631.000 lembar dengan nilai Rp3.631.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh milyar rupiah).

Based on the Government Regulation No.81 of 2010, the Government has again added another investment in the amount of Rp 900.000.000.000 (nine hundred billion rupiah), resulting in the total paid in capital of Rp 2.400.000.000.000 (two trillion and four hundred billion rupiah). In 2011, with the Government Regulation No.60 of 2011 dated 29 December 2011 the Government puts another investment in the amount of Rp 800.000.000.000 (eight hundred billion rupiah). Subsequently with the Minister of SOE's letter No. S-390/MBU/2012 dated 25 July 2012, the government again added its investment of Rp. 831.000.000.000 (eight hundred and thirty one billion rupiah) , to come to a total of Rp. 3.631.000.000.000 (three trillion six hundred and thirty one billion rupiah).

v. Struktur Organisasi

Susunan Dewan Komisaris PT Askrindo (Persero) per 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: KEP-23/MBU/2006 dan Nomor: 8/16/KEP.GBI/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-202/MBU/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-27/MBU/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Pengangkatan Komisaris Independen, serta Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Nomor: SK-161/MBU/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris.

v. Organizational Structure

The Board of Commissioners as at December 31, 2014 and 2013 under the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Governor of Bank Indonesia No. KEP-23 / MBU / 2006 and No. 8/16 / KEP.GBI / 2006 dated February 15, 2006 on dismissal and appointment of members of the commissioners of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and the Decree of the Minister of State Enterprises No. KEP-202 / MBU / 2011 dated August 22, 2011 on Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), and the copy of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-27 / MBU / 2013 dated January 17, 2013 on the Appointment of the Independent Commissioner and the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) number: SK-161 / MBU / 2014 dated February 27, 2014 on the Appointment of Members of the Board of Commissioners

<u>Tahun 2015 / Year 2015</u>	
Dewan Komisaris PT Askrindo (Persero)	
Komisaris Utama	Suradji
Komisaris	Deddy S. Priatna
Komisaris	Kondar Sinaga
Komisaris	Silvester Budi Agung
Komisaris Independen	Siti Agnes Ratnawati

Tahun 2014 / Year 2014

Suradji	<i>Commissioners</i>
Deddy S. Priatna	<i>President</i>
Kondar Sinaga	<i>Commissioner</i>
Silvester Budi Agung	<i>Commissioner</i>
Siti Agnes Ratnawati	<i>Independent Commissioner</i>

<u>Tahun 2015 / Year 2015</u>	
Direksi PT Askrindo (Persero)	
Direktur Utama	Antonius Chandra S.N.
Direktur Teknik	Singgih Hardjanto
Direktur Keuangan	T. Widya Kuntarto
Direktur Umum	Sabdono

Tahun 2014 / Year 2014

Antonius Chandra S.N.	<i>Board of Directors</i>
Singgih Hardjanto	<i>President Director</i>
T. Widya Kuntarto	<i>Technical Director</i>
Sabdono	<i>Finance Director</i>
	<i>General Director</i>

PT Askrindo (Persero) adalah perusahaan asuransi nasional yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Kuasa Pemegang Saham. Jumlah modal sebanyak 4.511.000 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp4.511.000.000.000,- (empat triliun lima ratus sebelas milyar rupiah) dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) was a national insurance company whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, through the Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) as Authorized Shareholders. Total capital as much as 4.511.000 have been issued and fully paid Rp4.511.000.000.000 (four trillion five hundred and eleven billion rupiah) with a par value of Rp1,000,000,- (one million rupiah)

Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia yang dimiliki PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah 99% terdiri dari 462.999 lembar saham @Rp1.000.000 (satu juta rupiah) senilai Rp462.999.000.000 (empat ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

PT Askrindo (Persero) is the Parent Company of PT Reasuransi Nasional Indonesia, Percentage of interest in 99,99% or equivalent : 462.999 unit @ Rp1.000.000 (one million rupiah) in total Rp462.999.000.000,-(four hundred sixty two billion nine hundred and ninety nine million rupiah).

d. Pernyataan atas Kepatuhan Terhadap SAK

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

c. Statement of Compliance with SAK

The Financial Statements have been prepared and presented in accordance with the accounting standards in Indonesia.

2 Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah mata uang Rupiah (Rp) dengan pembulatan dalam rupiah penuh dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan ini, Perusahaan mendefinisikan setara kas adalah kas dan bank, tanpa adanya pembatasan penggunaan atau tujuan tertentu.

Dengan berlakunya PSAK 1 (Revisi 2009) per Januari 2011, tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK 28 (revisi 2011) yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, Perusahaan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian atas penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK tersebut di atas. Semula disusun berdasarkan PSAK 28 (Revisi 2004) tentang Akuntansi Asuransi Kerugian.

b. Aset dan Liabilitas Keuangan

Pada tahun 2011, DSAK IAI menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Penyajian"; PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Ketiga pernyataan ini menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan"; PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Ketiga pernyataan tersebut berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2011) dan PSAK 55 (Revisi 2011), serta PSAK 60 (Revisi 2011), perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari investasi, kas dan setara kas, piutang reasuransi, piutang retrosesi, piutang hasil investasi, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang reasuransi, estimasi klaim retensi sendiri, premi yang belum merupakan pendapatan, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan cadangan pesangon karyawan.

c. Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam beberapa kategori. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan dan upaya, perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan ketika mencatat transaksi aset keuangan.

i. Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi yang diperdagangkan serta reksadana.

2 Summary of Significant Accounting Policies

Summary of significant accounting policies adopted by the Company for the preparation of the financial statements in conformity with Indonesian accounting principles:

a. Basis of the Financial Statements

The financial statements have been prepared on accrual basis. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), and the financial statements are prepared on the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using direct method with the following classifications: operating, investing and financing activities. For cash flows reporting purposes, the Company defines cash equivalents include cash in banks, unrestricted in use and and not designated for certain purpose.

With the pronouncement of PSAK 1 (Revised 2009) in January 2011, on Presentation of Financial Statements, the Company has made necessary adjustments in the presentation of financial statements to conform to the PSAK. Previously the financial statements were prepared on the basis of PSAK 28 (Revisi 2004) on Accounting for Loss Insurance.

b. Financial Assets and Liabilities

In 2011, the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) issued PSAK 50 (Revised 2011), "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and PSAK 55 (Revisi 2011) "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK 60 Financial Instruments: Disclosure. The above statements replace PSAK 50 (Revisi 2006) "Accounting for Investment in Certain Securities" and PSAK 55 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities". Those statements are effective for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 2012.

In the application of PSAK 50 (Revisi 2011), PSAK 55 (Revised 2011), and PSAK 60 (Revised 2011), the Company has to classify the financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Company's financial assets include investments, cash and cash equivalents, reinsurance receivables, retrocession receivables, investment income receivables, other receivables and other assets

The Company's financial liabilities include reinsurance payables, reserve for claims, unearned premiums, other payables, accrued expenses, and allowance for severance payments.

c. Financial Assets

The Company classifies its financial assets into several categories. This classification depends on the designation of the financial assets. Management determines the classification of financial assets at its initial recognition. The Company uses trade-date-accounting in recording financial assets transactions

i. Financial Assets Measured at Fair Value through Profit or Loss

Financial assets measured at fair value through profit and loss are financial assets that are designated for trading. Financial assets classified as trading if acquired primarily for the purpose of sale or repurchased in the near future and there is evidence of current short-term profit taking. Derivatives are classified as assets for trading unless designated and effective as hedging instruments.

The Company's financial assets which are classified as financial assets for trading include shares, bonds for trading and mutual funds.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya. Dalam hal pinjaman yang diberikan dan piutang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan piutang dan pinjaman yang diberikan tersebut. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur pinjaman yang diberikan dan piutang, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, seperti berikut:

- 1) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- 2) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- 3) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang dan diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual; diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi piutang reasuransi, piutang retrosesi, piutang hasil investasi, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

iii. Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- 1) Investasi pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- 2) Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual.
- 3) Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sampai saat ini perusahaan belum memiliki aset keuangan yang memenuhi syarat kategori dimiliki hingga jatuh tempo.

iv. Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

ii. Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determined payment and do not have price quotation in active market. At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value. When loan and receivable are not measured at fair value through profit and loss, the fair value is added with all directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, the entity measures the loan and receivable at fair value, not deducted with transaction costs at sale or other means of disposal, except for the following loans and receivable:

- 1) loans and receivables designated for sale in the near future, classified as for trade, and loans and receivables which at initial recognition classified as financial assets measured at fair value through profit and loss;
- 2) loans and receivables which at initial recognition are designated as available for sale, or
- 3) loans and receivables for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration; they are classified as available-for-sale. They are measured at cost and amortized using effective interest rate.

The Company's financial assets which are classified as loans and receivables include cash and cash equivalents, reinsurance receivables, retrocession receivables, investment income receivables, other receivables and other assets.

iii. Held-to-Maturity Financial Assets

Financial assets classified as held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and have defined maturities, and management has the positive intention and ability to hold the financial assets to maturity, unless:

- 1) Investment at initial recognition designated as financial assets measured at fair value through profit and loss.
- 2) Investment classified by the entity as available for sale.
- 3) Investments which have the definition of loans and receivables.

At initial recognition, financial assets held to maturity are recognized at their fair values plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate. Currently the Company has no financial assets which meet the criteria as held to maturity.

iv. Financial Assets Available for Sale

Investments classified as available for sale are non-derivative financial assets designated as held for a specified period which will be sold for liquidity purposes or to expect changes in interest rates, foreign exchange or those financial assets which are not classified as loans or receivables, investments which are classified as held to maturity or financial assets measured at fair value through profit or loss.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di ekuitas, diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual meliputi obligasi, reksadana dan penyertaan saham.

Pada saat ini perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang memenuhi kategori aset tersedia untuk dijual

d. Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam beberapa kategori

i Liabilitas Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi.

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

ii Liabilitas Keuangan Yang Diukur Dengan Biaya Perolehan Diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain, utang reasuransi, estimasi klaim retensi sendiri, premi yang belum merupakan pendapatan, utang lain - lain, biaya yang masih harus dibayar dan cadangan pesangon karyawan.

e. Nilai Wajar Instrumen Keuangan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran (bid price). Sedangkan untuk aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan (offer price).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi terbaiknya atas jumlah tertentu. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan

When there is impairment in value of financial assets classified as available for sale, the accumulated gains and losses previously recognized in equity are recognized in statement of income. However, interest income which is calculated using the effective interest rate method is recognized in statement of income.

The Company's financial assets classified as available for sale include bonds, mutual funds and investment in stocks.

Currently the Company has no financial assets which meet the criteria as available for sale.

d. Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities into several categories

i Financial Liabilities Measured at Fair Value Through Profit and Loss.

The fair values of financial liabilities measured at fair value through profit loss are financial liabilities that are designated for trading.

Financial liabilities are classified as trading if acquired primarily for purpose of sale or repurchase in the near future and there is evidence of current short-term profit taking. Derivatives are classified as liabilities for trading unless specified and effective as hedging instruments. Currently the Company has no financial liabilities which are classified as financial liabilities for trading.

ii Financial Liabilities Measured at Amortized Cost.

Financial liabilities which are not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss are classified and measured at amortized cost.

Financial liabilities measured at amortized cost include reinsurance payables, reserve for claims, unearned premiums, other payables, accrued expenses, and allowance for severance payments

e. Estimated Fair Value

The fair value of financial instruments held for trading in active market is based on the prevailing market value at the balance sheet date. The fair value used by the Company for the assets owned or obligations to be issued is the bid price. While for assets to be acquired or liability held is the offered price.

The fair value of financial instruments not traded in the market is determined using certain valuation techniques.

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

The preparation of financial statements, in conformity with Indonesian accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of its contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results may differ from those estimates

In preparing the financial statements, the Management has made their best judgments and estimates over certain amounts. Judgments and estimates used in these financial statements are based on the Management's evaluation of relevant facts and circumstances at the date of the financial

pada tanggal laporan keuangan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan perbedaan antara estimasi dan realisasi dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyelesaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

i. Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS).

Perusahaan membuat estimasi atas risiko klaim yang harus dibayar di masa yang akan datang berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini dan yang akan datang. Estimasi klaim retensi sendiri adalah estimasi klaim yang menjadi tanggungan perusahaan, sebelumnya dihitung berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK/06/2003 tanggal 30 September 2003. Mulai tahun 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor PER-09/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu sebagai berikut:

- 1) Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
 - a) nilai estimasi klaim yang masih dalam proses penyelesaian;
 - b) nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported).
- 2) Nilai klaim untuk produk asuransi dan atau produk reasuransi yang masih dalam proses penyelesaian paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, biaya penyelesaian hukum dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penyelesaian klaim.
- 3) Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian reasuransi.
- 4) Dalam hal cadangan klaim dalam proses belum bisa diestimasi, jumlah yang dicadangkan adalah prosentase rata-rata klaim yang dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut.

Penentuan Estimasi Klaim Retensi Sendiri Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, penggunaan metode loss ratio, margin provision of adverse deviation (PAD), tingkat inflasi masa lalu dan masa datang, dan bunga diskonto. Perubahan dalam asumsi yang diterapkan akan berdampak pada beban klaim yang diakui dalam laba (rugi) perusahaan dan mungkin dimasa depan akan direvisi.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS). Nilai tercatat Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS) pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.380.616.866.850,- (Catatan 23).

statements. Actual results could differ from these estimates, and the difference between the estimated and realization is charged or credited to current operations.

Information on the major assumptions which is made concerning the future and major source of other estimated uncertainty at the end of the reporting period, that have significant risks resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period are described below.

i. Estimated Own Retention Claims (EKRS).

The Company makes an estimate of the risk of claims to be paid in the future based on consideration of current conditions and future. Estimated own retention claims are estimated to be borne by the company claims, previously calculated based on the decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 424/KMK/06/2003 September 30, 2003. Starting in 2013 calculated by the Chairman of Bapepam Regulation No. PER-09/BL/2012 dated December 27, 2012 on Guidelines for the Establishment of the Technical Reserves of Insurance and Reinsurance Company is as follows:

- 1) Technical reserves in the form of least claims reserve is calculated by the sum of:
 - a) the estimated value of the claims that are still in the process of completion,
 - b) the estimated value of claims incurred but not reported (IBNR).
- 2) Value of claims for insurance or reinsurance products which are still in the process of completion is estimated at least on the basis of central estimate or best estimate for claims that have occurred and have been reported but are still in the process of completion, together with insurance loss appraisal costs, legal settlement costs and other costs associated with the settlement of claims.
- 3) Value of claims incurred but not reported is estimated as the central or best estimate for claims incurred but not reported claims using the ratio method or one of the triangle methods, together with costs of assessor loss reinsurance assessor.
- 4) In the case of claims reserves in the process can not be estimated, the amount reserved is the average percentage of claims paid to the sum insured for the same line of business in the last financial year multiplied by the sum of the claim.

In determining of Estimated Own Retention Claims the Company relies on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, the use of methods of loss ratio, margin provision of adverse deviation (PAD), the inflation rate of the past and the future, and the discount rate. Changes in the assumptions applied will impact the claims expense recognized in earnings (losses) of the Company and may be revised in the future.

While the Company believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions determined by the Company may materially affect the Estimated Own Claims Retention (EKRS). The carrying value of the Estimated Own Claims Retention (EKRS) on December 31, 2015 amounted to Rp 1.380.616.866.850, - (Note 23).

- ii. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP).
Premi yang belum merupakan pendapatan atau cadangan premi reasuransi adalah pendapatan premi yang ditangguhkan. Untuk reasuransi umum dan jiwa, dihitung dari jumlah pendapatan premi neto (premi bruto dikurang premi retrosesi dan komisi) dikalikan 40% mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK/06/2003 tanggal 30 September 2003. Untuk reasuransi syariah menggunakan prorata harian berdasarkan PMK No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Mulai tahun 2013 dalam perhitungan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, berlaku Peraturan Ketua Bapepam Nomor: PER-09/BL/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berlaku per 1 Januari 2013. Hal hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

- Untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) pada saat ulang tahun polis, Perusahaan harus menghitung CAPYBMP dan CARYBD.
- Cadangan yang dibentuk untuk produk tersebut adalah jumlah cadangan yang lebih besar antara hasil perhitungan CAPYBMP dan CARYBD

Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP)

- CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani.
- Premi bruto sebagaimana dimaksud di atas adalah premi bruto setelah dikurangi komisi langsung.
- Komisi langsung yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah komisi aktual yang dibayarkan perusahaan
- Komisi langsung yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP paling tinggi sebesar 20% dari premi bruto.

Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (CARYBD)

- CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis termasuk risiko bencana (*catastrophic risk*) berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP.
- Rasio klaim dihitung berdasarkan dari klaim dibayar selama periode 1 (satu) tahun dibagi pendapatan premi selama periode 1 (satu) tahun untuk tahun yang sama .
- Rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim selama 3 (tiga) tahun dibagi 3 (tiga).
- Pendapatan premi adalah pendapatan premi selama 1 (satu) tahun terakhir ditambah penurunan CAPYBMP atau dikurangi kenaikan CAPYBMP selama 1 (satu) tahun terakhir.
- Nilai CAPYBMP untuk tiap polis tidak boleh kurang dari nol.
- Dalam hal keseluruhan CAPYBMP atau CARYBD yang dibentuk lebih kecil dari nilai pengembalian premi yang dijanjikan, perusahaan harus menambah nilai cadangan yang dilaporkan menjadi paling sedikit sebesar nilai keseluruhan pengembalian premi yang dijanjikan.

Penentuan Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat pembatalan polis, daan biaya komisi langsung. Perubahan dalam asumsi yang diterapkan akan berdampak pada pendapatan premi yang diakui dalam laba (rugi) perusahaan dan mungkin dimasa depan akan direvisi.

- ii. *Unearned premiums*

Unearned premiums or reserve for reinsurance premiums represent deferred premium revenues. For general and life reinsurances, they are calculated on the basis of total net premium revenues (gross premiums deducted by retrocession premium and commission) multiplied by 40% in accordance with the stipulations in the decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 424/KMK.06/2003 dated 30 September 2003. For syariah reinsurance, daily prorated according to 11/PMK.010/2011 PMK dated January 12, 2011 is used.

Starting in 2013 in the calculation of unearned premium reserves, the regulations of Bapepam Number: PER-09/BL/2012, dated December 27, 2012, on Guidelines for Technical Allowance for Insurance and Reinsurance Companies effective as of January 1, 2013, is applicable. Matters governed by these regulations are as the followings:

- For products with a maturity of up to one (1) year or of more than 1 (one) year terms which their policy conditions and terms are renewable at the next year of the policy, the Company shall calculate CARYBD and CAPYBMP.*
- Reserves are established for these products is the greatest amount of reserves between the calculation results of CARYBD and CAPYBMP*

The reserves of Unearned Premiums (CAPYBMP)

- CAPYBMP is calculated on the basis of the proportion of gross premiums on a daily basis for the uncovered period of insurance.*
- Gross premium referred to above is a gross premium net of direct commissions.*
- Direct commission taken into account in the formation of CAPYBMP is the actual commission paid by the Company*
- Direct commission taken into account in the formation of CAPYBMP is 20% maximum of gross premium.*

Reserve for Uncovered Risk Period (CARYBD)

- CARYBD is calculated for each line of business or products that have similar risk characteristics including disaster risk (catastrophic risk) based on the average claims ratio for three years multiplied by CAPYBMP*
- Claims ratio is calculated based on claims paid during the period of one year divided by premium income over a period of one year for the same year.*
- Average claim ratio is the sum of the claim ratio for 3 (three) years divided by 3 (three).*
- Premium income is the premium income for one year plus decrease or minus increase in CAPYBMP within the last one year.*
- CSAPYBMP value for each policy should not be less than zero.*
- In case of overall CAPYBMP or CARYBD established is less than the value of the promised return of premium, the Company has to add the value of the reserves reported to be at least the same amount as the overall value of the promised return of premium.*

In determining of Unearned Premiums the Company relies on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, cancellation policy, and commission fees directly. Changes in the assumptions applied will impact on premium income recognized in earnings (losses) of companies and may be revised in the future.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP). Nilai tercatat Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP) pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.314.646.332.736,- (Catatan 24).

iii. Aset Retrosesi

a Dalam hal perusahaan melakukan pertanggung ulang atas risiko yang ditanggung, nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggung ulang yang dibentuk Perusahaan dihitung secara konsisten dengan pembentukan cadangan teknis sebagaimana yang diatur.

b Nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggung ulang yang dibentuk Perusahaan disajikan sebagai aset yang merupakan bagian dari tagihan retrosesi dan termasuk dalam aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat kesehatan

Jumlah tercatat aset retrosesi bagian EKRS dalam laporan keuangan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 422.547.076.770. (Catatan 7) , dan jumlah tercatat aset retrosesi bagian PYBMP dalam laporan keuangan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 664.107.711.421. (Catatan. 8)

iv. Tes Kecukupan Liabilitas

Perusahaan menilai setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas reasuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak reasuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas reasuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tanggungan terkait aset takberwujud terkait) tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Untuk melaksanakan tes kecukupan liabilitas (Liability Adequacy Test) tersebut pada akhir periode perusahaan menunjuk Aktuaris Independen untuk melaksanakan perhitungan cadangan teknis dimaksud.

Perubahan kebijakan akuntansi atas perhitungan cadangan teknis tersebut di atas perusahaan tidak melakukan penyajian kembali secara retrospektif, dengan pertimbangan kepraktisan sebagaimana diatur dalam PSAK 25 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan paragraf 05.

Jumlah tercatat hasil test kecukupan liabilitas untuk reasuransi konvensional adalah sebesar Rp64.330.462.487 (catatan 25) di atas estimasi nilai kini arus kas masa depan sesuai kontrak asuransinya. Dan jumlah tercatat hasil test kecukupan liabilitas untuk reasuransi syariah adalah sebesar Rp4.972.245.107 (Catatan 25) di atas estimasi nilai kini arus kas masa depan sesuai dengan kontrak asuransinya.

v. Piutang / Utang Reasuransi dan Retrosesi

Piutang reasuransi adalah saldo piutang premi kepada ceding company/broker yang telah dikompensasi dengan komisi dan komisi keuntungan reasuransi, setelah dikurangi dengan jumlah penyisihan penurunan nilai piutang yang tidak tertagih sampai dengan tahun buku berakhir. Piutang untuk reasuransi umum dibentuk cadangan penyisihannya dengan metode amortisasi dengan mempertimbangkan tingkat kolektibilitasnya, atau ceding company telah tidak beroperasi lagi.

While the Company believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions determined by the Company may materially affect the Estimated Own Claims Retention (EKRS). The carrying value of the Estimated Own Claims Retention (EKRS) on December 31, 2015 amounted to Rp1.314.646.332.736, - (Note 24).

iii. Retrocession Assets

a In the case the Company reschedules the risks covered, the estimated value of the claim recovery for the insured portion established by the Company is calculated consistent with the formation of technical reserves as stipulated.

b Estimated value of the claim recovery value of the reinsured portion established by the Company is presented as an asset as a part of the retrocession receivable and included in the assets allowed in the calculation of the level of financial health.

The carrying amount of retrocession assets of part of the IFRS in the financial statements as of December 31, 2015 amounted to Rp 422.547.076.770. (Note 7), and the carrying amount of retrocession assets of part of PYBMP in the financial statements as of December 31, 2015 amounted to Rp 664.107.711.421. (Note. 8)

iv. Liability Adequacy Test

The Company assesses in each reporting date whether the recognized reinsurance liability is sufficient by using current estimates of future cash flows under the reinsurance contracts. If that assessment shows that the carrying amount of the reinsurance liabilities (net of deferred acquisition costs related to intangible assets associated) is insufficient compared to the estimated future cash flows then the entire deficiency is recognized in profit or loss.

To carry out the liability adequacy test at the end of the period, the Company appointed an Independent Actuary to calculate the technical reserves.

For change in accounting policy for the calculation of technical reserves, the Company do not restate the item retrospectively for practical considerations as set out in PSAK 25 on Changes in Accounting Policies, Changes in Estimates and Errors paragraph 05.

The resulting carrying amount of a liability adequacy test for conventional reinsurance is Rp64,330,462,487 (note 25) above the estimated present value of future cash flows under the contract of insurance. And the resulting carrying amount of the liability adequacy test for sharia reinsurance amounted to Rp4.972.245.107 (Note. 25) above the estimated present value of future cash flows in accordance with insurance contracts.

v. Reinsurance and Retrocession Receivables/Payables

Reinsurance receivables are balance of premium receivables from ceding companies/brokers, deducted with reinsurance commissions and profit commissions, net of allowance for doubtful accounts at the balance sheet date. Allowance for doubtful receivables for general reinsurance is provided taken into account their rates of collectability, or the ceding company is out of operation.

Utang reasuransi adalah utang klaim yaitu jumlah kerugian pasti yang telah disetujui secara teknis tetapi belum dibayar sampai dengan tahun buku berakhir.

Piutang retrosesi umum/jiwa adalah saldo tagihan klaim retrosesi kepada retrocesioner yang sampai dengan tahun buku berakhir belum diterima.

Piutang retrosesi umum/jiwa dibentuk cadangan penyisihannya setelah umur piutang mencapai 5 (lima) tahun atau retrocesioner (reinsurers) telah bangkrut/likuidasi

Utang retrosesi adalah saldo utang premi retrosesi kepada retrocesioner yang telah dikompensasi dengan komisi retrosesi dan komisi keuntungan sampai dengan tahun buku berakhir.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu setiap akhir tahun buku berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai perolehan piutang usaha terdiri atas piutang reasuransi dan piutang retrosesi dikurangi cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagih dan penurunan nilai piutang dengan menggunakan metode suku bunga efektif berdasarkan taksiran umur piutang. Manajemen mengestimasi taksiran umur piutang sampai dengan penyelesaiannya dalam 3 (tiga) periode, yaitu: 1 tahun; 2 tahun; dan 3 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat penyelesaian dapat mempengaruhi umur piutang, dan karenanya biaya penyisihan piutang masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto Piutang Reasuransi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 353.446.457.168,- (Catatan 4), dan nilai tercatat neto Piutang Retrosesi perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 52.209.884.683 (Catatan 5).

vi. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya (cost) untuk menentukan nilai aset tetap, sehingga aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line method), sesuai dengan taksiran masa manfaat yang penetapannya berdasarkan tarif sebagai berikut:

	Masa Manfaat Useful Life (year)	Persentase Percentage	
Bangunan Kantor	20	5,00%	Office building
Renovasi Ruang Kantor	5	20,00%	Office renovation
Kendaraan	5	20,00%	Motor vehicles
Peralatan Komputer	5	20,00%	Computer hardware
Peralatan Non Komputer	5	20,00%	Non-computer
Perabot Kantor	5	20,00%	Office furniture & fixtures

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan.

Reinsurance payables represent total fixed losses, which have been approved technically, but have not been paid at the balance sheet date.

General or life retrocession receivables represent the balance of retrocession claims receivables from retrocessioners, yet to be received at the balance sheet date.

Allowance for doubtful account of general and life retrocession receivables is provided after receivable maturity has reached five (5) years or retrocessioners (reinsurers) are out of operations due to

Retrocession payables represent retrocession premium payables to retrocessioners compensated with retrocession commissions and profit commissions at the balance sheet date.

Allowance for Doubtful Accounts

The Company makes allowance for doubtful accounts at each of financial year end based on an analysis of the collectability of receivables and loans. Allowance established for loans and receivables whenever events or changes in circumstances indicate that the balances will not be collectible. Identification of loans and receivables uncollected requires judgment and estimates. When the expectation is different from the initial estimate, then this difference will impact the carrying value of loans and receivables and uncollectible accounts expense in the period where the change in estimate occurs. Judgments and estimates are the basis for calculating the allowance for impairment of receivables may not tertangihnya using the effective interest method.

The acquisition value of trade receivables comprise of reinsurance receivables and retrocession receivables less allowance for doubtful receivables and allowance for impairment of receivables using the effective interest method over the estimated life of the receivables. Management estimates the useful life of receivables up to its period of settlement within three (3) categories, namely: 1 year; 2 years; and 3 years. This is the age that generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in rates of settlements can affect the aging of receivables, and therefore the future cost allowance may be revised. Reinsurance receivables net carrying value of the Company as of December 31, 2015 amounted to Rp 353.446.457.168,- (Note 4) and the net carrying value of retrocession receivables on December 31, 2015 amounting to Rp 52.209.884.683 (Note 5).

vi. Fixed Assets

The Company uses cost model to determine fixed asset value, therefore fixed assets are recognized at acquisition cost net of accumulated depreciation. Depreciation of fixed assets is calculated using straight-line method, over their useful lives at the following rates:

Cost of maintenance and repairs are recognized as expense as incurred. Expenditures which extend the usefull life of the asset or result in increased future economic benefits such as increased in capacity and improvement in the quality, are capitalized and depreciated in accordance with the respective depreciation rate.

Apabila aset tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

Perusahaan juga menetapkan pengeluaran lebih dari Rp 2.500.000 dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dikapitalisasi.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap bangunan kantor selama 20 (dua puluh) tahun, dan aset tetap lainnya selama 5 (lima) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 166.446.549.273,- (Catatan 18).

vii. Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

viii. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan pada catatan No. 2. b, c dan d)

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in income statement.

The Company also determines that expenditure of more than Rp 2,500,000 with useful life of more than one (1) year is capitalized.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each asset in the Company is determined based on the expected utility of the asset. These estimates are determined based on internal technical evaluation and experience of the Company for similar assets. The useful life of each asset is reviewed periodically and adjusted if forecasts differ from previous estimates due to wear and tear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of the asset. However there is a possibility that the results of future operations can be significantly affected by changes in the amount and period of record of costs resulting from changes in above mentioned factors.

Changes in useful lives of fixed assets and investment properties can affect the amount of depreciation expense recognized and the carrying value of fixed assets.

Cost of acquisition of fixed assets are depreciated using the straight-line method based on their estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of office buildings for 20 (twenty) years, and other fixed assets for 5 (five) years. Those are the estimated useful lives that generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in the level of usage and technological developments could affect the economic useful lives and residual value of assets, and therefore future depreciation charges may be revised. The net carrying value of fixed assets of the Company on December 31, 2015 amounted to Rp 166.446.549.273, - (Note 18).

vii. Impairment of Assets

Testing for impairment is done when there is indication of impairment. Determination of asset value in use requires the estimation of the expected cash flows to be generated from the use of the asset (cash-generating unit) and the sale of assets and the appropriate discount rate to determine the present value.

Although the assumptions used in estimating the value in use of assets are reflected in the financial statements are deemed appropriate and reasonable, but significant changes in the above assumptions will have a material effect on the determination of the amount that can be recovered and consequently an impairment loss will have an impact on results of operations.

viii. Classification of Financial assets and Liabilities

The Company establishes the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions in PSAK No. 55 (Revised 2014) are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with accounting policies as disclosed in Note No. 2. b, c and d)

ix Penilaian instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi perusahaan. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.900.135.181.473, (catatan 4 sampai dengan 17), sedangkan nilai tercatat liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.933.601.411.844,- (Catatan 21 sampai dengan 32.).

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi perusahaan. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.900.135.181.473, (catatan 4 sampai dengan 17), sedangkan nilai tercatat liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.933.601.411.844,- (Catatan 21 sampai dengan 32.).

h. Taksiran Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan PSAK No. 46 (Revisi 2011) tentang "Pajak Penghasilan" ditetapkan:

- i. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode;
- ii. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode;
- iii. Laba kena Pajak atau laba fiscal (rugi pajak atau rugi fiscal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan);
- iv. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
 - 1) Perbedaan temporer dapat dikurangkan;
 - 2) Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - 3) Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal
- v. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau secara substantive telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba-rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

ix *Valuation of financial instruments*

The Company recorded certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components on the measurement of fair value is determined using verifiable objective evidence, the amount of change in fair value of the Company may be different when using different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities that can directly affect the company's profit or loss. The carrying amounts of financial assets at fair value in the statement of financial position at the date of December 31, 2015 amounted to Rp 3.900.135.181.473, (note 4 to 17), while the carrying value of financial liabilities in the statement of financial position on December 31, 2015 amounting to Rp 2,933.601.411.844, - (Notes 21 and 32.).

The Company recorded certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components on the measurement of fair value is determined using verifiable objective evidence, the amount of change in fair value of the Company may be different when using different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities that can directly affect the company's profit or loss. The carrying amounts of financial assets at fair value in the statement of financial position at the date of December 31, 2015 amounted to Rp3.900.135.181.473, (note 4 to 17), while the carrying value of financial liabilities in the statement of financial position on December 31, 2015 amounting to Rp2,933.601.411.844, - (Notes 21 and 32.).

h. *Estimated Income Tax*

Current tax expense is determined based on the taxable income for the related year computed using prevailing tax rates. The PSAK No.46 (Revised 2011) on "Accounting for Income Taxes" specifies:

- i Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.*
- ii Current tax is the amount of income taxes payable (recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period*
- iii Taxable profit (tax loss) is the profit (loss) for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are payable (recoverable).*
- iv Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods arising from:*
 - 1) deductible temporary differences*
 - 2) the carryforward of unused tax losses; and*
 - 3) the carryforward of unused tax credits, when the tax law*
- v Deferred tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax is measured at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the balance sheet date. Deferred tax is charged or credited in the statement of income, except when it relates to items charged or credited directly to equity. Current and

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari:

- i. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas; atau
- ii. Suatu kombinasi bisnis.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laba rugi jika pajak terkait dasar pos yang ada pada periode sama atau berbeda, diakui diluar laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos yang diakui:

- i. Dalam pendapatan komprehensif lain, diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
- ii. Langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Beban (penghasilan) Pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif. Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dapat dilakukan jika mempunyai hak yang dapat dipaksakan secara hukum. Dan bermaksud menyelesaikan dengan dasar neto.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Berdasarkan ketentuan paragraf 100 PSAK 46 revisi 2010 tentang pajak penghasilan dinyatakan bahwa: sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut perusahaan menyajikan penghasilan yang telah dikenakan pajak final dalam laporan laba rugi sebagai unsur pengurang laba sebelum pajak.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat pajak penghasilan badan pada laporan keuangan Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 63.822.388.714,- (Catatan 29)

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinannya besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Jumlah tercatat Aset Pajak Tangguhan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember, 2015, adalah sebesar Rp 28.941.264.631 (Catatan 21.)

deferred tax shall be recognised as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from:

- i a transaction or event which is recognised, in the same or a different period, outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity, or*
- ii a business combination*

Current tax and deferred tax shall be recognised outside profit or loss if the tax relates to items that are recognised, in the same or a different period, outside profit or loss. Therefore, in the same or a different period, current tax and deferred tax that relates to items that are recognised:

- i in other comprehensive income, shall be recognised in other comprehensive income;*
- ii directly in equity, shall be recognised directly in equity.*

The tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities shall be specifically presented in the statement of comprehensive income. Offsetting deferred tax assets and deferred tax can be done if the entity has a legally enforceable right to set off. And to settle them on net basis.

The carrying amount of deferred tax asset is assess at end of reporting period. The carrying amount shall be written down when the taxable profit is not sufficient for compensating part or the entire deferred tax asset. The write-down of the tax asset is reversed when taxable profit is sufficient for compensation.

Under the provisions of paragraph 46 of PSAK 100, revised in 2010, on income tax, it is stated that: in accordance with the tax laws, the income already subjected to final tax is no longer reported as taxable income and all expenses relating to income already subjected to final tax are not deductible. In connection with the provisions the Company presented income already subjected to final tax on the income statement as deduction component of income before tax.

Significant judgment is made in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations that ultimate determination of tax is uncertain throughout the normal course of business. The Company records a liability for corporate income tax is based on estimates of whether there are additional corporate income tax. The carrying amount of corporate income tax in the financial statements as of December 31, 2015 amounted to Rp 63.822.388.714,- (Note 29)

Deferred Tax

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized. Significant estimates by management is required in determining the total deferred tax assets that can be recognized, based on current usage and the level of taxable income and future tax planning strategies.

The carrying amount of deferred tax assets in the financial statements on December 31, 2015, amounted to Rp 28.941.264.631 (Note 21.)

k. Pensiun dan Penyisihan Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mempunyai program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi kriteria yang ditentukan Perusahaan. Luran dana pensiun 100% ditanggung oleh Perusahaan melalui DPLK Manulife dengan Manulife Program Pensiun (MPP). Perusahaan mengakui penyisihan untuk imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi penggantian dengan menghitung secara aktuarial berdasarkan metode projected unit credit, setelah memperhitungkan nilai wajar aset pendanaan ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Manulife. Selain itu, Perusahaan memberikan manfaat tambahan kepada karyawan berupa tunjangan hari tua melalui PT Asuransi Jiwasraya dengan perhitungan pada saat pensiun 60 x gaji dasar pegawai dengan premi ditanggung Perusahaan sebesar 70%.

Pada tahun 2015 entitas mengubah kebijakan akuntansi Imbalan Kerja berdasarkan PSAK 24 Revisi 2013 yaitu mengakui keuntungan (kerugian) aktuarial seluruhnya pada pendapatan komprehensif lain (OCI). Semula berdasarkan PSAK 24 Revisi 2010 menghitung keuntungan/(kerugian) aktuarial yang diakui dalam laba rugi tahun berjalan melalui pendekatan koridor. Sehubungan dengan itu Laporan keuangan tahun 2014 dan 2013 disajikan kembali. (Catatan 48.)

Penentuan beban dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera dalam laporan laba rugi komprehensif dan pada saat terjadi.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat neto atas liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp23.959.764.348,- (Catatan 30), dan beban imbalan kerja sebesar Rp4.423.806.825 (catatan 30)

d. Investasi dan Hasil Investasi

Deposito

Investasi dalam deposito disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai nominal.

Obligasi

Investasi dalam surat berharga obligasi korporat dan obligasi pemerintah disajikan berdasarkan nilai pasar dengan kategori surat berharga yang tersedia untuk dijual. Selisih antara nilai pasar dan harga perolehan yang belum direalisasikan akibat kenaikan (penurunan) harga pasar disajikan sebagai komponen ekuitas.

Saham, Obligasi Yang Diperdagangkan

Investasi dalam saham atau obligasi yang diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

k. Pension and Allowance for Post Employment Benefit

The Company provides defined benefit pension program for all of its employees, who meet the criteria determined by the Company. Pension fund contribution at 100% is paid by the Company through DPLK Manulife with Pension Program Manulife (MPP). The Company recognizes allowance for post employment benefit in accordance with the Labor Law No. 13/2003, which stipulated severance payments, post service benefits and other compensation by calculating on actuary basis using projected unit credit method, after calculating fair value of assets funded to financial institution of pension fund (DPLK) PT Manulife. The Company also provides additional benefit to its employees such as old age allowance through PT Asuransi Jiwasraya, calculated at pension period of 60 x basic employees' salary. The Company pays 70% of the premium.

In 2015 the entity changed its accounting policy based on the Employee Benefits PSAK 24 Revised 2013 which recognizes gains (losses) on actuarial entirely in Other Comprehensive Income (OCI). Previously based on the PSAK 24 Revised 2010, actuarial gains (losses) are recognized in income for the year through the corridor approach. Therefore, the Financial Statements ending 2014 and 2013 are restated. (Notes 48.)

Determination of expenses and liabilities for employees' benefits depend on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increases, annual employee resignation rate, level of disability, retirement age and mortality rates. Actual results that differ from the assumptions determined by the Company are recognized immediately in the statement of comprehensive income as incurred.

While the Company believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions determined by the Company may materially affect the estimated liabilities for employee benefits liabilities and net employee benefits expense. The net carrying value on employee benefits liabilities on December 31, 2015 amounted to Rp23.959.764.348, - (Note 30), and the cost of employment benefit of Rp4.423.806.825 (note 30)

d. Investments and Investment Income

Deposits

Investment in deposits is presented in the financial statements at its fair value.

Bonds

Investments in marketable securities such as corporate bonds and government bonds are presented at market price and classified as marketable securities available for sale. Unrealized gain or loss due to increase or decrease in market value is presented in equity.

Stocks or Bonds For Trading.

Investment in shares or bonds for trading are presented at fair value. Unrealized gain or loss due to increase or decrease in fair value, are recognized in the current statement of income.

Reksadana

Investasi dalam unit penyertaan reksadana penawaran umum dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) disajikan sebesar nilai wajar, yang merupakan nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan. Selisih laba rugi yang timbul dari perbedaan biaya perolehan dengan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor : KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012, tentang Nilai Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana, yang berlaku sejak 1 Januari 2013, antara lain ditetapkan:

- i Ketentuan mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam portofolio Reksa Dana diatur dalam Peraturan Nomor: IV.C.2, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
- ii Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksadana sesuai dengan peraturan Nomor: IV.C.2 lampiran Keputusan ini sejak tanggal 1 Januari 2013.

Perusahaan telah menerapkan ketentuan tersebut di atas untuk pengukuran nilai wajar portofolio reksadana sejak 31 Desember 2012.

Penyertaan Saham

Investasi dalam bentuk penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya).

Hasil Investasi

Hasil investasi dari bunga deposito dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku. Penghasilan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian dividen diterima. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing yang berkaitan dengan investasi dicatat sebagai bagian dari hasil investasi.

g. Pendapatan dan Beban Underwriting

Pendapatan premi reasuransi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan bordero premi/nota premi/*Statement of Account* reasuransi *treaty* dan slip premi reasuransi *facultative* yang disetujui, sedangkan beban premi retrosesi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan *technical statement of account retrosesi treaty* dan slip premi retrosesi *facultative*.

Pendapatan komisi retrosesi dan beban komisi reasuransi dicatat bersamaan dengan pencatatan premi yang bersangkutan.

Klaim reasuransi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan bordero klaim/nota klaim/*Definite Loss Advice (DLA)*, *Statement of Account* reasuransi *treaty* dan DLA reasuransi *facultative* yang disetujui, sedangkan pendapatan klaim retrosesi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan *Definite Loss Advice/Statement of Account retrosesi treaty* dan DLA retrosesi *facultative*.

i. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dan dijabarkan dalam mata uang rupiah sebagai mata uang penyajian dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi (kurs spot). Pada tanggal neraca, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut (kurs penutup). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibukukan atau diakui dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Mutual Funds

Investments in public offering mutual funds and limited investments mutual funds (RDPT) are presented at fair value, which represent value of net assets of the mutual funds at the reporting date. The resulting gains or losses due to difference of acquisition cost and fair value, are reported in the current statement of income.

In reference to the decree of the Head of Bapepam/LK No.: KEP-367/BL/2012, dated 9 July 2012 on fair value of securities in mutual fund portfolio, effective 1 January 2013, which reads:

- i The basis for fair market value of securities in mutual fund portfolio is the provision No.: IV.C.2, attached hereto.
- ii The investment manager of the mutual fund is required to estimate market fair value of securities in the mutual fund portfolio as specified in the provision No.: IV.C.2 attached hereto effective 1 January 2013.

For measuring the fair value of mutual funds since 31 December 2012, the Company has adopted those provisions

Investments in Stocks

Investments in stock of ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable fair values and are intended for long term investments are recognized at acquisition cost (cost method).

Investment Income

Investment income from deposit and bond interests is recognized based on proportionate time and prevailing interest rate. Dividend income is recognized at the time the dividends are declared. The resulting gains or losses in foreign currency related to the investment are recognized as part of investment income

g. Underwriting revenues and expenses

Treaty and *facultative* reinsurance premium revenues are recorded at portfolio of premium/premium note/statement of account of *treaty* reinsurance and *facultative* reinsurance premium notes which have been approved, while *treaty* and *facultative* retrocession premium expenses are recorded in accordance with the statement of account of *treaty* retrocession and *facultative* retrocession premium notes.

Retrocession commission revenues and reinsurance commission expenses are recognized at the time the related premiums are recorded.

Treaty and *facultative* *treaty* reinsurance claims are recognized in accordance with *bordereaux* of claims/claim notes/*Definite Loss Advice (DLA)*, *Statement of Account* of *treaty* reinsurance and DLA *facultative* reinsurance which have been approved, while *treaty* and *facultative* retrocession claim revenues are recorded in accordance with *Definite Loss Advice/Statement of Account* of *treaty* retrocession and DLA *facultative* retrocession.

i. Foreign Currencies Transactions and Balances

The Company's accounting is maintained in Indonesian Rupiah (Rp) as the functional denomination. Transactions involving foreign currencies during the year are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made (spot rate). At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are converted into Rupiah to reflect the rates of exchanges prevailing at that date (the closing rate). The resulting gains or losses are recognized in the statement of income of the current year.

Jenis Mata Uang	2015 Rp	2014 Rp	2013 Rp	Currency
1 Dollar Amerika Serikat/ United States Dollar 1	13.795,00	12.440,00	12.189,00	United States Dollar 1
1 Poundsterling Inggris/ Poundsterling 1	20.451,11	19.370,34	20.096,63	Poundsterling 1
1 Euro/ Euro 1	15.069,68	15.133,27	16.821,44	Euro 1
1 Yen Jepang/ Japanese Yen 1	114,53	104,25	116,17	Japanese Yen 1
1 Dollar Singapura/ Singapore Dollar 1	9.751,19	9.422,11	9.627,99	Singapore Dollar 1
1 Dollar Hongkong/ Hongkong Dollar 1	1.779,83	1.603,68	1.571,92	Hongkong Dollar 1
1 Ringgit Malaysia/ Malaysian Ringgit 1	3.209,65	3.561,93	3.707,69	Malaysian Ringgit 1

j. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
- 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga
- 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). PSAK 7 revisi 2010 par 9.

l. Kebijakan Akuntansi Syariah

i. Waad surplus, Dana tabarru, dan Dana tabungan

Bagi hasil dana peserta adalah distribusi dana peserta kepada pengelola baik hasil investasi maupun dari hasil pengelolaan (surplus underwriting), sesuai akad yang digunakan. Dasar pengaturan bagi hasil dana peserta adalah distribusi dana peserta pada asuransi syariah mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- PSAK Nomor 108, tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21, 50 dan 51.

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Bagi hasil dana peserta diakui pada saat akhir periode laporan.
- b) Bagi hasil dana peserta diukur berdasarkan total hasil investasi dan hasil pengelolaan (surplus underwriting) dana tabarru dengan nisbah yang ditetapkan oleh pengelola.

j. Transactions With Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the 'reporting entity').

i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- 1) has control or joint control over the reporting entity;
- 2) has significant influence over the reporting entity; or
- 3) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- 1) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- 2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- 3) Both entities are joint ventures of the same third party.
- 4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- 5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- 6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- 7) A person identified in (1) (a.) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

l. Sharia Accounting Policies

i. Waad surplus tabarru funds and saving funds

Profit sharing of participants' funds represents participants' fund distribution to the manager either investment income from tabarru fund or management income (surplus underwriting), in accordance with agreements used. The basis for arrangement of profit sharing of participants' funds is the following regulations:

- PSAK 108, on accounting for Syariah Insurance Transactions
- Official religious advices (Fatwa) of Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21, 50 and 51.

1) Recognition and Measurement

- a) Profit sharing of participants' funds are recognized at the end of the reporting period.
- b) Profit sharing of participants' funds are measured based on total investment income and management income (surplus underwriting) of tabarru funds with nisbah determined by the management of sharia.

2) Penyajian

Bagi hasil investasi dana peserta disajikan dalam laporan pendapatan dan beban dana peserta dengan judul bagi hasil ke Perusahaan. Di dalam neraca, bagi hasil dana peserta disajikan dalam item utang dengan judul utang bagi hasil.

3) Pengungkapan

Hal yang diungkapkan terkait dengan bagi hasil dana peserta adalah pembagian dari hasil investasi dana tabarru dan hasil pengelolaan dana tabarru, begitu juga dengan metode akad investasi yang digunakan.

Dasar perhitungan:

$$\text{Waad} = \frac{\text{Tabarru per cedant}}{\text{Total Dana Tabarru}} \times (\text{Surplus underwriting} \times \% \text{ Waad}) + \frac{\text{Hasil Investasi Tabarru}}{\text{Cedant} \times \% \text{ Waad}}$$

(Total Tabarru Fund)

ii. Zakat

Zakat menurut istilah syara adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan hukumnya adalah wajib.

Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 8 Desember 2006 dan tanggal 22 Desember 2006 Dewan Pengawas Syariah memutuskan bahwa untuk menghitung zakat Perusahaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Keuntungan Sebelum Pajak Usaha Syariah x 2,5%

2) Presentation

Profit sharing of participants' fund investments is presented in the statement of revenues and expenses of participants' funds under title of profit sharing to the Company. In the balance sheet, profit sharing of participants' funds is presented as payable account under title of profit sharing payable.

3) Disclosure

Matters disclosed in relation to profit sharing of participants' funds are distribution of investment income from tabarru funds and management income from tabarru funds, as well as investment agreement (akad) method used.

:Basis of calculation

ii. Zakat

Zakat according to syara (the Moslem law) means expending an amount of certain possession given to people, who are entitled to accept under terms determined by syara. Zakat represents one of the third Moslem pillars of faith, which is compulsory.

Based on the decision of the meetings of Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah) of PT Reasuransi Nasional Indonesia on 8 December 2006 and 22 December 2006, it was decided that for calculating Zakat, the Company may use the following formula:

Profit Before Tax from Sharia Business x 2.5%

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-15	31-Des-14	
3 Kas dan Setara Kas	16.633.101.243	2.460.031.933	3. Cash and Cash Equivalents
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Kas			Cash on Hand:
Kas Konvensional	89.632.854	146.813.032	Conventional
Kas Syariah	33.831.977	10.003.384	Syariah
Jumlah Kas	123.464.832	156.816.416	Total Cash
Bank			In Banks
Bank Konvensional			Conventional (in Rupiah)
Pihak Relasi			With Related Parties
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	14.098.352.055	539.571.650	PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan
PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini	162.883.972	468.340.197	PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini
PT Bank BPD Bengkulu	20.028.474	19.990.464	
	14.281.264.501	1.027.902.311	
Bank Konvensional (dalam Valuta Asing)			Conventional (in Foreign Currency)
Pihak Berelasi			With Related Parties
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	1.533.712.925	113.403.662	PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan
(2015): 111.094,64; (2014): USD 9,166.05;			(2015): 111.094,64; (2014): USD 9,166.05;
PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini	212.381.750	627.580.335	PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini
(2015): USD 15.726,53 (2014): USD 50,448.58			(2015): USD 15.726,53 (2014): USD 50,448.58
Jumlah Konvensional	16.027.359.177	1.768.886.308	Total conventional
Bank Syariah (dalam Rupiah)			Syariah Banks (in Rupiah)
Pihak Berelasi			With Related Parties
PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin	100.834.393	127.022.592	PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin
PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin	100.442.416	174.230.406	PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin
Jumlah	201.276.809	301.252.998	Total
Bank Syariah (dalam Valuta Asing)			Syariah Banks (in Foreign Currency)
Pihak Berelasi			With Related Parties
PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin	138.104.780	124.606.130	PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin
(2015): USD 10,011,22;			(2015): USD 10,011,22;
(2014): USD 10,016,56 ;			(2014): USD 10,016,56 ;
PT Bank Mandiri Syariah Ujroh	142.895.645	108.470.082	PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin
Cab. Thamrin (2015): USD 8,719.45			Cab. Thamrin (2015): USD 8,719.45
Cab. Thamrin (2014): USD 8,719.45			Cab. Thamrin (2014): USD 8,719.45
	281.000.425	233.076.212	
Jumlah Bank Syariah	482.277.234	534.329.210	Total in Syariah Banks
Jumlah Bank	16.509.636.411	2.303.215.518	Total in Syariah and Conventional Banks
Jumlah Kas dan Setara Kas	16.633.101.243	2.460.031.933	Total Cash and Cash Equivalents

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-15	31-Des-14	
4 Piutang Reasuransi	353.446.457.168	494.032.395.900	4. Reinsurance Receivables
Piutang Reasuransi Konvensional			Conventional
Piutang Reasuransi Umum			Piutang Reasuransi Umum
Saldo Awal	389.329.172.443	85.694.703.129	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	2.344.334.720.171	1.361.649.109.638	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	2.733.663.892.614	1.447.343.812.767	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	2.462.368.732.398	1.054.866.826.167	Collection in current year
	271.295.160.216	392.476.986.600	Remaining balance
Cadangan Penyisihan Piutang	410.239.941	410.239.941	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	5.213.912.983	2.737.574.216	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	265.671.007.292	389.329.172.443	Balance as at 31 December
Piutang Reasuransi Jiwa			Life Reinsurance Receivable
Saldo Awal	37.042.744.182	56.896.486.826	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	226.698.914.436	188.353.048.573	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	263.741.658.618	245.249.535.399	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	240.062.718.980	208.206.791.217	Collection in current year
	23.678.939.638	37.042.744.182	
Cadangan penyisihan piutang	-	-	Allowance for bad debts
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	23.678.939.638	37.042.744.182	Balance as at 31 December
Jumlah Piutang Reasuransi Konvensional	289.349.946.930	426.371.916.625	Balance of conventional reinsurance receivable
Piutang Reasuransi Syariah			Syariah reinsurance receivable
Piutang Reasuransi Umum			General reinsurance receivable
Saldo Awal	21.444.067.059	17.556.496.729	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	86.955.963.362	58.591.693.472	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	108.400.030.421	76.148.190.201	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	71.821.043.187	54.704.123.142	Collection in current year
	36.578.987.234	21.444.067.059	
Cadangan Penyisihan Piutang	(695.301.032)	(661.334.081)	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	35.883.686.202	20.782.732.978	Balance as at 31 December
Piutang Reasuransi Jiwa			Life reinsurance receivable
Saldo Awal	47.523.909.356	34.644.925.123	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	74.112.834.179	71.241.161.547	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	121.636.743.535	105.886.086.670	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	92.877.253.095	58.362.177.314	Collection in current year
	28.759.490.440	47.523.909.356	
Cadangan Penyisihan Piutang	(546.666.404)	(646.163.059)	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	28.212.824.036	46.877.746.297	Balance as at 31 December
Jumlah Piutang Reasuransi Syariah	64.096.510.238	67.660.479.275	Balance of syariah reinsurance receivable
Jumlah Piutang Reasuransi	353.446.457.168	494.032.395.900	Total reinsurance receivable
	31-Des-15	31-Des-14	
Piutang Reasuransi berdasarkan hubungan transaksi:			Reinsurance Receivable Based on transaction with
Pihak hubungan istimewa - PT Asuransi Kredit Indonesia	23.346.530.639	161.903.742.033	Affiliation - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Pihak ketiga	330.099.926.528	332.128.653.867	Third parties
Jumlah Piutang Reasuransi	353.446.457.168	494.032.395.900	Total Reinsurance Receivable

	31-Des-15	31-Des-14	
5 Piutang Retrosesi	52.209.884.684	34.591.739.372	5. Retrocession Receivables
Piutang Retrosesi Umum - Konvensional			<i>General Retrocession Receivable-Conventional</i>
Saldo Awal	34.007.715.398	6.289.046.384	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	158.091.782.034	104.614.304.738	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	192.099.497.432	110.903.351.122	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	138.751.793.722	75.549.108.138	<i>Collection in current year</i>
	53.347.703.710	35.354.242.984	
Cadangan Penyisihan Piutang	(930.675.801)	(930.675.801)	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(1.015.748.597)	(415.851.785)	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	51.401.279.312	34.007.715.398	Balance as at 31 December
Piutang Retrosesi Jiwa - Konvensional			Life Retrocession Receivable
Saldo Awal	-	-	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	481.106.697	-	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	481.106.697	-	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	67.695.288	-	<i>Collection in current year</i>
	413.411.409	-	
Cadangan Penyisihan Piutang	-	-	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	413.411.409	-	Balance as at 31 December
Jumlah Piutang Retrosesi Konvensional	51.814.690.721	34.007.715.398	<i>Balance Conventional Retrocession Receivable</i>
Piutang Retrosesi Umum - Syariah			Syariah Retrocession Receivable
Saldo Awal	592.250.580	596.705.929	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	14.253.092.130	4.992.564.699	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	14.845.342.710	5.589.270.628	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	14.442.491.263	4.997.020.048	<i>Collection in current year</i>
Jumlah saldo piutang retrosesi umum - Syariah	402.851.447	592.250.580	
Cadangan Penyisihan Piutang	(7.657.484)	(8.226.606)	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	395.193.963	584.023.974	Balance as at 31 December
Piutang Retrosesi Jiwa - Syariah	-	-	Life Retrocession Receivable
Saldo Awal	-	-	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	-	-	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	-	-	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	-	-	<i>Collection in current year</i>
Cadangan Penyisihan Piutang	-	-	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Piutang Retrosesi Jiwa-Syariah	-	-	Syari'a Life Retrocession Receivable
Jumlah Piutang Retrosesi Jiwa + Umum - Syariah	395.193.963	584.023.974	Balance of Syari'a Retrocession Receivable
Jumlah Piutang Retrosesi	52.209.884.684	34.591.739.372	Total Retrocession Receivable
Piutang Retrosesi berdasarkan hubungan transaksi:			<i>Retrocession Receivable Based on transaction with</i>
Phak hubungan istimewa - PT Asuransi Kredit Indonesia	1.019.226.865	-	<i>Affiliation with - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</i>
Pihak ketiga	51.190.657.819	34.591.739.372	<i>Third Parties</i>
Jumlah Piutang Retrosesi	52.209.884.684	34.591.739.372	Total Retrocession Receivable

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-15	31-Des-14	
6 Piutang Ujroh	9.329.946.220	8.895.604.636	6. Ujroh Receivable
7 Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Bagian Retrosesi	422.547.076.770	81.327.573.012	7. Un-earned Premium Retrocession Share

Kelas Bisnis	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-14	Classification of Business
Harta Benda	290.488.305.766	234.470.102.977	56.018.202.789	Properties
Kendaraan Bermotor	22.680.026	22.680.026	-	Motor
Pengangkutan	77.754.598.282	77.383.568.474	371.029.808	Marine Cargo
Rangka Kapal	5.500.842.245	2.982.066.900	2.518.775.345	Marine Hull
Rangka Pesawat	1.530.871.691	1.530.871.691	-	Aviation
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	2.833.902.866	(5.035.629.163)	7.869.532.029	Energy
Rekayasa	6.237.471.441	455.105.755	5.782.365.686	Engineering
Tanggung Gugat	25.005.893.424	24.549.442.398	456.451.026	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	2.181.144.406	875.886.883	1.305.257.523	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	5.996.709.566	3.394.918.622	2.601.790.944	Credit and surety bond
Aneka	4.857.829.001	849.589.731	4.008.239.270	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	136.828.056	(259.100.536)	395.928.592	Life reinsurance
Jumlah PYBMP Bagian Retrosesi	<u>422.547.076.770</u>	<u>341.219.503.758</u>	<u>81.327.573.012</u>	Total Estimated Own Claim Retention

Kelas Bisnis	31-Des-14	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-13	Classification Of Business
Harta Benda	56.018.202.789	40.062.310.711	15.955.892.078	Properties
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor
Pengangkutan	371.029.808	(37.276.006)	408.305.814	Marine Cargo
Rangka Kapal	2.518.775.345	1.610.018.090	908.757.255	Marine Hull
Rangka Pesawat	-	-	-	Aviation
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	7.869.532.029	6.938.615.649	930.916.380	Energy
Rekayasa	5.782.365.686	2.677.699.657	3.104.666.029	Engineering
Tanggung Gugat	456.451.026	203.278.874	253.172.152	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	1.305.257.523	872.062.506	433.195.017	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	2.601.790.944	558.179.710	2.043.611.234	Credit and surety bond
Aneka	4.008.239.270	1.973.389.985	2.034.849.285	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	395.928.592	(47.267.972)	443.196.564	Life reinsurance
Jumlah PYBMP Bagian Retrosesi	<u>81.327.573.012</u>	<u>54.811.011.204</u>	<u>26.516.561.808</u>	Total Estimated Own Claim Retention

		31-Des-14		31-Des-12	
8	Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	664.107.711.421		589.528.484.255	8. Estimated Claim Retrocession Share
Kelas Bisnis	31-Des-15	Kenaikan (penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-14	Classification Of Business	
Harta Benda	541.311.875.628	9.620.091.358	531.691.784.270	Properties	
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor	
Pengangkutan	1.344.201.422	791.068.633	553.132.789	Marine Cargo	
Rangka Kapal	27.677.158.030	(2.229.337.957)	29.906.495.987	Marine Hull	
Rangka Pesawat	-	-	-	Aviation	
Satelit	-	-	-	Satellite	
Energi	6.612.288.099	6.612.288.099	-	Energy	
Rekayasa	76.505.598.710	51.401.279.214	25.104.319.496	Engineering	
Tanggung Gugat	-	(57.150)	57.150	Liability	
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	-	(701.264)	701.264	Personal Accident and health	
Kredit dan Surety Bond	9.342.898.005	7.466.973.202	1.875.924.803	Credit and surety bond	
Aneka	65.636.449	(186.557.515)	252.193.964	Miscellaneous	
Reasuransi Jiwa	1.248.055.078	1.104.180.545	143.874.533	Life reinsurance	
Jumlah Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	<u>664.107.711.421</u>	<u>74.579.227.166</u>	<u>589.528.484.255</u>	Total estimated claim retrocession	

Kelas Bisnis	31-Des-14	Kenaikan (penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-13	Classification Of Business	
Harta Benda	531.691.784.270	327.927.095.767	203.764.688.503	Properties	
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor	
Pengangkutan	553.132.789	(4.376.388.655)	4.929.521.444	Marine Cargo	
Rangka Kapal	29.906.495.987	10.292.938.174	19.613.557.813	Marine Hull	
Rangka Pesawat	-	-	-	Aviation	
Satelit	-	-	-	Satellite	
Energi	-	(80.972.374)	80.972.374	Energy	
Rekayasa	25.104.319.496	(1.953.234.071)	27.057.553.566	Engineering	
Tanggung Gugat	57.150	(1.450.601.991)	1.450.659.141	Liability	
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	701.264	(40.931.257)	41.632.521	Personal Accident and health	
Kredit dan Surety Bond	1.875.924.803	924.803	1.875.000.000	Credit and surety bond	
Aneka	252.193.964	(20.500.957.142)	20.753.151.106	Miscellaneous	
Reasuransi Jiwa	143.874.533	23.073.363	120.801.170	Life reinsurance	
Jumlah Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	<u>589.528.484.255</u>	<u>309.840.946.617</u>	<u>279.687.537.638</u>	Total estimated own claim retention	

Aset retrosesi adalah nilai hak kontraktual neto retrosesional dalam perjanjian retrosesi. Jumlah tersebut menggambarkan bagian dari premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim retensi sendiri yang menjadi hak kontraktual neto retrosesional (lihat catatan 23 dan 24).

Retrocession asset is the net value of contractual right of reinsurer in a retrocession agreement. The amount represents a component of un-earned premium and estimated own claim retention which become the net value of contractual right of retrocessioner (See notes 23 and 24)

		31-Des-15		31-Des-14	
9	Biaya Dibayar Dimuka	43.865.809		82.971.000	9. Prepaid Expenses
		31-Des-15		31-Des-14	
10	Piutang Hasil Investasi	7.708.424.639		5.616.204.594	10. Investment Income Receivable
	Bunga Obligasi	4.253.071.056		3.337.374.202	Bond interest
	Bunga Deposito	3.455.353.584		2.254.501.624	Deposit interest
	Bunga Deposito On Call	-		24.328.767	On call deposit interest
	Jumlah Piutang Hasil Investasi	<u>7.708.424.639</u>		<u>5.616.204.594</u>	Total

Untuk piutang hasil investasi perusahaan tidak melakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan ke Bank pengelola obligasi dan deposito yang terjamin pembayarannya melalui transfer ke rekening entitas.

No allowance for bad debts and impairment is made for investment receivables since they are receivables from banks which manage securities and deposits and their payments are secured.

	31-Des-15	31-Des-14	
11 Piutang Lain-lain	3.428.924.302	3.046.811.585	11. Other Receivables
Piutang Pegawai	3.428.924.302	3.046.811.585	Loans to employees
Jumlah Piutang Lain-lain	<u>3.428.924.302</u>	<u>3.046.811.585</u>	Total other receivables

Piutang pegawai diberikan kepada pegawai untuk keperluan perumahan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 19/KEP/DIR/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Pinjaman Perumahan bagi pegawai PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Untuk piutang pegawai tidak dilakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan yang dijamin pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai.

Loans to employees are provided for housing facilities, given to those employees of minimum service period of one (1) year with credit maturity period of ten (10) years in accordance with the decree of the Company's director No. 19/KEP/DIR/VII/2002 dated 8 July 2002 regarding Housing Facility Loan for Employees of PT Reasuransi Nasional.

No allowance for uncollectible and impairment is made for receivable from employees, since the receivables are secured through deduction from the employees' salaries.

	31-Des-15	31-Des-14	
12 Dana Jaminan	51.000.000.000	47.000.000.000	12. Guarantee Funds
Dana Jaminan Konvensional:			Conventional
PT Bank Jabar Cab. DKI	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Jabar Cab DKI
PT Bank BTN Cab. Ciputat	10.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank BTN Cab Ciputat
PT Bank BNI Cab. Kemang Pratama	-	2.000.000.000	PT Bank BNI Cab Kemang Pratama
PT Bank BNI Cab. Boulevard Hijau	-	5.000.000.000	PT Bank BNI Cab Boulevard Hijau
PT Bank Mandiri Cab. Cikini	5.000.000.000	5.000.000.000	PT Bank Mandiri Cabang Cikini
PT Bank BTN Cab. Kuningan	-	10.000.000.000	PT Bank BTN Cabang Kuningan
PT Bank Sulut	21.000.000.000	-	PT Bank Sulut
	<u>40.000.000.000</u>	<u>36.000.000.000</u>	
Dana Jaminan Syariah:			Sharia
PT Bank Jabar Syariah Cab. Bekasi	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Jabar Syariah Cab Bekasi
PT Bank Mandiri Syariah Cab. Cikini	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Mandiri Syariah Cab Cikini
PT BRI Syariah Cab. Rawamangun	3.000.000.000	3.000.000.000	PT BRI Syariah Cab Rawamangun
Sukuk Retail Indonesia	-	-	Sukuk Retail Indonesia
	<u>11.000.000.000</u>	<u>11.000.000.000</u>	
Jumlah Dana Jaminan	<u>51.000.000.000</u>	<u>47.000.000.000</u>	Total

Tahun 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 diubah menjadi sebagai berikut: perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi. Dana jaminan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp51.000.000.000 dan Rp47.000.000.000, sudah memenuhi ketentuan di atas.

In 2008, in accordance with the regulation of the Minister of Finance No. 158/PMK.010/2008 on second amendment of the decree of the Finance Minister No. 424/KMK.06/2003 on financial healthiness of insurance companies and reinsurance companies, a number of provisions in the decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 was amended by the followings: Insurance and reinsurance companies should have guarantee funds of at least equal to larger than 20% of their required paid-in capital, and the result of 1% of net premiums earned plus 0.25% from reinsurance premium. The guarantee funds as of 31 December 2015 and 2014 of Rp 51.000.000.000 and Rp 47.000.000.000, have exceeded the above requirement.

	31-Des-2015	31-Des-2014	
13 Deposito Biasa	1.820.129.530.788	1.145.671.475.791	13. Deposits
Deposito Berjangka Rupiah			Time deposits (in Rupiah)
Pihak Berelasi (Bank Pemerintah):			With related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab. Wisma Metropolitan	-	6.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab. Wisma Metropolitan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab Cikini	-	26.600.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab Cikini
PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin	1.245.690.323	4.069.383.398	PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin
PT Bank Tabungan Negara	5.000.000.000	-	PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Tabungan Negara Syariah Cab Harmoni	24.750.000.000	21.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara Syariah Cab Harmoni
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Boulevard Hijau	6.000.000.000	9.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Boulevard Hijau
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Tangerang	500.000.000	13.500.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Tangerang
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Kota Wisata	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Kemang Pratama
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Taman Galaxy	15.000.000.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Taman Galaxy
PT Bank Syariah Mandiri Cab Cikini	-	24.500.000.000	PT Bank Syariah Mandiri Cab Cikini
PT Bank Syariah Mandiri Cab Baturaja	500.000.000	-	PT Bank Syariah Mandiri Cab Baturaja
PT Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Kelapa Gading	500.000.000	-	PT Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Kelapa Gading
PT Bank Syariah Mandiri Cab Citereup	500.000.000	-	PT Bank Syariah Mandiri Cab Citereup
PT Bank Syariah Mandiri Cab Klewer Solo	500.000.000	-	PT Bank Syariah Mandiri Cab Klewer Solo
PT Bank Syariah Mandiri Cab Luwuk	3.000.000.000	-	PT Bank Syariah Mandiri Cab Luwuk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cab Abdul Muis	6.500.000.000	19.800.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cab Abdul Muis
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Bekasi	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Bekasi
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Tangerang	1.500.000.000	1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Tangerang
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cianjur	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cianjur
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Jatinegara	-	30.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Jatinegara
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Gubeng Surabaya	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Gubeng Surabaya
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cirebon	4.000.000.000	19.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cirebon
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Suniarja Bandung	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Suniarja Bandung
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Citarum Bandung	1.500.000.000	1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Citarum Bandung
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jemursari	14.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jemursari
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Krian	15.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Krian
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gresik	12.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gresik
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jombang	10.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jombang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manukan	7.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manukan
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bojonegoro	20.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bojonegoro
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mojokerto	20.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mojokerto
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lamongan	12.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lamongan
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tuban	12.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tuban
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sidoarjo	10.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sidoarjo
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Waru	5.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Waru
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kertajaya	5.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kertajaya
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mulyosari	2.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mulyosari
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Diponegoro	2.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Diponegoro
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Rajawali	2.500.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Rajawali
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kusuma Bangsa	2.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kusuma Bangsa
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab HR Muhammad	2.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab HR Muhammad
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kapas Krampung	2.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kapas Krampung
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pamekasan	2.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pamekasan
PT Bank Aceh Cab Utama	7.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Utama
PT Bank Aceh Cab Sinabang	3.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Sinabang
PT Bank Aceh Cab Lhoksumawe	3.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Lhoksumawe
PT Bank Aceh Cab langsa	2.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab langsa
PT Bank Aceh Cab Takengon	3.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Takengon
PT Bank Aceh Cab Meulaboh	3.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Meulaboh
PT Bank Aceh Cab Kutacane	3.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Kutacane
PT Bank Aceh Cab Sigli	3.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Sigli
PT Bank Aceh Cab Blang Pidie	3.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Blang Pidie
PT Bank Aceh Cab Bireuen	3.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Bireuen
PT Bank Aceh Cab Sabang	2.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Sabang
PT Bank Aceh Cab Tapak Tuan	2.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Tapak Tuan
PT Bank Aceh Cab Syar. Banda Aceh	5.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Syar. Banda Aceh

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Aceh Cab Syar. LhokSumawe	3.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Syar. LhokSumawe
PT Bank Aceh Cab Syar. Medan	1.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Syar. Medan
PT Bank Aceh Cab Singkil	1.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Singkil
PT Bank Aceh Cab Bener Moriah	1.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Bener Moriah
PT Bank Aceh Cab Blang Keujeren	2.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Blang Keujeren
PT Bank Aceh Cab Calang	3.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Calang
PT Bank Aceh Cab Jeuram	1.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Jeuram
PT Bank Aceh Cab Jantho	2.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Jantho
PT Bank Aceh Cab Kuala Simpang	3.500.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Kuala Simpang
PT Bank Aceh Cab Meureudu	2.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Meureudu
PT Bank Aceh Cab Subulussalam	2.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Subulussalam
PT Bank Aceh Cab Idi	2.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Idi
PT Bank Aceh Cab Medan	5.000.000.000	-	PT Bank Aceh Cab Medan
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jelambar	-	49.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jelambar
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Karawang	-	10.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Karawang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banda Aceh	-	5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banda Aceh
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blankejeren	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blankejeren
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kota Cane	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kota Cane
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kuala Simpang	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kuala Simpang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Subusalam	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Subusalam
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksumawe	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksumawe
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sigli	-	1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sigli
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Takengon	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Takengon
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Langsa	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Langsa
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Singkil	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Singkil
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sabang	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sabang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Idi Rayeruk	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Idi Rayeruk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bireueun	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bireueun
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blangpidie	-	1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blangpidie
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksukon	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksukon
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Meulaboh	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Meulaboh
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sukoharjo	-	3.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sukoharjo
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banjarnegara	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banjarnegara
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonogiri	-	4.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonogiri
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Majenang	-	4.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Majenang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sudirman	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sudirman
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonosobo	-	5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonosobo
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bantul	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bantul
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Magelang	-	15.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Magelang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gombong	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gombong
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purwokerto	-	6.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purwokerto
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wates	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wates
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cilacap	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cilacap
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purbalingga	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purbalingga
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Slamet Riyadi	-	4.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Slamet Riyadi
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Boyolali	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Boyolali
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cik Ditiro	-	10.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cik Ditiro
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Katamso	-	10.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Katamso
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kebumen	-	4.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kebumen
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purworejo	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purworejo
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bitung	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bitung
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tondano	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tondano
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manado	-	5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manado
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kotamubago	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kotamubago
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tahuna	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tahuna
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pinaesaan	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pinaesaan
Jumlah Deposito Pada Pihak Berelasi	311.995.690.323	362.219.383.398	
Pihak Tidak Berelasi:			With un-related parties
PT Bank DKI Syariah Cab Pondok Indah	1.000.000.000	-	PT Bank Sulawesi Selatan
PT Bank QNB Indonesia	5.000.000.000	-	

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Sumatera Utara (SUMUT)	45.000.000.000	85.000.000.000	PT Bank Sumatera Utara (SUMUT)
PT Bank Maluku	193.500.000.000	45.000.000.000	PT Bank Maluku
PT Bank Lampung	110.000.000.000	15.000.000.000	PT Bank Lampung
PT Bank Sulawesi Utara	150.000.000.000	125.000.000.000	PT Bank Sulawesi Utara
PT Bank Sulawesi Utara Cab Kota Mubago	-	5.000.000.000	PT Bank Sulawesi Utara Cab Kota Mubago
PT Bank Sumatera Selatan Babel	-	3.000.000.000	PT Bank Sumatera Selatan Babel
PT Bank Bukopin	55.000.000.000	5.000.000.000	PT Bank Bukopin
PT Bank Bukopin Syariah Cab Salemba	43.250.000.000	18.750.000.000	PT Bank Bukopin Syariah Cab Salemba
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	110.000.000.000	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Artaloka	46.250.000.000	29.250.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Artaloka
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Kemayoran	2.000.000.000	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Kemayoran
PT Bank Woori Saudara Indonesia	30.000.000.000	-	PT Bank Woori Saudara Indonesia
PT Bank Kalimantan Barat	25.000.000.000	-	PT Bank Kalimantan Barat
PT Bank Nusa Tenggara Barat	35.000.000.000	-	PT Bank Nusa Tenggara Barat
PT Bank Mega Syariah Cab Kuningan	15.000.000.000	-	PT Bank Mega Syariah Cab Kuningan
PT Bank Panin Syariah Cab Slipi	51.500.000.000	-	PT Bank Panin Syariah Cab Slipi
PT Bank Panin Syariah	-	5.000.000.000	PT Bank Panin Syariah
PT Bank BTPN Syariah	8.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank BTPN Syariah
PT Bank Jabar Banten Cab Depok	15.000.000.000	30.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Cab Depok
PT Bank Jabar Banten Cab Banjar	-	2.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Cab Banjar
PT Bank Jabar Banten Cab Buah Batu	-	2.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Cab Buah Batu
PT Bank Jabar Banten Cab Soreang	-	2.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Cab Soreang
PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi	37.000.000.000	45.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Serang	7.500.000.000	2.500.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Serang
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Cirebon	3.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Cirebon
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Subang	500.000.000	500.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Subang
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Pelajar Pejuang, Bandung	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Pelajar Pejuang, Bandung
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Kramat Jati	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Kramat Jati
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Depok	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Depok
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sukajadi, Bandung	500.000.000	500.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sukajadi, Bandung
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Braga, Bandung	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Braga, Bandung
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sumber	500.000.000	500.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sumber
PT Bank Sumatera Barat (Nagari)	239.000.000.000	104.000.000.000	PT Bank Sumatera Barat (Nagari)
PT Bank Jambi	120.000.000.000	100.000.000.000	PT Bank Jambi
PT Bank Jambi Cab. Singkut	-	1.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Singkut
PT Bank Jambi Cab. Muara Mubago	-	2.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Muara Mubago
PT Bank Jambi Cab. Utama	-	1.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Utama
PT Bank Jambi Cab. Muara Bulin	-	1.500.000.000	PT Bank Jambi Cab. Muara Bulin
PT Bank Jambi Cab. Tebo	-	1.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Tebo
PT Bank Jambi Cab. Sutomo	-	1.500.000.000	PT Bank Jambi Cab. Sutomo
PT Bank Jambi Cab. Sungai Bengkal	-	1.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Sungai Bengkal
PT Bank Jambi Cab. Rimbo Bujang	-	1.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Rimbo Bujang
PT Bank Jambi Cab. Sabak	-	1.500.000.000	PT Bank Jambi Cab. Sabak
PT Bank Jambi Cab. Sarolangun	-	1.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Sarolangun
PT Bank Jambi Cab. Syariah	-	2.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Syariah
PT Bank Jambi Cab. Sungai Rengas	-	1.000.000.000	PT Bank Jambi Cab. Sungai Rengas
PT Bank Jambi Cab. Kuala Tungkal	-	1.500.000.000	PT Bank Jambi Cab. Kuala Tungkal
PT Bank Jambi Cab. Bangko	-	1.500.000.000	PT Bank Jambi Cab. Bangko
PT Bank Jambi Cab. Sungai Penuh	-	1.500.000.000	PT Bank Jambi Cab. Sungai Penuh
PT Bank Kaltim	-	10.000.000.000	PT Bank Kaltim
PT Bank Bengkulu Cab. Panorama	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Panorama
PT Bank Bengkulu Cab. Karang Tinggi	-	1.500.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Karang Tinggi
PT Bank Bengkulu Cab. Bintuhan	-	3.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Bintuhan
PT Bank Bengkulu Cab. Utama	-	5.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Utama
PT Bank Bengkulu Cab. Mega Mall	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Mega Mall
PT Bank Bengkulu Cab. Kayu Kuniyit	-	1.500.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Kayu Kuniyit
PT Bank Bengkulu Cab. Taj Kemuning	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Taj Kemuning
PT Bank Bengkulu Cab. Tes	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Tes
PT Bank Bengkulu Cab. Sukaraja	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Sukaraja
PT Bank Bengkulu Cab. Kepahing	-	4.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Kepahing

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Bengkulu Cab. Curuk	-	3.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Curuk
PT Bank Bengkulu Cab. Arga Makmur	-	4.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Arga Makmur
PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Minggu	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Minggu
PT Bank Bengkulu	50.000.000.000	5.000.000.000	PT Bank Bengkulu
PT Bank Bengkulu Cab. Tais	-	1.500.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Tais
PT Bank Bengkulu Cab. Pagar Dewa	-	2.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Pagar Dewa
PT Bank Bengkulu Cab. Muamara Aman	-	3.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Muamara Aman
PT Bank Bengkulu Cab. Bukit Kaba	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Bukit Kaba
PT Bank Bengkulu Cab. Manna	-	5.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Manna
PT Bank Bengkulu Cab. Lubuk Pinang	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Lubuk Pinang
PT Bank Bengkulu Cab. Penarik	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Penarik
PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Tengah	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Tengah
PT Bank Bengkulu Cab. Pino Raya	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Pino Raya
PT Bank Bengkulu Cab. Muko Muko	-	3.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Muko Muko
PT Bank Bengkulu Cab. Ipuh	-	1.000.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Ipuh
PT Bank Bengkulu Cab. Sudmana	-	1.500.000.000	PT Bank Bengkulu Cab. Sudmana
Jumlah Deposito Pada Pihak Tidak Berelasi	1.404.500.000.000	721.000.000.000	
Total Deposito Rupiah	1.716.495.690.323	1.083.219.383.398	
Deposito Berjangka (dalam mata uang asing)			Time Deposits (in Foreign Exchange)
Pihak Berelasi			With Related Parties
PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin	2.443.340.465	2.644.092.393	PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin
(2014): USD 212,548.00;			(2013): USD 483,941.59; (2014): USD 1,400,000.00;
PT Bank Syariah Mandiri Cab Cikini	4.138.500.000	-	
(2015): USD 300,000; (2014): USD 0;			
PT Bank Syariah Mandiri Cab W Metropolitan	-	17.416.000.000	
(2015): USD 0,- (2014): USD 1,400,000.00;			
PT Bank Bukopin	4.138.500.000	7.464.000.000	
(2015): USD 300,000.00 ;(2014): USD 600,000.00;			
Pihak Ketiga			With Un-related Parties
PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Arthaloka	73.113.500.000	14.928.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Cab Arthaloka
(2015): USD 5,300,000 (2014): USD1.200.000;			(2013) : USD 2.925.000; (2012): USD 875.000;
Jumlah Deposito Dalam Valuta Asing	83.833.840.465	42.452.092.393	
	1.800.329.530.788	1.125.671.475.791	
Deposito On Call:			Deposit on Call
Pihak Berelasi :			With Related Parties
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	15.000.000.000	-	PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan
PT Bank Mandiri Tbk Cab Cikini	4.800.000.000	-	PT Bank Mandiri Tbk Cab Cikini
	19.800.000.000	-	
Pihak Tidak Berelasi :			With Un-related Parties
PT Bank Bukopin Tbk Cab MT. Haryono	-	20.000.000.000	PT Bank Bukopin Tbk Cab MT. Haryono
Jumlah Deposito	1.820.129.530.788	1.145.671.475.791	Total Deposit

		31-Des-15	31-Des-14			
14 Saham Yang Diperdagangkan		72.930.428.377	43.856.462.215		14. Stocks Held for Trading	
31-Des-15						
Emiten:	Jumlah Saham/Number of Securities	Nilai Perolehan/Cost	Keuntungan (Kerugian) /Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2015	Emitent:	
Sugih Energy Tbk	3.764.600	1.566.073.600	203.288.400	1.769.362.000	Sugih Energy Tbk	
Bukit Asam Tbk	18.500	292.300.000	(208.587.500)	83.712.500	Bukit Asam Tbk	
Ratu Prabu Energy Tbk	2.839.739	1.590.253.840	(1.107.498.210)	482.755.630	Ratu Prabu Energy Tbk	
Semen Batu Raja Tbk	23.000	12.880.000	(6.187.000)	6.693.000	Semen Batu Raja Tbk	
Darma Henwa Tbk	8.415.500	639.578.000	(218.803.000)	420.775.000	Darma Henwa Tbk	
Intiagri Resources Tbk	17.927.500	19.182.425.000	46.701.137.500	65.883.562.500	Intiagri Resources Tbk	
Trub Alam Tbk	151.710	7.585.501	(1)	7.585.500	Trub Alam Tbk	
Bank Central Asia Tbk	58	661.200	(22.800)	638.400	Bank Central Asia Tbk	
Bakrie & Brother Tbk	6.964	348.200	-	348.200	Bakrie & Brother Tbk	
Island Concepts Tbk	3.510.000	1.516.320.000	607.230.000	2.123.550.000	Island Concepts Tbk	
Kertas Basuki R Tbk	78	3.900	-	3.900	Kertas Basuki R Tbk	
Multipolar Tbk	33	23.925	(15.444)	8.481	Multipolar Tbk	
Steady Safe Tbk	641.733	62.889.834	(5.133.864)	57.755.970	Steady Safe Tbk	
Sigma Gold Inti Perkasa Tbk	4.780.077	2.141.475.085	(47.801.359)	2.093.673.726	Sigma Gold Inti Perkasa Tbk	
Bank CIMB Niaga Tbk	6	6.000	(2.430)	3.570	Bank CIMB Niaga Tbk	
Jumlah	42.079.498	27.012.824.085	45.917.604.292	72.930.428.377		<i>Total</i>

31-Dec-14

Emiten:	Jumlah Saham/Number of Securities	Nilai Perolehan/Cost	Keuntungan (Kerugian) /Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2014	Emitent:	
Sugih Energy Tbk	5.400.000	2.246.400.000	59.400.000	2.305.800.000	Sugih Energy Tbk	
Bank Tabungan Negara Tbk	450.000	436.500.000	105.750.000	542.250.000	Bank Tabungan Negara Tbk	
Bukit Asam Tbk	18.500	292.300.000	(61.050.000)	231.250.000	Bukit Asam Tbk	
Ratu Prabu Energy Tbk	4.272.739	2.392.733.840	(1.961.187.201)	431.546.639	Ratu Prabu Energy Tbk	
Semen Batu Raja Tbk	23.000	12.880.000	(4.117.000)	8.763.000	Semen Batu Raja Tbk	
Darma Henwa Tbk	8.415.500	639.578.000	(218.803.000)	420.775.000	Darma Henwa Tbk	
Intiagri Resources Tbk	17.927.500	19.182.425.000	16.644.637.576	35.827.062.576	Intiagri Resources Tbk	
Trub Alam Tbk	151.467	7.573.351	-	7.573.351	Trub Alam Tbk	
Trub Alam Tbk	243	12.150	-	12.150	Trub Alam Tbk	
Bank Central Asia Tbk	48	547.200	82.800	630.000	Bank Central Asia Tbk	
Bakrie & Brother Tbk	6.964	348.200	-	348.200	Bakrie & Brother Tbk	
Island Concepts Tbk	3.510.000	1.516.320.000	56.160.000	1.572.480.000	Island Concepts Tbk	
Kertas Basuki R Tbk	100.978	5.048.900	-	5.048.900	Kertas Basuki R Tbk	
Multipolar Tbk	33	23.925	3.630	27.555	Multipolar Tbk	
Steady Safe Tbk	641.733	62.889.834	-	62.889.834	Steady Safe Tbk	
Sigma Gold Inti Perkasa Tbk	5.000.077	2.240.035.112	199.964.888	2.440.000.000	Sigma Gold Inti Perkasa Tbk	
Bank CIMB Niaga Tbk	6	6.000	(990)	5.010	Bank CIMB Niaga Tbk	
Jumlah	45.918.788	29.035.621.512	14.820.840.703	43.856.462.215		<i>Total</i>

	31-Des-14	31-Des-13	
15 Obligasi Yang Diperdagangkan	276.650.530.623	359.871.673.254	15. Bonds for Held for Trading

31-Des-15						
Emiten	Maturity	Rating	Nilai Perolehan/Cost	Un-realized Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2014	Emitent
Indosat	27-Jun-22	AA	2.000.000.000	(149.910.000)	1.850.090.000	Indosat
Adhi Karya	3-Jul-19	A	11.000.000.000	(1.204.052.000)	9.795.948.000	Adhi Karya
Astra Sedaya Finance	21-Feb-17	AA	15.000.000.000	(297.045.000)	14.702.955.000	Astra Sedaya Finance
Pegadaian	14-Feb-19	AA	45.877.500.000	4.353.360.000	50.230.860.000	Pegadaian
Bank Exim	20-Dec-16	AAA	15.267.500.000	(532.505.000)	14.734.995.000	Bank Exim
Bank Tabungan Negara	5-Jun-22	AA	45.444.500.000	2.559.720.000	48.004.220.000	Bank Tabungan Negara
Bank Bukopin	3-Jun-19	A	19.445.000.000	(1.087.466.000)	18.357.534.000	Bank Bukopin
Bank Nagari	26-Jun-19	A	5.000.000.000	(272.580.000)	4.727.420.000	Bank Nagari
Bank Permata	19-Dec-19	AA	5.000.000.000	(172.810.000)	4.827.190.000	Bank Permata
BCA Finance	12-Jun-17	AA	2.000.000.000	(62.122.000)	1.937.878.000	BCA Finance
Bumi Serpong Damai	5-Jun-18	AA	5.000.000.000	(266.560.000)	4.733.440.000	Bumi Serpong Damai
PLN	24-Okt-42	AAA	57.251.368.000	(6.136.030.263)	51.115.337.738	PLN
Hutama Karya	28-Jun-20	A	2.000.000.000	(187.658.000)	1.812.342.000	Hutama Karya
Garuda Indonesia	29-Jun-20	A	5.000.000.000	(387.775.000)	4.612.225.000	Garuda Indonesia
Sarana Multi Griya Financial	21-Mar-20	AA	3.000.000.000	(290.367.000)	2.709.633.000	Sarana Multi Griya Financial
INDON 43	15-Mei-43	-	15.693.682.000	5.706.542.885	21.400.224.885	INDON 43
Sukuk	28-Mar-23	A	21.347.000.000	(17.459.085.000)	3.887.915.000	Sukuk
Syariah				-	-	Sharia
Indosat	27-Jun-22	AA	1.000.000.000	(50.060.000)	949.940.000	Indosat
Adhi Karya	3-Jul-19	A	1.000.000.000	(26.628.000)	973.372.000	Adhi Karya
Adira Dinamika M. Finance	27-Sept-15	AA	1.000.000.000	(2.012.000)	997.988.000	Adira Dinamika M. Finance
PBS004	15-Feb-37	-	5.937.000.000	(1.802.220.000)	4.134.780.000	PBS004
Sukuk	28-Mar-23	A	13.219.000.000	(3.064.757.000)	10.154.243.000	Sukuk
			297.482.550.000	(20.832.019.378)	276.650.530.623	

31-Des-14						
Emiten	Maturity	Rating	Nilai Perolehan/Cost	Un-realized Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2014	Emitent
Indosat	27-Jun-22	AA	2.000.000.000	(280.000.000)	1.720.000.000	Indosat
Adhi Karya	03-Jul-19	A	11.000.000.000	(1.722.194.000)	9.277.806.000	Adhi Karya
Adira Dinamika M. Finance	27-Sep-15	AA	5.000.000.000	(59.000.000)	4.941.000.000	Adira Dinamika M. Finance
Astra Sedaya Finance	21-Feb-12	AA	15.000.000.000	(447.000.000)	14.553.000.000	Astra Sedaya Finance
Pegadaian	11-Okt-21	AA	45.877.500.000	(2.323.285.000)	43.554.215.000	Pegadaian
Bank Exim	20-Dec-16	AAA	15.267.500.000	110.320.000	15.377.820.000	Bank Exim
Bank Tabungan Negara	05-Jun-22	AA	45.444.500.000	(6.832.500.000)	38.612.000.000	Bank Tabungan Negara
Bank Bukopin	03-Jun-19	A	19.445.000.000	(2.155.000.000)	17.290.000.000	Bank Bukopin
FR0062	15-Apr-42	-	45.012.500.000	(10.362.500.000)	34.650.000.000	FR0062
FR0064	15-Mei-28	-	9.890.000.000	(1.390.000.000)	8.500.000.000	FR0064
FR0065	15-Mei-33	-	48.539.500.000	(4.027.500.000)	44.512.000.000	FR0065
Bank Nagari	26-Jun-19	A	5.000.000.000	(170.205.000)	4.829.795.000	Bank Nagari
Bank Permata	19-Dec-19	AA	5.000.000.000	(98.500.000)	4.901.500.000	Bank Permata
BCA Finance	12-Jun-17	AA	2.000.000.000	(94.000.000)	1.906.000.000	BCA Finance
Bumi Serpong Damai	05-Jun-18	AA	5.000.000.000	(327.810.000)	4.672.190.000	Bumi Serpong Damai
PLN	24-Okt-42	BBB	57.251.368.000	(6.618.764.200)	50.632.603.800	PLN
Hutama Karya	28-Jun-20	A	2.000.000.000	-	2.000.000.000	Hutama Karya
Garuda Indonesia	29-Jun-20	A	5.000.000.000	(285.000.000)	4.715.000.000	Garuda Indonesia
Sarana Multi Griya Financial	21-Mar-20	AA	3.000.000.000	(311.838.000)	2.688.162.000	Sarana Multi Griya Financial
Syariah						Sharia
INDON 43	15-Mei-43	-	15.693.682.000	(609.200.546)	15.084.481.454	INDON 43
PBS004	15-Feb-37	-	25.727.000.000	(7.165.600.000)	18.561.400.000	PBS004
Sukuk	28-Mar-23	A	21.347.000.000	(4.454.300.000)	16.892.700.000	Sukuk
			409.495.550.000	(49.623.876.746)	359.871.673.254	

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-15	31-Des-14	
16 Reksadana	165.222.566.483	52.424.428.148	16. Mutual funds
Reksadana Konvensional			<i>Conventional Mutual Fund</i>
PT Danareksa	5.077.073.021	5.091.936.110	PT Danareksa
Mandiri Manajer Investasi	9.283.208.225	3.941.187.059	Mandiri Manajer Investasi
Mega Capital	9.637.082.077	4.505.608.550	Mega Capital
Trimegah	1.084.300.000	1.337.990.000	Trimegah
PT Batavia Prosperindo Asset Manajement	1.872.165.315	2.202.294.427	PT Batavia Prosperindo Asset Manajement
AAA Asset Manajement	1.965.868.028	2.370.717.810	AAA Aset Manajement
Sucorinvest Asset Manajement	1.747.112.369	2.018.137.467	Sucorinvest Asset Manajement
BNI Asset Manajement	106.984.026.000	-	BNI Aset Manajement
GMT Aset Manajement	1.720.525.377	1.961.528.101	GMT Aset Manajement
Henan Puthirai	2.457.355.375	2.104.684.062	Henan Puthirai
Millenium Danatama Indonesia	15.171.883.834	16.234.923.638	Millenium Danatama Indonesia
PNM Investment Manajement	1.570.103.815	1.957.574.934	PNM Investment Management
Jumlah Reksadana	<u>158.570.703.436</u>	<u>43.726.582.158</u>	Total Investment in Mutual Fund
Reksadana Syariah			<i>Sharia mutual funds</i>
PNM Ekuitas Syariah	718.636.020	1.002.136.055	PNM Ekuitas Syariah
PNM Amanah Syariah	1.984.215.237	2.027.730.565	PNM Amanah Syariah
Mandiri Investama Atraktif Syariah	3.949.011.790		Mandiri Investama Atraktif Syariah
Mandiri Manajemen Investasi	-	4.662.376.964	Mandiri Manajemen Investasi
Mega Investama Capital	-	1.005.602.406	Mega Investama Capital
	<u>6.651.863.047</u>	<u>8.697.845.990</u>	
Total Reksadana Konvensional dan Syariah	<u>165.222.566.483</u>	<u>52.424.428.148</u>	Total Mutual Fund - Conventional and Sharia
17 Penyertaan Saham	1.423.700.000	1.423.700.000	17. Stock Investment
PT Asuransi Maipark Indonesia	723.700.000	723.700.000	PT Asuransi Maipark Indonesia
Dana Konsorsium Asuransi Khusus	700.000.000	700.000.000	Special insurance consortium fund
Jumlah Penyertaan Saham	<u>1.423.700.000</u>	<u>1.423.700.000</u>	Total stock investment

Penyertaan saham kepada PT Asuransi Maipark Indonesia dilakukan sehubungan dengan Surat Edaran (SE) Departemen Keuangan - Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE-604/LK/2003 tanggal 11 November 2003, kepada semua perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk menjadi pemegang saham PT Asuransi Maipark Indonesia minimal sebesar 0,5% dari total nilai investasi per tanggal 31 Desember 2002.

Dana Konsorsium Asuransi Risiko Khusus merupakan pembayaran dana klaim kepada Konsorsium Asuransi Risiko Khusus dalam rangka partisipasi perusahaan-perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil dalam bentuk penutupan asuransi pasar-pasar tradisional.

Pengukuran atas penyertaan saham tersebut di atas adalah dengan metode biaya (cost method).

Investments in shares of PT Asuransi Maipark Indonesia was made in conformity with the circular of the Ministry of Finance – Directorate General of Financial Institution No. SE-604/LK/2003 dated 11 November 2003 that all general insurance and reinsurance companies be shareholders of PT Asuransi Maipark Indonesia at minimum 0.5% of total investment value as of 31 December 2002.

Special Insurance Risk Consortium Funds represents payments of claim funds to Special Insurance Risk Consortium in relation to participation of general insurance and reinsurance companies to assist small societies by giving them services in form of insurance coverage for traditional markets.

Cost method is used for measuring the stock investment.

		31-Des-15		31-Des-14		
		166.446.549.273		51.038.355.682		18. Fixed Assets
31-Des-15						
Aset	Saldo Awal (Beginning Balance)	Penambahan (Addition)	Pengurangan (Deduction)	Penurunan Nilai (Impairment)	Saldo Akhir (Ending Balance)	Assets
Biaya Perolehan:						Cost
Tanah	31.262.092.800	108.957.907.200	-	-	140.220.000.000	Lands
Bangunan	15.902.116.577	6.241.124.539	-	-	22.143.241.116	Buildings
Renovasi	41.261.788	-	-	-	41.261.788	Renovation
Kendaraan	3.792.353.333	-	741.253.333	-	3.051.100.000	Vehicles
Komputer	6.749.001.068	1.207.500.000	1.070.695.808	-	6.885.805.260	Computers
Peralatan Kantor	22.748.070	869.499.000	-	-	892.247.070	Office equipment
Perabot Kantor	1.689.404.556	633.870.630	-	-	2.323.275.186	Office furniture and fixture
Software	1.973.429.261	200.035.102	-	-	2.173.464.363	Software
Jumlah	61.432.407.453	118.109.936.471	1.811.949.141	-	177.730.394.782	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.789.982.843	805.417.467	-	-	2.595.400.310	Buildings
Renovasi	33.697.127	7.564.661	-	-	41.261.788	Renovation
Kendaraan	2.784.771.810	540.440.000	741.253.333	-	2.583.958.477	Vehicles
Komputer	3.631.779.645	897.708.814	1.070.695.808	-	3.458.792.651	Computers
Peralatan Kantor	22.748.070	14.491.650	-	-	37.239.720	Office equipment
Perabot Kantor	1.183.202.928	221.337.240	-	-	1.404.540.168	Office furniture and fixture
Software	947.869.347	214.783.047	-	-	1.162.652.394	Software
Jml Ak Penyusutan	10.394.051.771	2.701.742.879	1.811.949.141	-	11.283.845.509	
Nilai Buku	51.038.355.682				166.446.549.273	Net Book Value
31-Des-14						
Aset	Saldo Awal (Beginning Balance)	Penambahan (Addition)	Pengurangan (Deduction)	Penurunan Nilai (Impairment)	Saldo Akhir (Ending Balance)	Assets
Biaya Perolehan:						Cost
Tanah	31.262.092.800	-	-	-	31.262.092.800	Lands
Bangunan	12.500.052.480	3.402.064.097	-	-	15.902.116.577	Buildings
Renovasi	41.261.788	-	-	-	41.261.788	Renovation
Kendaraan	3.760.853.333	31.500.000	-	-	3.792.353.333	Vehicles
Komputer	5.217.308.706	1.531.692.362	-	-	6.749.001.068	Computers
Peralatan Kantor	22.748.070	-	-	-	22.748.070	Office equipment
Perabot Kantor	1.477.812.856	211.591.700	-	-	1.689.404.556	Office furniture and fixture
Software	1.845.593.058	127.836.203	-	-	1.973.429.261	Software
Jumlah	56.127.723.091	5.304.684.361	-	-	61.432.407.453	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.157.121.359	632.861.484	-	-	1.789.982.843	Buildings
Renovasi	25.444.770	8.252.358	-	-	33.697.127	Renovation
Kendaraan	2.174.551.810	610.220.000	-	-	2.784.771.810	Vehicles
Komputer	2.866.637.424	765.142.221	-	-	3.631.779.645	Computers
Peralatan Kantor	22.748.070	-	-	-	22.748.070	Office equipment
Perabot Kantor	1.048.747.551	134.455.377	-	-	1.183.202.928	Office furniture and fixture
Software	754.784.487	193.084.860	-	-	947.869.347	Software
Jml Ak Penyusutan	8.050.035.471	2.344.016.300	-	-	10.394.051.771	
Nilai Buku	48.077.687.620				51.038.355.682	Net Book Value

Biaya penyusutan aset tetap per 31 Desember 2015, dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.701.742.879,- dan Rp 2.344.016.300,- dibukukan di beban usaha.

Depreciation expenses of fixed assets for the year ended 31 December 2015, and 2014 are Rp2.701.742.879,- and Rp 2.344.016.300,- respectively and charged as operating expenses.

Seluruh aset tetap berupa Gedung Kantor dan Perlengkapan Elektronik, telah diasuransikan terhadap risiko: gempa bumi, kebakaran, angin topan, banjir, pencurian, huru-hara, kerusakan, pemogokan, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 92.736.268.000,- dan Rp 41.078.500.000,-, untuk masing-masing tahun 2015 dan 2014. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan notulen rapat RUPSLB tentang Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Usaha Konvensional Nomor 15/RR/DIR tanggal 26 Juli 2011, Perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari PT PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp 35.000.000.000. Pencatatan tersebut berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, dengan laporannya nomor: 417.1.6.3.11.05.11 perihal Penilaian Aset Perusahaan dengan hasil penilaian berdasarkan nilai pasar (*market value*) sebesar Rp 35.078.800.000.

Dalam tahun 2015, entitas melakukan revaluasi aset tetap (tanah dan bangunan/gedung) untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan. Penilaian aset tersebut dilakukan oleh Perusahaan Jasa Penilai Publik Bidang Properti "Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi" dengan hasil penilaian untuk tanah (luas : 1.710 m²) sebesar Rp 140.220.000.000,- dan Gedung Kantor beserta sarana pelengkap (luas : 3.575 m²) sebesar Rp 17.837.000.000,-. Jumlah hasil revaluasi Rp 158.057.000.000,- sejumlah tersebut sudah termasuk dalam nilai tercatat aset tetap per 31 Desember 2015.

All fixed assets such as Office Building and Electronic Equipment, has been insured against the risks: earthquake, fire, typhoon, flood, theft, riots, strikes, with total coverage of Rp 92,736,268,000, - and Rp 41,078,500,000, -, for the years 2015 and 2014. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

For increase in paid-in capital, base on minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders No 15/RR/DIR dated July 26, 2011, on increase in authorized and paid-in capital of conventional business, The Company has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company PT PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp 35,000,000,000. The valuation is made by the public appraisal company Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan with the report number 417.1.6.3.11.05.11, based on current market value on 20 May 2011 of Rp 35,078,800,000

In 2015, the entity revalued its fixed assets (land and buildings) for tax purposes by the Finance Minister Regulation; 191/PMK.010/2015 on Revaluation of Assets to Interest Taxation. The asset valuation conducted by the Field Services Company Property Appraisal "Toto Suharto & Partners Bekasi branch" with the results of the assessment for the land (area: 1,710 m²) of Rp 140,220,000,000, - and Office Building along with complementary means (area: 3,575 m²) of Rp 17,837,000,000, - Total revaluation Rp 158,057,000,000, - a number that is already included in the carrying value of fixed assets per December 31, 2015.

	31-Des-15	31-Des-14	
19 Aset Pajak Tangguhan	28.941.264.631	8.437.393.123	19. Deferred Tax Asset
Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan per 31 Desember 2015 dan 2014 serta pendapatan (beban) pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut:			The breakdown of deferred tax assets (liabilities) as of 31 December 2015 and 2014 and deferred tax benefits (expenses) for the years ended 31 December 2015 and 2014:

	31-Des-15	(Beban)/Manfaat Pajak Tangguhan/Deferred Tax Expense (benefit)	31-Des-14	
Cadangan IBNR	27.482.935.963	20.691.556.180	6.791.379.783	Allowance for IBNR claims
Imbalan Pasca Kerja	1.105.951.706	(998.837.257)	2.104.788.963	Post employment benefit
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	769.058.895	(618.069.907)	1.387.128.802	Receivable impairment
Penyusutan	(1.349.569.950)	(1.226.739.581)	(122.830.369)	Depreciation
Surplus Revaluasi Gedung	931.102.868	931.102.868	-	Revaluation Surplus Building
	28.939.479.482	18.779.012.303	10.160.467.179	
Penurunan Nilai Aset Pajak Tangguhan Syariah	-	1.785.149	(1.723.074.056)	Decrease in value of deferred tax assets
Saldo Akhir Aset Pajak Tangguhan	28.941.264.631	18.780.797.451	8.437.393.123	Sharia Deferred Tax Asset

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

In September 2008, Law No. 7 of 1983 on "Income Tax" was revised for the fourth time with the Law No. 36 of 2008. The revised Law stipulates changes in corporate tax rate from a progressive rate to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 and thereafter

	31-Des-15	31-Des-14	
20 Aset Lain-lain	4.225.693.667	1.164.139.612	20. Other Assets
Terdiri dari :			
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)	27.000.000.000	27.000.000.000	Fund Management Contracts
(Cadangan Penyisihan KPD)	(27.000.000.000)	(27.000.000.000)	Allowance for Doubtful KPD
Corp. Member Rancamaya	165.000.000	165.000.000	Corp. Member Rancamaya
Corp. Member Bogor Raya	120.000.000	120.000.000	Corp. Member Bogor Raya
Corp. Member Gunung Geulis	110.000.000	110.000.000	Corp. Member Gunung Geulis
Corp. Member Emeraldalda	60.000.000	60.000.000	Corp. Member Emeraldalda
Lain-lain	3.770.693.667	709.139.612	Miscellaneous
Jumlah Aset Lain-lain	<u>4.225.693.667</u>	<u>1.164.139.612</u>	Total

Perusahaan menggunakan Manajer Investasi untuk mengelola dana melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dalam bentuk saham, obligasi, kas bank dan lain-lain.

Saldo Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) per 31 Desember 2015, yang telah direklasifikasi ke Aset lain-lain (non admitted asset) adalah sebesar Rp 27.000.000.000,-, disebabkan karena Kontrak Pengelolaan Dana telah jatuh tempo tetapi perusahaan kesulitan mencairkan dana.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas sampai dengan tahun 2015 perusahaan telah melakukan amortisasi seluruh nilai kontrak pengelolaan dana sebesar 100% atau Rp 27.000.000.000,-

Rincian kontrak pengelolaan dana adalah sebagai berikut :

	31-Des-15	31-Des-14
Rincian Kontrak Pengelolaan Dana:		
PT Synergy Asset Management (SYAM)	12.000.000.000	12.000.000.000
PT Euro Capital Pregrine Securities (PT EPS)	15.000.000.000	15.000.000.000
	<u>27.000.000.000</u>	<u>27.000.000.000</u>

Perkembangan terakhir tahun 2015 penagihan dana investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) adalah sebagai berikut:

PT Synergy Asset Management telah menegaskan bahwa sudah ada calon pembeli atas aset-aset miliknya, dan apabila sudah terealisasi maka hasil penjualannya akan segera dibayarkan kepada seluruh investor secara proporsional, termasuk kepada Perusahaan. Sampai akhir tahun 2015 tetap belum dapat dicairkan/dialihkan menjadi aset investasi.

PT Eurocapital Peregrine Securities merupakan tanggungjawab Saudara Djody Haryanto, seperti halnya PT Falcon Asset Resources Management (FARM) dan akan diselesaikan oleh yang bersangkutan secara bersamaan dengan tagihan dana investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) kepada PT Falcon Asset Resources Management (FARM) termasuk juga 10 (sepuluh) jaminan tanah/sertifikat di atas.

Sampai dengan akhir tahun 2015 tetap belum dapat dicairkan/dialihkan menjadi aset investasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas sampai dengan tahun 2015 perusahaan telah melakukan amortisasi seluruh nilai Kontrak Pengelolaan Dana sebesar 100% atau Rp 27.000.000.000.

The Company uses an Investment Manager to manage the funds through Funds Management Contracts in the form of stocks, bonds, cash and banks and others.

Balance of Investment in Fund Management Contracts as at December 31, 2015, which has been reclassified to other assets (non admitted assets) is Rp 27.000.000.000,-, because the Fund Management Contracts have expired but the Company finds it difficult to withdraw funds.

Taking into account the above conditions until 2015, the Company has to amortize the entire value of the fund management contracts at 100% or Rp 27 billion,-

Fund management contract details are as follows:

Breakdown of Fund Management Contracts:
 PT Synergy Asset Management (SYAM)
 PT Euro Capital Pregrine Securities (PT EPS)

The latest information on investment fund billing of Fund Management Contract (KPD) is as follow:

PT Synergy Asset Management has confirmed that there are existing potential buyers for its assets, and when it has been realized the sales proceeds will be paid proportionately to all investors, including to the Company. Until the end of 2014 the investment no payment has been made.

PT Eurocapital Peregrine Securities is the responsibility of Djody Haryanto as well as PT Falcon Asset Resources Management (FARM) and will be settled by the relevant person together with collection on investment funds under the Funds Management Contract (KPD) from PT Falcon Asset Resources Management (FARM), including 10 (ten) land sites as guarantee. By end of 2015 no settlement has been made.

Considering the situations, by 2015 the Company amortized the entire amount, Rp 27.000.000.000, of the KPD.

	31-Des-15	31-Des-14	
21 Utang Klaim Reasuransi	72.045.599.652	49.091.973.566	21. Reinsurance Claim Payables
Utang Klaim Reasuransi Konvensional			<i>Conventional Reinsurance Claim Payable</i>
Utang Klaim Reasuransi Umum			<i>General Reinsurance Claim Payable</i>
Saldo Awal	36.261.637.474	17.714.163.765	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	1.060.376.560.875	725.853.664.225	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	1.096.638.198.349	743.567.827.990	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	1.065.734.182.788	707.306.190.516	<i>Settlement in current year</i>
	<u>30.904.015.561</u>	<u>36.261.637.474</u>	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	<i>Impairment</i>
Saldo per 31 Desember	<u>30.904.015.561</u>	<u>36.261.637.474</u>	Balance as at 31 Desember
Utang Klaim Reasuransi Jiwa			<i>Life Reinsurance Claim Payable</i>
Saldo Awal	9.604.182.136	3.498.325.474	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	179.980.395.407	141.527.789.096	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	189.584.577.543	145.026.114.570	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	155.884.223.733	135.421.932.434	<i>Settlement in current year</i>
	<u>33.700.353.810</u>	<u>9.604.182.136</u>	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	<i>Impairment</i>
Saldo per 31 Desember	<u>33.700.353.810</u>	<u>9.604.182.136</u>	Balance as at 31 Desember
Jumlah Utang Klaim Reasuransi Konvensional	<u>64.604.369.371</u>	<u>45.865.819.610</u>	Total conventional reinsurance payable
Utang Klaim Reasuransi Syariah			<i>Syariah Reinsurance</i>
Utang Klaim Reasuransi Umum			<i>General Reinsurance</i>
Saldo Awal	2.220.877.704	3.559.588.721	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	47.123.971.650	28.013.746.005	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	49.344.849.354	31.573.334.726	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	43.777.059.068	29.352.457.022	<i>Settlement in current year</i>
	<u>5.567.790.286</u>	<u>2.220.877.704</u>	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	<i>Impairment</i>
Saldo per 31 Desember	<u>5.567.790.286</u>	<u>2.220.877.704</u>	Balance as at 31 Desember
Utang Klaim Reasuransi Jiwa			<i>Life Reinsurance</i>
Saldo Awal	1.005.276.253	1.171.066.129	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	121.084.522.586	96.482.883.463	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	122.089.798.839	97.653.949.592	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	120.216.358.843	96.648.673.339	<i>Settlement in current year</i>
	<u>1.873.439.996</u>	<u>1.005.276.253</u>	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	<i>Impairment</i>
Saldo per 31 Desember	<u>1.873.439.996</u>	<u>1.005.276.253</u>	Balance as at 31 Desember
Jumlah Utang Klaim Reasuransi Syariah	<u>7.441.230.281</u>	<u>3.226.153.956</u>	Total syariah reinsurance
Jumlah Utang Klaim Reasuransi	<u>72.045.599.652</u>	<u>49.091.973.566</u>	Total Reinsurance Claim Payable
Hutang Klaim Reasuransi umum - konvensional	30.904.015.561	36.261.637.474	General Reinsurance Claim Payable-Conventional
Hutang Klaim Reasuransi jiwa - konvensional	33.700.353.810	9.604.182.136	Life Reinsurance Claim Payable-Conventional
Hutang Klaim Reasuransi umum - syariah	5.567.790.286	2.220.877.704	General Reinsurance Claim Payable-Syari'a
Hutang Klaim Reasuransi jiwa - syariah	1.873.439.996	1.005.276.253	Life Reinsurance Claim Payable-Syari'a
Jumlah hutang klaim reasuransi	<u>72.045.599.652</u>	<u>49.091.973.566</u>	Total Reinsurance Claim Payable
Jumlah hutang tersebut di atas menunjukkan nilai wajar hutang reasuransi setelah dikurangi cadangan Penurunan nilai.			<i>The total debt shows the fair value of debt net of allowance for impairment</i>
Hutang klaim reasuransi berdasarkan hubungan transaksi:			<i>Reinsurance Claim Payable Based on transaction with</i>
Phak hubungan istimewa PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)			<i>Affiliation with PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</i>
Pihak ketiga	72.045.599.652	49.091.973.566	<i>Third party</i>
Jumlah hutang klaim reasuransi	<u>72.045.599.652</u>	<u>49.091.973.566</u>	Total reinsurance claim payable
Hutang reasuransi per 31 Desember 2015 seluruhnya merupakan utang kepada pihak ketiga.			<i>All of reinsurance claim payable at Desember, 31, 2015 were to third parties</i>

	31-Des-15	31-Des-14	
22 Utang Premi Retrosesi	55.437.660.098	28.658.729.156	22. Retrocession Premium Payable
Utang Premi Retrosesi Umum - Konvensional			General Retrocession Payable Balance-Conventional
Saldo Awal	27.505.527.767	5.371.041.078	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	155.839.417.098	242.926.414.761	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	183.344.944.865	248.297.455.839	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	130.442.482.984	220.791.928.072	Settlement in current year
Saldo Utang Premi Retrosesi	52.902.461.881	27.505.527.767	General Retrocession Payable Balance
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	
Saldo per 31 Desember	52.902.461.881	27.505.527.767	Balance as at 31 Desember
Utang Premi Retrosesi Jiwa - Konvensional			Premium Life Retrocession Payable-Conventional
Saldo Awal	55.155.321	812.844.168	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	481.203.217	(438.992.192)	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	536.358.538	373.851.976	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	1.455.556	318.696.655	Settlement in current year
	534.902.983	55.155.321	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	534.902.983	55.155.321	Balance as at 31 Desember
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Konvensional	53.437.364.864	27.560.683.088	Total Conventional Retrocession Payable
Retrosesi Syariah			Sharia retrocession
Utang Premi Retrosesi Umum			General Premium Retrocession Payable
Saldo Awal	912.535.553	1.043.502.021	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	24.118.363.023	13.728.859.826	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	25.030.898.576	14.772.361.847	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	23.216.113.857	13.859.826.294	Settlement in current year
Saldo sebelum penurunan nilai	1.814.784.719	912.535.553	Balance Before Impairment
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	1.814.784.719	912.535.553	Balance as at 31 Desember
Utang Premi Retrosesi Jiwa - Syariah			Premium Life Retrocession Payable-Sharia
Saldo Awal	185.510.515	73.369.189	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	90.672.718	113.772.054	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	276.183.233	187.141.243	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	90.672.718	1.630.728	Settlement in current year
	185.510.515	185.510.515	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	185.510.515	185.510.515	Balance as at 31 Desember
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Syariah	2.000.295.235	1.098.046.069	Total sharia retrocession payable
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Konven & Syariah	55.437.660.098	28.658.729.156	Total retrocesion premium payable Convent & Sharia
	31-Des-15	31-Des-14	
Hutang premi retrosesi berdasarkan jenis:			Premium Retrocession payable based on:
Hutang premi retrosesi umum - konvensional	52.902.461.881	27.505.527.767	General Premium Retrocession payable-Conventional
Hutang prem retrosesi jiwa - konvensional	534.902.983	55.155.321	Life Premium Retrocession Payable-Conventional
Hutang premi retrosesi umum - syariah	1.814.784.719	912.535.553	General Premium Retrocession Payable-Sharia
Hutang premi retrosesi jiwa - syariah	185.510.515	185.510.515	Lide Premium Retrocession Payable-Sharia
Jumlah hutang premi retrosesi	55.437.660.098	28.658.729.156	Total Retrocession Premium Payable

	31-Des-15		31-Des-14	
23 Estimasi Klaim Retensi Sendiri	1.380.616.866.849		1.114.816.724.377	23. Estimated Own Claim Retention
Kelas Bisnis	Saldo Balance as at 31-Des-15	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Saldo Balance as at 31-Des-14	Classification of Business
Harta Benda	824.344.397.721	124.068.513.401	700.275.884.320	Properties
Kendaraan Bermotor	25.799.492.395	8.733.063.061	17.066.429.334	Motor
Pengangkutan	48.714.216.141	(210.950.444)	48.925.166.585	Marine Cargo
Rangka Kapal	109.849.613.938	(4.396.571.137)	114.246.185.075	Marine Hull
Rangka Pesawat	2.073.220.046	(126.477.729)	2.199.697.775	Aviation
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	20.735.924.395	14.129.990.695	6.605.933.700	Energy
Rekayasa	120.125.772.785	42.494.453.280	77.631.319.505	Engineering
Tanggung Gugat	5.793.440.076	343.237.797	5.450.202.279	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	3.618.377.838	1.713.419.028	1.904.958.810	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	74.341.404.263	21.772.124.744	52.569.279.519	Credit and surety bond
Aneka	37.504.212.388	2.428.229.618	35.075.982.770	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	107.716.794.863	54.851.110.158	52.865.684.705	Life reinsurance
Jumlah	<u>1.380.616.866.849</u>	<u>265.800.142.473</u>	<u>1.114.816.724.377</u>	Total
Kelas Bisnis	Saldo Balance as at 31-Des-14	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Saldo Balance as at 31-Des-13	Classification of Business
Harta Benda	700.275.884.320	292.352.456.084	407.923.428.236	Properties
Kendaraan Bermotor	17.066.429.334	581.566.254	16.484.863.080	Motor
Pengangkutan	48.925.166.585	10.690.352.377	38.234.814.208	Marine Cargo
Rangka Kapal	114.246.185.075	28.197.071.538	86.049.113.537	Marine Hull
Rangka Pesawat	2.199.697.775	375.203.733	1.824.494.042	Aviation
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	6.605.933.700	(890.232.968)	7.496.166.668	Energy
Rekayasa	77.631.319.505	11.665.597.691	65.965.721.814	Engineering
Tanggung Gugat	5.450.202.279	(10.404.185.825)	15.854.388.104	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	1.904.958.810	67.259.916	1.837.698.894	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	52.569.279.519	21.821.818.673	30.747.460.846	Credit and surety bond
Aneka	35.075.982.770	(7.673.149.176)	42.749.131.946	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	52.865.684.705	21.279.919.044	31.585.765.661	Life reinsurance
Jumlah	<u>1.114.816.724.377</u>	<u>368.063.677.341</u>	<u>746.753.047.036</u>	Total

	31-Des-15		31-Des-14	
24 Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	1.314.646.332.737		915.415.412.784	24. Un-Earned Premium
Kelas Bisnis	Saldo/Balance as at 31-Dec-2015	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Saldo/Balance as at 31-Dec-2014	<i>Classification of Business</i>
Harta Benda	556.526.587.293	315.771.903.328	240.754.683.965	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	53.149.236.663	21.052.780.675	32.096.455.988	<i>Motor</i>
Pengangkutan	114.140.339.310	99.059.450.085	15.080.889.225	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	53.679.068.197	9.611.995.636	44.067.072.561	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	5.501.161.254	4.113.374.855	1.387.786.399	<i>Aviation</i>
Satelit	153.707.565	153.707.565	-	<i>Satellite</i>
Energi	18.697.334.671	(3.134.951.620)	21.832.286.291	<i>Energy</i>
Rekayasa	53.091.136.194	18.008.184.457	35.082.951.737	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	38.047.357.905	34.093.601.089	3.953.756.816	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	13.145.704.562	(8.209.425.969)	21.355.130.531	<i>Personal Accident and health</i>
Kredit dan Surety Bond	194.280.164.563	(27.999.846.003)	222.280.010.566	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	71.361.595.527	(280.200.979)	71.641.796.506	<i>Miscellaneous</i>
Reasuransi Jiwa	142.872.939.032	(63.009.653.166)	205.882.592.198	<i>Life reinsurance</i>
Jumlah Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	<u>1.314.646.332.737</u>	<u>399.230.919.953</u>	<u>915.415.412.784</u>	<i>Total Un-earned Premium</i>
Kelas Bisnis	Saldo/Balance as at 31-Des-14	Kenaikan/Penurunan Increase/decrease	Saldo/Balance as at 31-Des-13	<i>Classification of Business</i>
Harta Benda	240.754.683.965	126.657.367.387	114.097.316.578	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	32.096.455.988	11.145.590.510	20.950.865.478	<i>Motor</i>
Pengangkutan	15.080.889.225	1.706.913.743	13.373.975.482	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	44.067.072.561	17.392.403.667	26.674.668.893	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	1.387.786.399	1.177.150.223	210.636.176	<i>Aviation</i>
Energi	-	-	-	<i>Satellite</i>
Satelit	21.832.286.291	16.234.776.716	5.597.509.575	<i>Energy</i>
Rekayasa	35.082.951.737	10.976.657.980	24.106.293.757	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	3.953.756.816	2.193.114.043	1.760.642.773	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	21.355.130.531	17.388.219.320	3.966.911.211	<i>Personal Accident and health</i>
Kredit dan Surety Bond	222.280.010.566	175.510.986.261	46.769.024.305	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	71.641.796.506	16.296.320.963	55.345.475.543	<i>Miscellaneous</i>
Reasuransi Jiwa	205.882.592.198	11.025.688.292	194.856.903.906	<i>Life reinsurance</i>
Jumlah Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	<u>915.415.412.784</u>	<u>407.705.189.107</u>	<u>507.710.223.677</u>	<i>Total un-earned premium</i>

25 Test Kecukupan Liabilitas (LAT) Reasuransi Konvensional

Berikut adalah hasil perhitungan LAT yang dilakukan oleh KIS Aktuaria (PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria) untuk reasuransi konvensional, dengan laporan Nomor : 3154/KIS/LA/2016 tanggal 13 Januari 2016, secara keseluruhan total cadangan yang tersedia dibandingkan dengan total nilai kini arus kas masa depan adalah sebagai berikut:

No	Uraian / Description	Cadangan Neto / Net Reserve	Nilai Kini Arus Kas Masa Depan Berdasarkan Kontrak Asuransi/ Present Value of Future Cash Flows Based on Insurance Contract	Tes Kecukupan Liabilitas/Liability Adequate Test (LAT)	Description	No
A	Konvensional				Conventional	A
1	Cadangan Atas PYBMP	776.603.138.753	618.096.026.580	158.507.112.173	Reserve for Unearned Premium	1
2	Cadangan Premi	85.187.966.298	69.357.704.294	15.830.262.003	Reserve for Premium	2
3	Cadangan Klaim	679.956.688.769	789.963.600.457	(110.006.911.689)	Reserve for Claim	3
	Jumlah Konvensional	1.541.747.793.819	1.477.417.331.332	64.330.462.487	Total	
B	Syariah				Syariah	B
1	Cadangan Atas PYBMP	27.222.085.094	23.086.067.857	4.136.017.237	Reserve for Unearned Premium	1
2	Cadangan Premi	3.086.065.822	1.322.334.427	1.763.731.395	Reserve for Premium	2
3	Cadangan Klaim	36.552.466.661	37.479.970.187	(927.503.526)	Reserve for Claim	3
	Jumlah Syariah	66.860.617.577	61.888.372.471	4.972.245.106	Total	
	Total	1.608.608.411.396	1.539.305.703.803	69.302.707.593	Total	

Data dari tabel tersebut dia atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan total cadangan teknis untuk reasuransi konvensional dan syariah yang tersedia lebih besar dari nilai kini arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransinya, sehingga cadangan yang ada telah mencukupi.

25. Liability Adequacy Test

Here are the results of calculations of LAT as performed by KIS Actuary (PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria) for conventional reinsurance, with their report number: 3154/KIS/LA/2016 tanggal 13 January 2016 the overall total reserves available compared to the total present value of future cash flows is as follows:

The data in the above table showed that overall total technical reserves for conventional and syariah reinsurance available is greater than the present value of future cash flows under the contract of insurance, so that there has been sufficient reserves.

	31-Des-15	31-Des-14
26 Beban Yang Masih Harus Dibayar	22.321.813.643	18.372.387.572
Beban Umum	22.321.813.643	18.372.387.572
Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan, SDM dan umum, seperti: merit prestasi, jasa produksi karyawan dan beban SDM dan umum lainnya.		

26. Accrued Expenses

General Expenses

Accrued expenses relates to employees, human resources and general administrative, such as: merit system, employees' production bonus and other human resources expenses as well as other general expenses.

	31-Des-15	31-Des-14
27 Utang Pajak	36.819.905.407	8.042.015.629
Terdiri dari :		
PPH Pasal 21	-	-
PPH Pasal 23	-	-
PPH Pasal 25 *)	36.819.905.407	8.042.015.629
Jumlah Utang Pajak	36.819.905.407	8.042.015.629

27. Taxes Payable

Income tax article 21
 Income tax article 23
 Income tax article 25
Total

*) Perhitungan Pajak Penghasilan:

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba (rugi) dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

Income tax

Reconciliation between profit (loss) before income tax based on statement of income and fiscal profit (loss):

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	2014	
1) Laba Sebelum Pajak Penghasilan:	295.190.037.649	149.775.204.311	<i>Profit before income tax:</i>
Koreksi Pajak:			<i>Tax Correction</i>
2) Penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final:			<i>Income after tax</i>
a. Hasil Investasi	(177.103.894.570)	(90.288.427.596)	<i>Investment income a.</i>
b. Zakat	(819.964.322)	(575.224.089)	<i>Zakat b.</i>
c. Jasa Giro	(559.508.838)	(438.142.266)	<i>Banking fee c.</i>
Penghasilan kena pajak final	(178.483.367.730)	(91.301.793.951)	<i>Income subject to final tax</i>
3) Beda Tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Pendapatan Investasi			<i>Investment Income</i>
Pajak Penghasilan 21	12.232.981.121	7.172.710.518	<i>Income tax article 21</i>
Jamuan dan Representasi	1.830.326.810	1.415.770.590	<i>Entertainments and representation</i>
Cadangan Klaim (IBNR)	-	1.633.052.938	<i>Allowance for claims (IBNR)</i>
Biaya Perawatan/Pengobatan Pegawai	2.722.604.063	1.494.391.438	<i>Employees medical expenses</i>
luran Keanggotaan	1.903.162.000	634.760.079	<i>Membership fee</i>
Biaya Kendaraan Dinas	782.195.083	721.260.709	<i>Company vehicle expenses</i>
Biaya Telepon Genggam dan Fax (30%)	151.583.222	137.413.128	<i>Hand phones and fax (30%)</i>
Beban HUT dan Silaturahmi	567.437.826	175.637.971	<i>Anniversary and relation expenses</i>
Biaya Olah Raga, Rekreasi dan Bantal	659.436.656	137.922.303	<i>Sports, recreations and mental fostering</i>
Jamuan Makan dan Minum Pegawai	46.702.819	316.175.513	<i>Drinking expenses for employees</i>
Lain-lain	1.836.858.799	-	
Jumlah Beda Tetap	22.733.288.399	13.839.095.187	<i>Total permanent differences</i>
4) Beda Temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Cadangan Klaim IBNR	109.931.743.851	916.463.739	<i>Allowance for IBNR claims</i>
Imbalan Pasca Kerja	4.423.806.825	1.477.422.000	<i>Post employment benefit</i>
Penyusutan	(5.372.210.450)	(317.761.949)	<i>Depreciation</i>
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	3.141.844.843	3.295.510.374	<i>Allowance for receivables impairment</i>
Surplus Revaluasi Gedung	3.724.411.472	-	
a) Jumlah Beda Temporer	115.849.596.540	5.371.634.164	<i>Total temporary differences a)</i>
b) Jumlah Beda Tetap + Beda Temporer	138.582.884.939	19.210.729.351	<i>Total permanent + temporary differences b)</i>
Laba Kena Pajak (1+2+4b)	255.289.554.858	77.684.139.711	<i>Taxable income</i>
Pajak Kini (25% x Laba kena pajak)	63.822.388.714	19.421.034.928	<i>Current tax (25% x Rp 17.488.644.411)</i>
Kredit Pajak:			<i>Tax credit:</i>
PPH Pasal 25	27.002.483.307	11.379.019.299	<i>Income tax article 25</i>
PPH Badan Lebih (Kurang Bayar)	36.819.905.407	8.042.015.629	<i>Corporate income tax over/(under) payment</i>
	31-Dec-15	31-Dec-14	
28 Utang Zakat	819.964.322	575.224.089	29. Zakat Payable

Merupakan utang zakat yang belum diselesaikan dengan saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 819.964.322,- dan Rp 575.224.089,-

Represent zakat payable as of 31 December 2015 and 2014 amounting to Rp 819.964.322,- and Rp 575.224.089, respectively.

	31-Dec-15	31-Dec-14	
29 Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	23.959.764.349	22.976.083.443	30. Post Service Benefit Liability
Berdasarkan laporan aktuarial PT RAS Actuaris tanggal 31 Desember 2015, beban, Aset dan liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2015 sebesar Rp16.985.777.695,- dan Rp40.945.542.044,- per 31 Desember 2014 sebesar Rp14.238.139.726,- dan Rp37.214.223.168,- masing-masing dengan rincian sebagai berikut:			Based on actuarial reports of PT RAS Actuarial dated December 31, 2015, expenses, assets and post-employment benefit liabilities per December 31, 2015 amounted to Rp16.985.777.695,- and Rp40.945.542.044,- and as at December 31, 2014 amounted to Rp14.238.139.726,- and Rp37.214.223.168,- each with the following details:
Liabilitas:			Liability
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	40.945.542.044	37.214.223.168	Present value of benefit obligation
Nilai Wajar Aset Program	(16.985.777.695)	(14.238.139.726)	Fair value of plan assets
Status Pendanaan	23.959.764.349	22.976.083.443	Funding status
Liabilitas Masa Lalu Yang Masih Akan Diakui di Tahun-Tahun Mendatang	-	-	Past service liabilities to be recognized in future years
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Yang Belum Diakui	-	-	Unrecognized actuarial gain (loss)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Akhir	23.959.764.349	22.976.083.443	Net Liability at the End of Years
Beban:			Cost:
Beban Jasa Kini	2.653.916.210	2.402.242.807	Current service expenses
Beban Bunga	3.035.220.717	2.343.452.834	Interest expenses
Hasil yang Diharapkan dari Aset Program	(1.345.127.595)	(1.095.723.791)	Expected income from program assets
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial yang Diakui	79.797.493	350.666.028	Recognized actuarial gain (loss)
Beban Jasa Lalu yang Vested	-	-	Vested past service expenses
Amortisasi Beban Jasa Lalu yang Belum Vested	-	-	Amortization of unvested past service expenses
	4.423.806.825	4.000.637.878	
Rekonsiliasi Beban dan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja:			Reconciliation between cost and liability of post employment benefit:
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Awal	22.976.083.443	17.576.657.110	Net liability at beginning of years
Koreksi Saldo Aset Program			Adjustment in the balance of plan assets
Adjustment Saldo Awal Aset Program			Adjustment in the beginning balance of plan assets
Iuran Bersih yang Dibayarkan ke Aset Program	(4.078.425.654)	(3.403.922.733)	Net contribution paid to Plan Asset
Pembayaran Manfaat (Imbalan)	(601.100.104)	(190.300.874)	Benefit paid
Beban Imbalan Kerja Tahun Berjalan	4.423.806.825	4.000.637.878	Current Service Cost
Pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain	1.239.399.839	4.993.012.062	Remeasurement of other comprehensive income
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja akhir	23.959.764.349	22.976.083.443	Net liability at end of years
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat karyawan oleh aktuaris independen, sebagai berikut:			The followings are major assumptions used in determining post employment benefit expenses by the independent actuary:
Tingkat Diskonto	9,00% per annum	8,5% per annum	Discount rate
Tingkat hasil aset program	9,00% per annum	8,00% per annum	
Kenaikan Gaji Rata-rata per Tahun	10%	10%	Average salary increase per annum
Usia Pensiun Normal	56 tahun	56 tahun	Normal pension age
Tingkat Mortalita	TMI III/2011	TMI III/2011	Mortality rate
Tingkat Cacat/Disability	5% TMI III/2011	5% TMI III/2011	Disability rate
Tingkat Pengunduran Diri : usia 20-29	6%	6%	Age 20-29
usia 30-34	3%	3%	Age 30-34
usia 35-39	1,80%	1,80%	Age 35-39
usia 40-50	1..20%	1..20%	Age 40-50
usia 51-52	0,60%	0,60%	Age 51-22
usia > 52	0,00%	0,00%	Age > 52
Metode Aktuarial	Project unit credit	Project unit credit	Actuary method
Perusahaan menyerahkan pengelolaan aset pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan Perusahaan memberikan manfaat tambahan kepada karyawan berupa tunjangan hari tua melalui PT Asuransi Jiwasraya dengan perhitungan pada saat pensiun sebesar 60 x gaji dasar pegawai dengan premi ditanggung Perusahaan sebesar 70%.			The Company has entrusted PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia with the management of its defined benefit pension plan, and the Company provides additional benefit in terms of old age benefit through PT Asuransi Jiwasraya, in which an employee is entitle to get payment equals to 60X of his basic salary upon his retirement; 70% of the insurance premium is payable by the Company.

	31-Dec-15	31-Dec-14	
30 Utang Lain-lain	2.791.612.265	2.323.944.389	31. Other Payables
Merupakan beban yang masih harus dibayar pada divisi syariah yang belum diselesaikan per 31 Desember 2015 dan 2014, terdiri dari :		Represents provision accrued on the unpaid sharia division of December 31, 2015 and 2014, consisting of:	
- Beban pegawai yang masih harus dibayar	2.791.612.265	2.145.648.240	Personnel expenses accrued -
- Dana PKBL	-	178.296.149	fund debt PKBL -
	<u>2.791.612.265</u>	<u>2.323.944.389</u>	
31 Dana Tabarru (Peserta)	24.141.892.523	21.485.294.417	32. Tabarru Fund (Participant)
Merupakan alokasi surplus dana tabarru untuk cadangan dengan rincian		The amount is allocation for tabarru fund surplus in the following breakdown:	
Saldo Awal	21.485.294.417	17.325.340.107	Beginning balance
Alokasi Surplus Dana Tabarru	4.350.455.533	(1.170.512.043)	Tabarru fund surplus
Dana Tabarru Tahun Berjalan	(1.693.857.427)	5.330.466.353	Current year tabarru fund
Jumlah Dana Tabarru (Peserta)	<u>24.141.892.523</u>	<u>21.485.294.417</u>	Total participant fund
32 Modal	538.000.000.000	463.000.000.000	33. Capital
Modal telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 538.000 (lima ratus tiga puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan milyar rupiah) oleh para pemegang saham, dengan rincian setoran saham sebagai berikut:		Capital has been subscribed and paid amount 538.000 (five hundred and thirty eight thousand) shares with a nominal value totaling Rp538.000.000.000,- (five hundred and thirty eight billion Rupiah) by the shareholders, with details of deposit shares as follows:	
a. Sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) merupakan setoran saham lama sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 8 Agustus 2008 nomor 12, yang dibuat dihadapan Umaran Mansjur, notaris di Jakarta Timur.		a. Amounting to Rp85.000.000.000 (eighty billion rupiahs) is old stock payment as evident from the deed number 12 dated 8 August 2008, which is made before Umaran Mansjur, notary in East Jakarta	
b. Sebesar Rp 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) terdiri		b. Amounting to Rp 53,000,000,000 (fifty three billion rupiahs) consisting of:	
1) Sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) bersumber dari pengalihan cadangan umum Perseroan usaha konvensional menjadi modal setor usaha Syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 29 November 2010 ; dan		1) Rp18.000.000.000 (eighteen billion rupiahs) originating from the transfer of the Company's general reserves of conventional business into Syariah unit paid up capital as stipulated in the General Meeting of Shareholders dated 29 November 2010, and	
2) Sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) berupa inbreng melalui pengalihan hak atas asset milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia berupa tanah sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor 867/Cikini.		2) Amounting to Rp35.000.000.000 (thirty five billion rupiahs) in the form of the transfer of rights over the assets of the Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia in form of land use rights certificates number 867/Cikini.	
c. Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah) merupakan pengalihan pinjaman Subordinasi menjadi setoran modal dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada Perseroan, sebagaimana keputusan RUPS PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) tanggal 30 April 2013.		c. Amounting to Rp75.000.000.000 (seventy five billion rupiahs) represents the transfer of the Subordinated loans into capital injection of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to the Company, as evident from the company balance sheet as at 30 April 2013.	
d. Sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) tambahan modal disetor dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), telah disetor ke Perusahaan masing-masing tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)		d. Amounting to Rp 250.000.000.000 (two hundred and fifty billion Rupiah) additional paid-in capital of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), the Company has been deposited into each of September 24, 2014 at Rp 150.000.000.000,- (one hundred and fifty billion rupiah) and dated December 17, 2014 amounted to IDR 100.000.000.000, - (one hundred billion rupiah)	
Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah) tambahan setoran modal dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada Perseroan, tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana keputusan RUPS PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).		Amounting Rp75.000.000.000, - (seventy five billion Rupiah) additional capital injection of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to the Company, dated August 19, 2015 as GMS (General Meeting of Shareholders) PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).	
Dengan adanya perubahan Modal Dasar tersebut, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham terdiri dari 538.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		The change in the authorized capital resulted in the amount of paid-in capital of 538.000 shares of par value of Rp 1.000.000 (one million rupiah) each in the following breakdown:	

2015				
Pemegang Saham	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Jumlah Modal Disetor <i>Paid-in Capital</i>	Persentase <i>Percentase</i>	Shareholders
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	537.999	537.999.000.000	99,99	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1.000.000	0,01	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo
Jumlah	538.000	538.000.000.000	100,00	Total

2014				
Pemegang Saham	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Jumlah Modal Disetor <i>Paid-in Capital</i>	Persentase <i>Percentase</i>	Shareholders
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	462.999	462.999.000.000	99,99	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1.000.000	0,01	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo
Jumlah	463.000	463.000.000.000	100,00	Total

	31-Des-15	31-Des-14	
33 Komponen Ekuitas Lainnya	87.929.751.667	(20.131.281.175)	33. Other Equity Components
a) Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba/(rugi)			Items not to be classified to: a)
- Keuntungan(kerugian) aktuarial imbalan kerja	(21.370.681.014)	(20.131.281.175)	Gains (losses) on actuarial employee benefits -
- Beban pajak	-	-	Tax expense
- Jumlah setelah pajak	(21.370.681.014)	(20.131.281.175)	Total after tax
- Surplus revaluasi gedung	109.300.432.681	-	Buildings revaluation gains -
- Beban pajak	-	-	Tax expense
- Jumlah setelah pajak	109.300.432.681	-	Total after tax
- Jumlah komponen ekuitas lainnya	87.929.751.667	(20.131.281.175)	
b) Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba/(rugi)	Nihil	Nihil	Items to be classified to profit b)

	31-Des-15	31-Des-14	
34 Pendapatan Premi	3.451.755.982.573	2.095.931.414.310	34. Premium Revenues
Rincian pendapatan premi reasuransi adalah sebagai berikut:			<i>In the following breakdown</i>

31-Des-15					
Kelas Bisnis	Premi Bruto (<i>Gross Premium</i>)	Premi Retrosesi (<i>Retrocession Premium</i>)	Penurunan(Kenaikan) PYBMP/Decrease (Increase) in Un-Earned	Jumlah Pendapatan Premi (<i>Total Premium Revenues</i>)	Classification of Business
Konvensional Reasuransi Umum					<i>Conventional General Reinsurance</i>
Harta Benda	1.677.279.717.873	(848.845.807.169)	(78.832.129.819)	749.601.780.885	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	105.255.161.094	(38.981.910)	(19.596.241.500)	85.619.937.684	<i>Motor</i>
Pengangkutan	315.909.956.519	(195.753.648.626)	(21.476.450.922)	98.679.856.971	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	137.059.783.890	(13.213.888.332)	(6.116.666.563)	117.729.228.995	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	16.552.434.235	(15.333.256.735)	(2.582.503.164)	(1.363.325.665)	<i>Aviation</i>
Satelit	266.437.854	-	(153.707.564)	112.730.290	<i>Satellite</i>
Energi	44.949.535.052	(3.738.529.272)	(1.900.677.542)	39.310.328.238	<i>Energy</i>
Rekayasa	116.335.169.687	(13.627.199.251)	(17.240.082.433)	85.467.888.003	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	111.237.514.777	(89.439.339.731)	(9.542.979.088)	12.255.195.958	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	27.505.692.312	(5.192.940.900)	8.226.098.600	30.538.850.011	<i>Personal injury and health</i>
Kredit dan Surety Bond	429.452.969.430	(12.332.545.952)	31.402.809.466	448.523.232.944	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	173.811.356.307	(11.168.161.460)	1.477.870.753	164.121.065.600	<i>Miscellaneous</i>
	<u>3.155.615.729.029</u>	<u>(1.208.684.299.338)</u>	<u>(116.334.659.776)</u>	<u>1.830.596.769.916</u>	
Reasuransi Jiwa	296.140.253.544	(4.472.530.178)	53.695.062.137	345.362.785.503	<i>Life reinsurance</i>
Jumlah	<u>3.451.755.982.573</u>	<u>(1.213.156.829.515)</u>	<u>(62.639.597.639)</u>	<u>2.175.959.555.418</u>	Total

31-Des-14					
Kelas Bisnis	Premi Bruto (<i>Gross Premium</i>)	Premi Retrosesi (<i>Retrocession Premium</i>)	Penurunan(Kenaikan) PYBMP/Decrease (Increase) in Un-Earned	Jumlah Pendapatan Premi (<i>Total Premium Revenues</i>)	Classification of Business
Konvensional Reasuransi Umum					<i>Conventional General Reinsurance</i>
Harta Benda	854.206.164.382	(180.922.158.415)	(86.339.701.784)	586.944.304.182	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	91.177.887.639	-	(11.418.064.308)	79.759.823.331	<i>Motor</i>
Pengangkutan	77.216.331.198	(2.596.044.320)	(1.405.014.681)	73.215.272.197	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	126.919.067.003	(4.758.536.609)	(16.440.716.028)	105.719.814.365	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	1.176.157.739	(214.301.025)	(1.177.150.223)	(215.293.509)	<i>Aviation</i>
Satelit	-	-	-	-	<i>Satellite</i>
Energi	44.346.919.292	(17.566.537.604)	(9.296.161.067)	17.484.220.620	<i>Energy</i>
Rekayasa	80.926.119.262	(9.839.069.603)	(8.300.169.790)	62.786.879.869	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	27.328.201.833	(930.248.967)	(1.985.047.046)	24.412.905.820	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	38.348.752.435	(3.318.933.728)	(16.901.253.734)	18.128.564.973	<i>Personal injury and health</i>
Kredit dan Surety Bond	314.037.562.321	(4.455.504.806)	(174.952.806.551)	134.629.250.964	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	187.511.010.952	(18.325.079.683)	(12.443.901.583)	156.742.029.686	<i>Miscellaneous</i>
	<u>1.843.194.174.056</u>	<u>(242.926.414.761)</u>	<u>(340.659.986.795)</u>	<u>1.259.607.772.500</u>	
Reasuransi Jiwa	252.737.240.255	438.992.192	(39.907.917.796)	213.268.314.651	<i>Life reinsurance</i>
Jumlah	<u>2.095.931.414.310</u>	<u>(242.487.422.569)</u>	<u>(380.567.904.591)</u>	<u>1.472.876.087.151</u>	Total

	31-Des-15		31-Des-14		
35 Klaim Bruto	1.240.356.956.282		867.381.453.321		35. Gross Claim
2015					
Kelas Bisnis	Klaim Bruto (<i>Gross Claim</i>)	Klaim Retrosesi (<i>Retrocession Claim</i>)	(Penurunan) Kenaikan EKRS I/(Decrease) Increase in EKRS	Jumlah Beban Klaim (<i>Total Claim Expenses</i>)	Classification of Business
Klaim Reasuransi Konvensional					Conventional Reinsurance Claim
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	425.374.432.006	(108.887.240.743)	111.267.130.977	427.754.322.240	Properties
Kendaraan Bermotor	43.471.406.848	-	6.514.386.604	49.985.793.453	Motor
Pengangkutan	65.675.335.496	(6.222.085)	1.177.653.143	66.846.766.554	Marine Cargo
Rangka Kapal	71.699.059.867	(6.547.605.325)	(3.928.667.127)	61.222.787.415	Marine Hull
Rangka Pesawat	11.920.111.916	(8.686.087.947)	(126.477.729)	3.107.546.240	Aviation
Satelit	-	-	-	-	Satellite
Energi	35.129.603.196	(20.902.561.538)	7.517.702.596	21.744.744.253	Energy
Rekayasa	64.431.038.803	(6.315.550.408)	(11.917.141.300)	46.198.347.095	Engineering
Tanggung Gugat	7.512.069.096	-	342.210.122	7.854.279.218	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	7.248.706.225	-	1.990.596.158	9.239.302.383	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	226.314.176.519	(4.433.549.477)	14.304.723.439	236.185.350.481	Credit and surety bond
Aneka	101.600.620.902	(60.599.574)	8.444.533.064	109.984.554.392	Miscellaneous
	1.060.376.560.875	(155.839.417.098)	135.586.649.947	1.040.123.793.724	
Reasuransi Jiwa	179.980.395.407	(481.203.217)	72.806.883.744	252.306.075.934	Life reinsurance
Jumlah	1.240.356.956.282	(156.320.620.315)	208.393.533.691	1.292.429.869.658	Total

2014

Kelas Bisnis	Klaim Bruto (<i>Gross Claim</i>)	Klaim Retrosesi (<i>Retrocession Claim</i>)	(Penurunan) Kenaikan EKRS I/(Decrease) Increase in EKRS	Jumlah Beban Klaim (<i>Total Claim Expenses</i>)	Classification of Business
Klaim Reasuransi Konvensional					Conventional Reinsurance Claim
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	356.658.389.976	(70.433.607.386)	(38.479.920.013)	247.744.862.577	Properties
Kendaraan Bermotor	47.494.542.474	-	1.082.257.840	48.576.800.315	Motor
Pengangkutan	25.396.623.246	(119.439.176)	13.452.306.836	38.729.490.906	Marine Cargo
Rangka Kapal	48.876.927.503	(5.004.730.356)	17.891.614.851	61.763.811.997	Marine Hull
Rangka Pesawat	69.277.977	-	375.203.733	444.481.710	Aviation
Satelit	-	-	(32.553.425)	(32.553.425)	Satellite
Energi	20.503.907.453	(4.424.103.457)	547.631.076	16.627.435.072	Energy
Rekayasa	55.103.630.959	(3.121.438.034)	12.406.395.829	64.388.588.754	Engineering
Tanggung Gugat	12.262.823.026	-	(8.953.583.834)	3.309.239.192	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	5.701.444.381	-	(563.278.668)	5.138.165.713	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	43.235.673.108	-	21.852.750.857	65.088.423.965	Credit and surety bond
Aneka	110.550.424.122	(21.510.985.641)	11.403.571.141	100.443.009.622	Miscellaneous
	725.853.664.225	(104.614.304.051)	30.982.396.224	652.221.756.398	
Reasuransi Jiwa	141.527.789.096	-	6.393.441.126	147.921.230.222	Life reinsurance
Jumlah	867.381.453.321	(104.614.304.051)	37.375.837.350	800.142.986.620	Total

	31-Des-15	31-Des-14	
36 Beban Komisi Netto	691.395.755.679	544.442.967.625	<i>36. Net Commission Expense</i>
2015			
Kelas Bisnis	Beban Komisi (Commission Expense)	Pendapatan Komisi (Commission Income)	Beban komisi Bersih (Commission Expense)
			<i>Classification of Business</i>
Komisi Reasuransi Dibayar			<i>Paid reinsurance commission</i>
Konvensional			<i>Conventional</i>
Reasuransi Umum			<i>General Reinsurance</i>
Harta Benda	450.582.778.034	155.566.806.116	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	34.052.771.258	8.160.550	<i>Motor</i>
Pengangkutan	68.562.210.781	37.432.965.665	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	32.432.986.413	1.428.939.476	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	3.743.899.591	3.656.991.593	<i>Aviation</i>
Satelit	59.547.657	-	<i>Satellite</i>
Energi	8.079.256.217	152.371.857	<i>Energy</i>
Rekayasa	33.513.885.348	594.259.433	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	24.589.761.687	2.203.286.021	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	10.558.784.719	-	<i>Personal injury and health</i>
Kredit dan Surety Bond	106.522.771.446	50.813.903	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	53.551.455.887	680.108.787	<i>Miscellaneous</i>
	826.250.109.039	201.774.703.402	624.475.405.637
Reasuransi Jiwa	69.543.364.820	2.623.014.777	66.920.350.042
Jumlah	895.793.473.859	204.397.718.179	691.395.755.679

2014

Kelas Bisnis	Beban Komisi (Commission Expense)	Pendapatan Komisi (Commission Income)	Beban komisi Bersih (Commission Expense)	<i>Classification of Business</i>
Komisi Reasuransi Dibayar				<i>Paid reinsurance commission</i>
Konvensional				<i>Conventional</i>
Reasuransi Umum				<i>General Reinsurance</i>
Harta Benda	229.899.754.287	625.542.001	229.274.212.285	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	30.887.974.561	-	30.887.974.561	<i>Motor</i>
Pengangkutan	20.575.394.600	(2.195)	20.575.396.794	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	32.275.535.595	-	32.275.535.595	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	328.761.902	-	328.761.902	<i>Aviation</i>
Energi	8.042.042.370	679.704.526	7.362.337.844	<i>Energy</i>
Rekayasa	23.426.240.568	139.785.230	23.286.455.338	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	4.704.301.307	-	4.704.301.307	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	16.554.441.820	-	16.554.441.820	<i>Personal injury and health</i>
Kredit dan Surety Bond	59.054.420.687	-	59.054.420.687	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	55.795.866.347	-	55.795.866.347	<i>Miscellaneous</i>
	481.544.734.043	1.445.029.562	480.099.704.481	
Reasuransi Jiwa	64.384.191.603	40.928.459	64.343.263.144	<i>Life reinsurance</i>
Jumlah	545.928.925.645	1.485.958.021	544.442.967.625	<i>Total</i>

37 Beban Underwriting Lain Netto	31-Des-15 5.625.459.437	31-Des-14 3.720.566.976	<i>37. Underwriting other expenses - Net</i>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

38 Pendapatan Ujrah	31-Des-15 24.154.978.060	31-Des-14 21.644.007.857	<i>38. Ujrah Income</i>
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

39 Alokasi Surplus Dana Tabarru	31-Des-15 1.693.857.427	31-Des-14 1.170.512.044	<i>39. Allocation of Tabarru Fund Surplus</i>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

	31-Des-15	31-Des-14
--	-----------	-----------

40 Hasil Investasi	185.420.084.370	88.021.757.609	40. Investment Income
Terdiri dari:			
Bunga Deposito	104.828.449.496	65.656.768.058	Deposits interest
Obligasi	38.053.655.037	9.914.739.322	Bonds
Saham	32.029.700.263	878.316.341	Stocks
Reksadana	(2.118.390.437)	9.751.240.806	Mutual funds
Penyertaan	244.281.605	126.519.304	Capital investment
Selisih Kurs	12.382.388.405	1.694.173.777	Exchange rate difference
Jumlah Hasil Investasi Neto	185.420.084.370	88.021.757.609	Total
Cadangan Penyisihan RDPT adalah kerugian administratif atas penurunan nilai pada saat redemption RDPT.		Allowance of RDPT investment losses is the administrative losses on impairment during redemption RDPT.	
	31-Des-15	31-Des-14	
41 Beban Usaha	116.398.528.247	88.689.416.377	41. Operating Expenses
Terdiri dari:			
Beban Umum	99.645.776.227	75.094.891.407	General expenses
Beban Administrasi	9.804.080.929	7.652.780.963	Administrative expenses
Beban Pemasaran	6.948.671.091	5.941.744.007	Marketing expenses
Jumlah Beban Usaha	116.398.528.247	88.689.416.377	Total
	31-Des-15	31-Des-14	
42 Penghasilan (Beban) Lain-lain	13.811.175.394	4.129.786.256	42. Other income (expenses)
Hasil Lain-lain terdiri dari :			Other income:
Laba Beda Kurs Non Investasi	17.615.908.889	3.829.060.750	Gain on exchange rate of non investment
Jasa Giro	559.038.765	438.142.266	Banking fee
Bunga Piutang Pegawai	99.646.667	105.640.835	Interest on loans to employees
Laba pelepasan aset tetap	358.765.750	10.100.000	Net sales fix asset
Lain-lain	1.395.965.891	1.477.837.719	Miscellaneous
Jumlah Hasil Lain-lain	20.029.325.962	5.860.781.570	Total
Beban Lain-lain:			Other expenses:
Selisih Kurs Penerimaan/Pembayaran Reasuransi/Retrocesi	(1.883.160.801)	(316.558.864)	Exchange rate differences on receipt/payment of reinsurance/retrocession
Biaya Bank	318.583.676	321.470.369	Banking expenses
Beban Lainnya	7.782.727.693	1.726.083.808	Miscellaneous
Jumlah Beban Lain-lain	6.218.150.568	1.730.995.314	Total
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain	13.811.175.394	4.129.786.256	Total other income (expenses)
	31-Des-15	31-Des-14	
43 Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa			43. Transactions with Related Parties
Pemegang Saham:			Shareholders:
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)			PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Premi Reasuransi	201.183.136.097	175.011.740.476	Reinsurance premiums
Premi Retrocesi	18.930.675.357	622.771.723	Retrocession premiums
Klaim Reasuransi	154.506.325.328	11.133.125.427	Reinsurance claims
Beban Sewa Kantor	-	-	Office rental expenses
Pejabat Kunci:			Key personnel:
Komisaris dan Direksi	-	-	Commissioners and directors
Gaji/Honorarium	-	-	Salaries/remuneration
Tunjangan-Tunjangan	-	-	Allowance
Tantiem	-	-	Bonus

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-15	31-Des-14	
44 Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing			44 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies
Aset			Assets
Deposito (2015) USD 5,400,000.00; (2014) USD 2,644,998.54	74.493.000.000	42.452.094.756	Deposito (2015) USD 5,400,000.00; (2014) USD 2,644,998.54
Kas dan Bank (2015) : USD 152,328.51; (2014) : USD 68,284.00	2.101.371.795	974.065.560	as dan Bank (2015) : USD 152,328.51; (2014) : USD 68,284.00
Reksadana (2015) : USD 318,409.44; (2014) : USD 316,81	4.392.458.225	3.941.187.059	sadana (2015) : USD 318,409.44; (2014) : USD 316,815.68
Obligasi (2015) USD 5,256,655.50; (2014) USD 5,282,723.90	72.515.562.623	65.717.085.316	Obligasi (2015) USD 5,256,655.50; (2014) USD 5,282,723.90
	<u>153.502.392.643</u>	<u>113.084.432.691</u>	
Piutang Reasuransi			Reinsurance Receivable
USD (2015) : 8,676,046.76; (2014) : 2,368,396.42	119.686.065.054	29.462.851.465	USD (2015) : 8,676,046.76; (2014) : 2,368,396.42
EUR (2015) :60,008.81 ; (2014) : 30,106.20	994.731.644	455.605.253	EUR (2015) :60,008.81 ; (2014) : 30,106.20
JPY (2015) : 2,838,140.60; (2014) : 1.960,334.25	325.052.243	204.364.846	JPY (2015) : 2,838,140.60; (2014) : 1.960,334.25
SGD (2015) : 229,410.70; (2014) : 23,260.44	2.237.027.324	219.162.424	SGD (2015) : 229,410.70; (2014) : 23,260.44
GBP (2015):29.10; (2014):2,311.08	595.127	44.766.405	GBP (2015):29.10; (2014):2,311.08
KRW (2015): 0.00 ; (2014): 14,312,950.00	-	172.757.307	KRW (2015): 0.00 ; (2014): 14,312,950.00
SAR (2015) : 0.00; (2014) : 956.26	-	3.169.216	SAR (2015) : 0.00; (2014) : 956.26
MYR (2015) : 0.00; (2014) : 24,632.00	-	87.737.460	MYR (2015) : 0.00; (2014) : 24,632.00
HKD (2015) : 14,041.31;	24.991.145	-	HKD (2015) : 14,041.31;
	<u>123.268.462.537</u>	<u>30.650.414.376</u>	
Piutang Retrosesi			Retrocession Receivable
USD (2015) : 2,519,465.08; (2014) : 2,034,989.99	34.756.020.779	25.315.275.476	USD (2015) : 2,519,465.08; (2014) : 2,034,989.99
	<u>34.756.020.779</u>	<u>25.315.275.476</u>	
Liabilitas			Liabilities
Utang Reasuransi			Reinsurance Liabilities
USD (2015) : 891,319.34; (2014) : 695,732.30	12.295.750.295	8.654.909.812	USD (2015) : 891,319.34; (2014) : 695,732.30
SGD (2015) : 8,970.51; (2014) : 29,881.57	87.473.147	281.547.440	SGD (2015) : 8,970.51; (2014) : 29,881.57
JPY (2015): 2,967,658.00; (2014): 621,153	339.885.871	64.755.200	JPY (2015): 2,967,658.00; (2014): 621,153
EUR (2015) : 568.59; (2014) : 557.05	8.568.469	8.429.988	EUR (2015) : 568.59; (2014) : 557.05
GBP (2015) : 22.64;	463.013	-	GBP (2015) : 22.64;
	<u>12.732.140.795</u>	<u>9.009.642.440</u>	
Utang Retrosesi			Retrocession Liabilities
USD (2015) : 2,975,583.56; (2014) : 1,020,730.52	41.048.175.210	12.697.887.669	USD (2015) : 2,975,583.56; (2014) : 1,020,730.52
SGD (2015) : 3,436.40;	33.508.989	-	SGD (2015) : 3,436.40;
JPY (2015): 16,368.35;	1.874.667	-	JPY (2015): 16,368.35;
MYR (2015) : 730.79;	2.345.580	-	MYR (2015) : 730.79;
EUR (2015) : 1,229.23;	18.524.103	-	EUR (2015) : 1,229.23;
	<u>41.104.428.550</u>	<u>12.697.887.669</u>	
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan			Un-earned Premium
USD (2015) : 7,135,214.32; (2014) : 1,489,635.25	98.430.281.544	18.531.062.510	USD (2015) : 7,135,214.32; (2014) : 1,489,635.25
JPY (2015) : 493,957.88; (2014) : 391,796.09	56.572.996	40.844.742	JPY (2015) : 493,957.88; (2014) : 391,796.09
SGD (2015) : 53,999.54; (2014) : 27,680.89	526.559.774	260.812.390	SGD (2015) : 53,999.54; (2014) : 27,680.89
EUR (2014) : 16,304.56; (2014) : 2,929.22	245.704.502	44.328.677	EUR (2014) : 16,304.56; (2014) : 2,929.22
MMK (2015) : 7,019,855.77 ;	74.340.273	-	MMK (2015) : 7,019,855.77 ;
MYR (2015) :1,128.58; (2014) :263.81	3.622.347	939.673	MYR (2015) :1,128.58; (2014) :263.81
SAR (2015) : 0.00; (2014) : 8.830.17	-	29.272.720	SAR (2015) : 0.00; (2014) : 8.830.17
	<u>99.337.081.436</u>	<u>18.907.260.712</u>	
Estimasi Klaim Retensi Sendiri			Estimated own claim retention
USD (2015) :9,381,390.83; (2014) :10,468,991.61	129.416.286.500	130.234.255.628	USD (2015) :9,381,390.83; (2014) :10,468,991.61
EUR (2015) :115,574.65; (2014) :171,603.37	1.741.672.992	2.596.920.131	EUR (2015) :115,574.65; (2014) :171,603.37
JPY (2015) : 16,857,225 ; (2014) : 18,906,722.21	1.930.657.979	1.971.025.790	JPY (2015) : 16,857,225 ; (2014) : 18,906,722.21
SGD (2015): 208,277.14 ; (2014): 212,002.19	2.030.949.965	1.997.507.954	SGD (2015): 208,277.14 ; (2014): 212,002.19
GBP (2015) : 641,779.86 ; (2014) : 47,629.38	13.125.110.513	922.597.285	GBP (2015) : 641,779.86 ; (2014) : 47,629.38
KRW (2015) : 773,167.50;	9.061.523	-	KRW (2015) : 773,167.50;
AUD (2015) : 0.00; (2014) : 450,000.00	-	5.431.500	AUD (2015) : 0.00; (2014) : 450,000.00
MYR (2015) : 0.00; (2014) : 468.55	-	1.733.061	MYR (2015) : 0.00; (2014) : 468.55
	<u>148.253.739.471</u>	<u>137.729.471.349</u>	
Selisih Aset atas Liabilitas	<u>10.099.485.707</u>	<u>(9.294.139.627)</u>	Difference of assets and liabilities

45 Informasi Segmen	2015			45. Segment information
	Konvensional (Conventional)	Syariah (Syariah)	Jumlah (Total)	
Investasi				Investment
Dana Jaminan	40.000.000.000	11.000.000.000	51.000.000.000	Guarantee fund
Deposito Berjangka	1.518.993.000.000	281.336.530.788	1.800.329.530.788	Time deposits
Deposit On Call	19.800.000.000	-	19.800.000.000	Deposit on Call
Obligasi diperdagangkan	259.440.207.622	17.210.323.000	276.650.530.622	Bonds
Reksadana	158.570.703.436	6.651.863.047	165.222.566.483	Mutual funds
Saham yang Diperdagangkan	72.930.428.377	-	72.930.428.377	Stocks for trading
Penyertaan Saham	1.423.700.000	-	1.423.700.000	Capital investment
Piutang Reasuransi	289.349.946.930	64.096.510.238	353.446.457.168	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	51.814.690.721	395.193.962	52.209.884.683	Retrocession receivables
PYBMP Bagian Retrosesi	422.547.076.770	-	422.547.076.770	Retrocession un-earned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	664.107.711.421	-	664.107.711.421	Retrocession estimated claim
Utang Klaim Reasuransi	64.604.369.371	7.441.230.281	72.045.599.652	Reinsurance claim payable
Utang Premi Retrosesi	53.437.364.864	2.000.295.235	55.437.660.098	Retrocession premium payable
Aset Tetap	166.322.537.605	124.011.668	166.446.549.273	Fixed assets
Pendapatan Premi	2.175.959.555.418	-	2.175.959.555.418	Premium income
Beban Underwriting	1.989.451.084.773	-	1.989.451.084.773	Underwriting expenses
Beban Komisi	691.395.755.679	-	691.395.755.679	Commission expenses
Pendapatan Ujroh	-	24.154.978.060	24.154.978.060	Ujroh income
Alokasi Surplus Dana Tabarru	-	1.693.857.427	1.693.857.427	Tabarru fund surplus allocation
Hasil Usaha	223.437.460.342	27.635.230.282	251.072.690.624	Operating income

	2014			
	Konvensional (Conventional)	Syariah (Syariah)	Jumlah (Total)	
Investasi				Investments
Dana Jaminan	36.000.000.000	11.000.000.000	47.000.000.000	Guarantee fund
Deposito Berjangka	863.810.000.000	261.861.475.791	1.125.671.475.791	Time deposits
Deposit On Call	20.000.000.000	-	20.000.000.000	Deposit on Call
Obligasi	342.565.573.254	17.306.100.000	359.871.673.254	Bonds
Reksadana	43.726.582.158	8.697.845.989	52.424.428.147	Mutual funds
Saham yang Diperdagangkan	43.856.462.214	-	43.856.462.214	Stocks for trading
Penyertaan Saham	1.423.700.000	-	1.423.700.000	Capital investment
Piutang Reasuransi	426.371.916.625	67.660.479.275	494.032.395.900	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	34.007.715.398	584.023.974	34.591.739.372	Retrocession receivables
PYBMP Bagian Retrosesi	81.327.573.012	-	81.327.573.012	Retrocession un-earned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	589.528.484.255	-	589.528.484.255	Retrocession estimated claim
Utang Klaim Reasuransi	45.865.819.610	3.226.153.957	49.091.973.567	Reinsurance claim payable
Utang Premi Retrosesi	27.560.683.087	1.098.046.069	28.658.729.156	Retrocession premium payable
Aset Tetap	50.854.509.430	183.846.251	51.038.355.681	Fixed assets
Pendapatan Premi	1.472.876.087.150	-	1.472.876.087.150	Premium income
Beban Underwriting	1.348.306.521.221	-	1.348.306.521.221	Underwriting expenses
Beban Komisi	544.442.967.625	-	544.442.967.625	Commission expenses
Pendapatan Ujroh	-	21.644.007.857	21.644.007.857	Ujroh income
Alokasi Surplus Dana Tabarru	-	1.170.512.044	1.170.512.044	Tabarru fund surplus allocation
Hasil Usaha	114.272.365.848	17.884.555.441	132.156.921.289	Operating income

46 Perkembangan Terakhir Peraturan Perasuransian

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha perasuransian.

- b. Modal Perusahaan Reasuransi

Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dimana dalam pasal 6B ayat 2 disebutkan Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000 pada 31 Desember 2010
- ii. Paling sedikit sebesar Rp 150.000.000.000 pada 31 Desember 2012
- iii. Paling sedikit sebesar Rp 200.000.000.000 pada 31 Desember 2014

Sedangkan untuk perusahaan reasuransi yang memiliki unit kerja syariah diatur sebagai berikut:

- i. Paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000 pada 31 Desember 2008
- ii. Paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000 pada 31 Desember 2009
- iii. Paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000 pada 31 Desember 2010

Perusahaan sampai dengan posisi per 31 Desember 2015 baik untuk reasuransi konvensional maupun reasuransi syariah telah memenuhi ketentuan permodalan tersebut.

Pada tahun 2014 telah terealisasi pula pengalihan aset berupa tanah dan gedung senilai Rp. 35 milyar. Dan pengalihan pinjaman subordinasi sebesar Rp. 75 milyar dalam rangka pemenuhan modal kerja/ ekuitas perusahaan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Pada tahun 2011 telah keluar Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pasal 41 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

- c. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-09/BL/2011 tanggal 1 Desember 2011.

Pada tahun 2011 telah dikeluarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: PER-09/BL/2011 tanggal 1 Desember 2011, tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan ini mencabut PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Beberapa keputusan dari peraturan tersebut sebagai berikut:

46. New Regulation Pronouncement in Insurance

- a. The Law number 40 of the year 2014 on Insurance

On 17 October 2014 the law on insurance was adopted to supersede the earlier law number 2 of the year 1992 on Insurance Companies.

- b. Reinsurance Companies Capital

With the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 81 of 2008, the third amendment of the Government Regulation No. 73 of 1992 on operations of insurance companies where the article 6B paragraph 2 stipulates that reinsurance companies are required to have the following total equities:

- i. At least Rp 100.000.000.000 by 31 Desember 2010
- ii. At least Rp 150.000.000.000 by 31 Desember 2012
- iii. At least Rp 200.000.000.000 by 31 Desember 2014

Whereas for reinsurance companies with syariah units the following requirement applies:

- i. At least Rp 12.500.000.000 by 31 Desember 2008
- ii. At least Rp 25.000.000.000 by 31 Desember 2009
- iii. At least Rp 50.000.000.000 by 31 Desember 2010

By 31 December 2014 the Company has complied with the capital requirement for both conventional and syariah reinsurance.

Also by 2014 the transfer of assets in terms of land and office buildings valued at Rp. 35 billion was realized. And transfer of subordinated loans amounting to Rp. 75 billion in order to meet working capital or equity compliance.

- b. Regulation of Minister of Finance No. 11/PMK.010/2011 dated 12 January 2011.

In 2011 the Regulation of the Minister of Finance No. 11/PMK.010/2011 dated 12 January 2011 on financial health of insurance and reinsurance businesses with syariah principles was adopted, where the Article 40 paragraph 1 requires that insurance and reinsurance companies which maintain part of their businesses on the basis of syariah principles to prepare annual financial statements; whereas the Article 41 of the said regulation requires that the financial statements of syariah and non-syariah shall be prepared separately.

- c. The Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: PER-09/BL/2011 dated December 1, 2011.

In 2011 the Regulation of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board, No. PER-09/BL/2011 dated 1 December 2011 on Guidelines for Calculation of Minimum Solvency Limit Levels for Insurance and Reinsurance Companies was adopted. This regulation superseded PER-02/BL/2009 on Guidelines for Calculation of Minimum Solvency Level Limits for Insurance and Reinsurance Companies. Parts of the stipulation in the regulations read:

- i. Batas Tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008, ditetapkan berdasarkan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- ii. Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
- iii. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini tidak berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah maupun unit usaha syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.
- iv. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi periode Triwulan I yang berakhir 31 Maret 2012 dan seterusnya.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, yang berlaku sejak 1 Januari 2013.
Hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan di atas antara lain:
- i. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis
- ii. Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk cadangan
- iii. Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
- iv. Kecukupan Investasi, Perusahaan wajib memiliki aset dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan Aset Yang Diperkenankan ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan Liabilitas lain kepada tertanggung.
- e. Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor : KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012, tentang Nilai Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana, yang berlaku sejak 1 Januari 2013.
Hal-hal yang diatur dalam keputusan tersebut antara lain:
- i. Ketentuan mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana diatur dalam Peraturan Nomor: IV.C.2, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
- ii. Manajer Investasi yang mengelola Reksadana wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksadana sesuai dengan peraturan Nomor: IV.C.2 lampiran Keputusan ini sejak tanggal 1 Januari 2013.
- f. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- i. *The minimum limit level of solvency for insurance and reinsurance companies as referred to in Article 3 of the Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 on Healthiness of Financial Insurance and Reinsurance Companies, as has been amended several times, the latest of which was by the Regulation of the Minister of Finance number 158/PMK.010 / 2008, shall be determined on the basis of risk of loss which may arise as a result of deviation in management assets and liabilities.*
- ii. *Calculation of risk of loss that may arise as a result of deviation in management of assets and liabilities referred to in Article 1 shall be conducted under guidelines for calculation of minimum limit of solvency level as referred to in the Appendix which is an integral part of the Regulations of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board.*
- iii. *The regulation of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board does not apply to report on calculation of solvency of insurance and reinsurance companies which run their entire business on principles of syariah and their syariah units as well as for those insurance and reinsurance companies which do not run their business on syariah principles.*
- iv. *Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board is applicable for calculation of the solvency reports of insurance and reinsurance companies for the period ended March 31, 2012 and thereafter.*
- d. *The regulation of the Minister of Finance of the Republik f Indonesia No.: 53/PMK.010/2012 dated 3 April 2012, on Financial Healthiness of Insurance and Reinsurance Companies, effective 1 Januari 2013.*
Matters regulated include:
- i. *At any time those companies are to maintain solvability rate of 100% of their risk based minimum capital.*
- ii. *Liabilities taken into account in calculating the solvability rate are the entire liabilities of the company inclusive of technical reserve.*
- iii. *The targeted solvability rate referred to in point 2) shall at least 120% of risk based minimum capital.*
- iv. *Adequacy of investment. Companies are required to have investments in permitted assets in terms of type, method added with permitted assets in terms of cash on hand and in banks, of at least equal to their technical reserves plus their own retention claims and other liabilities to their insured parties.*
- e. *The decree of Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012 on fair value of securities in mutual fund portfolio, which effective 1 January 2013.*
Matters regulated include:
- i. *Fair value of securities in mutual fund portfolio as is stipulated under paragraph IV C.2*
- ii. *Investment managers who manage mutual funds must calculate the fair market value of the securities in the portfolio of Mutual Funds in accordance with the regulations Number: IV.C.2 since January 1, 2013.*
- f. *Regulation of the Chairman of Bapepam-LK No. PER-09/BL/2012 on Guidelines for Technical Allowance for Insurance Companies and Reinsurance Companies.*

Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

- i. Bagian ke empat pasal 7 sampai dengan 9 mengatur tata cara perhitungan Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) dan Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (CARYBD).
- ii. Bagian ke enam pasal 11 mengatur tata cara perhitungan Cadangan klaim.
- iii. Bagian ke tujuh pasal 12 mengatur tata cara perhitungan aset

47 Manajemen Risiko Keuangan

Sehubungan dengan risiko keuangan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan terfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi tiga jenis, yaitu: risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko harga lain.
- i. Risiko Mata Uang
Risiko mata uang timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs valuta asing. Perubahan nilai tukar memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan. Aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang asing paling banyak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sebagian besar pendapatan Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah.
- ii. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar
Risiko suku bunga timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, perusahaan melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Tabel dibawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Matters set out in these regulations include

- i. Part four chapters 7 through 9 set up procedures for calculation for the Unearned Premiums (CAPYBMP) and Reserves for Uncovered Period Risks (CARYBD).
- ii. Part six of Article 11 govern the calculation of claims reserves
- iii. Part seven of Article 12 govern the calculation of reinsurance assets.

47 Financial Risk Management

In relation to financial risk, the Company's financial risk management program focuses on the uncertainty of financial markets and minimize potential losses that affect the financial performance of the Company, including the following:

- a. Market risk
Market risks are risks related to fair value of financial assets or future cash flows of financial instruments which tend to fluctuate. The market risks include monetary risk, interest risk, and risk of commodities prices.
- i. Currency Risk
The monetary risk arises when future cash flows fluctuate due to fluctuation in financial instrument resulting from fluctuation in rates of foreign currencies. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are mostly in U.S. dollars and most of the revenues of the Company are denominated in rupiah.
- ii. Interest Rate Risk on Fair Value
The interest risk arises when future cash flows fluctuate due to fluctuation in financial instrument resulting from fluctuation in interest rates. The Company supervises the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Company. To measure the market risk of interest rate movements, the Company conducted an analysis on the movement of interest rates margins and on the maturity profile of assets and liabilities based on the schedule of interest rate changes.

The table below shows details on maturity of financial assets and financial liabilities influenced by interest rates.

Suku Bunga Tetap				Per 31 Desember 2015	
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah	
	<i>Less than One Year</i>	<i>More Than One Year</i>	<i>No Interest Charged</i>	<i>Total</i>	
Aset					Assets
Investasi					<i>Investments</i>
Deposito	1.871.129.530.788	-	-	1.871.129.530.788	<i>Deposits</i>
Surat Berharga:					<i>Securities</i>
Obligasi	-	276.650.530.622	-	276.650.530.622	<i>Bonds</i>
Reksadana	-	-	165.222.566.483	165.222.566.483	<i>Mutual funds</i>
Saham Diperdagangkan	-	-	72.930.428.377	72.930.428.377	<i>Stocks for trading</i>
Penyertaan Saham	-	-	1.423.700.000	1.423.700.000	<i>Share investment</i>
Kas dan Setara Kas	16.633.101.243	-	-	16.633.101.243	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang Reasuransi	-	-	353.446.457.168	353.446.457.168	<i>Reinsurance receivable</i>
Piutang Retrosesi	-	-	52.209.884.683	52.209.884.683	<i>Retrocession receivable</i>
PYBMP Bagian Retrosesi	-	-	422.547.076.770	422.547.076.770	<i>Retrocession un-earned premium</i>
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	-	-	664.107.711.421	664.107.711.421	<i>Estimated retrocession claim payable</i>
Piutang Hasil Investasi	-	-	7.708.424.639	7.708.424.639	<i>Investment income receivable</i>
Piutang Lain-lain	-	-	3.428.924.302	3.428.924.302	<i>Other receivables</i>
Aset Lain-lain	-	-	4.225.693.667	4.225.693.667	<i>Other assets</i>
Jumlah Aset Keuangan	16.633.101.243	276.650.530.622	1.747.250.867.511	3.911.664.030.164	<i>Total financial assets</i>
Liabilitas					Liabilities
Utang Klaim Reasuransi	-	-	72.045.599.652	72.045.599.652	<i>Reinsurance claim payable</i>
Utang Premi Retrosesi	-	-	55.437.660.098	55.437.660.098	<i>Retrocession premium payable</i>
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	-	-	1.380.616.866.850	1.380.616.866.850	<i>Estimated own claim retention</i>
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	-	-	1.314.646.332.736	1.314.646.332.736	<i>Un-earned premium</i>
Utang Lain-lain	-	-	2.791.612.265	2.791.612.265	<i>Other payables</i>
Beban Yang Masih Harus Dibayar	22.321.813.643	-	-	22.321.813.643	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	-	23.959.764.348	23.959.764.348	<i>Post service benefit liability</i>
Jumlah Liabilitas Keuangan	22.321.813.643	-	2.849.497.835.949	2.871.819.649.592	<i>Total financial liabilities</i>
Selisih Bersih	(5.688.712.400)	276.650.530.622	(1.102.246.968.438)	1.039.844.380.572	<i>Net balance</i>

iii. Risiko Harga Lain

Risiko harga lain timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain risiko yang timbul dari risiko suku bunga atau risiko mata uang), apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor spesifik pada instrumen keuangan individual atau penerbitnya, atau faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen keuangan serupa yang diperdagangkan di pasar (misal dampak penurunan indeks bursa saham, harga komoditas, atau variable risiko lain tertentu). Perusahaan tidak memiliki secara signifikan jenis aset keuangan yang dipengaruhi oleh faktor spesifik sebagaimana dimaksudkan di atas.

iii. Other Price Risk

Other price risk arises when the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than the risk arising from interest rate risk or currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or its issuer, or factors affecting all similar financial instruments traded in the market (eg the impact of decline in the stock market index, commodity price, or certain other risk variables). The Company does not have significant types of financial assets that are affected by specific factors, as referred to above.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi suatu kewajiban. Perusahaan memiliki kebijakan kredit untuk menetapkan batas kredit nasabah dan memantau saldonya secara berkelanjutan. Kualitas kredit dinilai setelah mempertimbangkan posisi keuangan dan pengalaman masa lalu nasabah. Perusahaan akan membentuk suatu penyisihan yang merupakan estimasi kerugian yang terjadi dalam akun piutang reasuransi, piutang retrosesi dan piutang lain-lain. Penyisihan digunakan untuk mencatat kerugian atas penurunan nilai suatu akun piutang, kecuali jika perusahaan merasa yakin bahwa tidak ada pemulihan yang mungkin terjadi terhadap tagihan tersebut. Pada saat itu, aset keuangan dianggap tidak tertagih dan akumulasi penyisihannya dihapuskan atas nilai tercatat dari aset keuangan.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014. Eksposur maksimum dicatat berdasarkan nilai tercatat bersih yang dilaporkan di neraca.

Konsentrasi Risiko Kredit
 Concentration of Credit Risks

	Korporasi <i>Corporate</i>	Lain-Lain <i>Other</i>	Eksposur <i>Maximum</i>	
Aset				Assets
Investasi				Investments
Deposito	1.871.129.530.788	-	1.871.129.530.788	Deposits
Surat berharga				Securities
Obligasi	276.650.530.622	-	276.650.530.622	Bonds
Reksadana	165.222.566.483	-	165.222.566.483	Mutual funds
Saham Yang Diperdagangkan	72.930.428.377	-	72.930.428.377	Stocks for trading
Penyertaan saham	1.423.700.000	-	1.423.700.000	Share investment
Kas dan setara kas	16.633.101.243	-	16.633.101.243	Cash and cash equivalent
Piutang reasuransi	353.446.457.168	-	353.446.457.168	Reinsurance receivable
Piutang retrosesi	52.209.884.683	-	52.209.884.683	Retrocession receivable
PYBMP Bagian Retrosesi	422.547.076.770	-	422.547.076.770	Retrocession un-earned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	664.107.711.421	-	664.107.711.421	Estimated retrocession claim payable
Piutang hasil investasi	7.708.424.639	-	7.708.424.639	Investment income receivable
Piutang lain-lain	3.428.924.302	-	3.428.924.302	Other receivables
Aset lain-lain	4.225.693.667	-	4.225.693.667	Other assets
Jumlah aset keuangan	3.911.664.030.164	-	3.911.664.030.164	Total financial assets

b. Credit Risk

Credit risks are risks which may arise one party involved in financial instrument may cause financial loss to other party due to failure in meeting his responsibility. The Company has a credit policy to set customers credit limits and monitor sustainable balance. Credit quality is assessed after considering the financial position and past experience of customers. The Company will establish an allowance which represents the estimated losses that occur in reinsurance receivables and other receivables accounts. Allowance is used to record impairment losses on an account except, when the Company feels confident that no recovery may occur on those collectibles. At that time, the financial asset is considered uncollectible and the provision expenses are written off on the carrying value of financial assets.

The table below illustrates the maximum exposure to credit risk and concentration risk of the Company on 31 December 2014. Maximum exposure is recorded at the net carrying value reported in the balance sheet.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya. Risiko likuiditas timbul jika Perusahaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan dasar transaksi yang wajar.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises when the Company is experiencing difficulty in securing sources of funding. Liquidity risk management means maintaining adequate cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and continuous supervision of the date of maturity of assets and financial liabilities.

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Fair value is an amount in which the asset could be exchanged, or liability can be solved on an arm's-length transactions.

The table below illustrates the carrying value and fair value of financial assets and liabilities:

Diukur Pada	(Rp 000,000)						Measured at
	Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (<i>Fair value through profit and loss</i>)	Pinjaman Diberikan dan Piutang (<i>Loan and Receivable</i>)	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (<i>Held to Maturity</i>)	Tersedia Untuk Dijual (<i>Available for Sale</i>)	Jumlah Perolehan Diamortisasi (<i>Total Cost Amortized</i>)	Jumlah Nilai Tercatat (<i>Carrying Amount</i>)	Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>)
Aset							Assets
Investasi							<i>Investments</i>
Deposito	-	-	1.871.130	-	-	1.871.130	<i>Deposits</i>
Surat Berharga :							<i>Securities</i>
Obligasi	276.651	-	-	-	-	276.651	<i>Bonds</i>
Reksadana	165.223	-	-	-	-	165.223	<i>Mutual funds</i>
Saham Yang Diperdagangkan	72.930	-	-	-	-	72.930	<i>Stocks for trading</i>
Penyertaan Saham	-	-	-	1.424	-	1.424	<i>Share investment</i>
Kas dan Setara Kas	-	16.633	-	-	-	16.633	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang Reasuransi	-	353.446	-	-	-	353.446	<i>Reinsurance receivable</i>
Piutang Retrosesi	-	52.210	-	-	-	52.210	<i>Retrocession receivable</i>
PYBMP Bagian Retrosesi	-	422.547	-	-	-	422.547	<i>Retrocession un-earned premium</i>
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	-	664.108	-	-	-	664.108	<i>Estimated retrocession claim payable</i>
Piutang Hasil Investasi	-	7.708	-	-	-	7.708	<i>Investment income receivable</i>
Piutang Lain-lain	-	3.429	-	-	-	3.429	<i>Other receivables</i>
Aset Lain-lain	-	4.226	-	-	-	4.226	<i>Other assets</i>
Jumlah Aset Keuangan	514.804	1.524.307	1.871.130	1.424	-	3.911.664	<i>Total financial assets</i>
Liabilitas							Liabilities
Utang Klaim Reasuransi	-	72.046	-	-	-	72.046	<i>Utang Klaim Reasuransi</i>
Utang Premi Retrosesi	-	55.438	-	-	-	55.438	<i>Utang Premi Retrosesi</i>
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	-	1.380.617	-	-	-	1.380.617	<i>Estimasi Klaim Retensi Sendiri</i>
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	-	1.314.646	-	-	-	1.314.646	<i>Premi Yang Belum Merupakan</i>
Utang Lain-lain	-	2.792	-	-	-	2.792	<i>Utang Lain-lain</i>
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	22.322	-	-	-	22.322	<i>Accrued Expenses</i>
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	23.960	-	-	-	23.960	<i>Post-Employment Benefits Liability</i>
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	2.871.820	-	-	-	2.871.820	<i>Total Financial Liabilities</i>
Selisih Bersih	514.804	(1.347.512)	1.871.130	1.424	-	1.039.844	<i>Net difference</i>

Nilai wajar atas investasi pada surat berharga per 31 Desember 2015 didasarkan kepada harga pasar pada tanggal tersebut.

The fair value of investments in marketable securities as of 31 December 2015 is based on the market price on that date.

e. Risiko Suku Bunga atas Arus Kas

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga pasar atas arus kas yang akan diterima di masa depan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

Akun yang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga pasar adalah deposito berjangka pada bank dan liabilitas diestimasi kesejahteraan karyawan.

e. Interest Rate Risk on Cash Flows

The Company supervises the impact of movements in market interest rates on cash flows to be received in the future to minimize the negative impact on the Company.

Accounts that are affected by changes in market interest rates are time deposits in banks and the estimated liability for employee welfare.

48 Penyajian kembali Laporan Keuangan tahun 2014 dan 2013

Perusahaan telah melakukan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun buku 2014 dan 2013. Hal ini antara lain sehubungan dengan penerapan pertama kali PSAK nomor 24 Revisi Tahun 2013, yang berlaku efektif 1 Januari 2015. Perbedaan dengan PSAK 24 yang berlaku sebelumnya, yaitu PSAK 24 revisi 2010, adalah dalam PSAK 24 yang baru ini tidak ada opsi penundaan pengakuan liabilitas, semua (keuntungan) kerugian aktuarial harus diakui di pendapatan komprehensif lain. Beberapa hal lain juga mengalami perubahan, seperti cara perhitungan bunga neto atas liabilitas (aset). Sehubungan dengan itu Laporan keuangan tahun 2014 dan 2013 disajikan kembali.

Perbandingan laporan keuangan yang disajikan kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 dengan laporan keuangan yang dilaporkan sebelumnya, adalah :

Tahun 2014

	Laporan Sebelumnya <i>Previous FS</i>	Penyesuaian <i>Adjustment</i>	Disajikan Kembali <i>Restated</i>
LIABILITAS			
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	4.140.306.782	18.835.776.661	22.976.083.443
Kewajiban Pajak Tangguhan	21.134.504	(21.134.504)	-
Utang Lain-Lain	2.323.944.389	21.134.504	2.345.078.893
EKUITAS			
Cadangan Umum	167.641.311.422	224.495.508	167.865.806.930
Laba Tahun Berjalan	131.085.912.282	1.071.009.007	132.156.921.289
Komponen Ekuitas Lainnya	-	20.131.281.175	20.131.281.175
LAPORAN LABA RUGI			
Beban Usaha	89.760.425.384	(1.071.009.007)	88.689.416.377
Laba Tahun Berjalan	131.085.912.282	1.071.009.007	132.156.921.289
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
(Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	-	(4.993.012.062)	(4.993.012.062)
Laba Komprehensif	131.085.912.282	3.922.003.055	127.163.909.227

Tahun 2013

	Laporan Sebelumnya <i>Previous FS</i>	Penyesuaian <i>Adjustment</i>	Disajikan Kembali <i>Restatement</i>
LIABILITAS			
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	2.662.884.782	14.913.772.328	17.576.657.110
EKUITAS			
Cadangan Umum	95.064.550.262	-	95.064.550.262
Laba Tahun Berjalan	72.576.761.160	224.496.783	72.801.257.943
Komponen Ekuitas Lainnya	-	(15.138.269.113)	(15.138.269.113)
LAPORAN LABA RUGI			
Beban Usaha	71.307.482.683	(224.496.783)	71.082.985.900
Laba Tahun Berjalan	72.576.761.160	224.496.783	72.801.257.943
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
(Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	-	(15.138.269.113)	(15.138.269.113)
Laba Komprehensif	72.576.761.160	(14.913.772.330)	57.662.988.830

49 PSAK baru yang Berlaku Efektif Tanggal 1 Januari 2015

Dalam tahun 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah menerbitkan PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari:

48. *The restatement of financial statements in 2014 and 2013*

The Company has restated the financial statements for year 2014 and 2013. This is due to the initial adoption of PSAK 24 (Revised 2013), effective January 1, 2015. The difference between the previous PSAK 24 (Revision 2010), is in terms of recognition of liabilities, actuarial gains or losses which has to be recognized in Other Comprehensive Income (OCI). Other items are also changed, like calculation of net interest on liabilities (asset). Therefore, the Financial Statements for the ended 31 December 2014 and 2013 are restated.

The followings are the financial statements for the year ended December 31, 2014 and 2013 and their restatements :

Year 2014

LIABILITIES
Post Service Benefit Liability
Deferred tax liability
Other payables
EQUITY
General reserve
Current year profit
Other Equity Components
PROFIT & LOSS
Operating Expenses
Current year profit
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Actuarial Gain (Loss) Define Benefit Program
Comprehensive Income

Year 2013

LIABILITIES
Post Service Benefit Liability
EQUITY
General reserve
Current year profit
Other Equity Components
PROFIT & LOSS
Operating Expenses
Current year profit
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Actuarial Gain (Loss) Define Benefit Program
Comprehensive Income

49. *New PSAK Effective 1 Januari 2015*

In the years 2013 the Indonesian Accounting Standard Board - Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI has adopted the following PSAKs has becomes effective by January 1, 2015 :

- 1) PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 1 (2013) ini menggantikan PSAK 1 (2009) : Penyajian Laporan Standar yang baru ini merevisi mengenai komponen laporan keuangan, judul laporan laba rugi, penyajian dan pengungkapan informasi komparatif (komparatif minimum dan komparatif tambahan) serta penyajian penghasilan komprehensif lain (OCI).
- 2) PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
Standar yang baru ini merevisi sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada dan menambahkan beberapa pengungkapan baru, antara lain:
 - a) Ruang lingkup hanya mencakup laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.
 - b) Terdapat pengaturan mengenai penyusunan laporan keuangan tersendiri untuk entitas yang berhenti menjadi entitas investasi.
- 3) PSAK 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
PSAK 15 (Revisi 2013) ini menggantikan PSAK 15 (2009) : Investasi pada Entitas Asosiasi.
- 4) PSAK 24 (2013) "Imbalan Kerja"
PSAK 24 (2013) ini menggantikan PSAK 24 (2010) : Imbalan Kerja Beberapa revisi penting pada standar ini adalah antara lain :
 - a) Penyajian dan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain (Other Comprehensive Income).
 - b) Menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan kerja pasti neto, yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.
- 5) PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- 6) PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
PSAK 66: Pengaturan Bersama menggantikan:
 - a) PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
 - b) ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas-Kontribusi Nonmoneter oleh
- 7) PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
PSAK 67 memberikan ketentuan transisi atas persyaratan pengungkapan
- 8) PSAK 46 (2014)"Pajak Penghasilan"
PSAK 46 (2014) ini menggantikan PSAK 46 (2010) : Pajak Penghasilan Standar yang baru ini merevisi sejumlah aturan yang telah ada dan
 - a) Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset
 - b) Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti
- 9) PSAK 48 (2014) "Penurunan Nilai Aset"
PSAK 48 (2014) ini menggantikan PSAK 48 (2009) : Penurunan Nilai Aset
- 10) ISAK 27 (2014) "Peralihan Aset dari Pelanggan"
- 11) ISAK 29 (2014) "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi"
ISAK 29 (2014) menggantikan PSAK 33 : Aktivitas Pengupasan Lapisan Entitas sedang melakukan penelaahan PSAK-PSAK tersebut di atas dalam rangka penerapannya sepanjang relevan dengan praktek-praktek yang dilaksanakan di perusahaan yang bergerak dibidang usaha asuransi dan reasuransi .

50 Tanggung Jawab Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan, sesuai dengan paragraph 15 PSAK 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan.

- 1) PSAK 1 (2013): Presentation of Financial Statement
This PSAK supersedes PSAK 1 (2009): Presentation of Financial
This new standard revises the financial statements of the component, heading of the income statement, presentation and disclosure of comparative information (comparative minimum and comparative supplementary) as well as the presentation of other comprehensive income (OCI).
- 2) PSAK 4 "Separate Financial Statements"
This new standard describes a number of existing disclosure requirements and adds some new disclosures, among others:
 - a) *The scope includes separate financial statements for additional information.*
 - b) *There are regulations concerning the preparation of separate financial statements for the entity that is no longer the investment entity.*
- 3) PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures "
This PSAK supersedes PSAK 15 (2009): Investments in Associates
- 4) PSAK 24 (2013) "Employee Benefits"
This PSAK 24 (2013) supersedes PSAK 24 (2010) : Employee Benefits
Some important revisions to this standard are, among others:
 - a) *Actuarial gains and losses are recognized entirely through other comprehensive income.*
 - b) *Determining the remeasurement on liabilities (assets) net employee benefits, which will be recognized as other comprehensive income.*
- 5) PSAK 65 "Consolidated Financial Statements"
- 6) PSAK 66 "Joint Arrangements"
This PSAK supersedes:
 - a) PSAK 12 (2009): Interest in Joint Venture
 - b) ISAK 12: Jointly Controlled Entities - Non Monetary Contributions by
- 7) PSAK 67 "Disclosure of Interest in Other Entities"
PSAK 67 provides the transitional provisions of the disclosure requirements for
- 8) PSAK 46 (2014)"Income Tax"
This PSAK 46 (2014) supersedes PSAK 46 (2010) : Income Tax
This new standard revises a number of existing rules and add new rules, among
 - a) *Regulate deferred tax assets and liabilities from assets that are not*
 - b) *Regulate deferred tax assets and liabilities from investment property*
- 9) PSAK 48 (2014) "Impairment of Assets"
This PSAK supersedes PSAK 48 (2009) : Impairment of Assets
- 10) ISAK 27 (2014) "Transfers of Assets from Customers"
- 11) ISAK 29 (2014) "Stripping Cost in Production Phase of a Surface Mine"
This PSAK supersedes PSAK 33 (2014)
The Management is assessing the impact of those standards on the financial statements, in view of adopting them so far they are relevant to practices in insurance and reinsurance companies.

50 Responsibility for Financial Statements

The Management is responsible for the preparation and the content of the financial statements, in compliance with paragraph 15 of the Indonesian Financial Accounting Standard 1 (Revision 2009) Presentation of Financial Statements.



Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia-10330

Phone : (62-21) 3140009, 3149373, 8064 2500 (hunting)

Fax. : (62-21) 3143716, 39049373, 31900430

E-mail : nasionalre@nasionalre.co.id

Website : www.nasionalre.id